



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2020**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 45 .A/LHP/XVIII.PDG/05/2021
Tanggal : 6 Mei 2021**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Padang - 25137**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2020**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 45.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021
Tanggal : 6 Mei 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang 25137
Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40810

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	ii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DAERAH	
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
2. LAPORAN PERUBAHAN SAL	
3. NERACA	
4. LAPORAN OPERASIONAL	
5. LAPORAN ARUS KAS	
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
LAMPIRAN	



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 45.B/LHP/XVIII.PDG/05/2021 tanggal 6 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Padang, 6 Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.

Register Negara Akuntan, Nomor D-13.856

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya TA 2020 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang memiliki 45 Organisasi Perangkat Daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2020;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2020;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;

01

- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya TA 2020 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 65 hari kalender mulai tanggal 1 Februari s.d. 7 Maret 2021 dan 15 Maret s.d. 13 April 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 16/ST/XVIII.PDG/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 dan Nomor 83/ST/XVIII.PDG/03/2021 tanggal 10 Maret 2021.

07

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

01



BUPATI DHARMASRAYA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 900/538 / BKD-2021

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pulau Punjung, 5 Mei 2021



SUTAN RISKHA TUANKU KERAJAAN, SE

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Uraian	Ref	Anggaran 2020 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2020	%	Realisasi Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	V.A.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	V.A.1.a				
Pendapatan Pajak Daerah	V.A.1.a.1	18.714.133.896,00	17.751.808.580,45	94,86	19.178.964.229,67
Pendapatan Retribusi Daerah	V.A.1.a.2	2.438.472.400,00	1.861.712.711,00	76,35	3.054.849.682,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.A.1.a.3	4.063.752.034,00	4.063.752.034,00	100,00	3.590.314.080,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.A.1.a.4	58.965.247.000,00	59.200.568.327,67	100,40	53.058.791.160,82
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		84.181.605.330,00	82.877.841.653,12	98,45	78.882.919.152,49
PENDAPATAN TRANSFER	V.A.1.b.				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	V.A.1.b.1	750.547.329.009,00	731.498.444.225,00	97,46	761.630.742.880,00
Dana Bagi Hasil Pajak	V.A.1.b.1.a	21.176.221.585,00	12.973.433.646,00	61,26	13.711.561.010,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.A.1.b.1.b	3.352.576.621,00	2.174.079.602,00	64,85	2.116.617.541,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	V.A.1.b.1.c	482.461.174.000,00	478.355.774.000,00	99,15	524.888.502.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.A.1.b.1.d	243.557.356.803,00	237.995.156.977,00	97,72	220.914.062.329,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		750.547.329.009,00	731.498.444.225,00	97,46	761.630.742.880,00
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	V.A.1.b.2				
Dana Otonomi Khusus		-	-		-
Dana Penyesuaian	V.A.1.b.2	99.826.676.000,00	99.826.676.000,00	100,00	97.546.293.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya		99.826.676.000,00	99.826.676.000,00	100,00	97.546.293.000,00
Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat		850.374.005.009,00	831.325.120.225,00	97,76	859.177.035.880,00
Transfer Pemerintah Provinsi	V.A.1.b.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.A.1.b.3	43.464.167.312,00	41.101.030.883,00	94,56	47.598.137.491,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-	-	-

Uraian	Ref	Anggaran 2020 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2020	%	Realisasi Tahun 2019
1	2	3	4	5	4
Bantuan Keuangan		-	-	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		43.464.167.312,00	41.101.030.883,00	94,56	47.598.137.491,00
Jumlah Pendapatan Transfer		893.838.172.321,00	872.426.151.108,00	97,60	906.775.173.371,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	V.A.1.c				
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	V.A.1.c.1	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	100,00	906.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga /Organisasi Swasta dalam Negeri	V.A.1.c.2	1.268.000.000,00	416.323.721,00	32,83	647.378.725,00
Pendapatan Hibah BOS	V.A.1.c.3	32.511.100.000,00	32.420.830.000,00	99,72	32.146.600.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		35.829.100.000,00	34.887.153.721,00	97,37	33.699.978.725,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.013.848.877.651,00	990.191.146.482,12	97,67	1.019.358.071.248,49
BELANJA DAERAH	V.A.2				
BELANJA OPERASI	V.A.2.a				
Belanja Pegawai	V.A.2.a.1	425.868.390.651,00	418.043.145.643,00	98,16	430.141.092.583,00
Belanja Barang dan Jasa	V.A.2.a.2	195.014.241.971,00	185.947.730.070,85	95,35	207.300.127.555,20
Bunga		-	-	-	-
Subsidi		-	-	-	-
Hibah	V.A.2.a.3	55.779.602.784,83	54.874.970.568,83	98,38	49.451.249.739,30
Bantuan Sosial	V.A.2.a.4	200.000.000,00	164.000.000,00	82,00	3.132.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	V.A.2.a.5	-			718.106.992,00
Jumlah Belanja Operasi		676.862.235.406,83	659.029.846.282,68	97,37	690.742.576.869,50
BELANJA MODAL	V.A.2.b.				
Belanja Tanah	V.A.2.b.	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	V.A.2.b.	67.942.318.246,75	64.751.373.002,50	95,30	45.512.218.370,50
Belanja Gedung dan Bangunan	V.A.2.b.	96.294.282.118,00	94.052.704.714,97	97,67	112.232.961.295,51
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.A.2.b.	36.304.327.743,83	34.663.993.010,80	95,48	61.210.263.507,34
Belanja Aset Tetap Lainnya	V.A.2.b.	1.060.864.045,00	1.057.381.450,00	99,67	7.642.646.743,30
Jumlah Belanja Modal		201.601.792.153,58	194.525.452.178,27	96,49	226.598.089.916,65
BELANJA TAK TERDUGA	V.A.2.c				
Belanja Tak Terduga	V.A.2.c	30.790.391.073,91	24.924.272.319,00	80,95	24.176.925,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		30.790.391.073,91	24.924.272.319,00	80,95	24.176.925,00
JUMLAH BELANJA		909.254.418.634,32	878.479.570.779,95	96,62	917.364.843.711,15

Uraian	Ref	Anggaran 2020 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2020	%	Realisasi Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
TRANSFER	V.A.3				
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		1.871.413.390,00	829.546.015,00	44,33	3.170.650.000,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		243.847.240,00	103.473.040,00	42,43	-
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan		2.115.260.630,00	933.019.055,00	44,11	3.170.650.000,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	V.A.3	-	-	-	-
Bantuan Keuangan ke Desa	V.A.3	105.472.650.000,00	105.472.649.600,00	100,00	116.017.917.000,00
Bantuan Keuangan Lainnya		900.000.000,00	864.933.454,00	96,10	-
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		106.372.650.000,00	106.337.583.054,00	99,97	116.017.917.000,00
JUMLAH TRANSFER		108.487.910.630,00	107.270.602.109,00	98,88	119.188.567.000,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.017.742.329.264,32	985.750.172.888,95	96,86	1.036.553.410.711,15
SURPLUS/(DEFISIT)	V.A.4	(3.893.451.613,32)	4.440.973.593,17	(114,06)	(17.195.339.462,66)
PEMBIAYAAN	V.A.5				
PENERIMAAN DAERAH	V.A.5.a				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	V.A.5.a	3.893.451.613,32	3.893.451.613,32	100,00	23.588.791.075,98
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah		-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		3.893.451.613,32	3.893.451.613,32	100,00	23.588.791.075,98
PENGELUARAN DAERAH	V.A.5.b				
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	V.A.5.b				2.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang					
Pemberian Pinjaman Daerah					
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan					2.500.000.000,00

Uraian	Ref	Anggaran 2020 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2020	%	Realisasi Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN NETTO		3.893.451.613,32	3.893.451.613,32	100,00	21.088.791.075,98
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) SEBELUM KOREKSI		-	8.334.425.206,49	-	3.893.451.613,32
KOREKSI SiLPA		-	-	-	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) SETELAH KOREKSI	V.A.6	-	8.334.425.206,49	-	3.893.451.613,32

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan


BUPATI DHARMASRAYA,
SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

URAIAN	Ref	2020	2019
1	2	3	4
Saldo Anggaran Lebih Awal	V.B	3.893.451.613,32	23.588.791.075,98
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		3.893.451.613,32	23.588.791.075,98
Subtotal		-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		8.334.425.206,49	3.893.451.613,32
Subtotal		8.334.425.206,49	3.893.451.613,32
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-Lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir		8.334.425.206,49	3.893.451.613,32

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan


BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKI TUANKU KERAJAAN, S.E.

3. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	Reff	SALDO 31 DES 2020	SALDO 31 DES 2019
1	2	3	4
ASET	V.C.1		
ASET LANCAR	V.C.1.a		
Kas di Kas Daerah	V.C.1.a.1	6.154.888.601,54	88.799.569,52
Kas di Bendahara Pengeluaran	V.C.1.a.2	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	V.C.1.a.3	991.000,00	5.395.063,00
Kas di BLUD	V.C.1.a.4	1.526.712.732,95	1.094.990.941,80
Setara Kas	V.C.1.a.5	645.579.320,00	2.695.211.372,00
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang Pajak	V.C.1.a.6	34.309.133.716,00	32.002.201.142,00
Penyisihan Piutang Pajak		(24.365.360.319,38)	(21.818.557.651,65)
Piutang Pajak Netto		9.943.773.396,62	10.183.643.490,35
Piutang Retribusi	V.C.1.a.7	242.685.161,00	138.133.361,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(100.954.575,00)	(110.949.906,00)
Piutang Retribusi Netto		141.730.586,00	27.183.455,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.C.1.a.8	3.524.570.411,00	4.063.752.034,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		(17.622.852,06)	(21.313.705,91)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto		3.506.947.558,95	4.042.438.328,10
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	V.C.1.a.9	5.821.956.799,88	12.310.601.825,87
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(923.326.882,67)	(546.175.917,56)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		4.898.629.917,21	11.764.425.908,31
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	V.C.1.a.10	6.505.389.322,00	3.072.369.696,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	V.C.1.a.11	8.967.719.269,00	3.389.783.336,00
Piutang Pendapatan Lainnya	V.C.1.a.12	13.050.752,00	13.050.752,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		(1.305.075,20)	(1.305.075,20)
Piutang Lainnya Netto		11.745.676,80	11.745.676,80
Belanja Dibayar Dimuka	V.C.1.a.13	231.012.527,83	169.315.624,28
Persediaan	V.C.1.a.14	27.219.306.442,17	37.729.072.702,63
Jumlah Aset Lancar		69.754.426.351,07	74.274.375.163,78
INVESTASI JANGKA PANJANG	V.C.1.b		
Investasi Non Permanen			-
Jumlah Investasi Nonpermanen			
Investasi Permanen			

URAIAN	Reff	SALDO 31 DES 2020	SALDO 31 DES 2019
1	2	3	4
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.C.1.b.1	27.452.000.000,00	27.452.000.000,00
Investasi Permanen Lainnya			
Jumlah Investasi Permanen		27.452.000.000,00	27.452.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		27.452.000.000,00	27.452.000.000,00
ASET TETAP	V.C.1.c		
Tanah	V.C.1.c.1	649.170.781.447,00	650.764.357.447,00
Peralatan dan Mesin	V.C.1.c.2	310.784.964.569,44	260.565.316.331,44
Gedung dan Bangunan	V.C.1.c.3	665.269.927.412,85	620.623.140.974,09
Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.C.1.c.4	1.268.023.945.040,42	1.215.452.774.013,34
Aset Tetap Lainnya	V.C.1.c.5	105.717.574.583,00	72.876.409.916,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	V.C.1.c.6	113.119.888.237,00	87.268.272.715,93
Akumulasi Penyusutan		(901.217.948.545,60)	(776.317.976.515,57)
Aset Tetap Setelah Akumulasi Penyusutan		2.210.869.132.744,11	2.131.232.294.882,23
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	V.C.1.d	-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA	V.C.1.e		
Tuntutan Ganti Rugi	V.C.1.e.1	293.258.963,00	302.120.251,44
Aset Tak Berwujud	V.C.1.e.2	3.834.413.677,00	3.778.739.886,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(1.569.821.608,17)	(1.231.263.297,99)
Aset Tak Berwujud Setelah Amortisasi		2.264.592.068,83	2.547.476.588,01
Aset Lain-Lain	V.C.1.e.3	213.829.466.684,84	221.011.350.127,84
Penyusutan Aset Lain-Lain		(142.013.028.477,75)	(3.745.411.425,00)
Aset Lain-Lain Setelah Penyusutan		71.816.438.207,09	217.265.938.702,84
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		-	-
Jumlah Aset Lainnya		74.374.289.238,92	220.115.535.542,29
JUMLAH ASET		2.382.449.848.334,09	2.453.074.205.588,30
KEWAJIBAN	V.C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	V.C.2.a		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.C.2.a.1	4.900.000,00	601.085,00
Pendapatan Diterima Dimuka	V.C.2.a.2	2.661.665.181,07	59.368.059,68
Utang Belanja	V.C.2.a.3	33.289.416.742,00	25.959.697.767,73
Utang Jangka Pendek Lainnya	V.C.2.a.4	-	2.609.516.672,86
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		35.955.981.923,07	28.629.183.585,27
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	V.C.2.b		

URAIAN	Reff	SALDO 31 DES 2020	SALDO 31 DES 2019
1	2	3	4
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		35.955.981.923,07	28.629.183.585,27
EKUITAS	V.C.3	2.346.493.866.411,02	2.424.445.022.003,03
JUMLAH EKUITAS		2.346.493.866.411,02	2.424.445.022.003,03
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.382.449.848.334,09	2.453.074.205.588,30

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, S.E.

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN
2019

URAIAN	Ref	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	V.D.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	V.D.1.a				
Pendapatan Pajak Daerah	V.D.1.a.1	20.059.644.354,45	21.331.271.199,67	(1.271.626.845,22)	(5,96)
Pendapatan Retribusi Daerah	V.D.1.a.2	1.985.918.356,61	2.911.433.570,20	(925.515.213,59)	(31,79)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.D.1.a.3	3.524.570.411,00	7.646.750.200,00	(4.122.179.789,00)	(100,00)
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	V.D.1.a.4	52.667.089.645,80	54.692.559.575,69	(2.025.469.929,89)	(3,70)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		78.237.222.767,86	86.582.014.545,56	(8.344.791.777,70)	(9,64)
PENDAPATAN TRANSFER	V.D.1.b				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	V.D.1.b	17.525.407.792,00	16.404.803.089,00	1.120.604.703,00	6,83
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.D.1.b	2.390.550.383,00	2.495.745.158,00	(105.194.775,00)	(4,21)
Dana Alokasi Umum (DAU)	V.D.1.b	478.355.774.000,00	524.888.502.000,00	(46.532.728.000,00)	(8,87)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.D.1.b	237.995.156.977,00	220.914.062.329,00	17.081.094.648,00	7,73
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		736.266.889.152,00	764.703.112.576,00	-34.941.612.746,00	(3,72)
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA					
Dana Penyesuaian	V.D.1.b	46.554.026.000	97.546.293.000,00	(50.992.267.000,00)	(52,27)
Jumlah Pendapatan Transfer lainnya		46.554.026.000	97.546.293.000,00	(50.992.267.000,00)	(52,27)

URAIAN	Ref	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.D.1.b	46.678.966.816,00	47.055.986.944,00	(377.020.128,00)	(0,80)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		46.678.966.816,00	47.055.986.944,00	(377.020.128,00)	(0,80)
Jumlah Pendapatan Transfer		829.499.881.968,00	909.305.392.520,00	(79.805.510.552,00)	(8,78)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	V.D.1.c	54.964.492.861,20	34.748.278.793,00	20.216.214.068,20	58,18
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		54.964.492.861,20	34.748.278.793,00	20.216.214.068,20	58,18
JUMLAH PENDAPATAN		962.701.597.597,06	1.030.635.685.858,56	(67.934.088.261,50)	(6,59)
BEBAN	V.D.2				
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	V.D.2.a	425.276.572.735,00	452.306.900.751,32	(27.030.328.016,32)	(5,98)
Beban Persediaan	V.D.2.b.	69.109.719.631,87	68.946.555.652,95	163.163.978,92	0,24
Beban Jasa	V.D.2.c	61.054.627.884,27	49.437.197.781,24	11.617.430.103,03	23,50
Beban Sewa	V.D.2.d	2.217.298.064,03	4.867.540.019,38	(2.650.241.955,35)	54,45
Beban Pemeliharaan	V.D.2.e	8.647.223.670,00	11.934.277.601,00	(3.287.053.931,00)	(27,54)
Beban Perjalanan Dinas	V.D.2.f	36.283.810.392,00	54.878.825.962,00	(18.595.015.570,00)	(33,88)
Beban Hibah	V.D.2.g	72.886.229.581,03	62.152.815.287,80	10.733.414.293,23	17,27
Beban Bantuan Sosial	V.D.2.h	17.918.600.000,00	3.132.000.000,00	14.786.600.000,00	472,11
Beban Penyusutan/Amortisasi	V.D.2.i	139.560.243.919,26	176.161.565.175,25	(36.601.321.255,99)	(20,78)
Beban Penyisihan Piutang	V.D.2.j	2.991.191.038,83	1.123.543.214,28	1.867.647.824,55	166,23
Beban Transfer	V.D.2.k	54.609.952.788,00	119.973.216.566,00	(65.363.263.778,00)	(54,48)
Beban Lain-Lain		-	-	-	-

URAIAN	Ref	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH BEBAN OPERASI		890.555.469.704,29	1.004.914.438.011,22	(114.358.968.306,93)	(11,38)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	V.D.3	72.146.127.892,77	25.721.247.847,34	46.424.880.045,43	180,49
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	V.D.4				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	V.D.4	60.050.000,00	198.608.000,00	(138.558.000,00)	(69,76)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit Penjualan Aset NonLancar		26.621.600,00	-	(26.621.600,00)	
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		235.756.441,00	-	(235.756.441,00)	-
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		(202.328.041,00)	198.608.000,00	(400.936.041,00)	(201,87)
Jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(71.943.799.851,77)	25.919.855.847,34	46.023.944.004,43	177,56
POS LUAR BIASA	V.D.5				
Pendapatan Luar Biasa		-	-		
Beban Luar Biasa	V.D.5	312.313.950,00	24.176.925,00	288.137.025,00	1191,79
Jumlah Pos Luar Biasa		312.313.950,00	24.176.925,00	288.137.025,00	1191,79
SURPLUS/DEFISIT LO	V.D.6	71.631.485.901,77	25.895.678.922,34	45.735.806.979,43	176,62

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan


BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, S.E.

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA LAPORAN ARUS KAS

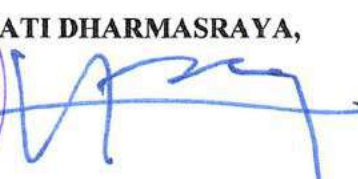
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	Ref	TAHUN 2020	TAHUN 2019
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.E.1		
Arus Masuk Kas	V.E.1.a		
Penerimaan Pajak Daerah		17.751.808.580,45	19.178.964.229,67
Penerimaan Retribusi Daerah		1.861.712.711,00	3.054.849.682,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.063.752.034,00	3.590.314.080,00
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah		59.135.018.327,67	52.860.183.160,82
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		12.973.433.646,00	13.711.561.010,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.174.079.602,00	2.116.617.541,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		478.355.774.000,00	524.888.502.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		237.995.156.977,00	220.914.062.329,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian		99.826.676.000,00	97.546.293.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		41.101.030.883,00	47.598.137.491,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Penerimaan Hibah		34.887.153.721,00-	33.699.978.725,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		990.125.596.482,12	1.019.159.463.248,49
Arus Keluar Kas	V.E.1.b		
Pembayaran Pegawai		418.043.145.643,00	430.141.092.583,00
Pembayaran Barang		185.947.730.070,85	207.300.127.555,20
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		54.874.970.568,83	49.451.249.739,30
Pembayaran Bantuan Sosial		164.000.000,00	3.132.000.000,00
Pembayaran Tak Terduga		24.924.272.319,00	24.176.925,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		829.546.015,00	3.170.650.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		103.473.040,00	-

URAIAN	Ref	TAHUN 2020	TAHUN 2019
1	2	3	3
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan		106.337.583.054,00	116.736.023.992,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		791.224.720.710,68	809.955.320.794,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		198.900.875.771,44	209.204.142.453,99
Arus Kas dari Aktifitas Investasi	V.E.2		
Arus Masuk Kas	V.E.2.a		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		60.050.000,00	188.228.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		600.000,00	10.380.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Lainnya		4.900.000,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		65.550.000,00	198.608.000,00
Arus Keluar Kas	V.E.2.b		
Perolehan Tanah		0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		64.751.373.002,50	45.512.218.370,50
Perolehan Gedung dan Bangunan		94.052.704.714,97	112.232.961.295,51
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		34.663.993.010,80	61.210.263.507,34
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.057.381.450,00	7.642.646.743,30
Perolehan Aset Lainnya			
Jumlah Arus Keluar Kas		194.525.452.178,27	226.598.089.916,65
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(194.459.902.178,27)	(226.399.481.916,65)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.E.3		
Arus Masuk Kas	V.E.3.a		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	V.E.3.b		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	2.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-

URAIAN	Ref	TAHUN 2020	TAHUN 2019
1	2	3	3
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	2.500.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	(2.500.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.E.4		
Arus Masuk Kas	V.E.4.a		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		47.828.833.482,00	40.440.250.504,00
Penerimaan Kas		1.894.200,00	3.392.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		47.830.727.682,00	40.443.642.504,00
Arus Keluar Kas	V.E.4.b		
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		47.824.534.567,00	40.457.372.438,00
Pengeluaran Kas		3.392.000,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas		47.827.926.567,00	40.457.372.438,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		2.801.115,00	(13.729.934,00)
Kenaikan/Penurunan Kas		4.443.774.708,17	(19.709.069.396,66)
Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas		94.194.632,52	14.544.592.538,98
Saldo Awal Kas di BLUD		1.094.990.941,80	8.565.179.881,00
Saldo Awal Kas di Dana BOS		2.695.211.372,00	483.693.923,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah dan Setara Kas		6.154.888.601,54	88.799.569,52
Saldo Akhir Kas di BLUD		1.526.712.732,95	1.094.990.941,80
Saldo Akhir Kas di Dana BOS		645.579.320,00	2.695.211.372,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		991.000,00	5.395.063,00
Saldo Akhir Kas		8.328.171.654,49	3.884.396.946,32

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan


BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, S.E.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	Ref	2020	2019
1	2	3	4
Ekuitas Awal	V.F	2.424.445.022.003,03	2.408.920.868.365,27
Surplus/Defisit-LO		71.631.485.901,77	25.895.678.922,34
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan		-	-
b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar		(149.582.641.493,78)	(10.371.525.284,58)
Ekuitas Akhir		2.346.493.866.411,02	2.424.445.022.003,03

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan


BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB I PENDAHULUAN

A. Informasi Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran 1.01. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Kerangka tersebut di atas dapat dimaknai bahwa Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut.

1. mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Memenuhi ketentuan dimaksud, maka Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 memberikan gambaran ringkas pencapaian kebijakan keuangan dan target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang disinkronkan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi satu kesatuan (*omnibus regulation*) dan pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keuangan (*financial accountability*) tetapi juga kaidah-kaidah yang baik (*best practices*), serta bertanggung jawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (*performance accountability*), dalam bentuk efektifitas dan transparansi



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pengelolaan keuangan daerah guna pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance and Clean Government*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam satu kesatuan laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan dan handal mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama Tahun 2020 sehingga dapat dievaluasi dan dinilai kinerjanya oleh *stake holder*, dan tujuan secara umum adalah memberikan informasi dalam rangka:

1. pembuatan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bahan bukti pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. informasi kinerja Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya yang berhubungan dengan anggaran/keuangan daerah sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi baik dari segi manajerial maupun organisasi untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di masa yang akan datang;
3. melaporkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta kinerja keuangan daerah selama periode tahun 2020;
4. menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek;
5. menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit kerja pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya, dalam satu tahun anggaran;
6. memonitor kinerja, dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang telah disyaratkan;
7. perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional;
8. mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi, antara lain: untuk menentukan biaya pelaksanaan program, fungsi dan aktivitas suatu satker sehingga mempermudah dalam melakukan analisis dan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja sebelumnya dengan kinerja unit pemerintahan, mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan serta target yang telah ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan konsolidasi dari laporan keuangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;
36. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
37. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
38. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
39. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
40. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud;
41. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;
43. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020.

D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Agar laporan keuangan dapat dipahami oleh para *stake holder* secara luas, tidak terbatas pada kepentingan tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan serta menghindari kesalahpahaman dan multitafsir dalam memahami laporan maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai pengungkapan hal-hal penting yang diperlukan dalam penyajian Laporan Keuangan, dimana secara umum bertujuan untuk:

1. Laporan keuangan mudah dipahami;
2. Menghindari kesalahpahaman;
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas;
5. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*).

Untuk lebih mudah memahami Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020, maka CaLK disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

- A. Informasi Umum
- B. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Kinerja Apbd

- A. Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Keuangan Daerah
- C. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- A. Penjelasan Atas Kinerja Dan Posisi Keuangan
- B. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah
- B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Kebijakan Akuntansi



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- A. Laporan Realisasi Anggaran
- B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- C. Neraca
- D. Laporan Operasional
- E. Laporan Arus Kas
- F. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

- A. Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya
- B. Susunan Perangkat Daerah
- C. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
- D. Revaluasi Aset Tetap
- E. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aset Tetap, KDP, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2020
- F. Rencana Dan Program Penanganan Krisis
- G. Pergeseran APBD Tahun 2020

Bab VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kabupaten Dharmasraya yang berjalan pada periode sebelumnya. Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBD. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya sebagai estimasi dalam menghitung postur APBD, namun dalam kondisi tertentu, asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dicapai. Berkaitan dengan itu, menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi keharusan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD. Kabupaten Dharmasraya menyusun APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara makro yang terjadi pada Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2019. Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya yang direncanakan dalam APBD mempunyai asumsi tetap dalam masa anggaran berjalan. Sedangkan apabila terdapat perubahan atas kondisi perekonomian maupun pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan perubahan mendasar maka dilaksanakan penyesuaian dalam perencanaan anggaran didalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun berjalan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD.

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah dapat dilihat melalui indikator ekonomi makro daerah yang terdiri dari pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB perkapita, indeks gini, persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

A.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan asumsi penyusunan APBD yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah atau merupakan nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pada tahun 2019 PDRB Kabupaten Dharmasraya harga berlaku adalah sebesar Rp10.351.222,59 juta dan PDRB Kabupaten Dharmasraya harga konstan sebesar Rp7.565.212,12 juta.

Nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2015-2019, mengalami kenaikan sebesar Rp2.761.687,7 juta atau 27,84%, dan untuk lebih jelasnya perkembangan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2019 menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.1
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2015-2019 (Jutaan Rupiah)

PDRB	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.400.594,59	2.646.717	2.852.098	2.949.573	2.897.946
B. Pertambangan dan Penggalian	762.109,02	684.589,75	674.407,94	700.488,64	728.630,78
C. Industri Pengolahan	468.344,95	511.210,21	564.907,91	578.751,87	509.422,40
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.666,85	79,24	91,70	2.371,90	2.364,29
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.047,66	48,15	52,73	1.343,69	1.374,85
F. Konstruksi	984.511,83	1.113.105,74	1.242.481,06	1.368.732,37	1.528.778,65
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.017.082,34	1.159.040,84	1.309.136,86	1.431.109,11	1.536.370,11
H. Transportasi dan Pergudangan	449.949,54	494.720,46	556.334,00	606.728,93	674.451,04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	67.558,79	80.131,22	90.275,81	98.432,60	108.608,81
J. Informasi dan Komunikasi	400.236,26	447.286,33	546.480,60	604.748,84	638.260,51
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	177.984,51	194.795,27	208.172,57	218.323,35	229.137,08
L. Real Estat	169.449,64	186.751,97	204.116,27	219.837,17	236.684,00
M,N. Jasa Perusahaan	67,96	1.800,81	80,08	2.055,70	2.190,45
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	450.372,60	492.819,73	540.821,72	594.587,38	656.363,92
P. Jasa Pendidikan	196.627,02	224.760,10	262.198,82	287.288,26	322.993,17
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123.177,80	135.148,05	154.792,33	172.267,78	187.701,55
R,S,T,U. Jasa lainnya	53.125,66	61.726,42	70.837,91	80.380,33	89.945,22
PDRB Dharmasraya (ADHB)	7.725.469,65	8.437.660,72	9.282.449,03	9.917.021,29	10.351.222,59
PDRB Dharmasraya (ADHK)	6.156.752,05	6.490.285,83	6.844.131,09	7.208.322	7.565.212,12

Sumber : www.bps.go.id

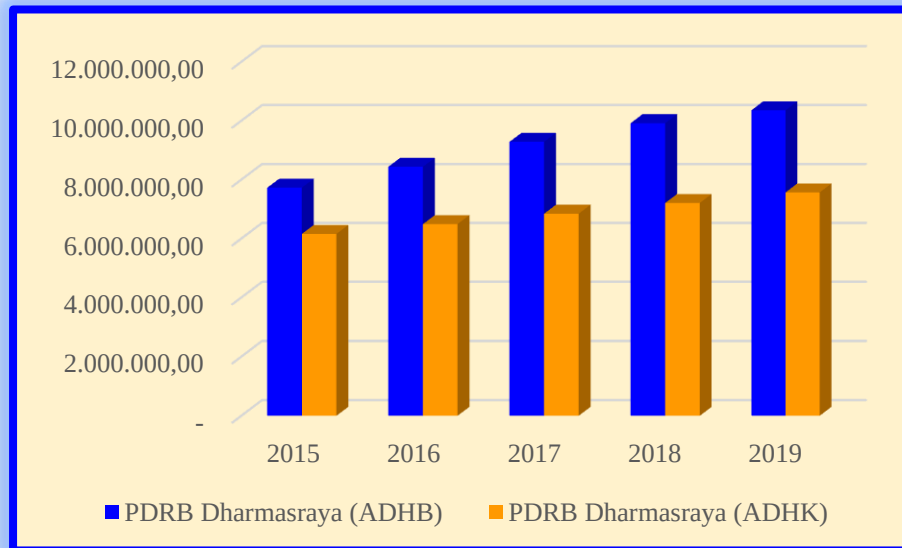
Untuk perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten tahun 2015-2019, dapat dilihat di Gambar 2.1 berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Gambar 2.1
Grafik Nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2019



Dari grafik di atas terlihat bahwa PDRB Kabupaten Dharmasraya baik ADHB maupun ADHK selalu meningkat tiap tahunnya. Dilihat berdasarkan struktur ekonomi Kabupaten Dharmasraya menurut lapangan usaha masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 28,53%. Hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Dharmasraya, Jika dibandingkan dengan data tahun 2018, angka ini mengalami penurunan, dimana tahun 2018 kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 29,74% atau mengalami penurunan sebesar (0,7)%. Selain Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14%. Sementara lapangan usaha lainnya memiliki kontribusi paling rendah yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Jasa lainnya. Untuk lebih jelasnya kontribusi PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2019 dapat dilihat di tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHB)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019

PDRB	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,30	1,32	30.73	29.74	28,53
B. Pertambangan dan Penggalian	0,43	0,34	0,31	0,30	7,42
C. Industri Pengolahan	0,25	0,25	0,26	0,27	5,57



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PDRB	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
F. Konstruksi	0,55	0,55	0,57	0,60	13,69
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,55	0,59	0,59	0,61	14,00
H. Transportasi dan Pergudangan	0,27	0,27	0,28	0,26	6,66
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,06	0,07	0,07	0,07	0,85
J. Informasi dan Komunikasi	0,22	0,23	0,27	0,26	7,96
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,10	0,10	0,10	0,10	2,00
L. Real Estat	0,10	0,10	0,10	0,10	2,11
M,N. Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,27	0,27	0,27	6,00	6,03
P. Jasa Pendidikan	0,12	0,13	0,14	0,15	2,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,08	0,08	0,09	0,09	1,71
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,05	0,05	0,05	0,06	0,79
PDRB Dharmasraya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : dharmasrayakab.bps.go.id

A.2. Laju Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB Menunjukkan pertumbuhan/perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Biasanya perhitungan pertumbuhan PDRB dihitung pada nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2015-2019 mengalami perlambatan, begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat maupun pertumbuhan ekonomi Nasional. Jika dilihat berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya melambat dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 5,32% melambat menjadi 4,98%. Untuk lebih jelasnya Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019 (ADHK Tahun 2010) dapat dilihat pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

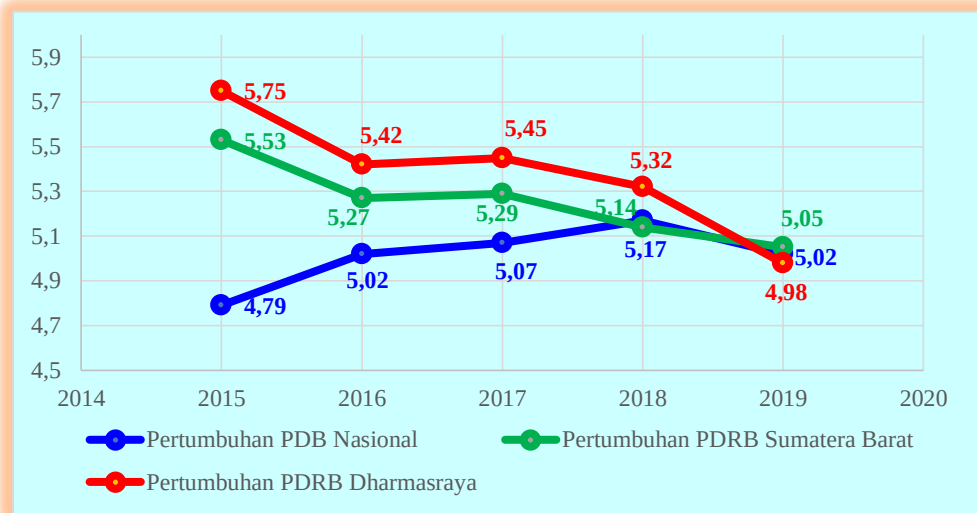
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.3
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2015 s/d 2019 (ADHK Tahun 2010)

No.	Pertumbuhan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan PDB Nasional	4,79	5,02	5,07	5,17	5,02
2	Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat	5,53	5,27	5,29	5,14	5,05
3	Pertumbuhan PDRB Dharmasraya	5,75	5,42	5,45	5,32	4,98

Sumber : www.bps.go.id

Gambar 2.2
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2015 s/d 2019



Dilihat dari tabel maupun grafik di atas, posisi pertumbuhan ekonomi Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat maupun nasional mengalami perlambatan, ketiga wilayah ini memiliki pertumbuhan yang hampir sama yaitu berkisar antara 5,02 % hingga 5,42%, namun perkembangannya hingga tahun 2016, ketiga wilayah ini mengalami perlambatan pertumbuhan PDRB. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan, namun pada tahun 2018-2019 mengalami perlambatan. Dibandingkan pertumbuhan Sumatera Barat dan Nasional, maka pertumbuhan ekonomi Dharmasraya lebih rendah, sedangkan Sumatera Barat masih tumbuh di atas nasional.

Dengan meningkatnya nilai PDRB ADHB dari tahun 2017 ke 2019 menggambarkan bahwa meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat yang mewakili 17 sektor dalam perhitungan PDRB. Namun memasuki triwulan 1 maupun kondisi selama triwulan 2 tahun 2020, terutama berkurangnya aktivitas perekonomian masyarakat akibat pandemi covid-19. Maka diasumsikan adanya perubahan target PDRB untuk tahun 2020, baik dari segi nilai maupun perlambatan pertumbuhan ekonomi maupun PDRB perkapita selama tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A.3. Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita menunjukkan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, atau secara umum dapat menggambarkan perkembangan pendapatan perkapita penduduk secara tahunan yang dihitung berdasarkan nilai PDRB ADHB.

Tabel 2.4
PDRB Pendapatan Perkapita Nasional Provinsi Sumatera barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2019 (Rp juta)

No.	Uraian	Pendapatan Perkapita (Rp. Juta)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PDRB perkapita Nasional (non migas)	45,14	47,96	51,89	56,00	59,10
2	Provinsi Sumatera Barat	34,41	37,21	40,32	42,83	45,78
3	Kabupaten Dharmasraya	34,83	36,77	39,50	41,05	41,80

Sumber : <http://www.bps.go.id>, data diolah

PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015 terlihat selalu berada di atas provinsi namun dibandingkan dengan PDRB perkapita nasional, maka angka ini berada di bawah angka nasional, artinya kesejahteraan masyarakat Dharmasraya dan Sumatera Barat pada tahun 2015 berada di atas rata-rata kesejahteraan ekonomi provinsi, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Sementara pada tahun 2017-2019 Pendapatan Perkapita Kabupaten Dharmasraya berada dibawah PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat dan PDRB perkapita nasional, artinya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dharmasraya berada dibawah rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Melihat pada perkembangan perekonomian di atas dan potensi ekonomi yang ada, maka tingkat kesejahteraan ekonomi yang diukur dari nilai PDRB ini masih akan dapat meningkat dengan baik di tahun-tahun berikutnya.

A.4. Inflasi

Laju inflasi digunakan untuk memperlihatkan perkembangan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dengan belum adanya perhitungan inflasi untuk Kabupaten Dharmasraya, maka berpedoman terhadap nilai inflasi provinsi serta 2 kota lainnya, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang sudah dihitung sejak 2015. Perkembangan inflasi tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah.

Tabel 2.5
Perkembangan Inflasi Nasional, Provinsi Sumbar, Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72
2	Sumatera Barat	10,87	5,02	2,11	2,60	1,67
3	Kota Padang	0,85	2,11	1,45	0,16	1,72



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
4	Kota Bukittinggi	2,79	1,37	0,43	0,41	1,31

Sumber : Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional berbagai tahun edisi 2015 s/d2019

Ditinjau dari perkembangan inflasi tahun 2015 sampai dengan 2016 nilai inflasi Provinsi Sumbar maupun dua kota lainnya berada di atas nasional, namun pada tahun 2017 terlihat nilainya turun sangat rendah bahkan tercatat sebagai angka terendah se-Indonesia. Berdasarkan analisa Kajian ekonomi regional Bank Indonesia, rendahnya angka inflasi ini karena melambatnya perekonomian yang berasal dari penurunan kinerja industri pertanian, perdagangan, pengolahan dan industri transportasi dan komunikasi. Melambatnya perekonomian ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

A.5. Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks gini digunakan mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah, angkanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Artinya semakin mendekati angka 1 maka kesenjangan semakin besar, begitupun sebaliknya. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, maka gini rasio dengan nilai di atas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4 - 0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, sedangkan apabila rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah.

Tabel 2.6
Indeks Gini Rasio Nasional, Provinsi Sumbar dan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2019

No.	Indeks Gini	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Nasional	0,41	0,40	0,40	0,38	0,38
2	Provinsi Sumatera Barat	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31
3	Kabupaten Dharmasraya	0,36	0,30	0,25	0,26	0,28

Sumber : sumbar.bps.go.id

Berdasarkan data di atas, maka terlihat indeks Gini Kabupaten Dharmasraya maupun Provinsi Sumbar berada pada kategori ketimpangan rendah (lebih baik) dibandingkan angka nasional, dimana indeks Gini nasional berada pada tingkat ketimpangan sedang. Berdasarkan perkembangan nilai, dari tahun 2015 hingga 2019 indeks Gini Kabupaten Dharmasraya dan Provinsi Sumatera Barat sedikit mengalami fluktuatif. Dalam mencapai tujuan yang lebih baik, maka nilai Gini diusahakan agar semakin mendekati nol, sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat antar golongan semakin kecil, atau pemerataan pendapatan semakin baik.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A.6. Tingkat Kemiskinan

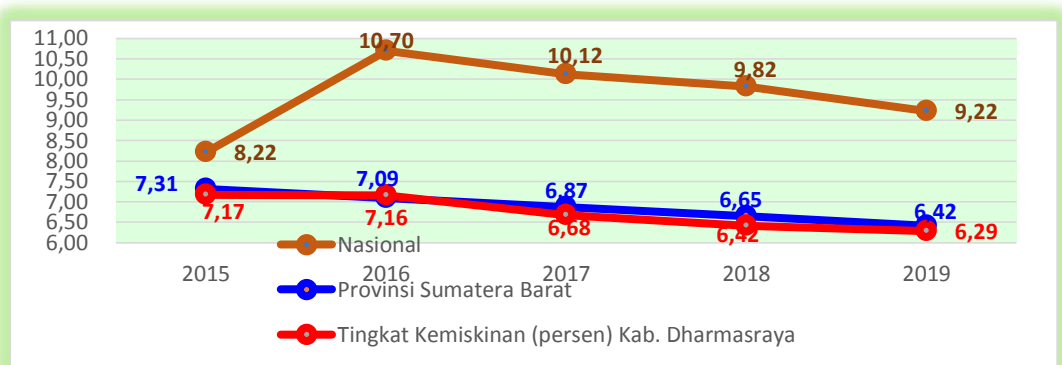
Dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dengan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi, hal ini telah mampu menekan tingkat kemiskinan hingga mencapai 6,29 persen di tahun 2019. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di awal pemekaran pada tahun 2005 sebesar 13,01%. Penurunan tingkat kemiskinan ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai upaya dan kebijakan yang berpihak kepada Rumah Tangga Miskin atau disebut juga dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui berbagai program dan kegiatan yang strategis dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Adapun perkembangan persentase maupun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2019

Keterangan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	8,22	10,70	10,12	9,82	9,22
Provinsi Sumatera Barat	7,31	7,09	6,87	6,65	6,42
Tingkat Kemiskinan (persen) Kab. Dharmasraya	7,17	7,16	6,68	6,42	6,29
Jumlah Penduduk miskin (jiwa)	15.890	16.240	15.630	15.418	15.490
Jumlah penduduk (jiwa)	223.112	229.313	235.476	241.571	241.579

Sumber : sumbar.bps.go.id

Gambar 2.3
Grafik Perkembangan Penduduk Miskin
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2019



Dilihat dari tabel maupun grafik di atas, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Dharmasraya berada di bawah nasional, namun masih berada di atas Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari garis tren pada grafik, maka garis kecenderungan penurunan kemiskinan Kabupaten Dharmasraya lebih tajam dibandingkan dengan nasional dan provinsi, sehingga untuk ke depannya ekspektasi penurunan persentase kemiskinan akan lebih baik. Pada tahun 2015, ketiga wilayah menunjukkan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

perkembangan yang negatif yang ditunjukkan oleh meningkatnya persentase penduduk miskin. Peningkatan tersebut disebabkan lebih oleh kondisi ekonomi internasional dan regional, terutama penurunan komoditi perkebunan.

A.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM sebagai indikator yang mewakili dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat juga mengalami perubahan, proyeksi ini mengikuti hasil proyeksi yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat terhadap proyeksi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang secara umum juga mengalami penurunan di bandingkan IPM tahun 2019. Berdasarkan data tahun 2017 IPM Kabupaten Dharmasraya 70,40, tahun 2018 yaitu 70,86 dan tahun 2019 yaitu 71,52.

A.8. Tingkat Pengangguran

Daya saing tenaga kerja merupakan kata kunci dalam peningkatan kinerja bidang ketenaga kerjaan, dengan semakin membaiknya pembangunan ekonomi daerah, maka hal ini juga berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran, meskipun angka ini masih berfluktuasi dan masih dalam jumlah yang dapat dikendalikan. Untuk itu ke depan pasar tenaga kerja semakin dituntut untuk menghasilkan tenaga kerja yang terdidik, berkeahlian dan berketerampilan, oleh sebab itu perlu berbagai inovasi yang sejalan dengan perkembangan zaman. Usaha itu dapat dilakukan melalui berbagai bentuk pelatihan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja sekaligus hendaknya dapat langsung disalurkan pada dunia kerja.

Saat ini Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 65,50% dengan tingkat pengangguran 5,80% pada tahun 2019. Tingkat pengangguran ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2015 yang berjumlah 3,51%. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran terus meningkat dari tahun ke tahun terhadap total jumlah angkatan kerja yang ada.

Tabel 2.8
Tingkat Pengangguran Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,51	3,38	3,69	3,94	5,80
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,88	66,50	66,96	64,53	65,50

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Untuk lebih jelasnya, berikut gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Dharmasraya :



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.9
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2018-2019

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang
			2018	2019	
1	2	3	5	6	7
1.	PDRB (Harga Berlaku)	Jutaan Rupiah	9917021.29	10.351.222,59	434.201,30
2.	PDRB (Harga Konstan)	Jutaan Rupiah	7208321.66	7.565.212,12	356.890,46
3.	PDRB Perkapita ADHB (Juta)	Rp	41,05	41,80	0,75
5.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,32	4,98	-0,34
6.	Tingkat Inflasi (Bukittinggi)	%	0,41	1,31	0,9
7.	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	29,74	28,53	-1,21
B	Pertambangan dan Penggalian	%	0,30	7,42	7,12
C	Industri Pengolahan	%	0,27	5,57	5,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	0,00	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0,00	0,01	0,01
F	Konstruksi	%	0,60	13,69	13,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	0,61	14,00	13,39
H	Transportasi dan Pergudangan	%	0,26	6,66	6,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	0,07	0,85	0,78
J	Informasi dan Komunikasi	%	0,26	7,96	7,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	0,10	2,00	1,9
L	Real Estat	%	0,10	2,11	2,01
M,N	Jasa Perusahaan	%	0,00	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	6,00	6,03	0,03
P	Jasa Pendidikan	%	0,15	2,63	2,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	0,09	1,71	1,62
R, S, T, U	Jasa lainnya	%	0,06	0,79	0,73
10.	Gini Rasio	Indeks	0,26	0,28	0,02
11.	Prosentase Penduduk Miskin	%	6,42	6,29	-0,13
12.	Tingkat Pengangguran	%	3,94	5,80	1,86

Sumber : Hasil Analisis



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan tabel indikator ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya di atas dapat dilihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami perlambatan dari 5,32% di tahun 2018 menjadi 4,98% di tahun 2019.

Meskipun tumbuh melambat, kinerja ekonomi masih positif, ditunjukkan oleh naiknya nilai PDRB setiap tahunnya, seiring dengan naiknya nilai PDRB tersebut juga mendorong meningkatnya pendapatan perkapita, jika dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar Rp. 41.050.000 menjadi Rp.41.800.000 di tahun 2019.

Berdasarkan struktur PDRB, maka sektor pertanian masih menduduki kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya.

Dilihat berdasarkan rasio gini untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk, pada tahun 2018 yaitu 0,26 dan tahun 2019 sebesar 0,28 artinya indeks ini dikategorikan rendah dimana pemerataan pendapatan penduduk Kabupaten Dharmasraya tiap tahunnya semakin membaik.

Semakin baiknya indikator perekonomian secara umum, maka hal ini juga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan daerah, terakhir pada tahun 2018 tercatat sebanyak 6,42% dan menurun menjadi 6,29% di tahun 2019. Melihat capaian keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut maka inilah yang dapat meningkatkan daya saing Dharmasraya semakin baik di tingkat regional maupun nasional.

B. Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,
Adanya perubahan asumsi yang terjadi diantaranya disebabkan oleh berubahnya besaran pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Adanya perubahan pendapatan disebabkan dari perubahan target pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat (dana perimbangan) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah yang disebabkan oleh berubahnya besaran Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa (DD), Serta berubahnya besaran Silpa tahun sebelumnya.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
Alokasi perubahan/persegeseran anggaran antar instansi di tahun 2020 lebih dominan disebabkan berubahnya struktur belanja antar instansi akibat dari penanganan pandemi



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

covid-19 selama tahun 2020 sebagai tindak lanjut terhadap penanganan dampak aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat

3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
Salah satu penyebab perubahan APBD 2020 disebabkan oleh adanya perubahan target Silpa tahun sebelumnya, besaran Silpa tahun sebelumnya (Silpa Tahun 2019) merupakan besaran Silpa yang digunakan di tahun anggaran 2020 setelah dilakukannya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019.
4. Keadaan darurat;
Keadaan darurat adalah situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal yang terjadi secara tiba-tiba, mengganggu kegiatan/organisasi/ komunitas yang sifatnya perlu segera ditanggulangi. Keadaan darurat dapat berubah menjadi bencana (disaster) yang mengakibatkan banyak korban atau kerusakan. Terkait dengan hal ini maka telah diterbitkan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non alam penyebaran corona *virus disease* 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional.
5. Keadaan luar biasa.
Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen.

Dilihat dari 5 (lima) dasar perubahan APBD yang telah diuraikan di atas, maka poin 1 sampai dengan poin 4 menjadi dasar utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

B.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Dilakukan Tahun 2020

Dalam menjelaskan dan menganalisis Arah kebijakan pendapatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 mempedomani Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Pada bagian ini dijelaskan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 serta Anggaran tahun 2019, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara Nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan Pendapatan Daerah tersebut diarahkan pada



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari : Sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.

Dengan adanya Pandemi Covid-19, Pemerintah telah menetapkan bahwa Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional. Pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan. Kebijakan inipun juga berdampak terhadap keuangan daerah, sehingga adanya perubahan kebijakan terhadap target untuk tahun 2020.

Dengan adanya perubahan target untuk tahun 2020, dimana target yang ditetapkan tidaklah seoptimis dibandingkan target awal yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya maupun RKPD Tahun 2020, hal ini didasari pada data teknis kondisi hingga triwulan 1 maupun tinjauan dampak hasil kekinian dari pandemi covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat.

Pasca diakhirinya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 dan dimulainya skema *New Normal*, berbagai aktivitas perekonomian secara umum belum bergerak sebagaimana yang diharapkan. Penerapan skema *New Normal*, namun masih dibarengi dengan diberlakukannya protokol kesehatan pada semua lini kehidupan diharapkan akan memberikan arah baru dalam pergerakan ekonomi khususnya di Kabupaten Dharmasraya. Dengan upaya yang serius dari seluruh komponen masyarakat serta dukungan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dalam pola kehidupan *New Normal* ini diharapkan kondisi perekonomian secara makro di tahun mendatang akan lebih baik hingga akhir tahun 2020 ini.

Dengan mempedomani arah kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan nasional, maupun kondisi perekonomian daerah terutama dampak dari pandemi Covid-19 selama tahun 2020, sehingga hal ini akan berdampak pada besaran terhadap Pendapatan daerah baik PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta dengan memperhatikan realisasi hingga akhir Juli 2020, maka perlu melakukan perubahan target terhadap pendapatan daerah yang akan ditargetkan untuk tahun 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Adapun perubahan arah kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan merubah target besaran PAD yang didasarkan pada realisasi sampai dengan 31 Juli 2020 serta mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah terutama dampak dari covid-19, dimana perubahan target PAD ini dilakukan rasional dan terukur. Diantara jenis pendapatan yang dirubah adalah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, besaran target dana perimbangan mempedomani besaran rincian alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu juga ada penambahan dana DAK Non Fisik sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 36 tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, perubahan target jenis pendapatan ini diantaranya :
 - Adanya alokasi dana BOS
 - Penyesuaian besaran pendapatan dari dana hibah swasta
 - Penyesuaian target pendapatan daerah yang berasal dari dana Insentif Daerah (DID) yang dialokasikan pemerintah pusat
 - Adanya perubahan alokasi anggaran Dana Desa dari Pusat

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang vital guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, hal ini dibuktikan dengan besarnya peran PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Besaran Pajak Daerah ditetapkan pada APBD awal yaitu sebesar Rp28.095.401.000,00. Sedangkan untuk realisasi PAD per tanggal 31 Juli 2020 terealisasi sebesar Rp8.649.908.224,00 atau sekitar 30,79 persen dari target APBD awal yang ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Hasil Pajak Retribusi

Retribusi Daerah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pada APBD tahun 2020, retribusi daerah direncanakan sebesar Rp.5.351.178.000,00, dan per tanggal 31 Juli 2020 terealisasi sebesar Rp 857.263.430,00 atau 16,02 persen terhadap APBD awal.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pada APBD tahun 2020, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp4.641.438.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.063.752.034,00

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Pada APBD tahun 2020, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp66.706.147.000,00 hingga akhir bulan Juli 2020 terealisasi sebesar Rp35.925.184.080,00 atau 53,86 persen dari target yang ditetapkan.

5. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Secara keseluruhan dana perimbangan teralisasi sebesar Rp418.578.182.342,00 atau sebesar 52,13 persen, yang terdiri dari DBH sebesar Rp.6.229.718.495,00 (33,95%), DAU sebesar Rp334.847.501.054,00 (62,51%), dan DAK sebesar Rp 77.500.962.793,00 (31,12%)

6. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah selama tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp123.211.373.300,00 dan hingga 31 Juli 2020 terealisasi sebesar Rp55.958.698.332,00 atau dengan capaian sebesar 45,42 persen.

Tabel 2.10.
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 Per Tanggal 31 Juli 2020

Kode Rek.	Uraian	awal	Pergeseran 3	Realisasi s/d 31 Juli 2020	Persentase realisasi
1	2	3	4	5	6= (5/3)
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.031.026.154.667	945.475.986.750	524.032.988.442	50,83
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	104.794.164.000	78.242.243.450	49.496.107.768	47,23
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	28.095.401.000	14.377.500.000	8.649.908.224	30,79
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	5.351.178.000	3.308.282.400	857.263.430	16,02
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.641.438.000	3.590.314.050	4.063.752.034	87,55
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	66.706.147.000	56.966.147.000	35.925.184.080	53,86
4.2.	DANA PERIMBANGAN	803.020.617.367	719.057.683.000	418.578.182.342	52,13
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.349.221.367	18.273.210.000	6.229.718.495	33,95
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	535.658.048.000	482.461.174.000	334.847.501.054	62,51
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	249.013.348.000	218.323.299.000	77.500.962.793	31,12
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	123.211.373.300	148.176.060.300	55.958.698.332	45,42
4.3.1.	Pendapatan Hibah	4.400.000.000	32.451.100.000	135.859.658	3,09
4.3.2.	Dana Darurat	-	0	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	44.967.294.300	44.967.294.300	17.160.862.674	38,16
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73.844.079.000	70.757.666.000	38.661.976.000	52,36
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-

Sumber : BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Tabel 2.11.
Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2020

Kode Rek.	Uraian	awal	Pergeseran 3	Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5	6 = (5 - 3)	7 = (6 / 3)
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.031.026.154.667	945.475.986.750	990.608.077.127	-40.418.077.540	-3,92
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	104.794.164.000	78.242.243.450	82.888.244.907	-21.905.919.093	-20,90
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	28.095.401.000	14.377.500.000	18.337.500.000	-9.757.901.000	-34,73
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	5.351.178.000	3.308.282.400	2.860.782.400	-2.490.395.600	-46,54
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.641.438.000	3.590.314.050	4.073.610.034	-567.827.966	-12,23



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Rek.	Uraian	awal	Pergeseran 3	Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5	6 = (5 - 3)	7 = (6 / 3)
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	66.706.147.000	56.966.147.000	57.616.352.473	-9.089.794.527	-13,63
4.2.	DANA PERIMBANGAN	803.020.617.367	719.057.683.000	743.588.026.920	-59.432.590.447	-7,40
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.349.221.367	18.273.210.000	20.208.713.920	1.859.492.553	10,13
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	535.658.048.000	482.461.174.000	482.461.174.000	-53.196.874.000	-9,93
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	249.013.348.000	218.323.299.000	240.918.139.000	-8.095.209.000	-3,25
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	123.211.373.300	148.176.060.300	164.131.805.300	40.920.432.000	33,21
4.3.1.	Pendapatan Hibah	4.400.000.000	32.451.100.000	33.501.100.000	29.101.100.000	661,39
4.3.2.	Dana Darurat	-	0	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	44.967.294.300	44.967.294.300	44.967.294.300	-	-
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73.844.079.000	70.757.666.000	85.663.411.000	11.819.332.000	16,01
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber : BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 turun sebesar Rp -40.418.077.540,00 dibandingkan dengan target awal yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Penurunan tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mempengaruhi pendapatan yang berasal dari sektor yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Penurunan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp. -21.905.919.093,00 khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi serta penurunan alokasi Dana Perimbangan sebesar Rp. -59.432.590.447,00 khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Namun pada Pos Lain-Lain Pendapatan Yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp. 40.920.432.000,00.

B.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan belanja daerah dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap penerimaan daerah yang berasal dari penjumlahan pendapatan daerah dan penerimaan daerah. Selain itu masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang perlu dioptimalkan baik target maupun sasarannya ditahun 2020 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang perlu sesegera mungkin serta adanya kebijakan-kebijakan yang berdampak pada perubahan belanja daerah.

Proyeksi Belanja Daerah pada kebijakan umum anggaran perubahan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.12.
Perubahan Target Belanja Daerah Tahun 2020

Kode Rek.	Uraian	awal	Pergeseran 3	Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5	6 = (5 - 3)	7 = (6 / 3)
5.	Belanja Daerah	1.102.724.680.352	952.564.664.280	994.501.528.740	108.223.151.612	-9,81
5.1.	Belanja Tidak Langsung	590.043.907.033	536.474.108.681	551.999.520.674	-38.044.386.359	-6,45
5.1.1.	Belanja Pegawai	427.605.641.033	363.429.778.491	378.942.502.484	-48.663.138.549	-11,38
5.1.2.	Belanja Bunga	-	0	-	-	-
5.1.3.	Belanja Subsidi	-	0	-	-	-
5.1.4.	Belanja Hibah	42.459.000.000	38.842.900.000	38.842.900.000	-3.616.100.000	-8,52
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	-	-
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	3.344.652.000	1.768.578.240	1.768.578.240	-1.576.073.760	-47,12
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota , Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	111.934.614.000	106.372.650.000	106.372.650.000	-5.561.964.000	-4,97
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	22.860.201.950	22.872.889.950	21.372.889.950	1.424,86
5.2.	Belanja Langsung	512.680.773.319	416.090.555.599	442.502.008.066	-70.178.765.253	-13,69
5.2.1.	Belanja Pegawai	48.066.620.000	45.567.133.000	45.567.133.000	-2.499.487.000	-5,20
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	208.147.033.695	189.588.621.618	199.886.605.899	-8.260.427.796	-3,97
5.2.3.	Belanja Modal	256.467.119.624	180.934.800.982	197.048.269.167	-59.418.850.457	-23,17
	SURPLUS/ DEFISIT	-71.698.525.685	-7.088.677.530	-3.893.451.613	67.805.074.072	-94,57

Sumber : BKD Kabupten Dharmasraya, Tahun 2020

Sebagai konsekuensi dari adanya penurunan pada alokasi Pendapatan Daerah, maka alokasi Belanja Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2020 juga mengalami penurunan sebesar Rp-108.223.151.612,00 yang semula berjumlah Rp.1.102.724.680.352,00 menjadi Rp.994.501.528.740,00.

Perubahan alokasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dari alokasi sebesar Rp. 590.043.907.033,00 menjadi Rp. 551.999.520.674,00 atau turun sebesar Rp. -38.044.386.359,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.512.680.773.319,00 menjadi Rp. 442.502.008.066,00 atau turun sebesar Rp70.178.765.253.

B.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung pada perubahan APBD Tahun 2020 terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa Dan Partai Politik, dan Belanja Tidak Terduga.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai diarahkan untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi sebagai belanja. Pada APBD tahun 2020, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp427.605.641.033,00 sedangkan pada APBD Perubahan turun menjadi Rp390.198.370.659,00 atau berkurang sebesar Rp-37.407.270.374,00

Perubahan kebijakan pegawai dilakukan melalui perubahan target pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS (tunjangan daerah) yang direncanakan dibayarkan pada APBD awal sebesar Rp87.695.158.295,00 untuk 14 bulan menjadi 11 bulan sebesar Rp53.849.105.000,00 dengan rincian untuk pembayaran hingga bulan Juli 2020 dibayarkan penuh sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan untuk pembayaran bulan Agustus hingga bulan November hanya dibayarkan sebesar 70 persen.

2. Belanja Hibah

Belanja hibah diarahkan untuk menganggarkan pemberian uang/barang/jasa kepada pemerintah atau perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dan lembaga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Pada APBD tahun 2020, belanja Hibah direncanakan sebesar Rp42.459.000.000,00 pada APBD Perubahan turun menjadi Rp.38.842.900.000,00 atau berkurang sebesar Rp. -3.616.100.000,00.

3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial diarahkan kepada pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan anggaran belanja lainnya belanja Bantuan Sosial tidak ada perubahan target yaitu Pada APBD awal tahun 2020, belanja Hibah direncanakan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp3.200.000.000,00 pada APBD Perubahan tetap menjadi Rp3.200.000.000,00 atau tidak berubah.

4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa.

Belanja Bagi Hasil diarahkan untuk bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa pada APBD 2020 direncanakan sebesar Rp3.344.652.000,00 pada APBD Perubahan turun menjadi Rp1.768.578.240,00 atau berkurang sebesar Rp. -1.576.073.760,00.

5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa Dan Partai Politik.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa Dan Partai Politik diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota pada APBD 2020 direncanakan sebesar Rp111.934.614.000,00 pada APBD Perubahan turun menjadi Rp110.472.650.000,00 atau berkurang sebesar Rp. - 561.964.000,00.

Adapun perubahan kebijakan untuk bantuan keuangan diantaranya disebabkan oleh berubahnya :

- besaran Dana Desa yang dialokasikan oleh pusat untuk masing-masing nagari, serta ;
- berubahnya besaran yang akan dialokasikan sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihitung besarnya 10 persen dari pendapatan daerah yang berasal dari Dana perimbangan di luar DAK.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga pada APBD 2020 direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 pada APBD **Perubahan naik** menjadi Rp22.860.201.950,00 atau bertambah sebesar Rp21.360.201.950,00. Berubahnya nilai belanja tidak terduga diarahkan untuk penanganan dampak pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020.

7. Belanja Langsung

Perubahan kebijakan pada belanja langsung sangat dipengaruhi oleh dampak covid-19 di daerah, serta turunnya total pendapatan yang berasal dari PAD dan turunnya alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sehingga secara keseluruhan belanja yang ada pada belanja di APBD perubahan

Adapun perubahan arah kebijakan pada belanja langsung diantaranya :

- pengalokasian dan penyesuaian belanja yang berasal dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD awal sebesar Rp -60.385.162.367,00 yaitu berubah dari Rp869.244.442.367,00 menjadi Rp808.859.280.000,00.

Adapun rincian besaran TKDD dapat dilihat dari tabel di bawah :

Tabel 2.13
Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
untuk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No.	Bidang/ Sub Bidang	APBN Awal	Revisi Covid-19	APBNP	selisih
		Perpres 78/2019	PMK 35/PMK.07/2020	Perpres 72/2019	
1	2	3	4	6 = 4 + 5	
1	DBH	18.349.221.367	18.273.210.000	16.971.965.000	-1.377.256.367
2	DAU	528.037.794.000	482.461.174.000	482.461.174.000	-45.576.620.000
3	DAK Fisik	162.353.274.000	132.421.793.000	152.766.632.000	-9.586.642.000
4	DAK non Fisik	86.660.074.000	85.901.843.000	85.901.843.000	-758.231.000
5	DID	20.009.465.000	17.485.016.000	17.485.016.000	-2.524.449.000
6	Dana Desa	53.834.614.000	53.272.650.000	53.272.650.000	-561.964.000
TOTAL		869.244.442.367	789.815.686.000	808.859.280.000	-60.385.162.367

- Pengurangan belanja secara keseluruhan yang disesuaikan dengan perubahan target pendapatan daerah, terutama belanja program/kegiatan yang sebagian besarnya hanya untuk untuk belanja kesekretariatan yang ada di setiap perangkat daerah serta menghilangkan alokasi



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

program/kegiatan diluar kemampuan keuangan daerah yang belum terlaksana dan/atau menyisakan program/kegiatan yang telah dibelanjakan oleh perangkat daerah serta tetap melaksanakan beberapa kegiatan prioritas daerah.

B.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Dengan adanya pandemi covid-19, hal ini sangat mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah, sehingga dengan demikian juga mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam pembiayaan daerah, adapun perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Perubahan alokasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dengan menggunakan nilai Silpa yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.
2. Tidak mengalokasikan penyertaan modal untuk tahun 2020, hal ini mengingat adanya penurunan target pendapatan daerah serta pengalokasian yang dominan terhadap penanganan dampak covid-19. Sehingga untuk tahun 2020 tidak dialokasikan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal/investasi.

Tabel 2.14
Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2020

Kode Rek.	Uraian	Awal	Pergeseran 3	Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5	6 = (5 - 3)	7 = (6 / 3)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	71.698.525.685	7.088.677.530	3.893.451.613	-67.805.074.072	-94,57
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	73.198.525.685	7.088.677.530	3.893.451.613	-69.305.074.072	-94,68
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.198.525.685	7.088.677.530	3.893.451.613	-69.305.074.072	-94,68
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	0	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	0	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	0	-	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	0	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	0	-	-	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.500.000.000	0	-	-1.500.000.000	-100,00
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	0	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	1.500.000.000	0	-	-1.500.000.000	-100,00
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	0	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	0	-	-	-
	Koreksi Silpa					
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-

Sumber : BKD Kabupaten Dharmasraya, dan Proyeksi Bappeda Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. Pencapaian Target Kinerja APBD

Target penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.013.848.877.651,00 dapat direalisasikan sebesar Rp990.191.146.482,12 atau sebesar 97,67% terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 84.181.605.330,00 terealisasi sebesar Rp82.877.841.653,12 atau 98,45%;
2. Dana Perimbangan sebesar Rp750.547.329.009,00 dengan terealisasi sebesar Rp.731.498.444.225,00 atau 97,46 %;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 179.119.943.312,00 terealisasi sebesar Rp175.814.860.604,00 atau 98,15%.

Anggaran Belanja Daerah pada Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp1.017.742.329.264,32 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.558.431.837.854,91 dan Belanja Langsung sebesar Rp459.310.491.409,41.

Dari total target Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp985.748.830.973,95 atau 96,86% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp545.148.192.380,00 atau 97,62% dan Belanja Langsung sebesar Rp440.600.638.593,95 atau 95,93%.

Sementara dari nilai penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp3.893.451.613,32 terealisasi sebesar Rp100% dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00, sehingga nilai pembiayaan netto sebesar Rp3.893.451.613,32.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah di Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020.

Dalam Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar Rp1.013.848.877.651,00 yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp84.181.605.330,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp893.838.172.321,00 dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp35.829.100.000,00.

Rencana penerimaan sejumlah tersebut, akan digunakan untuk membiayai belanja dan transfer sebesar Rp1.017.742.329.264,32 yang terdiri dari belanja daerah (setelah konversi) sebesar Rp909.254.418.634,32 dan transfer bagi hasil pendapatan dan bantuan keuangan sebesar Rp108.487.910.630,00.

Belanja daerah sejumlah Rp909.254.418.634,32 direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Pegawai Rp 425.868.390.651,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp 195.014.241.971,00
- Belanja Hibah Rp 55.779.602.784,83
- Belanja Bantuan Sosial Rp 200.000.000,00
- Belanja Modal Rp 201.601.792.153,58
- Belanja Tak Terduga Rp 30.790.391.073,91

Kekurangan dana untuk membiayai belanja dan transfer selama Tahun 2020 sebesar Rp3.893.451.613,32 akan di danai dari SiLPA Tahun Lalu sebelum koreksi sebesar Rp3.893.451.613,32.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2020

URAIAN	APBD TA. 2020	REALISASI
Pendapatan	1.013.848.877.651,00	990.191.146.482,12
Belanja	1.017.742.329.264,32	985.748.830.973,95
Surplus/Defisit	(3.893.451.613,32)	4.442.315.508,17

Persentase Target dan Realisasi capaian keuangan sebagaimana Tabel 3.1 di atas yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat di Tabel 3.2 berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.2
Persentase Pendapatan dan Belanja SKPD TA 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA
1	Dinas Pendidikan	182,46	98,44
2	Dinas Kesehatan	89,85	94,53
3	Rumah Sakit Umum Daerah	101,02	98,55
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	70,92	95,63
5	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	130,33	98,46
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	97,72
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	-	97,97
8	Dinas Pangan Perikanan	37,16	98,88
9	Dinas Lingkungan Hidup	165,46	97,88
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	96,87
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	98,40
12	Dinas Perhubungan	104,54	96,29
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	73,44	97,47
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	73,96	97,49
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	103,03	97,09
16	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	-	97,10
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	97,69
18	Dinas Pertanian	100,97	97,91
19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	110,60	96,61
20	Inspektorat Kabupaten	-	98,49
21	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	97,76
22	Badan Keuangan Daerah	94,87	92,40
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	97,67
24	Sekretariat Daerah	76,00	98,51
25	Sekretariat DPRD	-	91,31
26	Kecamatan Pulau Punjung	104,76	95,21
27	Kecamatan Sitiung	130,21	94,32
28	Kecamatan Koto Baru	166,86	96,40
29	Kecamatan Sungai Rumbai	52,12	99,40
30	Kecamatan IX Koto	28,00	98,94
31	Kecamatan Timpeh	70,82	96,31
32	Kecamatan Koto Salak	118,75	95,47
33	Kecamatan Asam Jujuhan	75,00	96,75
34	Kecamatan Koto Besar	92,00	96,73
35	Kecamatan Padang Laweh	172,67	94,52
36	Kecamatan Tiumang	52,80	94,34
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	95,75



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	92,34
39	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	99,79
40	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	98,31
41	PPKD	97,71	95,98

Untuk lebih rinci, Target Pendapatan dan Belanja dari masing-masing Perangkat Daerah di atas dapat dilihat berikut ini.

Tabel 3.3
Target Capaian Kinerja APBD Kabupaten Dharmasraya Per SKPD Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	PENDAPATAN	45,750,000.00	83,475,000.00	182.46
		Pendapatan Asli Daerah	45,750,000.00	83,475,000.00	182.46
		Pendapatan Retribusi Daerah	45,750,000.00	83,475,000.00	182.46
		Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Hibah - LRA	0.00	0.00	0.00
		BELANJA	299,694,399,147.00	295,018.884.615.25	98.44
		Belanja Operasi	244,756,509,082.00	242,037.882.414.00	98.89
		Belanja Pegawai	217,127,180,800.00	215,228,337,538.00	99.13
		Belanja Barang dan Jasa	27,629,328,282.00	26,809.544.876.00	97.03
		Belanja Modal	54,937,890,065.00	52,981,002,201.25	96.44
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,908,375,065.00	30,023,277,862.25	94.09
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23,029,515,000.00	22,957,724,339.00	99.69
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(299,648,649,147.00)	(294,935.409.615.25)	98.43
2	Dinas Kesehatan	PENDAPATAN	254,680,000.00	180,307,000.00	70.80
		Pendapatan Asli Daerah	254,680,000.00	180,307,000.00	70.80
		Pendapatan Retribusi Daerah	254,680,000.00	180,307,000.00	70.80
		BELANJA	113,870,038,483.00	108,864,966,379.15	95.60
		Belanja Operasi	81,157,888,450.00	77,849,134,869.00	95.92
		Belanja Pegawai	48,516,475,000.00	47,905,379,639.00	98.74
		Belanja Barang dan Jasa	32,641,413,450.00	29,943,755,230.00	91.74
		Belanja Modal	32,712,150,033.00	31,015,831,510.15	94.81
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21,512,289,640.00	20,926,373,879.50	97.28
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10,612,223,193.00	9,503,054,226.00	89.55
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	416,637,200.00	415,403,404.65	99.70
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	171,000,000.00	171,000,000.00	100.00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
		SURPLUS / (DEFISIT)	(113,615,358,483.00)	(108,684,659,379.15)	95.66
3	BLUD Puskesmas	PENDAPATAN	11,156,147,000.00	10,013,199,060.00	89.75
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.00	0.00	0.00
		Lain Lain PAD yang sah	11,156,147,000.00	10,013,199,060.00	89.75
		BELANJA	11,987,149,149.00	10,111,494,466.85	155.06
		Belanja Operasi	11,008,502,433.00	9,432,577,730.85	85.68
		Belanja Pegawai	388,865,000.00	261,420,865.00	67.23
		Belanja Barang dan Jasa	10,619,637,433.00	9,171,156,865.85	86.36
		Belanja Modal	978,646,716.00	678,916,736.00	69.37
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	978,646,716.00	678,916,736.00	69.37
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(831,002,149.00)	(98,295,406.85)	11.83
		PEMBIAYAAN			
		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	831,002,149.00	831,002,168.80	
		Penggunaan SiLPA	831,002,149.00	831,002,168.80	
		PEMBIAYAAN NETTO	831,002,149.00	831,002,168.80	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	732,706,761.95	
4	Rumah Sakit Umum Daerah	PENDAPATAN	10,000,000.00	11,230,800.00	112.31
		Pendapatan Asli Daerah	10,000,000.00	11,230,800.00	112.31
		Pendapatan Retribusi Daerah	10,000,000.00	11,230,800.00	112.31
		BELANJA	61,809,243,415.00	60,333,981,236.00	97.61
		Belanja Operasi	23,693,287,500.00	23,185,399,124.00	97.86
		Belanja Pegawai	21,569,340,000.00	21,486,112,062.00	99.61
		Belanja Barang dan Jasa	2,123,947,500.00	1,699,287,062.00	80.01
		Belanja Modal	38,115,955,915.00	37,148,582,112.00	97.46
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,971,144,950.00	6,643,280,612.00	95.30
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30,795,473,965.00	30,155,964,500.00	97.92
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	349,337,000.00	349,337,000.00	100.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(61,799,243,415.0)	(60,322,750,436.00)	97.61
5	BLUD RSUD	PENDAPATAN	45,000,000,000.00	45,461,444,814.00	0.00
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	-
		Lain Lain PAD yang sah	45,000,000,000.00	45,461,444,814.00	101.03
		BELANJA	45,000,000,000.00	44,930,971,431.00	99.94
		Belanja Operasi	43,410,000,000.00	43,384,802,194.00	99.94
		Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00
		Belanja Barang dan Jasa	43,410,000,000.00	43,384,802,194.00	
		Belanja Modal	1,590,000,000.00	1,546,169,237.00	97.24
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,590,000,000.00	1,546,169,237.00	97.24



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	-	530,473,383.00	#DIV/0!
		PEMBIAYAAN			
		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	263,387,688.00	263,387,688.00	
		Penggunaan SiLPA	263,387,688.00	263,387,688.00	
		PEMBIAYAAN NETTO	263,387,688.00	263,387,688.00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	-	793,861,071.00	0.00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	PENDAPATAN	1,410,000,000.00	1,000,038,473.81	70.92
		Pendapatan Asli Daerah	1,410,000,000.00	1,000,038,473.81	70.92
		Pendapatan Retribusi Daerah	630,000,000.00	235,745,000.00	37.42
		Lain-lain PAD Yang Sah	780,000,000.00	764,293,473.81	97.99
		BELANJA	86,068,999,295.41	82,311,046,789.73	95.63
		Belanja Operasi	27,595,246,479.58	25,735,445,106.58	93.26
		Belanja Pegawai	7,718,742,000.00	7,146,754,076.00	92.59
		Belanja Barang dan Jasa	19,876,504,479.58	18,588,691,030.58	93.52
		Belanja Modal	58,473,752,815.83	56,575,601,683.15	96.75
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41,000,000.00	41,000,000.00	100.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22,894,399,272.00	22,635,349,077.00	98.87
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	35,538,353,543.83	33,899,252,606.15	95.39
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(84,658,999,295.41)	(81,311,008,315.92)	96.05
7	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	PENDAPATAN	155,278,400.00	202,366,800.00	130.33
		Pendapatan Asli Daerah	155,278,400.00	202,366,800.00	130.33
		Pendapatan Retribusi Daerah	155,278,400.00	202,366,800.00	130.33
		BELANJA	4,895,230,640.00	4,820,025,356.00	98.46
		Belanja Operasi	4,881,230,640.00	4,806,025,356.00	98.46
		Belanja Pegawai	1,996,604,000.00	1,935,007,856.00	96.91
		Belanja Barang dan Jasa	2,884,626,640.00	2,871,017,500.00	99.53
		Belanja Modal	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4,739,952,240.00)	(4,617,658,556.00)	97.42
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Retribusi Daerah			0.00
		BELANJA	7,391,634,560.00	7,223,446,368.00	97.72
		Belanja Operasi	7,391,634,560.00	7,223,446,368.00	97.72
		Belanja Pegawai	6,680,222,000.00	6,540,551,569.00	97.91



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
		Belanja Barang dan Jasa	711,412,560.00	682,894,799.00	95.99
		Belanja Modal	-	-	0.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(7,391,634,560.00)	(7,223,446,368.00)	97.72
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00
		BELANJA	9,191,037,956.00	9,004,522,985.00	97.97
		Belanja Operasi	8,296,893,956.00	8,115,183,985.00	97.81
		Belanja Pegawai	3,902,423,000.00	3,807,912,415.00	97.58
		Belanja Barang dan Jasa	4,394,470,956.00	4,307,271,570.00	98.02
		Belanja Modal	894,144,000.00	889,339,000.00	99.46
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	865,344,000.00	860,539,000.00	99.44
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28,800,000.00	28,800,000.00	100.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9,191,037,956.00)	(9,004,522,985.00)	97.97
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00
		BELANJA	3,644,081,400.00	3,365,046,019.00	92.34
		Belanja Operasi	3,621,281,400.00	3,342,996,019.00	92.32
		Belanja Pegawai	1,389,100,000.00	1,333,814,869.00	96.02
		Belanja Barang dan Jasa	2,232,181,400.00	2,009,181,150.00	90.01
		Belanja Modal	22,800,000.00	22,050,000.00	96.71
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22,800,000.00	22,050,000.00	96.71
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3,644,081,400.00)	(3,365,046,019.00)	92.34
11	Dinas Pangan Perikanan	PENDAPATAN	200,000,000.00	74,325,000.00	37.16
		Pendapatan Asli Daerah	200,000,000.00	74,325,000.00	37.16
		Pendapatan Retribusi Daerah	200,000,000.00	74,325,000.00	37.16
		BELANJA	5,080,097,487.00	5,023,102,195.00	98.88
		Belanja Operasi	4,603,933,442.00	4,548,487,195.00	98.80
		Belanja Pegawai	3,251,502,000.00	3,206,081,081.00	98.60
		Belanja Barang dan Jasa	1,352,431,442.00	1,342,406,114.00	99.26



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
		Belanja Modal	476,164,045.00	474,615,000.00	99.67
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	476,164,045.00	474,615,000.00	99.67
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4,880,097,487.00)	(4,948,777,195.00)	101.41
12	Dinas Lingkungan Hidup	PENDAPATAN	65,000,000.00	107,550,000.00	165.46
		Pendapatan Asli Daerah	65,000,000.00	107,550,000.00	165.46
		Pendapatan Retribusi Daerah	65,000,000.00	107,550,000.00	165.46
		BELANJA	4,628,143,969.00	4,529,959,980.00	97.88
		Belanja Operasi	4,060,458,469.00	3,963,305,480.00	97.61
		Belanja Pegawai	3,183,934,000.00	3,090,805,008.00	97.08
		Belanja Barang dan Jasa	876,524,469.00	872,500,472.00	99.54
		Belanja Modal	567,685,500.00	566,654,500.00	99.82
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	567,685,500.00	566,654,500.00	99.82
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4,563,143,969.00)	(4,422,409,980.00)	96.92
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00
		BELANJA	4,707,180,698.00	4,559,970,205.00	96.87
		Belanja Operasi	4,561,860,698.00	4,415,535,705.00	96.79
		Belanja Pegawai	3,376,681,000.00	3,253,819,952.00	96.36
		Belanja Barang dan Jasa	1,185,179,698.00	1,161,715,753.00	98.02
		Belanja Modal	145,320,000.00	144,434,500.00	99.39
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75,320,000.00	74,584,500.00	99.02
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70,000,000.00	69,850,000.00	99.79
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4,707,180,698.00)	(4,559,970,205.00)	96.87
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00
		BELANJA	3,922,947,715.00	3,860,307,919.00	98.40
		Belanja Operasi	3,905,447,715.00	3,842,807,919.00	98.40
		Belanja Pegawai	2,825,672,000.00	2,766,258,659.00	97.90
		Belanja Barang dan Jasa	1,079,775,715.00	1,076,549,260.00	99.70
		Belanja Modal	17,500,000.00	17,500,000.00	100.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3,922,947,715.00)	(3,860,307,919.00)	98.40
15	Dinas Perhubungan	PENDAPATAN	342,500,000.00	355,437,395.00	103.78
		Pendapatan Asli Daerah	342,500,000.00	355,437,395.00	103.78
		Pendapatan Retribusi Daerah	342,500,000.00	355,437,395.00	103.78
		BELANJA	6,574,612,378.00	6,330,926,016.00	96.29
		Belanja Operasi	5,834,362,378.00	5,595,616,016.00	95.91
		Belanja Pegawai	4,754,164,000.00	4,675,576,188.00	98.35
		Belanja Barang dan Jasa	1,080,198,378.00	920,039,828.00	85.17
		Belanja Modal	740,250,000.00	735,310,000.00	99.33
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	740,250,000.00	735,310,000.00	99.33
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(6,232,112,378.00)	(5,975,488,621.00)	95.88
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	PENDAPATAN	315,000,000.00	231,325,000.00	73.44
		Pendapatan Asli Daerah	315,000,000.00	231,325,000.00	73.44
		Pendapatan Retribusi Daerah	315,000,000.00	231,325,000.00	73.44
		BELANJA	4,264,125,950.00	4,156,242,476.00	97.47
		Belanja Operasi	3,801,825,950.00	3,695,614,176.00	97.21
		Belanja Pegawai	2,307,071,000.00	2,205,422,219.00	95.59
		Belanja Barang dan Jasa	1,494,754,950.00	1,490,191,957.00	99.69
		Belanja Modal	462,300,000.00	460,628,300.00	99.64
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	462,300,000.00	460,628,300.00	99.64
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3,949,125,950.00)	(3,924,917,476.00)	99.39
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	PENDAPATAN	140,064,000.00	103,597,000.00	73.96
		Pendapatan Asli Daerah	140,064,000.00	103,597,000.00	73.96
		Pendapatan Retribusi Daerah	140,064,000.00	103,597,000.00	73.96
		BELANJA	9,886,240,281.00	9,638,188,727.97	97.49
		Belanja Operasi	4,193,066,143.00	3,945,742,659.00	94.10
		Belanja Pegawai	2,932,789,000.00	2,776,515,539.00	94.67
		Belanja Barang dan Jasa	1,260,277,143.00	1,169,227,120.00	92.78
		Belanja Modal	5,693,174,138.00	5,692,446,068.97	99.99
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,681,174,138.00	5,680,446,068.97	99.99
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9,746,176,281.00)	(9,534,591,727.97)	97.83
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	PENDAPATAN	150,000,000.00	154,548,000.00	103.03
		Pendapatan Asli Daerah	150,000,000.00	154,548,000.00	103.03
		Pendapatan Retribusi Daerah	150,000,000.00	154,548,000.00	103.03
		BELANJA	2,988,235,041.00	2,901,388,221.00	97.09
		Belanja Operasi	2,988,235,041.00	2,901,388,221.00	97.09
		Belanja Pegawai	2,445,792,000.00	2,364,522,822.00	96.68
		Belanja Barang dan Jasa	542,443,041.00	536,865,399.00	98.97
		Belanja Modal	-	-	0.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2,838,235,041.00)	(2,746,840,221.00)	96.78
19	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Retribusi Daerah			0.00
		BELANJA	8,473,594,857.00	8,228,201,008.00	97.10
		Belanja Operasi	6,160,778,307.00	6,051,069,044.00	98.22
		Belanja Pegawai	3,000,368,000.00	2,905,486,709.00	96.84
		Belanja Barang dan Jasa	3,160,410,307.00	3,145,582,335.00	
		Belanja Modal	2,312,816,550.00	2,177,131,964.00	94.13
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,950,000.00	70,941,500.00	99.99
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,241,866,550.00	2,106,190,464.00	93.95
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(8,473,594,857.00)	(8,228,201,008.00)	97.10
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Retribusi Daerah			0.00
		BELANJA	3,261,273,943.00	3,185,984,425.00	97.69
		Belanja Operasi	3,180,454,243.00	3,105,689,725.00	97.65
		Belanja Pegawai	2,764,420,000.00	2,706,094,358.00	97.89
		Belanja Barang dan Jasa	416,034,243.00	399,595,367.00	96.05
		Belanja Modal	80,819,700.00	80,294,700.00	99.35
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80,819,700.00	80,294,700.00	99.35
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3,261,273,943.00)	(3,185,984,425.00)	97.69
21	Dinas Pertanian	PENDAPATAN	56,500,000.00	52,147,000.00	92.30
		Pendapatan Asli Daerah	56,500,000.00	52,147,000.00	92.30
		Pendapatan Retribusi Daerah	56,500,000.00	52,147,000.00	92.30
		BELANJA	17,476,997,057.00	17,112,356,750.00	97.91
		Belanja Operasi	15,991,254,057.00	15,672,281,300.00	98.01
		Belanja Pegawai	11,584,896,000.00	11,438,018,376.00	98.73
		Belanja Barang dan Jasa	4,406,358,057.00	4,234,262,924.00	96.09
		Belanja Modal	1,485,743,000.00	1,440,075,450.00	96.93
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	828,443,000.00	805,112,500.00	97.18
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	597,400,000.00	575,062,950.00	96.26
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	59,900,000.00	59,900,000.00	100.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(17,420,497,057.00)	(17,060,209,750.00)	97.93
22	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	PENDAPATAN	13,980,000.00	15,461,716.00	110.60
		Pendapatan Asli Daerah	13,980,000.00	15,461,716.00	110.60
		Pendapatan Retribusi Daerah	13,980,000.00	15,461,716.00	110.60
		BELANJA	4,093,191,975.00	3,954,567,126.00	96.61
		Belanja Operasi	4,062,191,975.00	3,923,567,126.00	96.59
		Belanja Pegawai	2,728,875,000.00	2,661,515,716.00	97.53
		Belanja Barang dan Jasa	1,333,316,975.00	1,262,051,410.00	94.66
		Belanja Modal	31,000,000.00	31,000,000.00	100.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,000,000.00	31,000,000.00	100.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4,079,211,975.00)	(3,939,105,410.00)	96.57
23	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Retribusi Daerah			0.00
		BELANJA	558,129,000.00	556,971,078.00	99.79
		Belanja Operasi	558,129,000.00	556,971,078.00	99.79
		Belanja Pegawai	558,129,000.00	556,971,078.00	99.79
		Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal	-	-	0.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(558,129,000.00)	(556,971,078.00)	99.79



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
24	Sekretariat Daerah	PENDAPATAN	10,000,000.00	7,600,000.00	76.00
		Pendapatan Asli Daerah	10,000,000.00	7,600,000.00	76.00
		Pendapatan Retribusi Daerah	10,000,000.00	7,600,000.00	76.00
		BELANJA	30,678,259,484.00	30,221,522,051.00	98.51
		Belanja Operasi	29,526,850,584.00	29,076,860,061.00	98.48
		Belanja Pegawai	11,404,501,000.00	11,183,346,301.00	98.06
		Belanja Barang dan Jasa	18,122,349,584.00	17,893,513,760.00	98.74
		Belanja Modal	1,151,408,900.00	1,144,661,990.00	99.41
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	779,178,900.00	775,598,900.00	99.54
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	372,230,000.00	369,063,090.00	99.15
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(30,668,259,484.00)	(30,213,922,051.00)	98.52
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Retribusi Daerah			0.00
		BELANJA	10,356,994,000.00	10,181,605,008.00	98.31
		Belanja Operasi	10,356,994,000.00	10,181,605,008.00	98.31
		Belanja Pegawai	10,356,994,000.00	10,181,605,008.00	98.31
		Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal	-	-	0.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(10,356,994,000.00)	(10,181,605,008.00)	98.31
26	Sekretariat DPRD	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00
		BELANJA	24,753,619,550.00	22,602,453,567.00	91.31
		Belanja Operasi	24,158,619,550.00	22,012,457,117.00	91.12
		Belanja Pegawai	3,496,937,000.00	3,129,908,707.00	89.50
		Belanja Barang dan Jasa	20,661,682,550.00	18,882,548,410.00	91.39
		Belanja Modal	595,000,000.00	589,996,450.00	99.16
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270,000,000.00	266,930,000.00	98.86
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	325,000,000.00	323,066,450.00	99.41
		SURPLUS / (DEFISIT)	(24,753,619,550.00)	(22,602,453,567.00)	91.31
27	Kecamatan	PENDAPATAN	13,000,000.00	13,618,750.00	104.76



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
	Pulau Punjung	Pendapatan Asli Daerah	13,000,000.00	13,618,750.00	104.76
		Pendapatan Retribusi Daerah	13,000,000.00	13,618,750.00	104.76
		BELANJA	1,713,975,450.00	1,631,924,991.00	95.21
		Belanja Operasi	1,713,975,450.00	1,631,924,991.00	95.21
		Belanja Pegawai	1,540,099,000.00	1,462,531,875.00	94.96
		Belanja Barang dan Jasa	173,876,450.00	169,393,116.00	97.42
		Belanja Modal	-	-	0.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1,700,975,450.00)	(1,618,306,241.00)	95.14
28	Kecamatan Sitiung	PENDAPATAN	6,460,000.00	8,411,250.00	130.21
		Pendapatan Asli Daerah	6,460,000.00	8,411,250.00	130.21
		Pendapatan Retribusi Daerah	6,460,000.00	8,411,250.00	130.21
		BELANJA	1,958,674,000.00	1,847,518,475.00	94.32
		Belanja Operasi	1,952,674,000.00	1,841,518,475.00	94.31
		Belanja Pegawai	1,811,806,000.00	1,700,929,753.00	93.88
		Belanja Barang dan Jasa	140,868,000.00	140,588,722.00	99.80
		Belanja Modal	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1,952,214,000.00)	(1,839,107,225.00)	94.21
29	Kecamatan Koto Baru	PENDAPATAN	3,600,000.00	6,007,000.00	166.86
		Pendapatan Asli Daerah	3,600,000.00	6,007,000.00	166.86
		Pendapatan Retribusi Daerah	3,600,000.00	6,007,000.00	166.86
		BELANJA	1,837,204,550.00	1,771,093,078.00	96.40
		Belanja Operasi	1,827,204,550.00	1,761,093,078.00	96.38
		Belanja Pegawai	1,666,731,000.00	1,605,842,232.00	96.35
		Belanja Barang dan Jasa	160,473,550.00	155,250,846.00	96.75
		Belanja Modal	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1,833,604,550.00)	(1,765,086,078.00)	96.26
30	Kec. Sungai Rumbai	PENDAPATAN	8,500,000.00	4,430,000.00	52.12
		Pendapatan Asli Daerah	8,500,000.00	4,430,000.00	52.12
		Pendapatan Retribusi Daerah	8,500,000.00	4,430,000.00	52.12



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
		BELANJA	1,745,002,263.00	1,734,577,178.00	99.40
		Belanja Operasi	1,731,002,263.00	1,720,577,178.00	99.40
		Belanja Pegawai	1,546,508,000.00	1,537,304,026.00	99.40
		Belanja Barang dan Jasa	184,494,263.00	183,273,152.00	99.34
		Belanja Modal	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1,736,502,263.00)	(1,730,147,178.00)	99.63
31	Kecamatan IX Koto	PENDAPATAN	2,500,000.00	700,000.00	28.00
		Pendapatan Asli Daerah	2,500,000.00	700,000.00	28.00
		Pendapatan Retribusi Daerah	2,500,000.00	700,000.00	28.00
		BELANJA	1,683,742,962.00	1,665,849,244.00	98.94
		Belanja Operasi	1,683,742,962.00	1,665,849,244.00	98.94
		Belanja Pegawai	1,510,482,000.00	1,502,299,490.00	99.46
		Belanja Barang dan Jasa	173,260,962.00	163,549,754.00	94.40
		Belanja Modal	-	-	0.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1,681,242,962.00)	(1,665,149,244.00)	99.04
32	Kecamatan Timpeh	PENDAPATAN	6,160,000.00	4,362,500.00	70.82
		Pendapatan Asli Daerah	6,160,000.00	4,362,500.00	70.82
		Pendapatan Retribusi Daerah	6,160,000.00	4,362,500.00	70.82
		BELANJA	1,464,052,862.00	1,410,085,046.00	96.31
		Belanja Operasi	1,464,052,862.00	1,410,085,046.00	96.31
		Belanja Pegawai	1,271,856,000.00	1,218,446,134.00	95.80
		Belanja Barang dan Jasa	192,196,862.00	191,638,912.00	99.71
		Belanja Modal	-	-	0.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1,457,892,862.00)	(1,405,722,546.00)	96.42
33	Kecamatan Koto Salak	PENDAPATAN	1,000,000.00	1,187,500.00	118.75
		Pendapatan Asli Daerah	1,000,000.00	1,187,500.00	118.75
		Pendapatan Retribusi Daerah	1,000,000.00	1,187,500.00	118.75
		BELANJA	1,603,495,370.00	1,530,874,325.00	95.47
		Belanja Operasi	1,603,495,370.00	1,530,874,325.00	95.47



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
		Belanja Pegawai	1,373,205,000.00	1,302,485,621.00	94.85
		Belanja Barang dan Jasa	230,290,370.00	228,388,704.00	99.17
		Belanja Modal	-	-	0.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1,602,495,370.00)	(1,529,686,825.00)	95.46
34	Kecamatan Asam Jujuhan	PENDAPATAN	1,000,000.00	750,000.00	75.00
		Pendapatan Asli Daerah	1,000,000.00	750,000.00	75.00
		Pendapatan Retribusi Daerah	1,000,000.00	750,000.00	75.00
		BELANJA	1,436,305,550.00	1,389,555,359.00	96.75
		Belanja Operasi	1,436,305,550.00	1,389,555,359.00	96.75
		Belanja Pegawai	1,201,267,000.00	1,155,268,859.00	96.17
		Belanja Barang dan Jasa	235,038,550.00	234,286,500.00	99.68
		Belanja Modal	-	-	0.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1,435,305,550.00)	(1,388,805,359.00)	96.76
35	Kecamatan Koto Besar	PENDAPATAN	3,500,000.00	3,220,000.00	92.00
		Pendapatan Asli Daerah	3,500,000.00	3,220,000.00	92.00
		Pendapatan Retribusi Daerah	3,500,000.00	3,220,000.00	92.00
		BELANJA	1,583,408,712.00	1,531,605,655.00	96.73
		Belanja Operasi	1,567,758,712.00	1,515,955,655.00	96.70
		Belanja Pegawai	1,380,679,000.00	1,329,179,363.00	96.27
		Belanja Barang dan Jasa	187,079,712.00	186,776,292.00	99.84
		Belanja Modal	15,650,000.00	15,650,000.00	100.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,650,000.00	15,650,000.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1,579,908,712.00)	(1,528,385,655.00)	96.74
36	Kecamatan Padang Laweh	PENDAPATAN	1,500,000.00	2,590,000.00	172.67
		Pendapatan Asli Daerah	1,500,000.00	2,590,000.00	172.67
		Pendapatan Retribusi Daerah	1,500,000.00	2,590,000.00	172.67
		BELANJA	1,370,724,550.00	1,295,648,824.00	94.52
		Belanja Operasi	1,370,724,550.00	1,295,648,824.00	94.52
		Belanja Pegawai	1,178,727,000.00	1,106,237,654.00	93.85
		Belanja Barang dan Jasa	191,997,550.00	189,411,170.00	98.65



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
		Belanja Modal	-	-	0.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1,369,224,550.00)	(1,293,058,824.00)	94.44
gfgg h	37 Kecamatan Tiumang	PENDAPATAN	2,500,000.00	1,320,000.00	52.80
		Pendapatan Asli Daerah	2,500,000.00	1,320,000.00	52.80
		Pendapatan Retribusi Daerah	2,500,000.00	1,320,000.00	52.80
		BELANJA	1,640,436,987.00	1,547,590,394.00	94.34
		Belanja Operasi	1,640,436,987.00	1,547,590,394.00	94.34
		Belanja Pegawai	1,444,405,000.00	1,367,060,092.00	94.65
		Belanja Barang dan Jasa	196,031,987.00	180,530,302.00	92.09
		Belanja Modal	-	-	0.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1,637,936,987.00)	(1,546,270,394.00)	94.40
38	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Retribusi Daerah			0.00
		BELANJA	1,220,064,515.00	1,168,207,956.00	95.75
		Belanja Operasi	1,220,064,515.00	1,168,207,956.00	95.75
		Belanja Pegawai	922,352,000.00	878,659,875.00	95.26
		Belanja Barang dan Jasa	297,712,515.00	289,548,081.00	97.26
		Belanja Modal	-	-	0.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1,220,064,515.00)	(1,168,207,956.00)	95.75
39	Inspektorat Kabupaten	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Retribusi Daerah			0.00
		BELANJA	4,645,983,409.00	4,575,716,146.00	98.49
		Belanja Operasi	4,645,983,409.00	4,575,716,146.00	98.49
		Belanja Pegawai	3,720,892,500.00	3,664,035,560.00	98.47
		Belanja Barang dan Jasa	925,090,909.00	911,680,586.00	98.55



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
		Belanja Modal	-	-	0.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4,645,983,409.00)	(4,575,716,146.00)	98.49
40	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembang an Daerah	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Retribusi Daerah			0.00
		BELANJA	4,817,131,019.00	4,709,226,796.00	97.76
		Belanja Operasi	4,817,131,019.00	4,709,226,796.00	97.76
		Belanja Pegawai	3,574,191,000.00	3,478,357,535.00	97.32
		Belanja Barang dan Jasa	1,242,940,019.00	1,230,869,261.00	99.03
		Belanja Modal	-	-	0.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4,817,131,019.00)	(4,709,226,796.00)	97.76
41	Badan Keuangan Daerah	PENDAPATAN	18,714,133,896.00	17,751,808,580.45	94.86
		Pendapatan Asli Daerah	18,714,133,896.00	17,751,808,580.45	94.86
		Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	0.00	
		Pendapatan Pajak Daerah	18,714,133,896.00	17,751,808,580.45	94.86
		Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0.00	0.00	
		BELANJA	20,775,266,924.00	19,197,001,040.00	92.40
		Belanja Operasi	20,201,166,924.00	18,625,911,040.00	92.20
		Belanja Pegawai	17,669,088,351.00	16,281,089,261.00	92.14
		Belanja Barang dan Jasa	2,532,078,573.00	2,344,821,779.00	92.60
		Belanja Modal	574,100,000.00	571,090,000.00	99.48
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	574,100,000.00	571,090,000.00	99.48
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2,061,133,028.00)	(1,445,192,459.55)	70.12
42	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Retribusi Daerah			0.00
		BELANJA	4,670,201,007.00	4,561,252,381.00	97.67
		Belanja Operasi	4,665,201,007.00	4,557,302,381.00	97.69
		Belanja Pegawai	3,794,425,000.00	3,706,179,703.00	97.67
		Belanja Barang dan Jasa	870,776,007.00	851,122,678.00	97.74



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
		Belanja Modal	5,000,000.00	3,950,000.00	79.00
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,000,000.00	3,950,000.00	79.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4,670,201,007.00)	(4,561,252,381.00)	97.67
43	PPKD	PENDAPATAN	935,760,124,355.00	914,338,687,842.86	97.71
		Pendapatan Asli Daerah	6,092,852,034.00	7,025,383,013.86	115.22
		Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,063,752,034.00	4,063,752,034.00	100.00
		Lain-lain PAD Yang Sah	2,029,100,000.00	2,961,630,979.86	145.72
		PENDAPATAN TRANSFER	893,838,172,321.00	872,426,151,108.00	97.60
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	750,547,329,009.00	731,498,444,225.00	97.46
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	99,826,676,000.00	99,826,676,000.00	100.00
		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	43,464,167,312.00	41,101,030,883.00	94.56
		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35,829,100,000.00	34,887,153,721.00	97.37
		Pendapatan Hibah	35,829,100,000.00	34,887,153,721.00	97.37
		BELANJA	69,833,291,073.91	63,883,711,493.00	91.48
		Belanja Operasi	39,042,900,000.00	38,959,439,174.00	99.79
		Belanja Hibah	38,842,900,000.00	38,795,439,174.00	99.88
		Belanja Bantuan Sosial	200,000,000.00	164,000,000.00	82.00
		Belanja Tak Terduga	30,790,391,073.91	24,924,272,319.00	80.95
		Belanja Tak Terduga	30,790,391,073.91	24,924,272,319.00	80.95
		TRANSFER	108,487,910,630.00	107,270,602,109.00	
		TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2,115,260,630.00	933,019,055.00	49.86
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1,871,413,390.00	933,019,055.00	49.86
		Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	243,847,240.00	0.00	0.00
		TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	106,372,650,000.00	106,337,583,054.00	196.10
		Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00
		Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	105,472,650,000.00	105,472,649,600.00	100.00
		Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	900,000,000.00	864,933,454.00	96.10
		SURPLUS / (DEFISIT)	757,438,922,651.09	743,184,374,240.86	98.12
		PEMBIAYAAN			
		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3,893,451,613.32	2,799,061,756.52	
		Penggunaan SiLPA	3,893,451,613.32	2,799,061,756.52	
		PEMBIAYAAN NETTO	3,893,451,613.32	2,799,061,756.52	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	761,332,374,264.41	745,978,535,997.38	97.98
	Rekapitulasi	PENDAPATAN	1,013,848,877,651.00	990,191,146,482.12	97.67



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
		Pendapatan Asli Daerah	84,181,605,330.00	82,877,841,653.12	98.45
		Pendapatan Pajak Daerah	18,714,133,896.00	17,751,808,580.45	94.86
		Pendapatan Retribusi Daerah	2,438,472,400.00	1,866,612,711.00	76.55
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,063,752,034.00	4,063,752,034.00	100.00
		Lain-lain PAD Yang Sah	58,965,247,000.00	59,200,568,327.67	100.39
		PENDAPATAN TRANSFER	893,838,172,321.00	872,426,151,108.00	97.60
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	750,547,329,009.00	731,498,444,225.00	97.46
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	99,826,676,000.00	99,826,676,000.00	100.00
		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	43,464,167,312.00	41,101,030,883.00	94.56
		Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00
		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35,829,100,000.00	34,887,153,721.00	97.37
		Pendapatan Hibah	35,829,100,000.00	34,887,153,721.00	97.37
		BELANJA	909,254,418,634.32	878,479,570,779.95	
		Belanja Operasi	676,340,756,182.58	658,508,367,058.43	97.36
		Belanja Pegawai	425,868,390,651.00	418,043,145,643.00	98.16
		Belanja Barang dan Jasa	211,429,465,531.58	201,505,782,241.43	95.31
		Belanja Hibah	38,842,900,000.00	38,795,439,174.00	99.88
		Belanja Bantuan Sosial	200,000,000.00	164,000,000.00	82.00
		Belanja Modal	202,123,271,377.83	195,046,931,402.52	96.50
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	82.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68,463,797,471.00	65,272,852,226.75	95.34
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96,294,282,118.00	94,052,704,714.97	97.67
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	36,304,327,743.83	34,663,993,010.80	95.48
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,060,864,045.00	1,057,381,450.00	99.67
		BELANJA TAK TERDUGA	30,790,391,073.91	24,924,272,319.00	80.95
		Belanja Tak Terduga	30,790,391,073.91	24,924,272,319.00	80.95
		TRANSFER	108,487,910,630.00	107,270,602,109.00	98.88
		TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2,115,260,630.00	933,019,055.00	44.11
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1,871,413,390.00	933,019,055.00	49.86
		Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	243,847,240.00	0.00	0.00
		TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	106,372,650,000.00	106,337,583,054.00	99.97
		Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00
		Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	105,472,650,000.00	105,472,649,600.00	100.00
		Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	900,000,000.00	864,933,454.00	96.10
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3,893,451,613.32)	4,440,973,593.17	-114.10
		PEMBIAYAAN			
		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3,893,451,613.32	3,893,451,613.32	
		Penggunaan SiLPA	3,893,451,613.32	3,893,451,613.32	
		PEMBIAYAAN NETTO	3,893,451,613.32	3,893,451,613.32	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	(0.00)	8,334,425,206.49	0.00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diatas, maka dapat digambarkan pencapaian target kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlihat pada ringkasan realisasi APBD pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Dharmasraya TA 2020

Sesuai APBD

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	LEBIH/ KURANG
PENDAPATAN	1.031.026.154.667,00	1.013.848.877.651,00	990.191.146.482,12	97,67	(23.657.731.168,88)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	104.794.164.000,00	84.181.605.330,00	82.877.841.653,12	98,45	(1.303.763.676,88)
PENDAPATAN TRANSFER	921.831.990.667,00	893.838.172.321,00	872.426.151.108,00	97,60	(21.412.021.213,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.400.000.000,00	35.829.100.000,00	34.887.153.721,00	97,37	(941.946.279,00)
JUMLAH PENDAPATAN	1.031.026.154.667,00	1.013.848.877.651,00	990.191.146.482,12	97,67	(23.657.731.168,88)
BELANJA	987.445.414.352,00	909.254.418.634,32	878.478.228.864,95	96,62	30.776.189.769,37
BELANJA OPERASI	729.478.294.728,00	676.862.235.406,83	659.028.504.367,68	97,37	17.833.731.039,15
BELANJA MODAL	256.467.119.624,00	201.601.792.153,58	194.525.452.178,27	96,49	7.076.339.975,31
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	30.790.391.073,91	24.924.272.319,00	80,95	5.866.118.754,91
TRANSFER	115.279.266.000,00	108.487.910.630,00	107.270.602.109,00	98,88	1.217.308.521,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(71.698.525.685,00)	(3.893.451.613,32)	4.442.315.508,17	114,10	8.335.767.121,49
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73.198.525.685,00	3.893.451.613,32	3.893.451.613,32	100,00	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	71.698.525.685,00	3.893.451.613,32	3.893.451.613,32	100,00	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	-	8.335.767.121,49		8.335.767.121,49

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan

Secara umum, pelaksanaan masing masing program dan kegiatan berjalan lancar, ini dapat terlihat dalam target pencapaian kinerja APBD Tahun 2020 untuk belanja operasional capaian kinerjanya sebesar 97,37%, akan tetapi masih ada beberapa kegiatan yang capaian kinerja keuangannya masih rendah, dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.5.
Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan Tahun 2020

No	Kode Rekening	OPD	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan / Kendala
1	1.01.01	Dinas Pendidikan				
	1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 23	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	62.920.125,00	36.000.000,00	57,22	- Jumlah peserta didik Tidak mencukupi sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan
2	1.02.01	Dinas Kesehatan				
	1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 07	Akreditasi Puskesmas	1.320.825.000,00	305.690.000,00	23,14	Pembatalan penilaian Akreditasi terhadap 6 UPT Puskesmas dikarenakan adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/Menkes/455/2020 Tahun 2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada masa Pandemi Covid-19.
	1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 10	Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia (DAK Non Fisik)	52.452.000,00	32.182.000,00	61,36	- PIC Provinsi menginstruksikan agar Pelaksanaan Workshop Tata Kelola Mutu ditiadakan dulu. Beberapa orang Tenaga Pendamping terkendala dalam melaksanakan Pendampingan karena adanya Tenaga Kesehatan di Puskesmas yang terkonfirmasi Covid-19.
	1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 26	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit	800.000.000,00	499.919.454,00	62,49	Selama masa pandemi tahun 2020 untuk melakukan kegiatan Lansia mengalami kendala karena lansia merupakan usia yang rentan terhadap penularan virus covid 19 sehingga kegiatan pertemuan yang awalnya ditujukan untuk mengundang lansia tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
						- Rendahnya kunjungan pasien berobat karena belum kerjasama dengan BPJS sehingga pendapatan RSUD masih berkurang dan Karena Kondisi Pandemi COVID-19 sehingga fungsi pelayanan tidak optimal
3	1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang				
	1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	76.550.000,00	17.914.800,00	23,40	- Hal ini disebabkan karena Penghematan dan Efisiensi anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kode Rekening	OPD	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan / Kendala
	1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 28	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	309.900.000,00	50.397.900,00	16,26	ada 2 paket pekerjaan, yaitu Jasa Konsultan Perencanaan dengan nilai kontrak, 94.850.000,- realisasi keuangan 75.880.000,- dan Jasa Konsultan Perencana Embung dengan nilai kontrak 94.880.000, realisasi keuangan 75.904.000,- yang belum dibayarkan dan menjadi hutang di Tahun anggaran 2021
	1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 29	Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai	69.210.000,00	20.622.000,00	29,80	Recofusing anggaran pada kegiatan Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai di APBD Pergeseran sehingga kegiatan fisik pada kegiatan ini tidak di laksanakan
	1.03 . 1.03.01 . 00 . 36 . 03	Pemeliharaan dan Perawatan PJU	151.125.000,00	22.106.000,00	14,63	Recofusing anggaran pada kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan PJU di APBD Pergeseran sehingga kegiatan pada kegiatan ini tidak di laksanakan
4	1.04.01	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan				
	1.04 . 1.04.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.050.000,00	4.796.050,00	59,58	Tidak terlaksananya penambahan kendaraan dinas operasional untuk Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun 2020 sedangkan pembayaran pajaknya telah dianggarkan.
5	1.05.01	Satuan Polisi pamong Praja				
	1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	23.500.000,00	11.422.900,00	48,61	Hal ini disebabkan karena adanya mutasi kendaraan dinas ke dinas lain dan penurunan nilai pajak kendaraan sehingga terjadi efisiensi anggaran
6	2 . 03 . 01	Dinas Pangan Perikanan				
	2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.000.000,00	5.077.550,00	56,42	Hal ini disebabkan karena Penghematan dan Efisiensi anggaran
7	2 . 06 . 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.740.000,00	5.402.900,00	69,80	Hal ini disebabkan karena Penghematan dan Efisiensi anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kode Rekening	OPD	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan / Kendala
	2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.600.000,00	940.000,00	58,75	Hal ini disebabkan karena Penghematan dan Efisiensi anggaran
8	2 . 09 . 01 2.09 . 2.09.01.01 . 01 . 06	Dinas Perhubungan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	210.000.000,00	54.192.620,00	25,81	ini disebabkan karena SPM yang tertunda sedangkan secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100%. Sehingga menimbulkan hutang belanja 2020
9	2 . 10 . 01 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 06	Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.400.000,00	1.578.000,00	46,41	Hal ini disebabkan karena adanya mutasi kendaraan dinas ke dinas lain dan penurunan nilai pajak kendaraan sehingga terjadi efisiensi anggaran
10	2 . 16 . 01 2.16 . 2.16.01.01 . 01 . 06	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.332.150,00	2.584.050,00	59,65	Hal ini disebabkan karena penurunan nilai pajak kendaraan sehingga terjadi efisiensi anggaran
11	3 . 03 . 01 3.03 . 3.03.01.01 . 01 . 06	Dinas Pertanian Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	22.950.000,00	11.178.250,00	48,71	Rendahnya realisasi capaian kegiatan ini disebabkan karena ada beberapa kendaraan yang surat-suratnya tidak lengkap dan ada juga kendaraan dinas yang pengadaannya bukan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
12	3 . 08 . 01 3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 02 3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 06	Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	93.999.600,00 4.500.000,00	58.370.314,00 2.332.500,00	62,10 51,83	Ini disebabkan karena ada 2 (dua) buah dinas yang pindah ke OPD Lain yaitu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial . Pada Kegiatan ini terkendala karena ada beberapa kendaraan dinas roda 2 yang STNKnya tidak ditemukan, maka terkendala untuk pembayaran pajaknya
13	4 . 01 . 04	Sekretariat DPRD				



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kode Rekening	OPD	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan / Kendala
	4.01 . 4.01.04.01 . 15 . 05	Kegiatan Reses	425.962.550,00	258.116.350,00	60,60	- Karena masa pandemi maka kegiatan kunjungan kemasyarakatan tidak terlaksana secara maksimal.
14	4 . 01 . 05 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 06	Kecamatan Pulau Punjung Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	1.214.950,00	40,50	- Hal ini disebabkan karena penurunan nilai pajak kendaraan sehingga terjadi efisiensi anggaran
15	4 . 01 . 09 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 06	Kecamatan Sembilan Koto Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.900.000,00	2.014.000,00	69,45	- Hal ini disebabkan kurang tepatnya dalam perencanaan anggaran dan penurunan nilai pajak kendaraan sehingga terjadi efisiensi anggaran
16	4 . 01 . 15 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 06	Kecamatan Tiumang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.500.000,00	719.250,00	47,95	- hal ini disebabkan karena penurunan nilai pajak kendaraan sehingga terjadi efisiensi anggaran
	4 . 02 . 01 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 06	Inspektorat Kabupaten Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.860.000,00	3.513.850,00	35,64	- hal ini disebabkan karena penurunan nilai pajak kendaraan sehingga terjadi efisiensi anggaran
17	4 . 04 . 01 4.04 . 4.04.01.01 . 01 . 06 4.04 . 4.04.01 . 00 . 17 . 85	Badan Keuangan Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyusunan Produk Hukum Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	12.800.000,00 4.754.800,00	4.560.400,00 0,00	35,63 -	- Karena dalam perencanaannya untuk pembayaran pajak kendaraan kendaraan dinas yang belum jelas penempatannya (pindah OPD) yang dikumpulkan di Aset Kabupaten sebelum dipindah ke OPD Lain. Tidak adanya kegiatan pembahasan Ranperda / Penyusunan Produk hukum oleh DPRD tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur akuntansi pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Organisasi pemerintah daerah yang bertindak sebagai kantor pusat adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan yang bertindak sebagai kantor cabang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemilihan struktur ini disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 10 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189 ayat (1) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang Undang tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya telah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Susunan Perangkat Daerah yang berjumlah 35 Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, 3 Badan dan 11 Kecamatan. Selain 35 Perangkat Daerah tersebut, ada 3 SKPD yang masih tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Tahun 2010 yakni RSUD Sungai Dareh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kantor Kesbangpol. Ketiga SKPD tersebut tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukannya ditetapkan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 maka entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 41 entitas, yaitu.

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) RSUD Sungai Dareh
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
- 7) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
- 8) Dinas Pangan dan Perikanan
- 9) Dinas Lingkungan Hidup



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 12) Dinas Perhubungan
- 13) Dinas Komunikasi Dan Informatika
- 14) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 16) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
- 17) Dinas Perpustakaan Kearsipan
- 18) Dinas Pertanian
- 19) Dinas Transmisgrasi dan Tenaga Kerja
- 20) Inspektorat Kabupaten
- 21) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 22) Badan Keuangan Daerah
- 23) Kecamatan Pulau Punjung
- 24) Kecamatan Sitiung
- 25) Kecamatan Koto Baru
- 26) Kecamatan Sungai Rumbai
- 27) Kecamatan IX Koto
- 28) Kecamatan Timpeh
- 29) Kecamatan Koto Salak
- 30) Kecamatan Asam Jujuhan
- 31) Kecamatan Koto Besar
- 32) Kecamatan Padang Laweh
- 33) Kecamatan Tiumang
- 34) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 35) Sekretariat Daerah
- 36) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- 37) Sekretariat DPRD
- 38) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 39) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 40) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 41) Pejabat Pengelola keuangan Daerah (PPKD)

Sebagai entitas pelaporan, maka Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPKD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah disusun merupakan gabungan dari seluruh Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPKD sebagai PPKD/Bendahara Umum Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda.

- *Angka Realisasi Pendapatan* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA. 2020 adalah menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah atas seluruh penerimaan uang yang masuk pada Rekening Kas Daerah dan ditambah dengan realisasi pendapatan BLUD dan Dana BOS yang terdiri dari 146 SD Negeri dan 33 SMP Negeri yang tidak melalui Rekening Kas Daerah. Adapun BLUD yang dikelola sebanyak 16 BLUD yaitu.
 1. BLUD RSUD Sungai Dareh.
 2. BLUD Puskesmas Sungai Rumbai.
 3. BLUD Puskesmas Sungai Limau.
 4. BLUD Puskesmas Sitiung II.
 5. BLUD Puskesmas Padang Laweh.
 6. BLUD Puskesmas Sungai Dareh.
 7. BLUD Puskesmas Silago.
 8. BLUD Puskesmas Gunung Medan.
 9. BLUD Puskesmas Sitiung I.
 10. BLUD Puskesmas Koto Baru.
 11. BLUD Puskesmas Timpeh.
 12. BLUD Puskesmas Sialang.
 13. BLUD Puskesmas Tiumang.
 14. BLUD Puskesmas Koto Besar
 15. BLUD RSUD Sungai Rumbai
 16. BLUD Puskesmas Beringin Sakti
- *Angka Realisasi Belanja* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 berdasarkan kompilasi realisasi belanja seluruh entitas (SKPD), dimana pengguna anggaran bertanggungjawab atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakan. Sedangkan data realisasi pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah berfungsi sebagai kontrol melalui rekonsiliasi dengan SKPKD, ditambah dengan realisasi belanja BLUD sebanyak 16 BLUD dan Dana BOS yang terdiri dari 146 SD Negeri dan 33 SMP Negeri yang tidak melalui rekening Kas Daerah
- *Angka Realisasi Pembiayaan* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah

Dalam Laporan Realisasi Anggaran perlu dilakukan konversi agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran II) tentang SAP, Pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung APBD. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, kemudian konversinya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Laporan Operasional

Laporan Finansial menyangkut laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut.

- a. Pendapatan- LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional;
- c. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- d. Pos luar biasa, bila ada;
- e. Surplus/defisit-LO.

Laporan Operasional disusun berdasarkan konsolidasi dari seluruh Laporan Operasional SKPD dan PPKD.

c. Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya disusun berdasarkan konsolidasi Neraca SKPD dan SKPKD/PPKD. Dalam Penyusunan Neraca, rekening-rekening yang sifatnya *reciprocal* (timbang balik antar unit dalam satu Pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun *reciprocal* tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun *reciprocal*. Akun-akun *reciprocal* yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK- SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap Neraca kedua unit tersebut yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansiserta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran untuk menilai pengaruh dari aktifitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Daerah.

e. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut.

- a) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan;
- d) Koreksi kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
- e) Lain-lain;
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos.

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,
- d) Ekuitas Akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian informasi yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Selain itu juga meliputi kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam LRA dan **basis akrual** untuk pengakuan beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan dan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk LO dan Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos (akun) dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos (akun) dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

D. Kebijakan Akuntansi

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

1.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Umum

1. Definisi Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Definisi *pendapatan Perpajakan-LRA* adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. Klasifikasi

Jenis Pajak Daerah terdiri atas.

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Bawah Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- j. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

3. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di RKUD yang mencakup hal-hal sebagai berikut.

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Pengukuran

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.

Akuntansi Perpajakan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Pajak Daerah-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

5. Penyajian

Ilustrasi Penyajian Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Pendapatan Perpajakan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas per jenis pajak dalam mata uang rupiah.

Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun berkenaan serta realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun sebelumnya.

6. Pengungkapan

Pendapatan Perpajakan-LRA yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut antara lain.

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan Perpajakan-LRA.
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- c. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LRA per jenis pajak.

Klasifikasi pendapatan-LRA berdasarkan kewenangan SKPD dan PPKD adalah sebagai berikut.

Adapun klasifikasi pendapatan dapat dirinci berdasarkan objek pendapatan, yaitu.

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Pajak Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah.
- 2) Retribusi Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang retribusi daerah.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dipisahkan, hasil pengelolaan aset lainnya, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan dan pendapatan dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah serta pendapatan BLUD.

b. Pendapatan Transfer

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan rinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya menurut obyek pendapatan ditetapkan oleh pemerintah, seperti dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dana BOS, tunjangan profesi guru, dana insentif daerah dan lain sejenisnya.

3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya menurut obyek pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pendapatan bagi hasil lainnya dan lain sejenisnya.

4) Kelompok bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi lainnya atau Pemerintah Kabupaten terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi lainnya dan bantuan keuangan dari kabupaten.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Kelompok pendapatan hibah dirinci berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

2) Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

3) Pendapatan lainnya berupa pendapatan sumbangan pihak ketiga dan lain sejenisnya.

2. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan di RKUD atau entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

3. Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dantidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4. Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

5. Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah.

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan Nonperpajakan

Umum

1. Definisi pendapatan nonperpajakan diartikan sebagai pendapatan negara atau daerah yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan.
2. Klasifikasi Nonperpajakan
Klasifikasi Pendapatan Nonperpajakan dapat dibagi berdasarkan proses memperoleh pendapatan tersebut yang digolongkan menjadi.
 - a. Pendapatan perizinan;
 - b. Pendapatan layanan;
 - c. Pendapatan pemanfaatan sumber daya alam
 - d. Pendapatan hasil investasi;
 - e. Pendapatan hasil investasi aset non keuangan;
 - f. Pendapatan nonperpajakan lainnya.

Dalam rangka penyusunan LRA, basis akuntansi yang digunakan untuk mencatat pendapatan nonperpajakan adalah basis kas.

Pendapatan nonperpajakan-LRA adalah semua penerimaan pendapatan nonperpajakan pada rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengakuan

Secara umum pendapatan LRA diakui pada saat diterima di RKUD.

Pendapatan LRA yang berasal dari pendapatan nonperpajakan diakui pada saat.

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima telah melaporkan/mengesahkan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dokumen sumber pencatatan pengakuan pendapatan nonperpajakan basis kas adalah bukti setor seperti SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) atau dokumen lainnya yang dipersamakan setelah mendapat otorisasi dari bank/pos tempat menyetor, seperti Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau sejenisnya maupun dokumen lain yang ditetapkan oleh BUD sebagai dasar pengakuan pendapatan tersebut.

1.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan -LO

a. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat.

1. Timbulnya hak atas pendapatan;
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Contohnya adalah penetapan yang dilakukan atas kekurangan pembayaran Pajak Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contohnya adalah Wajib Pajak Daerah melakukan penyetoran atas kewajiban perpajakannya tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

1. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assesment system*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assesment system* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan *self assesment system* antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment system*

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan *official assessment system* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment system* antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah. Contoh dokumen sumber *official assessment system* antara lain: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

3. Pengembalian Pajak

Wajib Pajak dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan membayar ke Daerah lebih besar dari pada kewajibannya pada suatu masa atau tahun pajak. Untuk itu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajaknya.

Dokumen sumber pencatatan pengembalian Pajak-LO antara lain surat ketetapan kelebihan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan daerah. Contoh dokumen sumber pengembalian pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

b. Pengukuran

Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu.

1. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk *self assesment*.
2. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk *official assessment*.

Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukuka penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Pajak Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c. Penyajian

Pendapatan Perpajakan-LO disajikan pada Laporan Operasional per jenis pajak dalam mata uang rupiah. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan membandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun berkenaan dengan realisasi tahun sebelumnya.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO antara lain adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran Pendapatan Pajak Daerah-LO;
2. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO per jenis pajak.

2. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Tujuan kebijakan akuntansi beban dan belanja ialah mengatur perlakuan akuntansi beban dan belanja. Perlakuan akuntansi beban dan belanja mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan belanja.

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu.

No	Beban	Belanja
a	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5

a.2. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

1. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
2. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
3. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja Sekretariat DPRD,



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

belanja Sekretariat Daerah provinsi/kota/kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi/kota/kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/kota/kabupaten.

b. Pengakuan

Menurut PSAP Nomor 12 tentang Akuntansi Beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat.

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Menurut PSAP Nomor 02 tentang Akuntansi Belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat.

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode Pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2. Metode Pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari RKUD dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

d. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

e. Penyajian

Penyajian Beban dan Belanja disesuaikan dengan format yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

f. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah.

1. rincian beban per SKPD.
2. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. rincian belanja per SKPD.
2. penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1. Definisi

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- 3) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a.2. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya terjadinya dan diklasifikasikan antara lain.

1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
3. Transfer Pemerintah Provinsi.
4. Transfer/Bagi Hasil ke Desa.
5. Transfer/Bantuan Keuangan.

b. Pengakuan

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

c. Pengukuran

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di RKUD.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari RKUD.

d. Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

e. Penyajian

Transfer disajikan sebagai pengeluaran transfer.

f. Pengungkapan

1. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah.
 - 1) penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah.
 - 1) transfer keluar harus dirinci;
 - 2) penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain.
 - 1) Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1. Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

a.2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

c. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Penyajian di Laporan Keuangan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah contoh penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut.

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

a.2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari.

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
2. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUD.

b. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

d. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

6. Kebijakan Akuntansi Piutang

a. Definisi dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Buletin Teknis SAP Nomor 02 Tahun 2010 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

a.2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas.

1. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas.

1. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
2. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Piutang Retribusi;
4. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas.

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas.

3. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas.

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi;
- 7) Piutang Transfer antar Daerah;
- 8) Piutang Kelebihan Transfer.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas.

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi Daerah
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

b. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika.

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila.

1. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
2. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memper-hitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

c. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut.

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.

1. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut.

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari.

1. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan.

1. Kualitas lancar, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria.
- a. Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria.
- a. Umur piutang tiga sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria.
- a. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria.
- a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria.
- a. Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria.
- a. Umur piutang tiga sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria.
- a. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut.

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan satu bulan;



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang satu sampai dengan tiga bulan;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang tiga sampai dengan 12 bulan;
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan.

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut.

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar.

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar.

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. 0,5 % dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

e. Penyajian

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

f. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa.

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Persediaan merupakan aset yang berwujud.

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. Barang yang disimpan untuk atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

a.2. Klasifikasi

1. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
2. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
3. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
4. Persediaan dapat terdiri dari.
 - a. Barang Konsumsi;
 - b. Barang pakai habis;
 - c. Barang cetakan
 - d. Perangko dan materai
 - e. Obat-obatan dan bahan farmasi
 - f. Amunisi;
 - g. Bahan untuk pemeliharaan;
 - h. Suku cadang;
 - i. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - j. Pita cukai dan leges;
 - k. Bahan Baku;
 - l. Barang dalam proses / setengah jadi;
 - m. Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
5. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman
7. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang dan persediaan yang tidak lagi digunakan disebabkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Pengakuan

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

2. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi, dan bersifat netral). Dokumen sumber adalah faktur, kwitansi, dan kwitansi, dan berita acara serah terima (BAST).

3. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun asset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

4. Beban Persediaan diakui dengan dua pendekatan yaitu.

a. Pendekatan Aset

Pengakuan Beban Persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan Aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.

Contohnya antara lain adalah persediaan obat di Rumah Sakit, persediaan di Sekretariat SKPD.

b. Pendekatan Beban

Setiap pembelian Persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

5. Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
6. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka persediaan ini diperlukan sebagai beban.
7. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlukan sebagai kerugian daerah.

c. Metode Pencatatan

1. Metode Periodik yaitu pencatatan berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*) yang digunakan untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kantor (ATK). barang habis pakai, barang cetakan, dan sejenisnya yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD. Dengan metode ini pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

2. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *update*.

d. Pengukuran

1. Persediaan disajikan sebesar.
 - (a) Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian.
 - (b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan.
 - (a) Metode *First In First Out* (FIFO)
 - (b) Harga pembelian terakhir
3. Persediaan yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu.
 - a. Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis
 - b. Barang Konsumsi
 - c. Barang habis pakai
 - d. Barang cetakan
 - e. Perangko dan materai
 - f. Obat-obatan dan bahan farmasi
4. Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing
5. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan baik untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dinilai dengan menggunakan nilai wajar dan indeks nilai wajar dari Persediaan hewan dan tanaman tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait.
6. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

e. Beban Persediaan

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*)
2. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan dalam jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
4. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
5. Selisih persediaan pencatatan antara hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dengan yang dibukukan yang disebabkan karena persediaan hilang, using, kadaluarsa ataupun rusak maka selisih persediaan ini dipertimbangkan sebagai suatu kejadian yang abnormal dan diperlakukan sebagai beban.

f. Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan.

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
- (b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (c) Kondisi Persediaan.

8. Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

a.2 Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrua Nomor 06 tentang Investasi antara lain.

a) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu.

1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

b. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*)

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

c. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek

a) Investasi dalam bentuk surat berharga.

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu enam bulan.
- 2. Pengukuran investasi jangka panjang
 - a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b) Investasi non permanen
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

d. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu.

- 1. Metode biaya.

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- 2. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- 3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20%, menggunakan metode biaya.
- b) Kepemilikan 20 sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain.

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

f. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

9. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*material*) dan perlengkapan (*supplies*).



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas dalam rangka penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Daerah yang berkaitan dengan penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Kodifikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah maka untuk Laporan Barang Milik Daerah TA 2019 telah diharuskan untuk menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menerbitkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan adanya perubahan regulasi tersebut berakibat pada perubahan klasifikasi dan penyajian data aset tetap dengan ketentuan sebagai berikut.

- Nilai Aset Tetap yang tidak berubah sebagai akibat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.
 - Aset Tetap Tanah
 - Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - Kontruksi Dalam Pengerjaan
- Nilai Aset Tetap yang berubah sebagai akibat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.
 - KIB peralatan mesin dari 9 sub KIB menjadi 19 sub KIB
 - KIB Bangunan gedung dari 2 sub KIB menjadi 4 sub KIB
 - KIB Aset Tetap Lainnya dari 4 sub KIB menjadi 6 sub KIB
 - Aset tetap rambu-rambu yang semula dicatat pada KIB Bangunan Gedung, sub KIB monumen, pindah ke KIB Peralatan Mesin, sub KIB rambu-rambu
 - Aset tetap peralatan olahraga yang semula dicatat pada KIB Aset Tetap Lainnya pindah ke KIB Peralatan Mesin sub KIB peralatan olahraga
 - Saldo Aset Lain-Lain berubah mengikut pada perpindahan aset rambu-rambu dan alat olahraga

Pelaksanaan peraturan Bupati di atas efektif dilaksanakan 31 Desember 2019 dan seterusnya, sehingga khusus Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya TA. 2019 berdasarkan klasifikasi aset sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat bengkel, alat kantor, alat rumah tangga, alat kedokteran, alat komunikasi, rambu-rambu, alat olahraga dan lain sebagainya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin air conditioning), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan sejenis lainnya dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon serta sejenis lainnya dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, dan biota air. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

f. **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

g. **Akumulasi Penyusutan**

Merupakan akumulasi dari penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
Suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
Aset tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.
- Merupakan objek pemeliharaan
Aset tetap tersebut merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai barang inventaris ekstrakomptabel.

1. Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah daerah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan.
- 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah wakaf yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Peralatan dan Mesin

Barang berwujud dapat diakui sebagai Peralatan dan Mesin apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.000.000,00

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

3. Gedung dan Bangunan

Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, suatu aset harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, merupakan objek pemeliharaan dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp20.000.000,00.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan dan merupakan objek pemeliharaan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap pakai. Terhadap hewan dan tanaman memiliki batasan kapitalisasi sebesar Rp1.000.000,00. Hewan dan tanaman yang telah dikembangkan dimaksud untuk dijual kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap tetapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

Mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, diatur sebagai berikut.

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.

- b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir (a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari satu tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.
- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir (a) dan (b) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir (a) dan (b) di atas adalah Rp.20.000.000,00.

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika.

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Peraturan Bupati ini memberikan pedoman sebagai berikut.

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- c. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggungjawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat di hapusbukukan.
- f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.
- g. Khusus untuk konstruksi Jalan, Irigasi dan Jaringan, apabila BAST sudah ada namun pekerjaan belum selesai, dan telah bisa digunakan/ dimanfaatkan namun karena keterbatasan waktu dan dana, pekerjaan tidak dilanjutkan akan diakui sebagai Aset Tetap Definitif.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan keuangan.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah sebesar Rp1.000.000,00. Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp1.000.000,00 maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan BMD.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak honor tim, biaya perjalanan dinas. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00. artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari Rp20.000.000,00 maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BMD dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas jalan, irigasi, dan jaringan diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Aset Tetap Lainnya

Khusus hewan dan tumbuhan memiliki batasan kapitalisasi sebesar Rp1.000.000,00. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan bangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya

konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi *force majeure*, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

Penyajian

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati

Hal-Hal Khusus Tentang Aset Tetap

1. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Setelah aset diperoleh, Pemerintah daerah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) seperti belanja rehabilitasi dan lain sejenisnya. Sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) seperti belanja pemeliharaan.

Pembedaan antara *capital expenditure* atau *revenue expenditure* selain dari menambah manfaat atau tidak, juga dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran yang disebut dengan *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset) yang dapat diklasifikasi sebagai aset tetap. Kriteria suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) setelah perolehan pada aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 dan untuk gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kerja. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlukan sebagai biaya (*expense*).

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan, berupa pengembangan (*peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut*) dan penggantian utama (*memperbaharui bagian aset tetap*).

Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki resiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidak pastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, seperti pembangunan tanggul lumpur, tanggul pemecah gelombang, tanggul penahan lahar dan lain sejenisnya tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expense*).

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan *renovasi* berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pertukaran Aset Tetap

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan pertukaran, yaitu.

- Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
- Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang;
- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari Neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, dimana proses berada pada Bagian Aset dan pencatatan di PPKD.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah mendapatkan persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindahan tangenan, dan dilakukan dengan cara.

- a. Dijual;
- b. Dipertukarkan;
- c. Dhibahkan; atau
- d. Dijadikan penyertaan modal daerah.

Renovasi Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pengecatan gedung, suku cadang dan lain sejenisnya, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu.

- a. *Renovasi aset tetap milik sendiri*, merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi aset.

- b. *Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan*, mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Pada SKPD yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai penambah nilai pelaporan aset tetap terkait dan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum di serahterimakan pekerjaannya, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Apabila akan diserahkan pada SKPD pemilik sesuai dokumen penyerahan yang telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD yang melakukan renovasi dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

- c. *Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan* yang meliputi renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya dan renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Sama halnya dengan huruf b diatas dan apabila pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik sesuai Berita Acara Penyerahan/dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

- a. **Reklasifikasi Aset Tetap**

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi aset.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode palaporan.

- b. **Koreksi Aset Tetap**

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

Aset Tetap Di Luar Negeri

Kebijakan umum pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri yang merupakan salah satu komponen utama dalam memperjuangkan NKRI. Begitu juga halnya dengan hubungan adat dan kebudayaan.

Interaksi yang diciptakan pemerintah daerah dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat harus bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap saling pengertian dan menghormati di antara masyarakat bangsa-bangsa. Untuk melaksanakan kegiatan di luar negeri tersebut tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain wisma, dan aset tetap lainnya.

Pada prinsipnya pengakuan Aset Tetap di luar negeri sama dengan pengakuan aset tetap di dalam negeri, kecuali untuk tanah diatur khusus, yaitu *“pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengidiskasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen”*.

Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di neraca tersebut dengan tanpa batas waktu.

Apabila pembelian aset tetap dilakukan secara angsuran, maka aset tetap diakui ketika aset tetap yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

Pengakuan Aset Tetap Luar Negeri diukur dengan nilai perolehan atau apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain itu, karena pembelian aset tetap diluar negeri umumnya menggunakan mata uang asing, maka harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan diatur dalam Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perolehan secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Perolehan Aset Tetap dari Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut.

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan.
 - a. Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklamasi dan lain-lain);
 - b. Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklamasi dan lain-lain);
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
4. Informasi penyusutan, meliputi.
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan.
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
6. Untuk KDP diungkapkan.
 - a. Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca.
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
 - c. Jumlah biaya yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Uang Muka Kerja yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;
 - e. Jumlah retensi (yaitu % dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak).
7. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

10. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Definisi dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

a.2 Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

b. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika.

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi.

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi.

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
4. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
5. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat distribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi.

1. Asuransi;
2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi.

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.

Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

d. Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

11. Akuntansi Dana Cadangan

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup.

- 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;

- 4) Sumber dana cadangan; dan
- 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

a.2 Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

b. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

c. Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

d. Penyajian di Laporan Keuangan

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset.

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. Kebijakan Aset Lainnya

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

a.2 Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi.

- Tagihan Jangka Panjang;
- Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi.

- Aset Tak Berwujud; dan
- Aset lain-lain.

b. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer*-BOT)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas.

a. *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

e. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (*intangible asset-work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika.

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

4. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari.

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah.
 - 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah.

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

5. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

d. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

e. Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.

f. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT, dan BTO);
- d. informasi lainnya yang penting.

13. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a.2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrua! Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika.

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari.

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misalnya pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

c. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contohnya biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu.

1. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

d. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva.

14. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah

a. Definisi

Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar BLUD.

b. Karakteristik dan Prinsip BLUD

BLUD mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Pendanaan BLUD merupakan bagian dari APBD;
- BLUD dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- Pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
- BLUD membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
- f. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- g. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
- h. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah
- i. Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

c. Pengakuan Akun Laporan Keuangan

- 1) Pendapatan- LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh BUD.
- 2) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh BUD.
- 3) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan BUD.
- 4) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan BUD.
- 5) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
 - saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
 - Pendapatan direalisasi.
- 6) Pendapatan – LO pada BLUD yang diakui pada saat pendapatan direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 7) Pendapatan – LO pada BLUD diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- 8) Beban pada BLUD diakui pada saat:
 - Timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
 - terjadinya konsumsi aset pada saat terjadinya peralihan hak pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.
 - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan aset berhubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

d. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan

- 1) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran BLUD dikonsolidasikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- 3) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD
- 4) Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada laporan Kas BUD adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disahkan oleh BUD.
- 5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya.
- 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUD dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
- 7) Terhadap konsolidasi Laporan Keuangan BLUD kedalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik.
- 8) Akun-akun timbal balik meliputi pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan.
- 9) Dikecualikan terhadap akun-akun timbal balik adalah akun –akun pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB V

PENJELASAN POS-POS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

V.A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 berdasarkan alur penetapan anggaran telah melalui beberapa kali perubahan. Dengan adanya wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di seluruh dunia termasuk Indonesia dan perkembangannya yang cepat meluas telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Organisasi Kesehatan Sedunia *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Pada Akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020.

Sehubungan dengan meluasnya penyebaran wabah COVID-19, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/sj-Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Kepala Daerah dimintakan untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan target belanja daerah untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam APBD Tahun 2020, dengan melakukan pergeseran anggaran pada bulan April 2020.

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan beberapa kali penyesuaian pendapatan dan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan uraian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.1
Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD 2020

Uraian	JUMLAH (Rp)							Bertambah / (Berkurang)	
	APBD Murni 2020	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	APBD-P 2020	Pergeseran APBD-P 2020	(Rp)	%
	PERDA No. 7 Tahun 2019	PERBUP No. 1 Tahun 2020	PERBUP No. 8 Tahun 2020	PERBUP No. 9 Tahun 2020	PERBUP No. 18 Tahun 2020	PERDA No. 2 Tahun 2020	PERBUP No. 36 Tahun 2020		
	31/12/2019	24/01/2020	06/04/2020	23/04/2020	20/07/2020	04/11/2020	21/12/2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-2	10
PENDAPATAN	1.031.026.154.667	1.031.026.154.667	1.061.977.254.667	945.475.986.750	984.912.075.670	1.011.209.659.848	1.013.848.877.651	17.177.277.016	1,67
BELANJA	1.102.724.680.352	1.102.724.680.352	1.137.547.044.481	952.564.664.280	995.681.089.626	1.015.103.111.461	1.017.742.329.264	84.982.351.088	7,71
SURPLUS/ (DEFISIT)	(71.698.525.685)	(71.698.525.685)	(75.569.789.814)	(7.088.677.530)	(10.769.013.956)	(3.893.451.613)	(3.893.451.613)	(67.805.074.072)	94,57
PEMBIAYAAN	71.698.525.685	71.698.525.685	75.569.789.814	7.088.677.530	10.769.013.956	3.893.451.613	3.893.451.613	67.805.074.072	94,57
SILPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. APBD Awal Tahun 2020

- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020.

2. Pergeseran APBD Tahun 2020

a. Pergeseran pertama

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020.

b. Pergeseran kedua

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2020.

c. Pergeseran ketiga

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 23 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020.

d. Pergeseran keempat

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. APBD Perubahan Tahun 2020

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;
- b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Bahwa dengan adanya tambahan dana transfer dari pusat Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19, maka dilakukanlah pergeseran anggaran yang dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- c. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1. Pendapatan Daerah	990.191.146.482,12	1.019.358.071.248,49

Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.013.848.877.651,00 dengan realisasi sebesar Rp990.191.146.482,12 atau 97,67% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.019.358.071.248,49 maka terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp 29.166.924.766,37 atau 2,86%.

Dengan adanya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia pada Tahun 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah berupaya untuk menetapkan target pendapatan lebih rasional, untuk menghindari deviasi yang cukup tinggi antara penetapan target dan realisasi pendapatan. Sebagai antisipasi meluasnya wabah COVID-19, pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/260/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan adanya penetapan pembatasan sosial berskala besar, berdampak kepada perekonomian masyarakat dan menurunnya pendapatan daerah. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya, terdapat penurunan pendapatan daerah sebesar Rp29.166.924.766,37 atau -2,86%.

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2020 dan 2019 dapat diuraikan antara lain sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli Daerah	84.181.605.330,00	82.877.841.653,12	98,45	78.882.919.152,49
Pendapatan Transfer	893.838.172.321,00	872.426.151.108,00	97,60	906.775.173.371,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	35.829.100.000,00	34.887.153.721,00	97,37	33.699.978.725,00
JUMLAH	1.013.848.877.651,00	990.191.146.482,12	97,67	1.019.358.071.248,49



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selanjutnya anggaran dan realisasi akun-akun Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	82.877.841.653,12	78.882.919.152,49

PAD – terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah – Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp84.181.605.330,00 dan realisasinya sebesar Rp82.877.841.653,12 atau sebesar 98,45%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp78.882.919.152,49, maka terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp3.994.922.500,63 atau 5,06%.

Dalam upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 oleh Perangkat Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/298/KPTS-BUP/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/71/KPTS-BUP/2020 tentang Penetapan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1.a.1. Pendapatan Pajak Daerah	17.751.808.580,45	19.178.964.229,67

Berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014.

Berdasarkan penetapan target penerimaan dibebankan kepada Badan Keuangan Daerah selaku pemungut Pajak Daerah. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp18.714.133.896,00 dan realisasinya sebesar Rp17.751.808.580,45 atau sebesar 94,86%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp19.178.964.229,67, maka terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp 1.427.155.649,22 atau -7,44%. Adapun anggaran dan realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 5.1.2
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Hotel	60.000.000,00	75.169.750,00	125,28%	197.117.450,00
2	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	1.364.845.743,45	136,48%	1.893.206.142,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0%	7.975.000,00
4	Pajak Reklame	175.000.000,00	198.347.740,00	113,34%	166.970.339,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
5	Pajak Penerangan Jalan PLN	11.150.000.000,00	11.338.084.342,00	101,69%	10.808.558.843,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0%	200.000,00
7	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	6.898.303,00	68,98%	20.116.025,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	2.400.000,00
9	PBB Perdesaan dan Perkotaan	4.466.633.896,00	2.162.234.785,00	48,41%	2.534.754.352,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.700.000.000,00	2.368.255.340,00	139,31%	3.147.399.751,00
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00	235.472.577,00	156,98%	400.266.327,67
JUMLAH		18.714.133.896,00	17.751.808.580,45	94,86%	19.178.964.229,67

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp18.714.133.896,00 dan terealisasi sebesar Rp17.751.808.580,45 atau sebesar 94,86%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2019 sebesar Rp19.178.964.229,67, Pajak Daerah mengalami **penurunan** sebesar Rp1.427.155.649,22 atau -7,44%.

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020 berasal dari penerimaan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya dan penerimaan pajak Tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.1.3
Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Piutang Pajak					2020	Jumlah (Rp)
		1996 sd 2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Pajak Hotel						75.169.750,00	75.169.750,00
2	Pajak Restoran						1.364.845.743,45	1.364.845.743,45
3	Pajak Hiburan						0,00	0,00
4	Pajak Reklame						198.347.740,00	198.347.740,00
5	Pajak Penerangan Jalan PLN					1.076.625.717	10.261.458.625,00	11.338.084.342,00
6	Pajak Parkir						0,00	0,00
7	Pajak Air Tanah						6.898.303,00	6.898.303,00
8	Pajak Sarang Burung Walet						2.500.000,00	2.500.000,00
9	PBB Perdesaan dan Perkotaan	222.482	6.954.629	11.124.178	32.294.734	112.363.988	1.999.274.774,00	2.162.234.785,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						2.368.255.340,00	2.368.255.340,00
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						235.472.577,00	235.472.577,00
JUMLAH		222.482	6.954.629	11.124.178	32.294.734	1.188.989.705	16.512.222.852,45	17.751.808.580,45

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 berasal dari penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp16.512.222.852,45 dan piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp1.239.585.728,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020, dari **11** obyek pajak daerah terdapat **tiga** obyek pajak mengalami **kenaikan** penerimaan, **dua** obyek pajak tidak ada target dan penerimaan, dan **enam** obyek pajak mengalami **penurunan** dibandingkan dengan Tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut.

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp75.169.750,00 atau 125,28% dari target ditetapkan. Dibandingkan Tahun 2019, penerimaan pajak hotel Tahun 2020 mengalami **penurunan** penerimaan sebesar Rp121.947.700,00 atau - 61,87%. Dengan adanya edaran Gubernur terkait pembatasan berskala besar yang membatasi mobilisasi keluar dan masuk penduduk di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona, sehingga berimbas pada penurunan tingkat hunian hotel di Dharmasraya.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.364.845.743,45 atau 136,48% dari target ditetapkan. Dibandingkan Tahun 2019, penerimaan pajak restoran mengalami **penurunan** penerimaan sebesar Rp528.360.398,55 atau -27,91%. Pajak Restoran menurun penerimaannya pada Tahun 2020 disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat. Untuk meningkatkan target pajak restoran, pada bulan oktober 2020 diperkenalkan aplikasi e-panda untuk pelaporan pembayaran pajak restoran. Aplikasi ini digunakan oleh Bendahara SKPD, Puskesmas dan Sekolah untuk melaporkan pembayaran pajak restoran atas kegiatan pembelian makan minum pada instansi masing-masing yang berasal dari rumah makan/ restoran. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan kedepannya pelaporan pajak restoran bisa lebih akurat dan konsisten.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan Tahun 2020 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi karena selama Tahun 2020 tidak dilakukan kegiatan hiburan yang mengumpulkan orang banyak. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi covid 19 mengakibatkan tidak adanya kegiatan hiburan yang menjadi event tahunan di Kabupaten Dharmasraya seperti Selaju Sampan Pulai, event motor cross dan lainnya.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00 terealisasi sebesar Rp198.347.740,00 atau 113,34% mengalami **kenaikan** penerimaan dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp31.377.401,00 atau sebesar 18,79%. Pajak reklame meningkat penerimaannya karena adanya konsistensi penagihan kepada wajib pajak yang memasang reklame disepanjang jalan utama Kabupaten Dharmasraya.

e) Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 11.150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 11.338.084.342,00 atau 101,69% mengalami **kenaikan** penerimaan dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp 529.525.499,00 atau 4,9%. Selama Tahun 2020 terdapat penerimaan Piutang Tahun 2019 sebesar Rp1.076.625.717,00 yang terdiri dari piutang PPJ PLN sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp971.279.892,00 dan piutang PPJ Non PLN sebesar Rp105.345.825,00. Kenaikan penerimaan PPJ disebabkan karena adanya pemasangan listrik baru dan pelanggan baru.

f) Pajak Parkir

Pajak Parkir Tahun 2020 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi. ini disebabkan karena kebijakan yang tidak memperbolehkan lagi pemungutan pajak parkir di tepi jalan umum. Pemungutan pajak parkir yang biasa dilaksanakan kepada acara hiburan masyarakat juga tidak ada akibat dampak covid 19 yang membatasi atau pelarangan kerumunan di masyarakat.

g) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.898.303,00 atau 68,98%. Penerimaan pajak air tanah Tahun 2020 mengalami **penurunan** penerimaan disebabkan adanya wabah covid-19 menurunnya produksi air minum kemasan yang berdampak pada penurunan nilai pajak air tanah.

h) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00 terealisasi sebesar Rp2.500.000,00 atau 100% mengalami **kenaikan** penerimaan dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp2.400.000,00 atau 4,7%.

i) PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp2.162.234.785,00 atau mengalami **penurunan** penerimaan dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp372.519.567,00 atau -14,7%. Penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 sebesar Rp2.162.234.785,00 terdiri dari penerimaan **Pokok Piutang** sebesar Rp2.146.253.174,00 dan penerimaan **Denda Piutang** PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp15.981.611,00.

Rincian penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 terdiri dari.

Tahun	PBB-P2		Penerimaan PBB-P2
	Pokok	Denda	
2020	1.999.252.949,00	21.825,00	1.999.274.774,00
2019	101.847.415,00	10.516.573,00	112.363.988,00
2018	28.488.244,00	3.806.490,00	32.294.734,00
2017	10.255.846,00	868.332,00	11.124.178,00
2016	6.258.394,00	696.235,00	6.954.629,00
2015	150.326,00	72.156,00	222.482,00
1996-2014	-	-	-
Jumlah	2.146.253.174,00	15.981.611,00	2.162.234.785,00

j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.368.255.340,00 atau 139,31%. Mengalami **penurunan** penerimaan dibandingkan Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp779.144.411,00 atau -24,76%. Menurunnya penerimaan BPHTB selama Tahun 2020 disebabkan berkurangnya pengurusan bea balik nama sertifikat.

k) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp235.472.577,00 atau 156,98%. Mengalami **penurunan** penerimaan dibanding Tahun 2019 sebesar Rp 164.793.750,67 atau -41,17%. Sementara itu, masih rendahnya capaian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target yang ditetapkan karena banyaknya pelaku usaha mineral bukan logam yang tidak memiliki izin atau izinnya tidak berlaku lagi serta kurangnya pajak mineral logam dan batuan yang bersumber dari kegiatan pembangunan fisik yang memanfaatkan mineral bukan logam dan batuan pada perangkat daerah di Kabupaten Dharmasraya.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1.a.2. Pendapatan Retribusi Daerah	1.861.712.711,00	3.054.849.682,00

Merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp2.438.472.400,00 dengan realisasi sebesar Rp1.861.712.711,00 atau 76,35%. Retribusi Daerah Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.193.136.971,00 atau sebesar -39,06%.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah yang dipungut serta yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.4
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
A	Retribusi Jasa Umum	1.013.064.000,00	913.526.000,00	90,17%	1.591.110.000,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	175.000.000,00	139.345.000,00	79,63%	646.306.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	65.000.000,00	107.550.000,00	165,46%	79.310.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	109.804.000,00	79.242.000,00	72,17%	87.889.000,00
4	Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor	310.000.000,00	324.109.000,00	104,55%	297.030.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	38.260.000,00	31.955.000,00	83,52%	0,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	315.000.000,00	231.325.000,00	73,44%	480.575.000,00
B	Retribusi Jasa Usaha	1.244.808.400,00	767.881.711,00	61,69%	1.096.086.567,00
1	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1.083.808.400,00	592.180.516,00	54,64%	922.312.267,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	32.500.000,00	33.829.195,00	104,09%	24.700.200,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	3.500.000,00	4.160.000,00	118,86%	0,00
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	95.000.000,00	104.712.000,00	110,22%	118.774.100,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	30.000.000,00	33.000.000,00	110,00%	30.300.000,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	180.600.000,00	180.305.000,00	99,84%	367.653.115,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	180.600.000,00	180.305.000,00	99,84%	367.653.115,00
JUMLAH		2.438.472.400,00	1.861.712.711,00	76,35%	3.054.849.682,00

Penerimaan Retribusi Tahun 2020 sebesar Rp**1.866.612.711,00** berasal dari.

1. Penerimaan Retribusi Tahun 2020 sebesar Rp1.828.721.711,00
2. Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2019 sebesar Rp22.686.000,00
 Terdiri atas Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Kumperdag sebesar Rp16.455.000,00 dan Piutang Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Dinas Pendidikan Rp6.231.000,00.
3. Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2018 sebesar Rp9.248.000,00
 Terdiri dari Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Kumperdag Rp3.050.000,00 dan Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Dinas Pendidikan Rp6.198.000,00.
4. Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2017 sebesar Rp5.957.000 berupa Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Dinas Pendidikan.

Berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2020, dari **11** obyek retribusi daerah terdapat **enam** obyek retribusi mengalami **kenaikan** penerimaan dan **lima** obyek retribusi mengalami **penurunan** dibandingkan dengan Tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut.

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dari target yang ditetapkan sebesar Rp175.000.000,00 terealisasi sebesar Rp139.345.000,00 atau sebesar 79,63%. Target retribusi ini di berikan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Lab. Kesda). Pada Penerimaan tahun ini terdapat **penurunan** penerimaan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp506.961.000,00 atau -363,82%. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan status RSUD Sungai Rumbai pada tahun 2019 realisasinya pada Retribusi Pelayanan Kesehatan dan tahun 2020 ditetapkan menjadi Pendapatan BLUD pada Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini diberikan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp65.000.000,00 terealisasi sebesar Rp107.550.000,00 atau sebesar 165,46%. Adanya **kenaikan** penerimaan dibanding tahun sebelumnya sebesar 26,26%. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya area pelayanan persampahan/kebersihan di sektor perumahan.

c) Retribusi Pelayanan Pasar.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar Rp109.804.000,00 kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp101.804.000,00 dan Dinas Pertanian sebesar Rp8.000.000,-. Realisasi dari Dinas Kumperdag sebesar Rp71.642.000 atau sebesar 70,37% dan dari Dinas Pertanian terealisasi sebesar Rp7.600.000,00 atau 95%. Dari total ditargetkan sebesar Rp109.804.000,00 terealisasi sebesar Rp79.242.000,00 atau persentase capaian sebesar Rp72,17% belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan disebabkan karena pelaksanaan pemungutan retribusi masih belum optimal, akan tetapi dibanding tahun sebelumnya terjadi **penurunan** pendapatan sebesar Rp8.647.000,00. Hal ini disebabkan karena dampak covid-19 yang mengakibatkan pelayanan pasar menjadi sepi dan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Nagari menjadi berkurang.

d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dari Target retribusi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp310.000.000,00 terealisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2020 sebesar 104,55% mengalami **kenaikan** dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp27.079.000,00. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah unit kendaraan yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan adanya upaya razia gabungan dengan sidang ditempat pada tahun 2020 terhadap kendaraan bermotor yang harus melakukan KIR. Adapun razia gabungan tersebut melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya (Dinas Perhubungan dan Satpol-PP), Dinas Perhubungan Provinsi, Polres Dharmasraya dan Pengadilan Negeri Dharmasraya.

e) Retribusi Tera/ Tera ulang

Pendapatan Retribusi Tera/ Tera Ulang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Tera/ Tera Ulang.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dari Target retribusi yang diberikan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebesar Rp38.260.000,00 terealisasi Penerimaan Retribusi Retribusi Tera/ Tera Ulang 2020 sebesar Rp31.955.000,00 atau 83,52%

f) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Target di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp30.000.000,00. Persentase capaian penerimaan Retribusi Penyedotan Kakus Tahun 2020 sebesar 110,00%. Terdapat **kenaikan** penerimaan retribusi dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,18% disebabkan karena semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan kakus.

g) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dari Target retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp315.000.000,00, terealisasi capaian target Penerimaan Tahun 2020 sebesar 73,44% mengalami **penurunan** dibandingkan tahun 2019 karena pada tahun tersebut terdapat penerimaan piutang pada tahun-tahun sebelumnya dan belum optimalnya pencapaian penerimaan retribusi karena SKRD yang diterbitkan pada tahun 2020 belum sepenuhnya dilakukan penyetoran oleh pihak vendor.

h) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011.

Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp1.083.808.400,00 dan realisasi sebesar Rp592.180.516,00 terdapat pada 16 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	45.750.000,00	83.475.000,00
2	Dinas Kesehatan	79.680.000,00	40.962.000,00
3	RSUD Sungai Dareh	10.000.000,00	8.730.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	600.000.000,00	202.745.000,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	155.278.400,00	202.366.800,00
6	Dinas Pangan dan Perikanan	150.000.000,00	10.000.000,00
7	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13.980.000,00	15.461.716,00
8	Sekretariat Daerah	10.000.000,00	7.600.000,00
9	Kecamatan Pulau Punjung	6.000.000,00	6.150.000,00
10	Kecamatan Sitiung	1.460.000,00	2.820.000,00
11	Kecamatan Koto Baru	1.500.000,00	3.250.000,00
12	Kecamatan Sungai Rumbai	3.500.000,00	2.430.000,00
13	Kecamatan Sembilan Koto	1.750.000,00	700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Target	Realisasi
14	Kecamatan Timpeh	1.660.000,00	1.700.000,00
15	Kecamatan Koto Besar	2.000.000,00	2.470.000,00
16	Kecamatan Tiumbang	1.250.000,00	1.320.000,00
	Jumlah	1.083.808.400,00	592.180.516,00

Penerimaan Tahun 2020 sebesar 592.180.516,00 terjadi **penurunan** realisasi sebesar Rp330.131.751,00 atau -55,75% dibandingkan tahun lalu disebabkan karena alat berat yang ada di UPT Peralatan dan Kelengkapan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemakaian Alat Berat pada Dinas Pangan dan Perikanan banyak dalam keadaan rusak berat sehingga tidak optimal beroperasi dan pemakaian oleh masyarakat berkurang akibat dari dampak ekonomi covid 19.

i) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Target Retribusi Tempat khusus parkir sebesar Rp32.500.000,00 dengan rincian target pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp2.500.000,00 dan Dinas Perhubungan Rp.30.000.000,00. Terealisasi Penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp33.829.195,00 terjadi **kenaikan** sebesar Rp9.128.995 atau 26,99% dari tahun sebelumnya, karena pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan RSUD Sungai Dareh.

j) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Target retribusi pada Dinas Pertanian sebesar Rp3.500.000,00 Pada Tahun 2020 penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi 118,86%, mengalami **peningkatan** dibandingkan tahun sebelumnya yang tidak ada realisasi sama sekali.

k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Target retribusi Persentase Penjualan Produksi Usaha Daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp95.000.000,00, target retribusi tersebut terdapat pada Dinas Pangan dan Perikanan sebesar Rp50.000.000,00 dan pada Dinas Pertanian sebesar Rp45.000.000,00 penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp104.712.000,00, yaitu sebesar 110,22%. Penerimaan Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 mengalami **penurunan** sebesar Rp14.062.100,00. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya adanya perbaikan kolam, kekurangan debit air kolam akibat terganggunya jaringan irigasi karena perbaikan sehingga banyak benih dan induk ikan mati.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

l) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Penerimaan Retribusi IMB tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp187.348.115,00 atau -103,91%, dimana Target Retribusi ini pada tahun 2020 sebesar Rp180.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	150.000.000	154.548.000
2	Kecamatan Pulau Punjung	7.000.000	7.468.750
3	Kecamatan Sitiung	5.000.000	5.591.250
4	Kecamatan Koto Baru	2.100.000	2.757.000
5	Kecamatan Sungai Rumbai	5.000.000	2.000.000
6	Kecamatan Sembilan Koto	750.000	-
7	Kecamatan Timpeh	4.500.000	2.662.500
8	Kecamatan Koto Salak	1.000.000	1.187.500
9	Kecamatan Asam Jujuhan	1.000.000	750.000
10	Kecamatan Koto Besar	1.500.000	750.000
11	Kecamatan Padang Laweh	1.500.000	2.590.000
12	Kecamatan Tiumang	1.250.000	-
Jumlah		180.600.000	180.305.000

Hasil capaian dari penerimaan Retribusi IMB sebesar Rp180.305.000,00 atau sebesar 99,84% Sementara itu, tidak tercapainya realisasi sesuai target yang ditetapkan karena pemungutan belum dilakukan secara optimal.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1.a.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.063.752.034,00	3.590.314.080,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 5.1.5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.063.752.034,00	4.063.752.034,00	100%	3.590.314.080,00

Pada akhir Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memiliki investasi permanen penyertaan modal sebesar Rp27.452.000.000,00 terdiri dari penyertaan modal pada PT BPD Sumatera Barat/Bank Nagari sebesar Rp25.852.000.000,00, pada PT. Balairung Citra Jaya sebesar Rp1.500.000.000,00 dan pada PT. BPR Pulau Punjung sebesar Rp100.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dari penyertaan modal tersebut, penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 ditargetkan penerimaan sebesar Rp4.063.752.034,00 dengan realisasi sebesar Rp4.063.752.034,00 atau 100% yang berasal dari penerimaan deviden Bank Nagari Tahun 2019 sebesar Rp4.043.805.181,00, dan penerimaan deviden PT BPR Pulau Punjung sebesar Rp19.946.853,00 terdiri dari piutang Tahun 2019 sebesar Rp9.473.740,00 dan piutang Tahun 2016 s.d. 2018 sebesar Rp10.473.113,00. Jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar Rp3.590.314.080,00 penerimaan untuk Tahun 2020 mengalami **kenaikan** sebesar Rp473.437.954,00 atau 13,19%.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1.a.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59.200.568.327,67	53.058.791.160,82

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp58.965.247.000,00 dengan realisasi Rp59.200.568.327,67 atau 100,40%. Terdapat kenaikan pendapatan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp6.141.777.166,85 atau 11,58% dari penerimaan Tahun 2019.

Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 5.1.6
Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan	9.100.000,00	73.050.000,00	802,75%	209.328.000,00
2	Penerimaan Jasa Giro	1.020.000.000,00	1.064.703.252,00	104,38%	1.006.094.689,00
3	Penerimaan Bunga Deposito	600.000.000,00	1.423.926.635,00	237,32%	1.263.006.209,00
4	Pendapatan BLUD	48.892.061.000,00	48.517.856.348,00	99,23%	40.938.653.558,00
5	Dana Kapitasi	7.264.086.000,00	6.956.787.526,00	95,77%	6.964.039.776,00
6	Tuntutan Ganti kerugian Daerah	200.000.000,00	255.291.060,86	127,65%	1.882.499.742,26
7	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	80.000.000,00	122.754.673,81	153,44%	176.613.086,56
8	Pendapatan Dari Pengembalian	200.000.000,00	144.660.032,00	72,33%	0,00
9	Pengelolaan Air Minum	700.000.000,00	641.538.800,00	91,65%	618.556.100,00
	JUMLAH	58.965.247.000,00	59.200.568.327,67	100,40%	53.058.791.160,82

Berdasarkan realisasi penerimaan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2020, dari **sembilan** obyek penerimaan terdapat **lima** obyek penerimaan mengalami **kenaikan** penerimaan dan **empat** obyek penerimaan mengalami **penurunan** dibandingkan dengan Tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp9.100.000,00 terealisasi sebesar Rp73.050.000,00 atau 802,75%. Terdiri dari penerimaan atas Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat pada Mantan Bupati Dharmasraya Periode tahun 2005-2010 sebesar Rp60.050.000,00, penjualan atas sisa bongkaran atap pada Dinas Pendidikan pada tahun 2019 yang disetor ke kas daerah tahun 2020 sebesar Rp600.000,00, penerimaan atas hasil pengelolaan kebun karet milik pemda sebesar Rp7.500.000,00 dan Penjualan Aset Tetap Lainnya atas Kambing yang telah afkir sebanyak 9 ekor pada Dinas Pertanian sebesar Rp4.900.000,00

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2020 mengalami **penurunan** dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp136.278.000,00 atau -65,10%. Disebabkan karena tahun 2020 tidak dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena terkendala adanya wabah COVID-19.

2. Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.020.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.064.703.252,00 atau 104,38%. Terjadi **kenaikan** penerimaan sebesar Rp58.608.563,00 atau 5,83%. Hal ini disebabkan karena perputaran uang keluar digiro SKPD tidak terlalu tinggi karena banyaknya kegiatan yang dibatasi akibat adanya COVID-19, sehingga dana yang mengendap di Kas Daerah memberikan dampak kenaikan penerimaan jasa giro Tahun 2020.

3. Penerimaan Bunga Deposito

Penerimaan bunga deposito berasal dari penempatan deposito selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.423.926.635,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.7
Penerimaan Bunga Deposito Tahun 2020

NO	Nomor Rekening	No Seri Bilyet	Jumlah	Bank Penempatan	Jangka Waktu	Suku bunga	tanggal pembuatan	Tanggal Pencairan	Penerimaan Bunga Deposito
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1403.0301.01040-1	138833	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	23/06/2020	23/07/2020	58.333.333,00
2	1403.0301.01063-3	143802	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	31/08/2020	23/12/2020	216.397.839,00
3	1403.0301.01062-2	143803	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	01/09/2020	21/12/2020	212.634.399,00
4	1403.0301.01065-5	143807	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	07/09/2020	20/11/2020	70.972.220,00
5	1403.0301.01066-6	143808	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	07/09/2020	25/11/2020	75.833.330,00
6	1403.0301.01067-0	143809	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	07/09/2020	18/12/2020	97.479.839,00
7	1403.0301.01068-1	143810	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	07/09/2020	21/12/2020	100.201.613,00
8	0616-01-000505-40-9	371729 6	5.000.000.000	BRI KC Dharmasraya	1 bulan	4,5%	08/09/2020	16/12/2020	117.827.376,00
9	1403.0301.01069-2	143811	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	14/09/2020	11/11/2020	55.510.747,00
10	1403.0301.01070-3	143812	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	14/09/2020	13/11/2020	47.311.837,00
11	1403.0301.01071-4	143813	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	14/09/2020	13/11/2020	57.392.467,00
12	1403.0301.01072-5	143814	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	14/09/2020	17/11/2020	61.250.000,00
13	7102.0401.00875-6	048777	5.000.000.000	Bank Nagari Syariah	1 bulan	58%	25/09/2020	28/12/2020	86.715.948,00
14	1403-0301-01077-3	048777	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	15/10/2020	23/12/2020	65.860.214,00
15	Piutang 2019								100.205.473,00
	JUMLAH		85.000.000.000						1.423.926.635,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Target Penerimaan Bunga Deposito Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 dengan penerimaan sebesar Rp1.423.926.635,00 atau 237,32%. Terdapat **kenaikan** pendapatan dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp160.920.426,00 atau 12,74 % dari penerimaan Tahun 2019 sebesar Rp1.263.006.209,00. Penerimaan Bunga Deposito Tahun 2020 terdiri dari penerimaan tahun 2020 sebesar Rp1.323.721.162,00 dan penerimaan piutang tahun 2019 sebesar Rp100.205.473,00.

Penetapan target Bunga Deposito pada Tahun 2020 diturunkan dari tahun sebelumnya disebabkan situasi pandemi covid-19 diprediksi pemanfaat *idle cash* (kas menganggur) untuk penempatan deposito pada Kas Daerah sangat minim karena dipergunakan untuk optimalisasi belanja. Terlewatnya target penerimaan bunga deposito disebabkan pada bulan September- Desember 2020 adanya *idle kas* dari DAK yang belum direalisasikan untuk pembayaran kegiatan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk investasi deposito jangka pendek 1 bulan.

4. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Kapitasi Puskesmas

Kabupaten Dharmasraya Pada Tahun 2020 memiliki 16 unit Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak pada bidang kesehatan yaitu 2 unit Badan Layanan Umum RSUD Sungai Dareh dan RSUD Sungai Rumbai dan 14 unit Badan Layanan Umum UPT Puskesmas, uraian sejarah singkat mengenai pembentukan BLUD di Kabupaten Dharmasraya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Badan Layanan Umum RSUD Sungai Dareh

BLUD RSUD Sungai Dareh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/460/KPTS-BUP/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penetapan RSUD Sungai Dareh untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh di Kabupaten Dharmasraya. Pelaksanaan unit BLUD RSUD Sungai Dareh mulai berjalan pada 1 Januari 2015.

2. Badan Layanan Umum UPT Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai

Tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya memiliki UPT Puskesmas Kabupaten Dharmasraya (*holding*) pada Dinas Kesehatan. UPT Puskesmas membawahi 13 Puskesmas sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya.

Adanya penetapan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, telah terjadi Perubahan Struktur Organisasi UPT Puskesmas melalui Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/147/KPTS-BUP/2018 tentang Pencabutan atas Keputusan Dharmasraya Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 18 April 2018.

Pencabutan keputusan tersebut diiringi dengan pembentukan UPT Puskesmas sebanyak 13 Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap dengan uraian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/148/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago
2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/149/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru.
3. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/150/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh
4. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/151/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar
5. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/152/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh
6. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/153/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang
7. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/154/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Gunung Medan
8. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/155/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I.
9. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/156/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II
10. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/157/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh dan Beringin Sakti.
11. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/158/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumbang
12. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/159/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai
13. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/160/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pada akhir Tahun 2019 Kabupaten Dharmasraya telah menambah 2 unit BLUD yaitu UPT RSUD Sungai Rumbai dan UPT Puskesmas Beringin Sakti yang mulai berjalan pada tanggal 2 Januari 2020, dengan dasar penetapan sebagai berikut.

- a. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/462/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/476/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Beringin Sakti sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang tidak membagi BLUD dalam status “Bertahap” atau “Penuh, maka Keputusan Bupati Tahun 2018 tentang penetapan UPT Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Bertahap



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dicabut, digantikan dengan Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan uraian sebagai berikut.

1. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/463/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/464/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
3. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/465/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/466/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/467/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya SK Nomor 188.45/468/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/469/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/470/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/471/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumbang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/472/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/473/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/474/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/475/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pendapatan Jasa Layanan BLUD selama Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp48.892.061.000,00 terealisasi sebesar Rp48.517.856.348,00 atau 99,23%. Mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.579.202.790,00 atau 18,51% dibandingkan penerimaan Tahun 2019 sebesar Rp40.938.653.558,00.

Pendapatan Kapitasi Puskesmas pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp7.264.086.000,00 terealisasi sebesar Rp6.956.787.526,00 atau 95,77% mengalami **penurunan** sebesar Rp7.252.250,00 atau -0,10% dibandingkan Tahun 2019.

Realisasi Pendapatan Kapitasi Puskesmas pada Tahun 2020 sebesar Rp6.956.787.526,00 terdapat pembayaran kapitasi lebih salur oleh BPJS pada Bulan Desember 2020 sebesar Rp9.817.300,00. Pembayaran lebih salur kapitasi Tahun 2020 akan dilakukan pemotongan pada penerimaan kapitasi pada tahun 2021. Rincian lebih salur pendapatan kapitasi puskesmas dapat dilihat pada penjelasan di neraca kewajiban jangka pendek pendapatan diterima dimuka pada laporan keuangan ini.

Data Pendapatan Jasa Layanan BLUD dan Kapitasi Puskesmas dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.8
Pendapatan Jasa Layanan BLUD dan Kapitasi Puskesmas Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
I	Jasa Layanan BLUD	48.892.061.000,00	48.517.856.348,00	99,23%	40.938.653.558,00
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	45.000.000.000,00	45.461.444.814,00	101,03%	37.885.575.392,00
2	BLUD RSUD Sungai Rumbai	800.000.000,00	499.919.454,00	62,49%	0,00
3	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	350.000.000,00	264.479.000,00	75,57%	325.903.000,00
4	BLUD Puskesmas Sungai Limau	240.640.000,00	167.179.000,00	69,47%	213.562.240,00
5	BLUD Puskesmas Sitiung II	104.692.500,00	130.039.000,00	124,21%	103.753.650,00
6	BLUD Puskesmas Padang Laweh	231.000.000,00	136.234.000,00	58,98%	237.797.000,00
7	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	273.230.000,00	159.494.000,00	58,37%	146.153.000,00
8	BLUD Puskesmas Silago	245.570.400,00	193.781.500,00	78,91%	244.407.000,00
9	BLUD Puskesmas Gunung Medan	121.000.000,00	64.097.000,00	52,97%	91.234.020,00
10	BLUD Puskesmas Sitiung I	495.955.100,00	405.088.600,00	81,68%	494.791.000,00
11	BLUD Puskesmas Koto Baru	478.178.000,00	565.120.000,00	118,18%	694.485.256,00
12	BLUD Puskesmas Timpeh	196.380.000,00	179.044.000,00	91,17%	232.276.500,00
13	BLUD Puskesmas Sialang	75.500.000,00	37.444.000,00	49,59%	44.071.000,00
14	BLUD Puskesmas Tiumang	96.335.000,00	78.984.600,00	81,99%	106.821.000,00
15	BLUD Puskesmas Koto Besar	140.080.000,00	137.466.380,00	98,13%	117.823.500,00
16	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	43.500.000,00	38.041.000,00	87,45%	0,00
II	Kapitasi Puskesmas	7.264.086.000,00	6.956.787.526,00	95,77%	6.964.039.776,00
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	535.947.000,00	555.029.850,00	103,56%	595.736.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	359.100.000,00	272.472.000,00	75,88%	311.240.032,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung II	592.828.000,00	625.476.600,00	105,51%	584.518.500,00
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh	216.000.000,00	218.613.000,00	101,21%	200.848.600,00
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	1.176.502.000,00	1.119.651.000,00	95,17%	1.113.037.650,00
6	BLUD Puskesmas Silago	517.457.000,00	458.918.450,00	88,69%	491.083.669,00
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan	521.000.000,00	474.994.200,00	91,17%	488.410.950,00
8	BLUD Puskesmas Sitiung I	549.402.200,00	624.805.500,00	113,72%	580.019.700,00
9	BLUD Puskesmas Koto Baru	957.267.000,00	884.551.200,00	92,40%	846.074.550,00
10	BLUD Puskesmas Timpeh	380.860.000,00	346.994.523,00	91,11%	496.634.075,00
11	BLUD Puskesmas Sialang	346.909.000,00	363.629.700,00	104,82%	348.050.450,00
12	BLUD Puskesmas Tiumang	262.193.800,00	260.792.000,00	99,47%	251.188.850,00
13	BLUD Puskesmas Koto Besar	673.395.000,00	597.443.700,00	88,72%	657.196.500,00
14	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	175.225.000,00	153.415.803,00	87,55%	0,00
JUMLAH		56.156.147.000,00	55.474.643.874,00	98,79%	47.902.693.334,00

Uraian realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas dapat dijelaskan di **Lampiran 1** pada Laporan Keuangan ini.

5. Penerimaan Kerugian Daerah

Penerimaan Kerugian Daerah berasal dari pengembalian ke Kas Daerah atas temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang telah dilakukan penetapan keputusan kerugian daerahnya berupa Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM) maupun Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Penerimaan Kerugian Daerah yang masuk ke kasda Tahun 2020 adalah sebesar Rp255.291.060,86. Terdiri dari penerimaan TGR yang tercatat pada Aset Lainnya sebesar Rp8.861.288,44 dan penerimaan kerugian daerah sebesar Rp246.429.772,42 atas penetapan SKP2KS Tahun 2020 sebesar Rp174.389.530,00, dan piutang TGR tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp72.040.242,42.

Dalam usaha penyelesaian kerugian daerah pada Tahun 2020, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan Sidang Perdana pada tanggal 19 November 2020 atas Sidang pembayaran uang oleh pemegang kas yang berasal dari dana pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura Kab. Dharmasraya Tahun 2006 digunakan untuk biaya pendidikan Program S2 Pegawai Negeri Sipil an. Ir. Zulkarnaini dengan Hasil Putusan Mewajibkan Tertuntut untuk menyetor ke kas daerah sebesar Rp3.725.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dibayar lunas pada saat pengajuan usulan pensiun untuk memperoleh rekomendasi Inspektorat sebesar Rp3.725.000,00 paling lambat bulan Agustus Tahun 2021.

Pejabat Penyelesaian Kerugian daerah (PPKD) telah menetapkan SKP2KS selama Tahun 2020 sebanyak 16 SKP2KS, terdiri atas temuan dari tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020. Penerbitan Surat Keterangan Pelunasan (SKL) atas pembebanan kerugian daerah pada Tahun 2020 sebanyak 92 SKL.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian lebih lanjut terkait penerimaan kerugian daerah dan piutang TGR per 31 Desember 2020 dapat dilihat di **Lampiran 15** pada Laporan Keuangan ini.

6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penerimaan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan berupa penerimaan dari penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Penerimaan denda keterlambatan Tahun 2020 sebesar Rp122.754.673,81 atau 153,44%. Mengalami **penurunan** sebesar Rp 53.858.412,75 dibandingkan penerimaan tahun 2019 sebesar Rp176.613.086,56 atau -30,5%. Berkurangnya penerimaan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan berkurangnya kegiatan pengadaan barang jasa karena adanya *refocusing* anggaran tahun 2020 akibat dampak COVID-19.

7. Pendapatan Dari Pengembalian

Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian terdiri dari Pendapatan dari Pengembalian LHP dan Pendapatan dari Pengembalian Belanja. Pendapatan dari Pengembalian LHP yaitu Pengembalian Temuan pada saat NHP/LHP APIP yang tidak tercantum dalam kerugian daerah karena penyetorannya pada saat NHP atau LHP terbit sehingga tidak ditetapkan dalam Buku Pemantauan Kerugian Daerah dari BPK RI sedangkan Pendapatan dari Pengembalian Belanja berupa pengembalian belanja pada tahun berikutnya atas belanja pegawai.

Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp144.660.032,00 atau 72,33%. Penerimaannya berasal dari Pendapatan dari Pengembalian LHP sebesar Rp70.206.736,00 dan Pendapatan dari Pengembalian Belanja sebesar Rp74.453.296,00.

8. Pengelolaan Air Minum

Pengelolaan Air Minum berada pada Unit Pelaksana Teknis Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Anggaran penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp641.538.800,00 atau 91,65%. Terdiri dari penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp546.894.500,00 dan penerimaan piutang sebesar Rp94.644.300 terdiri dari Tahun 2019 sebesar Rp89.388.300,00, Tahun 2018 sebesar Rp4.651.400,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp604.600,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1.b. Pendapatan Transfer	872.426.151.108,00	906.775.173.371,00

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diperoleh suatu entitas pelaporan dari entitas pelaporan lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Pendapatan transfer dianggarkan Rp893.838.172.321,00 dengan realisasi Rp872.426.151.108,00 atau sebesar 97,60%. Penganggaran Pendapatan Transfer dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp906.775.173.371,00, Pendapatan Transfer Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp34.349.022.263,00 atau 3,79% disebabkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dilakukan penyesuaian penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Rincian Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 2** pada Laporan Keuangan ini.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Transfer dapat diuraikan sebagai berikut.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1.b.1.. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	731.498.444.225,00	761.630.742.880,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp750.547.329.009,00 dengan realisasi sebesar Rp731.498.444.225,00 atau 97,46%.

Tabel 5.1.9
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bagi Hasil Pajak	21.176.221.585,00	12.973.433.646,00	61,26	13.711.561.010,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.352.576.621,00	2.174.079.602,00	64,85	2.116.617.541,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	482.461.174.000,00	478.355.774.000,00	99,15	524.888.502.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	243.557.356.803,00	237.995.156.977,00	97,72	220.914.062.329,00
JUMLAH		750.547.329.009,00	731.498.444.225,00	97,46	761.630.742.880,00

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, Menteri Keuangan dapat menyalurkan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan perkembangan penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1.b.1.a Bagi Hasil Pajak	12.973.433.646,00	13.711.561.010,00

Pada Tahun Anggaran 2020 penerimaan Bagi Hasil Pajak dianggarkan Rp21.176.221.585,00 dengan realisasi sebesar Rp12.973.433.646,00 atau sebesar 61,26%. Penerimaan Bagi Hasil Pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.10
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
A	Dana Bagi Hasil Pajak				
1	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	7.962.274.783,00	6.823.371.615,00	85,70	3.093.468.410,00
a	DBH PPh Pasal 21	7.582.992.584,00	6.403.344.495,00	84,44	2.979.605.400,00
b	DBH PPh Pasal 25/29 OP	379.282.199,00	420.027.120,00	110,74	113.863.010,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	13.127.303.319,00	6.070.340.967,00	46,24	10.407.879.988,00
a	DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	8.965.362.106,00	3.246.940.987,00	36,22	6.944.960.031,00
b	DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	351.390.596,00	111.908.046,00	31,85	460.389.557,00
c	DBH PBB Bagi Rata	3.810.550.617,00	2.711.491.934,00	71,16	3.002.530.400,00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	86.643.483,00	79.721.064,00	92,01	210.212.612,00
a	DBH Cukai untuk Prov/Kab/Kota	86.643.483,00	79.721.064,00	92,01	210.212.612,00
JUMLAH		21.176.221.585,00	12.973.433.646,00	61,26	13.711.561.010,00

Penetapan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan terkait lebih salur dan kurang salur yang masuk ke Kas Daerah Tahun 2020 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020. Berdasarkan PMK tersebut Kabupaten Dharmasraya menganggarkan Dana Bagi Hasil Pajak Pusat sebesar Rp21.176.221.585,00 dan terealisasi sebesar Rp12.973.433.646,00 atau 61,26%. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tidak terealisasi seluruhnya pada Tahun 2020 disebabkan karena mempertimbangkan kemampuan keuangan negara yang tidak memungkinkan untuk menyalurkan secara keseluruhan Dana Bagi Hasil yang merupakan bagi hasil Pemerintah Pusat yang diterima Pemda pada Tahun 2020.

Penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020. Berdasarkan data dari Simtrada, kurang bayar Tahun 2019 yang disalurkan Tahun 2020 terdiri dari PPh Pasal 21 sebesar Rp2.269.557.653,00, PPh Pasal 25/29 WPOPND Rp210.400.199,00, PBB BD Perkebunan Rp223.428.527,00. Uraian terkait Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020 berdasarkan PMK 113/2020 dan penyaluran berdasarkan KMK 22/2020 dapat dirinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.10.a
Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020

N o	Uraian	Tahun 2020				
		Kurang Bayar	Lebih Bayar	Potongan	Diterima tahun 2020	tgl masuk kasda
	Dana Bagi Hasil Pajak					
1	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan					
	PPh Pasal 21 Tahun 2019	2.269.557.653			2.269.557.653,00	8/10/2020
	PPh Pasal 25/29 Tahun 2019	210.400.199			210.400.199,00	8/10/2020
	PPh Pasal 21 Tahun 2018		4.435.069			
2	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan					
	PBB Bagi Rata Tahun 2019	1.153.653.617				
	PBB Perkebunan Tahun 2019	4.579.912.935		204.276.607	223.428.527,00	8/10/2020
	PBB Perhutanan Tahun 2019	719.743.568		67.214.819	-	
	PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi TA. 2019	20.247.880		1.890.892	-	
	PBB Pertambangan Non Minyak Bumi dan Gas Bumi TA. 2019		2.565.137			
	PBB Sektor lainnya TA. 2019	94.810.172				
	PBB Biaya Pemungutan Perkebunan TA. 2019	190.829.889				
	PBB Biaya Pemungutan Perhutanan TA 2019	19.992.977				
	PBB Biaya Pemungutan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2019	562.130				
	PBB Biaya Pemungutan Sektor lainnya TA 2019	2.633.705				
	PBB Perkebunan Tahun 2018		2.459.330.237			
	PBB Pertambangan Non Minyak Bumi dan Gas Bumi TA. 2018		135.644.872			
	PBB Biaya Pemungutan Perkebunan TA. 2018		102.472.094			
	PBB Biaya Pemungutan Pertambangan Non Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2018		3.767.913			
3	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau					
	Kurang Bayar Tahun 2019	7.773.483				
	Jumlah	9.270.118.208	2.708.215.322	273.382.318	2.703.386.379	132.336

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1.b.1.b Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.174.079.602,00	2.116.617.541,00

Pada Tahun Anggaran 2020 penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp3.352.576.621,00 dengan realisasi sebesar Rp2.174.079.602,00 atau 64,85%. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 57.462.061,00 atau 2,71% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp2.116.617.541,00. Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.11
Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
B	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam				
a	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi	14.526.000,00	13.494.000,00	92,90	-
b	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	846.182.404,00	783.746.950,00	92,62	1.327.272.981,00
c	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	508.820.256,00	392.434.650,00	77,13	50.620.360,00
d	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	335.386.811,00	196.127.713,00	58,48	148.568.400,00
e	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.647.661.150,00	788.276.289,00	47,84	590.155.800,00
	JUMLAH	3.352.576.621,00	2.174.079.602,00	64,85	2.116.617.541,00

Penerimaan bruto Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada penyaluran transfer ke daerah dan dana Tahun 2020 dari data Simtrada Kementerian Keuangan sebesar Rp2.191.201.136,00 pemotongan sebesar Rp17.121.534,00 dengan penerimaan netto sebesar Rp2.174.079.602,00. Pemotongan terdapat pada DBH SDA Minerba - Iuran Tetap sebesar Rp16.833.723,00 dan DBH SDA Kehutanan-PSDH sebesar Rp287.811,00, dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1.11.a
Kurang Bayar dan Lebih Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2020			
		Kurang Bayar	Lebih Bayar	Potongan	Diterima tahun 2020
	Dana Bagi Hasil SDA	256.934.517	196.752.099	17.121.534	-
1	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan				
	DBH Tahun 2017	287.811		287.811	-
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara				
	Mineral dan Batubara Landrent Tahun 2019	16.833.723		16.833.723	-
	Mineral dan Batubara Royalti Tahun 2019		98.184.464		
	Mineral dan Batubara Landrent Tahun 2018		7.285.855		
3	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi				
	Panas Bumi Iuran Tetap Tahun 2019	10.512.833			
	Panas Bumi Iuran Tetap Tahun 2018		722.577		
4	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan				
	Perikanan Tahun 2019	229.300.150			
5	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan				
	PSDH Kehutanan Tahun 2019		90.559.203		
	Total	256.934.517	196.752.099	17.121.534	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada Tahun 2019, Kabupaten Dharmasraya mencatat Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.072.369.696,00. Berdasarkan dari data Simtrada Kementerian Keuangan, piutang diterima pada Tahun 2020 sebesar Rp1.736.944.395,00 dan sisa piutang yang tidak diterima di kas daerah dilakukan eliminasi penerimaannya sebesar Rp1.335.425.301,00. Eliminasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020 yang telah mencabut PMK Nomor 20/PMK. 07/2020 dan PMK Nomor 36/PMK.07/2020.

Tabel 5.1.11.b

Penerimaan Kurang Salur Dana Bagi Hasil Tahun 2019 pada Tahun 2020

No	Uraian	Piutang Tahun 2019		Tahun 2020	
		Kurang Bayar	Dasar	Penerimaan	Tanggal
1	PPH 21 dan PPH 25/29 Tahun 2018		PMK 20/2020		
	- PPh 25/29	12.413.544,00		12.413.544,00	27/07/20
2	Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018		PMK 20/2020		
	- Bagi Rata	585.974.334,00		585.974.334,00	27/07/20
	- Kehutanan	96.070.780,00		96.070.780,00	27/07/20
	- Minyak Bumi dan Gas Bumi	4.277.128,00		4.277.128,00	27/07/20
	- Sektor Lainnya	37.346.498,00		37.346.498,00	27/07/20
	- Kehutanan	2.668.633,00		2.668.633,00	27/07/20
	- Minyak Bumi dan Gas Bumi	118.810,00		118.810,00	27/07/20
	- Sektor Lainnya	1.037.403,00		1.037.403,00	27/07/20
3	DBH CHT tahun 2018	7.190.444,00	PMK 20/2020	7.190.444,00	27/07/20
4	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2018		PMK 20/2020		
	- PSDH	19.664.913,00		19.664.913,00	27/07/20
5	DBH Sumber Daya Alam Perikanan Tahun 2018	3.677.289,00	PMK 20/2020	3.677.289,00	27/07/20
6	DBH TA.2019 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 PPH 21 dan PPH 25		PMK 36/2020		
	- PPH 21	872.850.442,00		872.850.442,00	28/07/20
	- PPH 25/29	93.654.177,00		93.654.177,00	28/07/20
7	DBH TA.2019 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 Pajak Bumi dan Bangunan		PMK 36/2020		
	- Bagi Rata	196.640.935,00			
	- Perkebunan	509.950.371,00			
	- Kehutanan	75.172.377,00			
	- Minyak Bumi dan Gas Bumi	128.558.781,00			
	- Non Minyak Bumi dan Gas Bumi lainnya	17.708.212,00			
	- Sektor Lainnya	23.555.748,00			
	- Perkebunan	21.248.024,00			
	- Kehutanan	2.088.172,00			



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Piutang Tahun 2019		Tahun 2020	
		Kurang Bayar	Dasar	Penerimaan	Tanggal
	- Minyak Bumi dan Gas Bumi	3.570.922,00			
	- Non Minyak Bumi dan Gas Bumi lainnya	491.973,00			
	- Sektor Lainnya	654.371,00			
11	DBH TA.2019 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 Sumber Daya Alam Kehutanan		PMK 36/2020		
	- PSDH	173.329.556,00			
12	DBH TA.2019 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara		PMK 36/2020		
	- Royalti	6.571.539,00			
14	DBH TA.2019 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 Sumber Daya Alam Panas Bumi		PMK 36/2020		
	- Iuran Tetap	5.256.417,00			
15	DBH TA.2019 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 Sumber Daya Perikanan	170.627.903,00	PMK 36/2020		
	Total	3.072.369.696,00		1.736.944.395,00	

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1.b.1.c. Dana Alokasi Umum	478.355.774.000,00	524.888.502.000,00

Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 sebelum pandemi COVID-19 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp535.658.048.000,00. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang membahayakan stabilitas perekonomian dan sistem keuangan nasional, dilakukanlah penyesuaian kembali anggaran belanja negara, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, sehingga DAU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 dianggarkan menjadi sebesar Rp482.461.174.000,00. Terdiri dari DAU Formula sebesar Rp478.355.774.000,00 dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebesar Rp4.105.400.000,00. Penerimaan DAU yang terealisasi ke kas daerah hanya DAU Formula sebesar Rp478.355.774.000,00, sedangkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebesar Rp4.105.400.000,00 tidak terealisasi karena pada Tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya belum melakukan pengangkatan pegawai PPPK.

Penerimaan DAU Tahun 2020 sebesar Rp478.355.774.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp46.532.728.000,00 atau -8,87% dibandingkan penerimaan DAU Tahun 2019 sebesar Rp524.888.502.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1.b.1.d Dana Alokasi Khusus	237.995.156.977,00	220.914.062.329,00

Pada Tahun Anggaran 2020 penerimaan Dana Alokasi Khusus direncanakan Rp243.557.356.803,00 dan terealisasi Rp237.995.156.977,00 atau sebesar 97,72%. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan Rp17.081.094.648,00 atau 7,73% dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 sebesar Rp220.914.062.329,00.

Tabel 5.1.12
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Dana Alokasi Khusus Reguler	138.861.296.000,00	135.487.930.046,00	97,57%	130.475.189.776,00
2	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan	13.905.000.000,00	13.453.783.106,00	96,76%	10.204.511.039,00
3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	90.791.060.803,00	89.053.443.825,00	98,09%	80.234.361.514,00
JUMLAH		243.557.356.803,00	237.995.156.977,00	97,72%	220.914.062.329,00

1) DAK Fisik Reguler

Penerimaan DAK Fisik Reguler Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.13
Realisasi DAK Fisik Reguler Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	DAK Bidang Pendidikan SD	30.962.115.000,00	29.480.649.704,00	95,22	19.093.494.238,00
2	DAK Bidang Pendidikan SMP	11.144.536.000,00	10.987.097.819,00	98,59	13.952.165.676,00
3	DAK Bidang Pendidikan SKB	692.354.000,00	690.312.560,00	99,71	1.970.326.143,00
4	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Dasar	16.525.556.000,00	15.965.533.278,00	96,61	3.151.659.235,00
5	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Rujukan	46.486.783.000,00	45.733.309.968,00	98,38	28.923.624.536,00
6	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	1.517.827.000,00	1.464.565.475,00	96,49	2.027.848.479,00
7	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Keluarga Berencana	1.174.000.000,00	862.284.300,00	73,45	1.000.487.000,00
8	DAK Bidang Jalan	27.163.876.000,00	27.139.079.998,00	99,91	25.583.317.000,00
9	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.734.215.000,00	1.734.215.000,00	100,00	-
10	DAK Bidang Sosial	98.289.000,00	98.289.000,00	100,00	-
11	DAK Bidang PAUD	1.361.745.000,00	1.332.592.944,00	97,86	-
12	DAK Bidang Sanitasi	-	-	-	1.701.132.000,00
13	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	-	-	-	27.656.459.576,00
14	DAK Bidang Pertanian	-	-	-	2.675.321.383,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
15	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	1.250.931.100,00
16	DAK Bidang Pariwisata	-	-	-	1.488.423.410,00
JUMLAH		138.861.296.000,00	135.487.930.046,00	97,57	130.475.189.776,00

Penerimaan DAK Fisik Reguler Tahun 2020 tidak terealisasi 100% disebabkan pencairan dana berdasarkan nilai kontrak kegiatan.

2) DAK Fisik Penugasan

Penerimaan DAK Fisik Penugasan Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.14
Realisasi DAK Fisik Penugasan Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bidang Kesehatan dan KB - Pengendalian Penyakit	1.811.844.000,00	1.688.405.477,00	93,19	-
2	Bidang Air Minum	705.488.000,00	705.488.000,00	100,00	3.043.598.000,00
3	Bidang Irigasi	1.250.000.000,00	1.055.306.800,00	84,42	2.396.711.974,00
4	Bidang Sanitasi	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	100,00	1.800.000.000,00
5	Bidang Pasar	3.284.589.000,00	3.284.588.922,00	100,00	2.651.385.312,00
6	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.039.814.000,00	1.035.732.655,00	99,61	-
7	DAK Bidang Pariwisata	2.153.867.000,00	2.024.964.353,00	94,02	-
8	DAK Bidang Lingkungan Hidup	93.556.000,00	93.556.000,00	100,00	
9	DAK Bidang Pertanian	2.185.843.000,00	2.185.842.499,00	100,00	
10	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penguatan Intervensi Stunting	59.999.000,00	59.898.400,00	99,83	
11	Bidang Kesehatan dan KB - Penurunan Stunting	-	-	-	312.815.753,00
JUMLAH		13.905.000.000,00	13.453.783.106,00	96,76	10.204.511.039,00

3) DAK Non Fisik

Penerimaan DAK Non Fisik Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.15
Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) - Pendidikan Anak Usia Dini					
1	BOP PAUD	4.585.800.000,00	4.513.800.000,00	98,43%	4.553.400.000,00
2	BOP Pendidikan Kesetaraan	899.500.000,00	582.624.800,00	64,77%	1.242.100.000,00
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus					
3	Tunjangan Profesi Guru	56.216.957.000,00	56.216.957.000,00	100,00%	53.280.551.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
4	Tunjangan Khusus Guru	5.707.230.000,00	5.707.230.000,00	100,00%	5.542.733.600,00
	Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil				
5	Tambahan Penghasilan Guru	96.250.000,00	225.900.000,00	234,70%	508.650.000,00
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana				
6	BOK dan KB - Bantuan Operasional Kesehatan	14.499.863.000,00	13.100.166.008,00	90,35%	11.234.151.195,00
7	BOK Tambahan	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00%	0,00
8	BOK Gelombang V	2.639.217.803,00	2.639.217.803,00	100,00%	0,00
9	BOK Keluarga Berencana	2.604.004.000,00	2.556.288.540,00	98,17%	2.148.409.993,00
10	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Akreditasi LABKESDA	0,00	0,00	0,00%	296.816.108,00
	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan				
11	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	874.881.000,00	862.653.506,00	98,60%	1.069.548.818,00
12	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00	398.606.168,00	95,51%	358.000.000,00
	JUMLAH	90.791.060.803,00	89.053.443.825,00	98,09%	80.234.361.514,00

Penerimaan bruto DAK Non Fisik Tahun 2020 pada penyaluran transfer ke daerah dan dana Tahun 2020 dari Kementerian Keuangan sebesar Rp90.920.710.803,00 terdapat pemotongan sebesar Rp1.867.266.978,00 dengan penerimaan bersih sebesar Rp89.053.443.825,00. Pemotongan dilakukan berdasarkan sisa DAK yang dialokasikan Tahun 2019 tidak terealisasi dan dikompensasikan terhadap penyaluran DAK Non Fisik Tahun 2020. Pemotongan terdapat pada :

1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp 1.399.696.992,00
2. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp47.715.460,00
3. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp12.227.494,00
4. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebesar Rp18.751.832,00
5. BOP PAUD sebesar Rp72.000.000,00
6. BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp 316.875.200,00

V.A.1.b.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Dana Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya pada Tahun 2020 terdiri dari.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1.b.2.a. Dana Penyesuaian	99.826.676.000,00	97.546.293.000,00

Pada Tahun Anggaran 2020 penerimaan Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp99.826.676.000,00 terealisasi 100%. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan Dana Penyesuaian Tahun 2019 sebesar Rp2.280.383.000,00 atau 2,34%. Penerimaan Dana Penyesuaian dapat diuraikan sebagai berikut.

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.16
Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
A.	Dana Penyesuaian				
1	Dana Desa	53.272.650.000,00	53.272.650.000,00	100%	51.593.117.000,00
2	Dana Insentif Daerah	46.554.026.000,00	46.554.026.000,00	100%	45.953.176.000,00
a	Dana Insentif Daerah-Kemandirian	10.389.878.000,00	10.389.878.000,00	100%	12.855.836.000,00
b	Dana Insentif Daerah-Kategori Kualitas Belanja Modal Pendidikan	6.845.138.000,00	6.845.138.000,00	100%	12.437.096.000,00
c	Dana Insentif Daerah- Mandatory Spending	250.000.000,00	250.000.000,00	100%	10.495.261.000,00
d	Kinerja Pemerintah Daerah	29.069.010.000,00	29.069.010.000,00	100%	
e	Dana Insentif Daerah-Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0%	10.164.983.000,00
JUMLAH		99.826.676.000,00	99.826.676.000,00	100%	97.546.293.000,00

Penerimaan Transfer Dana Desa pada Tahun 2020 tidak melalui RKUD, tetapi ditransfer dari KPPN ke Rekening Kas Desa. Sumber pencatatan Dana Desa di Laporan Realisasi Anggaran adalah Data dari Simtrada Kementerian Keuangan dan Laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

V.A.1.b.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2020 terdiri dari.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1.b.3.a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41.101.030.883,00	47.598.137.491,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp43.464.167.312,00 dengan realisasi sebesar Rp41.101.030.883,00 atau sebesar 94,56%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2019 sebesar Rp47.598.137.491,00 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp6.497.106.608,00 atau sebesar -13,65%.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2020 sebesar Rp41.101.030.883,00 berasal dari penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp 37.711.247.547,00 dan penerimaan piutang kurang salur Tahun 2019 sebesar Rp 3.389.783.336,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.17
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2020 dan 2019

No	Jenis Bagi Hasil	Anggaran	Penerimaan Tahun 2020		2020	%	2019
			2020	Piutang 2019			
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1	PKB	8.654.456.288,00	5.564.530.583,00	1.194.533.528,00	6.759.064.111,00	78,10	10.173.491.522,00
2	BBNKB	4.735.222.640,00	3.504.766.684,00	526.432.603,00	4.031.199.287,00	85,13	6.124.593.201,00
3	PBBKB	19.438.337.850,00	14.898.264.169,00	1.658.007.244,00	16.556.271.413,00	85,17	20.031.430.885,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Bagi Hasil	Anggaran	Penerimaan Tahun 2020		2020	%	2019
			2020	Piutang 2019			
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
4	PAP	88.163.027,00	88.415.104,00	10.809.961,00	99.225.065,00	112,55	102.568.614,00
5	Pajak Rokok	10.547.987.507,00	13.655.271.007,00	0	13.655.271.007,00	129,46	11.166.053.269,00
	Jumlah	43.464.167.312,00	37.711.247.547,00	3.389.783.336,00	41.101.030.883,00	94,56	47.598.137.491,00

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1.c.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	34.887.153.721,00	33.699.978.725,00

Rencana penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp35.829.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.887.153.721,00 atau 97,37%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp 33.699.978.725,00, Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.187.174.996,00 atau 3,52%.

Tahun 2020 Pemkab Dharmasraya kembali memperoleh hibah dari Kementerian Keuangan terkait dengan Program Kementerian PUPR berupa program hibah air limbah setempat untuk pembangunan jamban dan tangki septik bagi penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Tahun 2020 sebesar Rp2.050.000.000,00 terealisasi penerimaannya 100%. Dana Hibah ini merupakan insentif atas biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh Pemda untuk pembangunan tangki septik yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pengawasan sampai terbangunnya tangki septik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat. Pendapatan hibah tersebut baru diperoleh apabila Pemda telah menyelesaikan pembangunan tangki septik dimaksud.

Pendapatan hibah dari pihak ketiga Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 1.268.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp416.323.721,00 dengan persentase 32,83%. Mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp231.055.004,00 atau -35,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemberi hibah adalah perusahaan konstruksi yang melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan perusahaan sektor perkebunan tidak memberikan kontribusi hibahnya pada tahun 2020 ini. Hal ini disebabkan tidak adanya penekanan kewajiban mengikat terhadap pemberian hibah oleh pihak ketiga serta menurunnya kegiatan pembangunan fisik dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19, sehingga penerimaan hibah dari pihak ketiga setiap tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Penerimaan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2020 dianggarkan Rp32.511.100.000,00 dengan realisasi penerimaan hibah sebesar Rp32.420.830.000,00 atau 99,72%. Penerima Hibah Dana BOS yang tercatat di Laporan Keuangan Pemda adalah Sekolah Negeri – tidak termasuk sekolah swasta – yang terdiri atas 146 Sekolah Dasar Negeri dan 33 Sekolah Menengah Pertama Negeri.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerimaan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.18
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan hibah dari Pemerintah	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	100,00	906.000.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.268.000.000,00	416.323.721,00	32,83	647.378.725,00
3	Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	32.511.100.000,00	32.420.830.000,00	99,72	32.146.600.000,00
JUMLAH		35.829.100.000,00	34.887.153.721,00	97,37	33.699.978.725,00

Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 3** pada Laporan Keuangan ini.

V.A.2. BELANJA DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2020 anggaran belanja dan transfer direncanakan Rp1.017.742.329.264,32 dengan realisasi Rp985.750.172.888,95 atau sebesar 96,86%. Belanja Daerah dianggarkan Rp909.254.418.634,32 dengan realisasi sebesar Rp878.479.570.779,95 atau sebesar 96,62%. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp108.487.910.630,00 dengan realisasi sebesar Rp107.270.602.109,00 atau 98,88%.

Anggaran dan Realisasi pos-pos Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.2.a. Belanja Operasi	659.029.846.282,68	690.742.576.869,50

Belanja Operasi TA 2019 direncanakan Rp676.862.235.406,83 dengan realisasi sebesar Rp659.029.846.282,68 atau sebesar 97,36%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp690.742.576.869,50 terjadi penurunan sebesar Rp31.712.730.586,82 atau -4,59 %.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 terdiri dari.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.2.a.1. Belanja Pegawai	418.043.145.643,00	430.141.092.583,00

Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung (BL). Pada Tahun 2020 Belanja Pegawai BTL dianggarkan sebesar Rp380.110.636.151,00 dengan realisasi sebesar Rp373.993.878.778,00 atau sebesar 98,39%. Belanja Pegawai BL dianggarkan sebesar Rp45.757.754.500,00 dengan realisasi sebesar Rp44.049.266.865,00 atau sebesar 96,27%.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp418.043.145.643,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp430.141.092.583,00 terjadi penurunan sebesar Rp12.097.946.940,00 atau 2,81%. Menurunnya belanja pegawai disebabkan karena anggaran belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (TPP) dianggarkan hanya 11 bulan dan pemotongan sebesar 30% pada



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bulan Juli dan Agustus 2020. Sedangkan kenaikan belanja pada Insentif Guru Sertifikasi Tahun 2020 disebabkan karena adanya pembayaran utang belanja Insentif Guru Sertifikasi tahun 2019 yang dibayarkan tahun 2020. Pada beberapa tahun sebelumnya, belanja Insentif Guru Sertifikasi untuk triwulan IV dianggarkan tahun berikutnya. Namun pada tahun 2020 ini dianggarkan dan direalisasikan sebanyak 4 triwulan ditambah pembayaran utang belanja tahun sebelumnya.

Belanja Pegawai Tahun 2020 dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 5.1.19
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
A	Belanja Tidak Langsung	380.110.636.151,00	373.993.878.778,00	98,39	383.764.182.714,00
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	235.195.448.760,00	231.767.137.816,00	98,54	232.687.254.234,00
2	Tambahan Penghasilan	137.296.436.190,00	134.743.388.260,00	98,14	142.992.465.951,000
a	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	60.837.683.000,00	59.461.125.280,00	97,74	79.767.730.771,000
b	Insentif Guru Non Sertifikasi	474.100.000,00	453.750.000,00	95,71	496.250.000,00
c	Insentif Guru Sertifikasi	71.658.493.380,00	71.207.271.280,00	99,37	56.319.047.580,00
d	Tambahan Penghasilan Insentif Dokter/Perawat Jaga Puskesmas (UGD/Rawat Inap)	0,00	0,00	-	1.732.800.000,00
e	Tunjangan Khusus Guru	4.326.159.810,00	3.621.241.700,00	83,71	4.676.637.600,000
3	Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.428.696.000,00	6.406.185.000,00	99,65	7.266.060.000,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	422.282.901,00	393.074.656,00	93,08	758.209.642,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	85.341.996,00	65.700.649,00	76,99	60.192.887,00
6	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	682.430.304,00	618.392.397,00	90,62	0,00
B	Belanja Langsung	45.757.754.500,00	44.049.266.865,00	96,27	46.376.909.869,00
1	Honorarium PNS	7.528.892.500,00	6.981.205.000,00	92,73	9.845.563.319,00
2	Honorarium Non PNS	36.553.930.000,00	35.735.690.000,00	97,76	35.719.817.550,00
3	Belanja Pegawai BLUD	388.865.000,00	261.420.865,00	67,23	
4	Uang Lembur	1.286.067.000,00	1.070.951.000,00	83,27	811.529.000,00
JUMLAH		425.868.390.651,00	418.043.145.643,00	98,16	430.141.092.583,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.2.a.2. Belanja Barang dan Jasa	185.947.730.070,85	207.300.127.555,20

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja pembelian barang maupun jasa yang digunakan untuk memperlancar operasional seluruh kegiatan yang akhirnya dapat memperlancar tugas-tugas pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 21 menyatakan bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa sebelum konversi ke Belanja Hibah pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp211.429.465.531,58 terealisasi sebesar Rp201.505.782.241,43 atau 95,31%. Konversi anggaran Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Hibah adalah sebesar Rp16.415.223.560,58 dengan realisasi sebesar Rp15.558.052.170,58 atau 94,78%. Setelah dilakukan konversi, anggaran Belanja Barang dan Jasa menjadi Rp195.014.241.971,00 dengan realisasi sebesar Rp185.947.730.070,85 atau 95,35%

Tahun 2020 realisasi Belanja Barang dan Jasa setelah konversi mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp21.353.057.484,35 atau -10,30%. Menurunnya Belanja Barang disebabkan karena penyesuaian belanja refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Belanja Barang dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.20
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	9.592.111.639,00	8.869.774.977,00	92,47	12.248.708.921,00
2	Belanja Bahan/Material	9.565.660.442,00	8.937.832.304,00	93,44	6.405.141.609,00
3	Belanja Jasa Kantor	28.540.652.590,00	26.147.164.617,00	91,61	20.023.120.605,00
4	Belanja Premi Asuransi	8.774.020.000,00	8.627.202.865,00	98,33	7.853.935.265,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.549.303.759,00	4.351.360.808,00	95,65	6.858.635.745,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.826.330.700,00	3.673.616.891,00	96,01	5.095.762.632,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	711.201.000,00	552.871.000,00	77,74	1.536.831.993,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	127.350.000,00	127.350.000,00	100,00	467.040.000,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00	46.300.000,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.369.117.000,00	1.368.117.000,00	99,93	2.593.084.000,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	8.262.973.770,00	7.524.968.640,00	91,07	11.983.211.484,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	467.500.000,00	466.195.000,00	99,72	901.106.000,00
13	Belanja Pakaian Kerja	60.350.000,00	60.348.500,00	100,00	393.766.575,00
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	166.840.000,00	166.035.500,00	99,52	1.039.971.637,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	36.262.263.920,00	34.639.538.502,00	95,53	52.629.019.427,00
16	Belanja Pemeliharaan	1.804.842.550,00	1.636.947.203,00	90,70	2.371.076.458,00
17	Belanja Jasa Konsultansi	492.269.778,00	492.205.000,00	99,99	597.416.000,00
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	674.671.083,00	661.536.162,00	98,05	2.317.725.126,00
20	Belanja Barang Dana Bos	24.934.196.307,00	24.301.756.042,00	97,46	21.399.909.788,00
21	Belanja Barang dan Jasa BLUD	54.029.637.433,00	52.555.959.059,85	97,27	50.539.024.290,20
22	Belanja Barang dan Jasa BOS Daerah	798.000.000,00	782.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		195.014.241.971,00	185.947.730.070,85	95,35	207.300.787.555,20



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD sebelum konversi ke Hibah Tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp201.505.782.241,43 dapat dilihat pada **Lampiran 4** Laporan Keuangan ini.

a. Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp8.869.774.977,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.21
Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja alat tulis kantor	2.757.774.593,00	2.600.648.068,00	94,30	6.439.373.181,00
2	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	-	1.200.000,00
3	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	422.863.000,00	418.273.404,00	98,91	579.865.950,00
4	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	262.624.000,00	261.733.000,00	99,66	274.006.996,00
5	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	610.903.963,00	599.758.942,00	98,18	526.013.030,00
6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.263.719.583,00	3.065.023.001,00	93,91	3.774.631.383,00
7	Belanja pengisian tabung gas	41.450.000,00	41.109.000,00	99,18	78.013.000,00
8	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban, dst)	1.921.645.000,00	1.575.271.062,00	81,98	61.123.672,00
9	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kual, dispenser, dst)	167.892.500,00	166.070.500,00	98,91	387.228.209,00
10	Belanja Peralatan Persampahan	6.989.000,00	6.988.000,00	0,00	11.453.500,00
11	Bahan Habis Pakai Sarana dan Prasarana Perhubungan	136.250.000,00	134.900.000,00	99,01	103.300.000,00
12	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	-	12.500.000,00
JUMLAH		9.592.111.639,00	8.869.774.977,00	92,47	12.248.708.921,00

b. Belanja Bahan/Material sebesar Rp8.744.354.304,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.22
Realisasi Belanja Bahan/Material Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja bahan baku bangunan	92.509.000,00	92.494.000,00	99,98	514.112.400,00
2	Belanja bahan/bibit tanaman	828.959.750,00	827.459.750,00	99,82	678.905.800,00
3	Belanja bibit ternak	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4	Belanja bahan obat-obatan	6.647.823.997,00	6.232.245.895,00	93,75	2.708.715.873,00
5	Belanja bahan kimia	278.051.000,00	214.855.500,00	77,27	284.354.864,00
6	belanja bahan material makanan	217.850.000,00	216.890.000,00	99,56	58.600.000,00
7	Belanja Hadiah	42.255.000,00	42.255.000,00	100,00	464.817.500,00
8	Belanja Bahan Praktek Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	9.902.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
9	Belanja Bahan Peralatan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
10	Belanja Bahan Kebutuhan Keperluan Bencana	428.253.000,00	425.107.114,00	99,27	12.630.000,00
	Belanja Bahan Kosmetik	2.927.045,00	2.927.045,00		0,00
11	Belanja Perlengkapan Olah Raga	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	8.940.000,00
12	Belanja Bahan Makanan/Sembako	83.000.000,00	83.000.000,00	100,00	140.025.000,00
13	Belanja Cindera Mata	122.000.000,00	122.000.000,00	100,00	252.998.000,00
14	Belanja Bahan Dekorasi dan Publikasi	71.501.650,00	71.281.000,00	99,69	0,00
15	Belanja Bahan/alat Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	399.070.000,00	329.839.000,00	82,65	0,00
16	Belanja Bahan Material untuk penghias ruangan dan peralatan	0,00	0,00	0,00	526.717.477,00
17	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	0,00	0,00	0,00	495.493.695,00
18	Belanja perlengkapan sekolah	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	240.929.000,00
JUMLAH		9.298.200.442,00	8.744.354.304,00	94,04	6.405.141.609,00

c. **Belanja Jasa Kantor sebesar Rp26.147.164.617,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.23
Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja telepon	711.968.132,00	655.872.198,00	92,12	725.245.608,00
2	Belanja air	39.862.500,00	35.760.800,00	89,71	34.926.770,00
3	Belanja listrik	10.457.703.367,00	9.893.656.968,00	94,61	8.342.378.842,00
4	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	0,00	0,00	-	1.275.000,00
5	Belanja surat kabar/majalah	230.554.500,00	224.415.000,00	97,34	1.453.610.000,00
6	Belanja kawat/faksimili/internet	1.257.469.088,00	1.217.616.511,00	96,83	989.658.155,00
7	Belanja paket/pengiriman	7.600.600,00	6.680.040,00	87,89	3.661.000,00
8	Belanja Sertifikasi	13.582.500,00	13.172.240,00	96,98	7.050.000,00
9	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.440.296.400,00	2.168.945.400,00	88,88	2.853.774.261,00
11	Belanja Jasa Dekorasi	295.500.000,00	294.900.000,00	99,80	271.917.000,00
12	Belanja Penulisan Skripsi/Wisuda/Naskah Akademis*)	60.000.000,00	0,00	-	0,00
13	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	-	3.000.000,00
14	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	271.494.200,00	269.822.500,00	99,38	265.065.500,00
15	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	550.660.000,00	528.025.000,00	95,89	148.438.800,00
16	Belanja jasa penyebarluasan Informasi	1.065.400.000,00	865.400.000,00	81,23	150.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
17	Belanja Jasa Upah Kerja	590.240.000,00	543.710.000,00	92,12	326.575.000,00
18	Belanja jasa penyelenggaraan mayat dan orang terlantar	18.000.000,00	17.700.000,00	98,33	7.200.000,00
19	Belanja jasa informasi, teks, audio dan visual	0,00	0,00	-	257.265.000,00
20	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.980.451.500,00	2.627.240.661,00	88,15	2.716.921.639,00
21	Belanja Jasa Cleaning Service/tenaga kebersihan	0,00	0,00	-	516.600.000,00
22	Belanja jasa pembuatan dan pemeliharaan Website/Aplikasi atau Peta	164.000.000,00	163.855.000,00	99,91	303.976.830,00
23	Belanja Jasa Hiburan Kesenian	767.085.000,00	767.085.000,00	100,00	13.500.000,00
24	Belanja Kontribusi	70.061.000,00	70.061.000,00	100,00	551.298.200,00
25	Belanja Jasa Konsultan	100.000.000,00	98.400.000,00	98,40	0,00
26	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	42.206.000,00	27.648.000,00	65,51	79.783.000,00
27	Belanja Bantuan Operasional SATGAS	1.489.400.000,00	1.344.344.250,00	90,26	0,00
28	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	4.500.000,00	50,00	0,00
29	Belanja Insentif	4.889.217.803,00	4.289.454.049,00	87,73	0,00
JUMLAH		28.540.652.590,00	26.147.164.617,00	91,61	20.023.120.605,00

d. Belanja Premi Asuransi sebesar Rp8.627.202.865,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.24
Realisasi Belanja Premi Asuransi Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan masyarakat	8.416.020.000,00	8.274.672.200,00	98,32	7.580.232.400,00
2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	358.000.000,00	352.530.665,00	98,47	275.963.865,00
JUMLAH		8.774.020.000,00	8.627.202.865,00	98,33	7.856.196.265,00

e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp 4.351.360.808,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.25
Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Service	1.259.925.930,00	1.216.571.014,00	96,56	1.475.796.236,00
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.230.186.588,00	2.215.278.309,00	99,33	3.128.842.028,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	675.592.641,00	674.955.485,00	99,91	1.876.861.163,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
4	Belanja Jasa KIR	92.145.450,00	74.438.450,00	80,78	1.776.000,00
5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	167.743.150,00	111.715.050,00	66,60	331.696.868,00
6	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	500.000,00	406.000,00	81,20	38.558.800,00
7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	123.210.000,00	57.996.500,00	47,07	5.104.650,00
JUMLAH		4.549.303.759,00	4.351.360.808,00	95,65	6.858.635.745,00

f. **Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp 3.673.616.891,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.26
Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja cetak	2.913.595.550,00	2.826.866.050,00	97,13	3.676.158.827,00
2	Belanja Penggandaan	869.658.650,00	803.908.841,00	92,92	1.404.537.305,00
3	Belanja Jilid	43.076.500,00	42.842.000,00	00,00	15.066.500,00
JUMLAH		3.826.330.700,00	3.673.616.891,00	95,62	5.095.762.632,00

g. **Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp 552.871.000,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.27
Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	0,00	0,00	-	90.000.000,00
2	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	331.725.000,00	316.225.000,00	95,33	879.048.993,00
3	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	351.176.000,00	210.186.000,00	59,85	518.206.000,00
4	Belanja Sewa Tempat Pembuangan Sampah	0,00	0,00	-	2.000.000,00
5	Belanja sewa penginapan	28.300.000,00	26.460.000,00	93,50	47.577.000,00
JUMLAH		711.201.000,00	552.871.000,00	77,74	1.536.831.993,00

h. **Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp127.350.000,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.28
Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	127.350.000,00	127.350.000,00	100	419.040.000,00
2	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	0.00	0.00	00,00	48.000.000,00
JUMLAH		127.350.000,00	127.350.000,00	100	467.040.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

i. Belanja Sewa Alat Berat sebesar Rp4.950.000,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.29
Realisasi Belanja Sewa Alat Berat Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Eskavator	4.950.000,00	4.950.000,00	100	46.300.000,00
JUMLAH		4.950.000,00	4.950.000,00	100	46.300.000,00

j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar Rp1.368.117.000,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.30
Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja sewa meja kursi	85.950.000,00	85.950.000,00	100,00	56.000.000,00
2	Belanja Sewa Komputer dan Printer	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00
3	Belanja Sewa Proyektor	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	22.500.000,00
4	Belanja sewa tenda	981.067.000,00	981.067.000,00	100	2.293.109.000,00
5	Belanja Sewa Sound System	182.100.000,00	181.100.000,00	99,45	136.850.000,00
6	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0,00	0,00	0,00	51.625.000,00
7	sewa alat pelaksana sidang tera	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
8	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan olah raga	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00
JUMLAH		1.369.117.000,00	1.368.117.000,00	99,93	2.593.084.000,00

k. Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp7.524.968.640,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.31
Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.291.137.500,00	1.170.856.420,00	90,68	1.085.572.500
2	Belanja makanan dan minuman rapat	2.496.888.000,00	2.364.038.400,00	94,68	3.508.744.000
3	Belanja makanan dan minuman tamu	1.647.586.000,00	1.635.352.650,00	99,26	1.567.734.500
4	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.160.000,00	12.940.000,00	98,33	33.950.500
5	Belanja Makan dan Minum pasien	138.250.000,00	131.831.000,00	95,36	20.892.244,00
6	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.512.912.270,00	2.102.365.170,00	83,66	5.720.067.740,00
7	Belanja Makan minum tambahan anak sekolah	163.040.000,00	107.585.000,00	65,99	46.250.000,00
JUMLAH		8.262.973.770,00	7.524.968.640,00	91,07	11.983.211.484,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp466.195.000,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.32
Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	271.000.000,00	271.000.000,00	100	449.000.000,00
2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	96.000.000,00	95.370.000,00	99,34	80.130.000,00
3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.000.000,00	44.715.000,00	99,37	48.000.000,00
5	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0	148.476.000,00
6	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	55.500.000,00	55.110.000,00	99,30	55.500.000,00
JUMLAH		467.500.000,00	466.195.000,00	99,72	901.106.000,00

m. Belanja Pakaian Kerja sebesar Rp60.348.500,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.33
Realisasi Belanja Pakaian Kerja Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja pakaian kerja lapangan	30.350.000,00	30.350.000,00	100	362.466.575,00
2	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	30.000.000,00	29.998.500,00	100	24.500.000,00
3	Belanja Pakaian Pelatihan/Kegiatan	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00
JUMLAH		60.350.000,00	60.348.500,00	100	393.766.575,00

n. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu sebesar Rp166.035.500,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.34
Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
1	Belanja pakaian adat daerah	47.900.000,00	47.682.500,00	99,55	119.460.000,00
2	Belanja pakaian batik tradisional	8.840.000,00	8.828.000,00	99,86	92.311.023,00
3	Belanja pakaian olahraga	45.100.000,00	44.790.000,00	99,31	571.813.299,00
4	Belanja Pakaian Kontingen	65.000.000,00	64.735.000,00	99,59	0,00
5	Belanja Pakaian MTQ	0,00	0,00	-	256.387.315,00
JUMLAH		166.840.000,00	166.035.500,00	99,52	1.039.971.637,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

o. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp34.639.538.502,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.35
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.415.743.337,00	8.898.735.450,00	84,07	11.366.026.126,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.846.520.583,00	25.740.803.052,00	97,26	41.262.993.301,00
JUMLAH		36.262.263.920,00	34.639.538.502,00	94,97	52.629.019.427,00

p. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS Rp661.536.162,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.36
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	67.016.710,00	66.716.710,00	99,55	493.239.920,00
2	Belanja sosialisasi	25.000.000,00	24.800.000,00	99,20	48.800.000,00
3	Belanja bimbingan teknis	576.154.373,00	563.619.452,00	97,82	1.612.885.206,00
4	Belanja Kontribusi	6.500.000,00	6.400.000,00	98,46	162.800.000,00
JUMLAH		674.671.083,00	661.536.162,00	98,05	2.317.725.126,00

q. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.636.947.203,00 terdiri dari

Tabel 5.1.37
Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	233.533.000,00	222.622.000,00	95,33	1.014.420.126,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	623.484.550,00	620.111.250,00	99,46	680.501.255,00
3	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	138.855.000,00	138.105.000,00	99,46	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	213.250.000,00	212.800.500,00	99,79	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan	204.000.000,00	196.276.583,00	96,21	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	234.500.000,00	232.961.870,00	99,34	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Instalasi/Jaringan Air, Listrik, Telepon	157.220.000,00	14.070.000,00	8,95	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan jaringan	0,00	0,00	0,00	615.250.677,00
9	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	0,00	0,00	0,00	60.904.400,00
JUMLAH		1.804.842.550,00	1.636.947.203,00	90,70	2.371.076.458,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- r. **Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp492.205.000,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.38
Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	0,00	0,00	282.535.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	450.297.878,00	450.265.000,00	99,99	155.221.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	41.971.900,00	41.940.000,00	99,92	95.200.000,00
JUMLAH		492.269.778,00	492.205.000,00	99,99	532.956.000,00

- s. **Belanja Barang dan Jasa Dana BOS sebesar Rp24.301.756.042,00** terdiri dari :

Tabel 5.1.39
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS pada 146 Sekolah Dasar Negeri SDN	17.484.372.732,00	17.048.427.093,00	97,51	14.887.659.377,00
2	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS pada 33 Satuan Menengah Pertama Negeri SMPN	7.449.823.575,00	7.253.328.949,00	97,36	6.512.250.411,00
JUMLAH		24.934.196.307,00	24.301.756.042,00	97,46	21.399.909.788,00

Alokasi Dana BOS Reguler Tahun 2020 untuk Kabupaten Dharmasraya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 350/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang II Tahun 2020, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 419/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang III Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1042/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap III Tahun 2020.

Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Dharmasraya kembali menerima Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020, sebanyak 12 Sekolah Dasar Negeri dan 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri. Setiap sekolah menerima sebesar Rp60.000.000,00.

Anggaran Pendapatan dan Belanja BOS Tahun 2020 dibandingkan dengan realisasinya dapat diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.40

Realisasi Pendapatan dan Belanja BOS Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Saldo Awal	2.695.211.372,00	2.695.211.372,00	100	483.693.923,00
2	Pendapatan BOS	32.511.100.000,00	32.420.830.000,00	99,72	32.146.600.000,00
	Pendapatan BOS Reguler	30.951.100.000,00	30.860.830.000,00	99,71	28.418.600.000,00
	Pendapatan BOS Afirmasi	780.000.000,00	780.000.000,00	100	3.304.000.000,00
	Pendapatan BOS Kinerja	780.000.000,00	780.000.000,00	100	424.000.000,00
3	Pendapatan Jasa Giro	0	0		0
4	Total Penerimaan	35.206.311.372,00	35.116.041.372,00	99,74	32.630.293.923,00
5	Belanja				
6	Belanja Barang dan Jasa BOS Reguler	24.934.196.307,00	24.301.756.042,00	97,46	21.399.909.788,00
7	Belanja Modal Dana BOS	10.272.115.065,00	10.174.364.310,00	99,05	8.535.172.763,00
	Belanja Modal BOS Reguler	6.870.007.065,00	6.783.266.390,00	98,74	6.649.280.763,00
	Belanja Modal BOS Afirmasi	2.356.029.000,00	2.352.184.980,00	99,84	1.727.971.000,00
	Belanja Modal BOS Kinerja	1.046.079.000,00	1.038.912.940,00	99,31	157.921.000,00
8	Total Belanja	35.206.311.372,00	34.476.120.352,00	97,93	29.935.082.551,00
9	Surplus / Defisit	0,00	639.921.020,00		2.695.211.372,00

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2020 realisasi pendapatan BOS sebesar Rp35.116.041.372,00 berasal dari saldo awal BOS sebesar Rp2.695.211.372,00, penerimaan BOS Tahun 2020 atas satuan pendidikan sebanyak 146 SD Negeri dan 33 SMP Negeri sebesar Rp32.420.830.000,00. Belanja BOS Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp34.476.120.352,00 terdiri dari belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp24.301.756.042,00 dan belanja modal BOS sebesar Rp10.174.364.310,00. Saldo akhir dana BOS Tahun 2020 sebesar Rp639.921.020,00 terdiri atas kas tunai sebesar Rp492.164.526,00 dan kas dibank sebesar Rp147.756.494,00.

Realisasi Pendapatan dan Belanja BOS Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 3** pada Laporan Keuangan ini.

t. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp 52.555.959.059,85 terdiri dari.

Tabel 5.1.41

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
I	BLUD RSUD	43.793.740.000,00	43.600.327.783,00	99,56	41.019.179.916,00
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	43.410.000.000,00	43.384.802.194,00	99,94	41.019.179.916,00
2	RSUD Sungai Rumbai	383.740.000,00	215.525.589,00	56,16	-
II	BLUD Puskesmas	10.235.897.433,00	8.955.631.276,85	87,49	9.519.184.374,20
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	892.854.433,00	823.043.639,00	92,18	855.995.813,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	591.438.564,00	444.846.924,30	75,21	478.757.309,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung II	689.283.850,00	689.279.500,00	100,00	636.661.527,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh	433.934.000,00	356.435.422,00	82,14	443.966.859,00
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	1.206.957.820,00	1.170.088.078,00	96,95	1.288.622.823,00
6	BLUD Puskesmas Silago	738.561.672,00	623.191.858,00	84,38	675.882.995,00
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan	602.122.056,00	508.467.079,18	84,45	572.567.497,82
8	BLUD Puskesmas Sitiung I	1.117.829.794,00	922.264.862,00	82,50	996.053.199,38
9	BLUD Puskesmas Koto Baru	1.614.346.074,00	1.309.583.744,00	81,12	1.406.486.091,00
10	BLUD Puskesmas Timpeh	589.920.087,00	525.810.794,00	89,13	693.128.841,00
11	BLUD Puskesmas Sialang	424.301.615,00	360.131.650,00	84,88	376.094.982,00
12	BLUD Puskesmas Tiumbang	366.196.432,00	360.190.830,00	98,36	294.079.049,00
13	BLUD Puskesmas Koto Besar	769.263.736,00	694.084.966,93	90,23	800.887.388,00
14	Puskesmas Beringin Sakti	198.887.300,00	168.211.929,44	84,58	-
JUMLAH		54.029.637.433,00	52.555.959.059,85	98,80	50.538.364.290,20

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp54.029.637.433,00 terealisasi sebesar Rp52.555.959.059,85 atau 98,80%. Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun 2020 dapat dilihat di **Lampiran 1** pada Laporan Keuangan ini

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.2.a.3. Hibah	54.874.970.568,83	49.451.249.739,30

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2020 sebelum konversi dianggarkan sebesar Rp38.842.900.000,00 dengan realisasi Rp38.795.439.174,00 atau 99,88%. Konversi penambahan anggaran Hibah sebesar Rp16.936.702.784,83 berasal dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp16.415.223.560,58 dan Belanja Modal sebesar Rp521.479.224,25 menjadi Rp55.779.602.784,83. Realisasi Belanja Hibah dari konversi sebesar Rp16.079.531.394,83 terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp15.558.052.170,58 dan Belanja Modal sebesar Rp521.479.224,25 sehingga realisasi Belanja Hibah menjadi Rp54.874.970.568,83 atau 98,38%. Belanja Hibah setelah konversi mengalami kenaikan sebesar Rp5.423.720.829,53 atau 10,97% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp49.451.249.739,30.

Belanja Hibah terdiri atas Belanja Hibah kepada Pemerintah, Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Hibah kepada Rumah Gadang Suku Tahun 2020 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/166/KPTS-BUP/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/17/KPTS-BUP/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020. Rincian Realisasi Belanja Hibah pada Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.42
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hibah	38.842.900.000,00	38.795.439.174,00	99,88	12.357.501.489,00
	a. Hibah kepada Pemerintah	30.955.000.000,00	30.955.000.000,00	100,00	1.445.000.000,00
	b. Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi	5.887.900.000,00	5.840.439.174,00	99,19	7.012.501.489,00
	c. Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	3.900.000.000,00
2	Konversi Belanja Barang dan Jasa menjadi Belanja Hibah	16.415.223.560,58	15.558.052.170,58	94,78	34.974.744.789,03
	a. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.185.722.127,00	14.495.282.737,00	95,45	26.906.562.050,93
	b. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.229.501.433,58	1.062.769.433,58	86,44	5.081.722.738,10
	c. Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	212.410.000,00
	d. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Uang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.774.050.000,00
3	Konversi Belanja Modal menjadi Belanja Hibah	521.479.224,25	521.479.224,25	100,00	2.119.003.461,27
JUMLAH		55.779.602.784,83	54.874.970.568,83	98,38	49.451.249.739,30

1. Belanja yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat Rp30.955.000.000,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.43
Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
a	Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00
b	Hibah kepada Bawaslu	8.455.000.000,00	8.455.000.000,00	100	445.000.000,00
c	Hibah kepada POLRES	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100	0,00
d	Hibah kepada KODIM	500.000.000,00	500.000.000,00	100	0,00
JUMLAH		30.955.000.000,00	30.955.000.000,00	100	1.445.000.000,00

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 2020 sebesar Rp30.955.000.000,00 disebabkan karena adanya kegiatan pemilihan Bupati Dharmasraya pada Tahun 2020. Pendanaan kegiatan dianggarkan dari APBD untuk dilakukan hibah ke Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 20 pada Permendagri tersebut dinyatakan bahwa apabila masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pemilihan, KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten wajib



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Pada saat Laporan Keuangan ini disusun, KPU Kabupaten Dharmasraya dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya telah menyetorkan sisa dana hibahnya ke kas daerah sebesar Rp1.877.988.004,00 pada tanggal 23 April 2021 dan Rp518.587.670,00 pada tanggal 20 April 2021.

2. Belanja yang diserahkan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Rp5.840.439.174,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.44
Realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	KONI	450.000.000,00	404.751.956,00	89,94	736.818.189,00
b.	BAZNAS	400.000.000,00	397.849.080,00	99,46	399.995.800,00
d.	KORPRI	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
e.	MUI	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
f.	PMI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
g.	BOP PAUD	4.019.400.000,00	4.019.400.000,00	100,00	3.980.700.000,00
h.	AISYIYAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
i.	ORARI	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
j.	Kampus UNAND III	337.500.000,00	337.438.138,00	99,98	1.000.000.000,00
k.	Pemuda Pancasila	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
l.	RAPI	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
m.	Paket A, Paket B dan Paket C	581.000.000,00	581.000.000,00	100,00	679.987.500,00
JUMLAH		5.887.900.000,00	5.840.439.174,00	95,22	7.012.501.489,00

3. Belanja Belanja Hibah Rumah Gadang Suku Rp2.000.000.000,00

Belanja Hibah Rumah Gadang berupa bantuan hibah untuk perbaikan rumah gadang suku yang berada di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 40 rumah gadang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 terealisasi keseluruhannya 100%.

Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah, Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Hibah kepada Rumah Gadang Suku Tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5** pada Laporan Keuangan ini.

4. Belanja Hibah yang dikonversi dari Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp15.558.052.170,58 terdiri dari.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.45
Realisasi Belanja Hibah yang Dikonversi dari Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.185.722.127,00	14.495.282.737,00	95,45	26.906.562.050,93
b.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.229.501.433,58	1.062.769.433,58	86,44	5.081.722.738,10
c.	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0	212.410.000,00
d.	Uang untuk Diberikan kepada masyarakat	0,00	0,00	0	2.774.050.000,00
JUMLAH		16.415.223.560,58	15.558.052.170,58	94,78	34.974.744.789,03

Realisasi Belanja Hibah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp14.495.282.737,00 dan Belanja Hibah Untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp1.062.769.433,58.

Realisasi Belanja Hibah yang dikonversi dari Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga per Satuan Kerja Perangkat Daerah selengkapnya dapat dilihat di **Lampiran 6** pada Laporan Keuangan ini.

5. Belanja Hibah berasal dari konversi Belanja Modal yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp521.479.224,25.

Realisasi Belanja Hibah berasal dari konversi Belanja Modal berasal dari Belanja Modal Dana DAK Dinas Pendidikan yang dialokasikan untuk sekolah-sekolah swasta, selengkapnya dapat dilihat di **Lampiran 7** pada Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.2.a.4. Bantuan Sosial	164.000.000,00	3.132.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp164.000.000,00 atau 82% berupa Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan.

Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan terealisasi sebesar Rp164.000.000,00 dapat dilihat di **Lampiran 8** pada Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.2.a.5. Bantuan Keuangan	0,00	718.106.992,00

Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar 0,00. Pada Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp718.106.992,00 adalah berupa konversi Transfer Bantuan Keuangan ke Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2019. Tahun 2020 tidak dilakukan konversi Belanja Bantuan Keuangan untuk Belanja Partai Politik tetap direalisasikan di Transfer Bantuan Keuangan Belanja Partai Politik.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.2.b. Belanja Modal	194.525.452.178,27	226.598.089.916,65

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Belanja Modal Tahun 2020 sebelum konversi dianggarkan sebesar Rp202.123.271.377,83, dikonversi menjadi anggaran belanja hibah yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp521.479.224,25 sehingga anggaran Belanja Modal setelah konversi menjadi Rp201.601.792.153,58.

Tabel 5.1.46
Anggaran Belanja Modal Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran	Konversi ke Hibah	Anggaran setelah Konversi
1	2	3	4	5=3-4
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.463.797.471,00	521.479.224,25	67.942.318.246,75
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.294.282.118,00	0,00	96.294.282.118,00
4	Belanja Modal Jalan Irigasi. dan Jaringan	36.304.327.743,83	0,00	36.304.327.743,83
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.060.864.045,00	0,00	1.060.864.045,00
JUMLAH		202.123.271.377,83	521.479.224,25	201.601.792.153,58

Realisasi Belanja Modal sebelum konversi sebesar Rp195.046.931.402,52 dikonversikan ke Belanja Hibah sebesar Rp521.479.224,25 sehingga Belanja Modal setelah konversi Tahun 2020 menjadi Rp194.525.452.178,27. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp32.072.637.738,38 atau sebesar -14,15% dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp226.598.089.916,65.

Realisasi Belanja Modal terinci pada akun-akun aset berikut ini.

Tabel 5.1.47
Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Realisasi 2020	konversi ke hibah	Realisasi setelah konversi	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Belanja Modal Tanah	0		-	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.272.852.226,75	521.479.224,25	64.751.373.002,50	45.512.218.370,50
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.052.704.714,97	0,00	94.052.704.714,97	112.232.961.295,51
4	Belanja Modal Jalan Irigasi. dan Jaringan	34.663.993.010,80	0,00	34.663.993.010,80	61.210.263.507,34
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.057.381.450,00	0,00	1.057.381.450,00	7.642.646.743,30
JUMLAH		195.046.931.402,52	521.479.224,25	194.525.452.178,27	226.598.089.916,65



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Belanja Modal masing-masing SKPD Tahun 2020 terdapat pada **Lampiran 9** pada Laporan Keuangan ini.

Dari realisasi Belanja Modal sebelum konversi sebesar Rp195.046.931.402,52 yang menjadi Aset Tetap Intrakomptabel adalah sebesar Rp175.804.961.786,91 atau 90,13 % dari total Belanja Modal, menjadi Aset Tak Berwujud Rp 62.491.941,00 atau 0,03%, menjadi Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp2.184.091.238,00 atau 1,12%, menjadi Aset yang Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp521.479.224,25 atau 0,27%, menjadi Persediaan sebesar Rp408.877.550,00 atau 0,21%, menjadi Belanja Operasional sebesar Rp 3.823.271.700,00 atau 1,96%, menjadi Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp8.043.639.026,50 atau 4,12%, Belanja Modal Retensi 2019 sebesar Rp282.579.150,00 atau 0,14% dan utang Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp3.915.539.785,86 atau 2,01%. Adapun uraian realisasi Belanja Modal Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.48
Realisasi Belanja Modal sebelum Konversi ke Hibah Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian Belanja Modal	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Aset Tetap Intrakomptabel	175.804.961.786,91	90,13	218.640.798.453,40
2	Aset Tak Berwujud	62.491.941,00	0,03	731.415.569,00
3	Aset Ekstrakomptabel	2.184.091.238,00	1,12	1.766.124.852,75
4	Aset yang diserahkan ke Masyarakat	521.479.224,25	0,27	566.394.190,27
5	Persediaan	408.877.550,00	0,21	1.552.609.271,00
6	Belanja Operasional	3.823.271.700,00	1,96	1.400.000.000,00
7	Barang Pakai Habis	8.043.639.026,50	4,12	2.747.376.391,50
8	Utang Retensi Tahun 2019	282.579.150,00	0,14	-
9	Utang Tahun 2019	3.915.539.785,86	2,01	1.312.374.650,00
JUMLAH		195.046.931.402,52	100	228.717.093.377,92

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.2.c. Belanja Tak Terduga	24.924.272.319,00	24.176.925,00

Belanja Tak Terduga dianggarkan Rp30.790.391.073,91 dan direalisasikan sebesar Rp24.924.272.319,00 atau sebesar 80,95%.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2020 yang dianggarkan untuk refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp30.218.479.074,00 dengan realisasi sebesar Rp24.533.858.369,00 atau 81,19%. Terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp6.550.935.985,00 dan penyediaan jaring pengaman sosial sebesar Rp17.982.922.384,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga yang bukan untuk penanganan Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp390.413.950,00 terdiri dari Pembiayaan Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebesar Rp241.707.150,00 dan Penanganan Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (DBD) sebesar Rp148.706.800,00. Rincian Belanja Tidak Terduga dapat dilihat di **Lampiran 10** pada Laporan Keuangan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laporan Penggunaan APBD Tahun 2020 untuk Penanganan Covid-19

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Dalam perturan tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*).

Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diprioritaskan untuk :

- penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.

Pemerintah Daerah juga menyampaikan laporan alokasi dan penggunaan APBD untuk penanganan COVID-19 kepada Menteri Dalam Negeri.

Kabupaten Dharmasraya telah menganggarkan penanganan COVID-19 pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp57.662.744.532,00 dengan realisasi sebesar Rp50.126.194.992,00 yang berasal dari Belanja Tak Terduga dan Belanja Program/ Kegiatan di beberapa SKPD.

Laporan Penggunaan APBD Tahun 2020 Untuk Penanganan Covid-19 terdapat pada **Lampiran 11** di Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.3 Transfer	107.270.602.109,00	119.188.567.000,00

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2020 berupa Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari Transfer Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Transfer Bantuan Keuangan terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Realisasi Transfer dianggarkan sebesar Rp108.487.910.630,00 dan terealisasi sebesar Rp107.270.602.109,00 atau 98,88% dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.49
Realisasi Transfer Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
I.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.115.260.630,00	933.019.055,00	44,11	3.170.650.000,00
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.871.413.390,00	829.546.015,00	44,33	3.170.650.000,00
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	243.847.240,00	103.473.040,00	42,43	
II.	Transfer Bantuan Keuangan	106.372.650.000,00	106.337.583.054,00	99,97	116.017.917.000,00
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	105.472.650.000,00	105.472.649.600	100,00	116.017.917.000,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	900.000.000,00	864.933.454,00	96,10	-
JUMLAH		108.487.910.630,00	107.270.602.109,00	98,88	119.188.567.000,00

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2020 berupa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa/Nagari dianggarkan Rp1.871.413.390,00 dan terealisasi sebesar Rp829.546.015,00 atau 44,33%.

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Tahun 2020 berupa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa/Nagari dianggarkan Rp243.847.240,00 terealisasi sebesar Rp103.473.040,00 atau 42,43%.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2020 baru dibayarkan sampai pada Triwulan I, II, dan III, sedangkan realisasi Triwulan IV dibayarkan pada Tahun 2021. Uraian selengkapnya mengenai transfer bagi hasil pajak daerah dapat dilihat pada **Lampiran 12** dan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya pada **Lampiran 13** di Laporan Keuangan ini.

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dianggarkan sebesar Rp105.472.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp105.472.649.600,00 atau 100% yang diperuntukkan untuk 52 nagari. Dana Bantuan Keuangan ke Desa bersumber dari dana transfer APBN sebesar Rp53.272.650.000,00 dengan realisasi 100%. Dana Desa yang bersumber dari dana APBD atau Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan sebesar Rp52.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp52.199.999.600,00.

Penyaluran Dana Desa dari APBN dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Kas Desa (RKD) tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dicatat di Laporan Realisasi Anggaran sebesar penyaluran ke Desa berdasarkan Laporan pada Aplikasi Simtrada dan OMSPAN Kementerian Keuangan. Rincian Dana Bantuan Keuangan ke Desa bersumber dari dana transfer APBN dapat dilihat pada **Lampiran 14a** dan Dana Desa yang bersumber dari dana APBD atau Alokasi Dana Desa (ADD) pada **Lampiran 14b** di Laporan Keuangan ini.

Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dapat dilihat di **Lampiran 19** pada Laporan Keuangan ini.

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp864.933.454,00 atau 96,10% adalah berupa Transfer kepada Partai Politik. Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp864.933.454,00 terdapat pembayaran utang



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

belanja Partai Politik Tahun 2019 sebesar Rp66.542.574,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan Partai Politik dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.50
Realisasi Transfer Belanja Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realiasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Partai PDI Perjuangan	176.120.000,00	171.971.278,00	97,64	127.384.412,00
2	Partai Golongan Karya	156.780.000,00	152.716.631,00	97,41	126.719.381,00
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	112.280.000,00	109.157.423,00	97,22	72.226.642,00
4	Partai Amanat Nasional	106.960.000,00	103.539.023,00	96,80	67.830.398,00
5	Partai Demokrat	79.940.000,00	76.628.292,00	95,86	61.855.915,00
6	Partai Keadilan Sejahtera	71.500.000,00	67.990.280,00	95,09	49.255.548,00
7	Partai Berkarya	55.490.000,00	51.371.334,00	92,58	15.805.257,00
8	Partai NasDem	54.350.000,00	51.245.825,00	94,29	63.153.604,00
9	Partai Hati Nurani Rakyat	42.990.000,00	39.898.282,00	92,81	57.463.648,00
10	Partai Kebangkitan Bangsa	43.590.000,00	40.415.086,00	92,72	35.372.257,00
11	Partai Persatuan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	41.039.930,00
JUMLAH		900.000.000,00	864.933.454,00	96,10	718.106.992,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.4 Surplus/(Defisit)	4.440.973.593,17	(17.195.339.462,66)

Jumlah Surplus/(Defisit) LRA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Surplus sebesar Rp4.440.973.593,17 sedangkan pada Tahun 2019 defisit sebesar (Rp17.195.339.462,66).

V.A.5 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Rencana dan realisasi pembiayaan daerah Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.5.a. Penerimaan Pembiayaan	3.893.451.613,32	23.588.791.075,98

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan Rp3.893.451.613,32 terealisasi sebesar Rp3.893.451.613,32 atau 100%.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.A.5.a.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 ini merupakan penerimaan SiLPA Tahun 2019. Secara rinci nilai penerimaan SiLPA Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Kas di Kas Daerah	Rp	67.974.346,52
b. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sungai Dareh	Rp	263.387.688,00
c. Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas	Rp	831.002.168,80
d. Saldo Akhir Dana BOS	Rp	2.309.451.372,00
e. Saldo Akhir Dana BOS Lebih Salur	Rp	385.760.000,00
f. SP2D No.03451/SP2D-1.03.01/2019 kelebihan debet oleh Bank	Rp	24.908.068,00
g. Salah setor Bank/ Penerimaan Puskesmas Beringin Sakti	Rp	(1.543.000,00)
h. Salah setor Bank/ zakat masuk ke rekening Kas Daerah	Rp	(1.467.242,00)
i. Salah setor Bank/ zakat masuk ke rekening Kas Daerah	Rp	(1.072.603,00)
j. Piutang atas Pembatalan Kontrak Kerja Tahun 2017 No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017	Rp	13.050.752,00
k. Kas di Bendahara Penerimaan / Jasa Giro BOS 2018	Rp	2.003.063,00
l. SP2D No.5711/LS/2016 kekurangan debet oleh Bank Nagari (telah disetor ke CV. Mulla Karya tgl 26/04/2021)	Rp	(3.000,00)
Jumlah	Rp	3.893.451.613,32

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.5.b. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	2.500.000.000,00

Terdapat realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp0,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	8.334.425.206,49	3.893.451.613,32

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 sebesar Rp8.334.425.206,49 sedangkan SiLPA Tahun 2019 sebesar Rp3.893.451.613,32. Bila dibandingkan SiLPA Tahun 2020 dengan Tahun 2019 terjadi kenaikan SiLPA sebesar Rp4.440.973.593,17 atau 114,06 %.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Secara rinci Nilai SiLPA Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

a. Kas di Kas Daerah	Rp	6.154.888.601,54
b. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sungai Dareh	Rp	793.861.071,00
c. Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai	Rp	732.706.761,95
d. Saldo Akhir Dana BOS	Rp	639.921.020,00
e. Piutang atas Pembatalan Kontrak Kerja Tahun 2017 No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017	Rp	13.050.752,00
f. SP2D No.5711/LS/2016 kekurangan debet oleh Bank Nagari (telah disetor ke CV. Mulla Karya tgl 26/04/2021)	Rp	(3.000,00)
Jumlah	Rp	8.334.425.206,49

Uraian Perhitungan SiLPA Tahun 2020 sebagai berikut:

Surplus/Defisit LRA	Rp	4.440.973.593,17
Pembiayaan Netto	Rp	3.893.451.613,32
SiLPA LRA Sebelum Koreksi	Rp	8.334.425.206,49
Koreksi SiLPA	Rp	0,00
SiLPA LRA Setelah Koreksi	Rp	8.334.425.206,49



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menggambarkan perubahan atas Saldo Anggaran Lebih dimana pada akhir Tahun 2019 terdapat Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp3.893.451.613,32 dan terjadi kenaikan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2020 sebesar Rp4.440.973.593,17 sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2020 menjadi Rp8.334.425.206,49.

Rincian perhitungan LPSAL sebagai berikut.

Surplus/ (Defisit LRA)	Rp	4.440.973.593,17
Pembiayaan Netto	Rp	<u>3.893.451.613,32</u>
SiLPA LRA sebelum koreksi	Rp	8.334.425.206,49
Koreksi Silpa:	Rp	0,00
Jumlah Koreksi	Rp	0,00
SiLPA LRA setelah koreksi	Rp	<u>8.334.425.206,49</u>



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.C. NERACA

V.C.1. ASET

Neraca Kabupaten Dharmasraya merupakan Neraca yang kelima belas kali disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Neraca Kabupaten Dharmasraya menggambarkan posisi keuangan Kabupaten Dharmasraya mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2019.

Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2020 memiliki Aset sebesar Rp2.382.449.848.334,09, Kewajiban sebesar Rp33.651.510.666,07 dan Ekuitas sebesar Rp2.346.493.866.411,02.

Total Aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.382.449.848.334,09 turun sebesar Rp70.624.357.254,21 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.453.074.205.588,30 atau 2,88%. Penurunan nilai aset terjadi karena adanya perhitungan nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain yang mempengaruhi jumlah aset secara keseluruhan pada Tahun 2020.

Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.1.a. Aset Lancar	69.754.426.351,07	74.274.375.163,78

Aset Lancar adalah kas dan setara kas, serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar adalah aset dalam bentuk Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Setara Kas, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Dibayar Dimuka dan Persediaan. Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.754.426.351,07 mengalami penurunan sebesar Rp4.519.948.812,72 atau 6,09% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp74.274.375.163,78. Adapun rincian Aset Lancar pada Tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019

Aset Lancar		Tahun 2020	Tahun 2019
a.	Kas di Kas Daerah	6.154.888.601,54	88.799.569,52
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	991.000,00	5.395.063,00
d.	Kas di BLUD	1.526.712.732,95	1.094.990.941,80
e.	Kas di BOS	645.579.320,00	2.695.211.372,00
f.	Investasi Jangka Pendek	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Lancar		Tahun 2020	Tahun 2019
g.	Piutang Pajak	34.309.133.716,00	32.002.201.142,00
h.	Penyisihan Piutang Pajak	(24.365.360.319,38)	(21.818.557.651,65)
i.	Piutang Retribusi	242.685.161,00	138.133.361,00
j.	Penyisihan Piutang Retribusi	(100.954.575,00)	(110.949.906,00)
k.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.524.570.411,00	4.063.752.034,00
l.	Penyisihan Piutang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	(17.622.852,06)	(21.313.705,91)
m.	Piutang Lain - lain PAD yang Sah	5.821.956.799,88	12.310.601.825,87
n.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(923.326.882,67)	(546.175.917,56)
o.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	6.505.389.322,00	3.072.369.696,00
p.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	8.967.719.269,00	3.389.783.336,00
q.	Belanja Dibayar Dimuka	231.012.527,83	169.315.624,28
r.	Piutang Lainnya	13.050.752,00	13.050.752,00
s.	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.305.075,20)	(1.305.075,20)
t.	Persediaan	27.219.306.442,17	37.729.072.702,63
Jumlah		69.754.426.351,07	74.274.375.163,78

Saldo masing-masing Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.1.a.1 Kas di Kas Daerah	6.154.888.601,54	88.799.569,52

Kas di Kas Daerah merupakan rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Dharmasraya adalah Bank Nagari Cabang Pulau Punjung. Penunjukan Bank Nagari sebagai bank umum untuk menyimpan uang daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/1/KPTS-BUP/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung sebagai Kas Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan rekening nomor 1403.0101.00075-4, serta diperkuat dengan Perjanjian Kerjasama antara Bendahara Umum Kabupaten Dharmasraya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung Nomor 900/362/DPPKD-2012 dan Nomor PKS/001/PL/DIR06-2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Pelayanan Perbankan dan Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Untuk mempermudah penerimaan pendapatan, pada tahun 2020 Bendahara Umum Daerah membuka rekening kas daerah pada BRI Kantor Cabang Dharmasraya dengan Perjanjian Kerjasama antara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Pengelolaan Keuangan Nomor 900/733/BKD-2020 tanggal 1 September 2020 dengan nomor rekening 0616.01-000699-30-5.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo akhir Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 berdasarkan rekening koran Bank Nagari Cabang Pulau Punjung adalah Rp6.154.888.601,54, sedangkan saldo rekening koran pada BRI Kantor Cabang Dharmasraya adalah Rp0,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.1.a.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Saldo di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum disetor kembali ke Kas Daerah pada akhir periode pembukuan. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.1.a.3 Kas di Bendahara Penerimaan	991.000,00	5.395.063,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019.

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2020 dan 2019 terdiri dari.

Tabel 5.2.2
Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2020 dan 2019

No	OPD/Uraian	2020	2019
1	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan	0	2.003.063,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	991.000,00	282.000,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan	0	3.110.000,00
	Jumlah	991.000,00	5.395.063,00

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2020 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp991.000,00 adalah pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor tanggal 30 Desember 2020, telah disetor ke kas daerah tanggal 2 Januari 2021 sebesar Rp991.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2019 yang telah disetor Tahun 2020 :

1. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan adalah penerimaan bunga tabungan Dana BOS Tahun 2018 yang belum disetor ke Kas Daerah Tahun 2019 sebesar Rp2.003.063,00. Penyetoran ke kasda dilaksanakan pada Tahun 2020 dengan rincian setoran tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp21.666,00, Rp20.882,00, Rp5.135,00, Rp32.340,00, Rp111.092,00, setoran tanggal 6 Maret 2020 sebesar Rp1.434.060,00, dan setoran tanggal 2 April 2020 sebesar Rp 377.888,00.
2. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan adalah pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp282.000,00 yang disetor ke kas daerah tanggal 2 Januari 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan atas pungutan retribusi pelayanan kesehatan RSUD Sungai Rumbai tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.110.000,00 yang disetor ke kas daerah tanggal 2 Januari 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.1.a.4 Kas di Kas BLUD	1.526.712.732,95	1.094.990.941,80

Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2020 memiliki 16 unit Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak pada bidang kesehatan yaitu 14 unit Badan Layanan Umum UPT Puskesmas dan 2 unit Badan Layanan Umum RSUD yaitu RSUD Sungai Dareh dan RSUD Sungai Rumbai.

Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sungai Dareh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/460/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan RSUD Sungai Dareh untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh di Kabupaten Dharmasraya.

Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sungai Rumbai ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/462/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPT Puskesmas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya dengan uraian sebagai berikut.

14. SK Nomor 188.45/463/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
15. SK Nomor 188.45/464/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
16. SK Nomor 188.45/465/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. SK Nomor 188.45/466/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. SK Nomor 188.45/467/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. SK Nomor 188.45/468/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. SK Nomor 188.45/469/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. SK Nomor 188.45/470/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. SK Nomor 188.45/471/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
23. SK Nomor 188.45/472/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. SK Nomor 188.45/473/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. SK Nomor 188.45/474/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
26. SK Nomor 188.45/475/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
27. SK Nomor 188.45/476/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Beringi Sakti sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Adapun rincian saldo yang ada direkening BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.3
Saldo Kas di BLUD Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Kas di BLUD Tahun 2020			Jumlah	2019
		Kas Di Bank	Kas di Bendahara Penerimaan	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7
1	RSUD Sungai Dareh	793.861.071,00			793.861.071,00	263.387.688,00
2	RSUD Sungai Rumbai	0,00		102.400,00	102.400,00	0,00
3	Puskesmas Sungai Rumbai	3.372.729,00			3.372.729,00	43.357.433,00
4	Puskesmas Sungai Limau	2.616.339,70		51.300,00	2.667.639,70	35.198.564,00
5	Puskesmas Sitiung II	57.992.850,00		36.600,00	58.029.450,00	54.163.350,00
6	Puskesmas Padang Laweh	1.830.578,00	470.000,00		2.300.578,00	23.364.500,00
7	Puskesmas Sungai Dareh	1.193.642,00			1.193.642,00	19.335.680,00
8	Puskesmas Silago	5.084.754,00			5.084.754,00	42.741.272,00
9	Puskesmas Gunung Medan	9.426,00			9.426,00	122.056,18
10	Puskesmas Sitiung I	216.926.251,62	6.100		216.932.351,62	171.176.513,62



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Kas di BLUD Tahun 2020			Jumlah	2019
		Kas Di Bank	Kas di Bendahara Penerimaan	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7
11	Puskesmas Koto Baru	321.977.230,00			321.977.230,00	278.901.074,00
12	Puskesmas Timpeh	13.227.864,00		811.352,00	14.039.216,00	63.281.172,00
13	Puskesmas Sialang	76.360.665,00			76.360.665,00	48.492.615,00
14	Puskesmas Tiumang	2.601.058,00			2.601.058,00	50.680.288,00
15	Puskesmas Koto Besar	24.763.848,75		0,32	24.763.849,07	788.736,00
16	Puskesmas Beringin Sakti	3.416.673,56			3.416.673,56	0,00
JUMLAH		1.525.234.980,63	476.100,00	1.001.652,32	1.526.712.732,95	1.094.990.941,80

Saldo di BLUD Tahun 2020 sebesar Rp1.526.712.732,95 terdiri atas Saldo Kas di Bank sebesar Rp1.525.234.980,63, saldo Kas di Bendahara Penerimaan BLUD sebesar Rp476.100,00, dan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD sebesar Rp1.001.652,32.

Atas saldo Kas BLUD di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.001.652,32 terdapat saldo Utang PFK atas pajak negara per 31 Desember 2020 sebesar Rp144.900,00 yang belum disetorkan oleh Bendahara BLUD RSUD Sungai Rumbai sebesar Rp102.400,00 atas PPN telah disetor kes negara pada tanggal 7 Maret 2021 dan Puskesmas Sungai Limau sebesar Rp42.500,00 atas PPh Pasal 21 telah disetor ke kas negara tanggal 22 Maret 2021.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.1.a.5 Setara Kas	645.579.320,00	2.695.211.372,00

Akun ini menampung kas selain sisa Uang Muka Kerja (Uang Persediaan/UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang merupakan pemotongan/pungutan PPN dan PPh yang timbul atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal yang belum disetor ke Kas Negara dan saldo Kas Dana BOS serta rekening operasional lainnya di sekolah negeri pada saat tanggal neraca.

Sekolah Negeri pengelola Dana BOS Tahun 2020 terdiri dari 146 SD Negeri dan 33 SMP Negeri. Saldo Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp645.579.320,00 terdiri dari kas dibank sebesar Rp147.756.494,00 dan kas tunai di bendahara pengeluaran sebesar Rp497.822.826,00 termasuk didalamnya PPN dan PPh 21 yang belum disetor ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran SDN 09 Kotobesar sebesar Rp4.755.100,00 dan pajak restoran belum disetor ke kas daerah sebesar Rp903.200,00. Pajak Negara dan Pajak daerah tersebut telah disetor ke kas negara dan daerah pada bulan April 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Dana BOS Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 3** Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.1.a.6 Piutang Pajak	34.309.133.716,00	32.002.201.142,00

Piutang Pajak terdiri dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Piutang Pajak Hotel, dan Piutang Pajak Restoran. Piutang Pajak Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2020	2019
1	PBB-P2	33.285.365.626,00	30.925.575.425,00
2	Pajak Penerangan Jalan	1.020.968.090,00	1.076.625.717,00
3	Pajak Hotel	2.800.000,00	0,00
	Jumlah	34.309.133.716,00	32.002.201.142,00

1. Piutang PBB-P2

Piutang PBB-P2 sebagian besar merupakan piutang sewaktu pelimpahan dari Pemerintah Pusat (KPP Pratama Solok) kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor BA-47/WPJ.27/KP.06/2014 pada tanggal 27 Februari 2014.

Penagihan Piutang PBB-P2 masih bersifat pasif dengan pola penagihan piutang dilakukan apabila ada yang mengurus BPHTB untuk diminta membayar seluruh tagihan PBB yang ada pada daftar piutang dan aplikasi SIMPBB.

Banyaknya nilai piutang PBB-P2 yang belum tertagih tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti belum optimalnya melakukan verifikasi dan validasi data piutang ke lapangan semenjak pengalihan PBB-P2 ke Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Verifikasi dan validasi data piutang dimaksud agar data-data piutang PBB-P2 tersebut diyakini kebenarannya dan objek pajaknya memang ada.

Surat Penetapan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp4.506.043.375,00 dengan penerimaan pokok PBB-P2 Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.999.252.949,00 dan penerimaan denda tahun 2020 sebesar Rp21.825,00. Nilai piutang yang timbul atas penerbitan dan penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 per-31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.506.790.426,00.

Penerimaan piutang PBB tahun-tahun sebelumnya pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp147.000.225,00 yang mengurangi pokok piutang PBB dan penerimaan denda sebesar Rp15.959.786,00 tidak mengurangi pokok piutang.

Nilai piutang PBB-P2 dari Tahun 1996 sampai dengan 2019 per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.778.575.200,00 ditambah dengan SKP Tahun 2020 sebesar Rp4.506.043.375,00 dikurangi penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp1.999.252.949,00, maka saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp33.285.365.626,00. Piutang PBB-P2 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.2.4
Piutang PBB-P2 Tahun 2020 dan 2019

No	Tahun Pajak	Piutang Per 31 Desember 2019	Ketetapan Tahun 2020	Penerimaan LRA 2020	Penerimaan Pokok Piutang PBB-P2	Penerimaan Denda PBB-P2	Saldo Piutang Per 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=3+4-6
1	2020	-	4.506.043.375,00	1.999.274.774,00	1.999.252.949,00	21.825,00	2.506.790.426,00
2	2019	2.289.114.953,00		112.363.988,00	101.847.415,00	10.516.573,00	2.187.267.538,00
3	2018	2.375.663.583,00	-	32.294.734,00	28.488.244,00	3.806.490,00	2.347.175.339,00
4	2017	2.039.445.548,00	-	11.124.178,00	10.255.846,00	868.332,00	2.029.189.702,00
5	2016	2.245.090.395,00	-	6.954.629,00	6.258.394,00	696.235,00	2.238.832.001,00
6	2015	2.309.607.062,00	-	222.482,00	150.326,00	72.156,00	2.309.456.736,00
7	2014	2.799.125.593,00	-	-	-	-	2.799.125.593,00
8	1996 s.d. 2013	16.867.528.291,00	-	-	-	-	16.867.528.291,00
	Jumlah	30.925.575.425,00	4.506.043.375,00	2.162.234.785,00	2.146.253.174,00	15.981.611,00	33.285.365.626,00

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama Tahun 2020 sebesar Rp2.162.234.785,00 terdiri dari penerimaan Pokok Piutang sebesar Rp2.146.253.174,00 dan penerimaan Denda Piutang PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp15.981.611,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tahun	PBB-P2		Penerimaan PBB-P2
	Pokok	Denda	
2020	1.999.252.949,00	21.825,00	1.999.274.774,00
2019	101.847.415,00	10.516.573,00	112.363.988,00
2018	28.488.244,00	3.806.490,00	32.294.734,00
2017	10.255.846,00	868.332,00	11.124.178,00
2016	6.258.394,00	696.235,00	6.954.629,00
2015	150.326,00	72.156,00	222.482,00
2014	-	-	-
1996-2013	-	-	-
Jumlah	2.146.253.174,00	15.981.611,00	2.162.234.785,00

Dari hasil proses validasi dan pemutakhiran sementara terhadap data Piutang PBB-P2 yang berumur 5 tahun (2016 s.d. 2021) diketahui terdapat data piutang yang tidak valid sebanyak 3.193 obyek pajak pada 36 Nagari dengan nilai sebesar Rp1.002.832.625,00. Untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data piutang PBB-P2 lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Piutang PPJ per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.020.968.090,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.5
Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang 2020				Piutang 2019			
	Perusahaan	Tagihan	Nilai	Tgl Setor	Perusahaan	Tagihan	Nilai	Tgl Setor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PT PLN (Persero)	Des-20	979.410.413,00	01/15/21	PT PLN (Persero)	Des-20	971.279.892,00	15/01/20
2	PT Incasi Raya	Jun-20	4.172.954,00	02/02/21	PT Andalas Wahana Berjaya	Nov-19	3.650.800,00	02/01/20
3	PT Incasi Raya	Nov-20	5.926.805,00	01/08/21		Des-19	4.851.387,00	18/02/20
4	PT Incasi Raya	Des-20	5.315.740,00	02/02/21	PT Selago Makmur Plantantion	Sept - Des 19	17.160.519,00	07/02/20
5	PT Sumbar Andalas Kencana	Des-20	6.668.458,00	01/22/21	PT Incasi Raya Pangian	Sept - Des 19	12.114.520,00	26/02/20
6	PT Selago Makmur Plantantion	Des-20	6.325.127,00	01/11/21	PT Sumbar Andalas Kencana	Agus-Des 19	28.051.839	09/03/20
7	PT. DL	Des-20	9.084.351,00	01/20/21	PT Bina Pratama Sakato Jaya	Agu-19	8.757.812,00	23/03/20
8	PT Andalas Wahana Berjaya	Des-20	4.064.242,00	02/22/21		Sep-19	7.833.388,00	23/03/20
						Okt-19	8.241.812,00	23/03/20
						Nov-19	7.513.138,00	23/03/20
						Des-19	7.170.610,00	23/03/20
	JUMLAH		1.020.968.090,00				1.076.625.717,00	

Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.020.968.090,00 terdiri dari Piutang PPJ PLN bulan Desember 2020 sebesar Rp979.410.413,00 yang telah diterima di Kas Daerah tanggal 15 Januari 2021 dan Piutang PPJ Non PLN sebesar Rp41.557.677,00 yang telah diterima penerimaannya pada Tahun 2021. Terdapat penerimaan PPJ Non PLN bulan Juni 2020 atas setoran PT. Incasi Raya sebesar Rp4.172.954,00 salah setor oleh pihak Bank Nagari ke rekening lain tanggal 14 Agustus 2020 sehingga penerimaannya dikoreksi kembali oleh pihak Bank Nagari ke kas daerah tanggal 2 Februari 2021.

3. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel Tahun 2020 sebesar Rp2.800.000,00 merupakan piutang pajak Hotel Jakarta Indah penagihan Bulan Desember 2020 yang telah disetor ke kas daerah tanggal 6 Januari 2021 sebesar Rp2.800.000,00. Piutang Pajak Hotel Tahun 2019 sebesar Rp0,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(24.365.360.319,38)	(21.818.557.651,65)

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 24.365.360.319,38 terdiri dari.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2020	2019
1	Penyisihan Piutang PBB-P2	24.360.241.478,93	21.813.174.523,07
2	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	5.104.840,45	5.383.128,58
3	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	14.000,00	-
	Jumlah	24.365.360.319,38	21.818.557.651,65

Penyisihan Piutang PBB-P2 sampai Tahun 2020 sebesar Rp24.360.241.478,93 dengan rincian dan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.2.6
Penyisihan Piutang PBB-P2 Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Umur (Th)	Kualitas	% Cad.	Jumlah Penyisihan
1	Tahun Pajak 2020	2.506.790.426,00	< 1	Lancar	0,5	12.533.952,13
2	Tahun Pajak 2019	2.187.267.538,00	1 s.d 2	Kurang Lancar	10	218.726.753,80
3	Tahun Pajak 2018	2.347.175.339,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.173.587.669,50
4	Tahun Pajak 2017	2.029.189.702,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.014.594.851,00
5	Tahun Pajak 2016	2.238.832.001,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.119.416.000,50
6	Tahun Pajak 2015	2.309.456.736,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.154.728.368,00
7	Tahun Pajak 2014	2.799.125.593,00	> 5	Macet	100	2.799.125.593,00
8	Pajak 1996 s.d 2013	16.867.528.291,00	> 5	Macet	100	16.867.528.291,00
	Jumlah	33.285.365.626,00				24.360.241.478,93

Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2020 sebesar Rp5.104.840,45 dengan perhitungan sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Umur (Th)	Kualitas	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan
1	PPJ PLN	979.410.413,00	< 1	Lancar	0,5	4.897.052,07
2	PPJ Non PLN	41.557.677,00	< 1	Lancar	0,5	207.788,39
	Jumlah	1.020.968.090,00				5.104.840,45

Penyisihan Piutang Pajak Hotel Tahun 2020 adalah sebesar Rp14.000,00 dari perhitungan (0,5% x Rp2.800.000,00.)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.1.a.7 Piutang Retribusi	242.685.161,00	138.133.361,00

Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp242.685.161,00 terdiri dari.

Uraian	2020	2019
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	54.967.000,00	24.805.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	121.046.361,00	30.096.361,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	66.671.800,00	83.232.000,00
Jumlah	242.685.161,00	138.133.361,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar dikelola oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Retribusi bersumber dari MoU Pengurus pasar yang diketahui Wali Nagari dan Dinas terkait untuk memungut retribusi pelayanan pasar. MoU untuk pemungutan retribusi pelayanan pasar pada Tahun 2020 masih memakai MoU Tahun 2019 karena masa MoU berlaku untuk 2 tahun. Adapun Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2020 dan 2019 berasal dari.

Tabel 5.2.7
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Piutang 2019	MoU Pasar Penetapan target 2020		Penerimaan 2020	Sisa Piutang 2019	Piutang 2020	Total Piutang 2020
			Nomor	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8
1	Pasar Sitiung	500.000	0851/004/MOU/Pasar Sitiung - 2019	6.000.000	6.500.000			-
2	Pasar Koto Agung	-	0851/019/MOU/Pasar Koto Agung - 2019	6.000.000	6.000.000			-
3	Pasar Lawai	375.000	0851/005/MOU/Pasar Lawai - 2019	1.500.000	1.875.000			-
4	Pasar Pulau Punjung	5.300.000	0851/001/MOU/Pasar Pulau Punjung - 2019	9.000.000	1.850.000	5.300.000	7.150.000	12.450.000
5	Pasar Sikabau	1.900.000	0851/018/MOU/Pasar Sikabau - 2019	5.400.000	3.900.000	-	3.400.000	3.400.000
6	Pasar Sopan Jaya	-	0851/006/MOU/Pasar Sopan Jaya - 2019	7.020.000	6.020.000		1.000.000	1.000.000
7	Pasar Pinang Makmur	-	0851/007/MOU/Pasar Pinang Makmur - 2019	4.500.000	4.500.000		-	-
8	Pasar Marga Makmur	-	0851/008/MOU/Pasar Marga Makmur - 2019	2.520.000	2.520.000		-	-
9	Pasar Trimulya	-	0851/011/MOU/Pasar Trimulya - 2019	4.200.000	-		4.200.000	4.200.000
10	Pasar Beringin Sakti	-	0851/010/MOU/Pasar Beringin Sakti - 2019	3.504.000	3.504.000		-	-
11	Pasar Lagan Jaya	-	0851/002/MOU/Pasar Lagan Jaya - 2019	2.600.000	-		2.600.000	2.600.000
12	Pasar Abai Siat	-	0851/012/MOU/Pasar Abai Siat - 2019	3.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000
13	Pasar Mayang Taurai	-	0851/023/MOU/Pasar Mayang Taurai - 2019	3.600.000	3.600.000		-	-
14	Pasar Lubuk Karya	-	0851/025/MOU/Pasar Lubuk Karya - 2019	2.400.000	-		2.400.000	2.400.000
15	Pasar Koto Laweh	1.800.000	0851/024/MOU/Pasar Koto Laweh - 2019	3.000.000	1.800.000		3.000.000	3.000.000
16	Pasar Koto Ranah	4.008.000	0851/015/MOU/Pasar Koto Ranah - 2019	3.000.000	4.008.000		3.000.000	3.000.000
17	Pasar Sungai Limau	1.500.000	0851/027/MOU/Pasar Sungai Limau - 2019	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000
18	Pasar Tanjung Alam	540.000	0851/025/MOU/Pasar Tanjung Alam - 2019	540.000	540.000		540.000	540.000
19	Pasar Silago	365.000	0851/003/MOU/Pasar Silago - 2019	2.520.000	365.000		2.520.000	2.520.000
20	Pasar Ampang Kuranji Silago	177.000	0851/002/MOU/Pasar Ampang Kuranji Silago - 2019	1.020.000	177.000		1.020.000	1.020.000
21	Pasar Lubuk Karak	-	0851/016/MOU/Pasar Lubuk Karak - 2019	2.100.000	-		2.100.000	2.100.000
22	Pasar Sungai Rumbai	-	0851/013/MOU/Pasar Sungai Rumbai - 2019	7.200.000	7.200.000		-	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Piutang 2019	MoU Pasar Penetapan target 2020		Penerimaan 2020	Sisa Piutang 2019	Piutang 2020	Total Piutang 2020
			Nomor	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8
23	Pasar Sialang Gaung	5.800.000	0851/021/MOU/Pasar Sialang Gaung - 2019	6.600.000	6.300.000		6.100.000	6.100.000
24	Pasar Ampang Kuranji Kec Koto Baru	-	0851/022/MOU/Pasar Lagan Jaya - 2019	1.020.000	843.000		177.000	177.000
25	Pasar Koto Baru	2.040.000	0851/020/MOU/Pasar Koto Baru - 2019	5.040.000	3.640.000		3.440.000	3.440.000
26	Pasar Alahan Nan Tigo	-	0851/026/MOU/Pasar AlahanNan Tigo - 2019	1.020.000	-		1.020.000	1.020.000
27	Pasar Ampalu	500.000	0851/014/MOU/Pasar Ampalu - 2019	6.000.000	3.500.000		3.000.000	3.000.000
	JUMLAH	24.805.000		101.804.000	71.642.000	5.300.000	49.667.000	54.967.000

Penerimaan Retribusi tahun 2020 adalah sebesar Rp71.642.000,00 terdiri dari penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp52.137.000,00 dan pelunasan piutang Tahun 2019 sebesar Rp19.505.000,00.

Nilai Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp54.967.000,00 yang berasal dari piutang 2020 sebesar Rp49.667.000,00 dan sisa piutang 2019 sebesar Rp5.300.000,00.

b. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2020 sebesar Rp121.046.361,00. Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2.8
Daftar Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2020 dan 2019

No	Perusahaan	Piutang 2020	Piutang 2019
A	Tahun 2020		
1	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	6.050.000,00	-
2	PT. Indosat	20.075.000,00	-
3	Excelindo	11.275.000,00	-
4	Protelindo	49.050.000,00	-
5	Era Bangun Towerindo	4.500.000,00	-
B	Tahun 2019		
1	PT. Solusi Tunas Pratama	2.750.000,00	2.750.000,00
C	Tahun 2017		
1	PT. Telkomsel	5.500.000,00	5.500.000,00
2	PT. Tower Bersama	550.000,00	550.000,00
D	Tahun 2015		
1	PT. Tower Bersama	8.995.321,00	8.995.321,00
2	PT. Indosat	12.301.040,00	12.301.040,00
	Jumlah	121.046.361,00	30.096.361,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2020 sebesar Rp121.046.361,00 terdiri dari piutang tahun 2020 sebesar Rp90.950.000,00 dan piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp30.096.361,00 terdiri dari :

- 1) Piutang Tahun 2019 sebesar Rp2.750.000,00 berasal dari piutang PT Solusi Tunas Pratama.
- 2) Piutang Tahun 2017 sebesar Rp6.050.000,00 berasal dari piutang PT Telkomsel sebesar Rp5.500.000,00 dan PT Tower Bersama sebesar Rp550.000,00.
- 3) Piutang Tahun 2015 sebesar Rp21.296.361,00 terdiri dari piutang PT Tower Bersama sebesar Rp8.995.321,00 dan PT Indosat sebesar Rp12.301.040,00.

Tidak adanya perkembangan penerimaan piutang pada tahun sebelumnya dan tidak maksimalnya penerimaan retribusi pada Tahun 2020 karena terbatasnya ruang gerak untuk melakukan penagihan retribusi disebabkan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

c. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp66.671.800,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.9
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Piutang 2020	Piutang 2019
1	Dinas Pendidikan	64.246.000,00	80.449.000,00
	Rumah Dinas	64.246.000,00	80.449.000,00
2	Dinas Perkimtan	1.825.800,00	2.183.000,00
	Sewa Rusunawa	1.825.800,00	2.183.000,00
3	Kecamatan Koto Baru	600.000,00	600.000,00
	Kendaraan Dinas	600.000,00	600.000,00
Jumlah		66.671.800,00	83.232.000,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp66.671.800,00 terdiri dari:

- 1) Retribusi pemakaian rumah dinas di Dinas Pendidikan sebesar Rp64.246.000,00 yang berasal dari piutang Tahun 2017 sebesar Rp15.870.000,00, Piutang Tahun 2018 sebesar Rp33.952.000,00 dan piutang Tahun 2019 sebesar Rp14.424.000,00.
- 2) Retribusi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 sebesar Rp1.825.800,00 telah disetor ke kas daerah tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp281.000,00, tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp662.400,00 dan tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp882.400,00 dan piutang Tahun 2019 sebesar Rp2.183.000,00 telah disetor ke kas daerah tanggal 14 Januari 2021.
- 3) Retribusi pemakaian kendaraan dinas Tahun 2018 di Kecamatan Koto Baru yang belum disetor sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp600.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian piutang pemakaian kekayaan daerah atas rumah dinas pada Dinas Pendidikan terdapat pada **Lampiran 15**.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Penyisihan Piutang Retribusi	(100.954.575,00)	(110.949.906,00)

Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2020 merupakan Penyisihan atas Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Penyisihan Piutang Rumah Susun Sewa Sederhana (rusunawa) pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018 pada Kecamatan Koto Baru dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.10
Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2020

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai
				Penyisihan
Retribusi Pelayanan Pasar				
Tahun 2019	5.300.000	Macet	100%	5.300.000,00
Tahun 2020	49.667.000	Lancar	0,5%	248.335,00
Jumlah	54.967.000,00			5.548.335,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
Tahun 2015	21.296.361,00	Macet	100%	21.296.361,00
Tahun 2017	6.050.000,00	Macet	100%	6.050.000,00
Tahun 2019	2.750.000,00	Macet	100%	2.750.000,00
Tahun 2020	90.950.000,00	Lancar	0,50%	454.750,00
Jumlah	121.046.361,00			30.551.111,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Tahun 2017	15.870.000,00	Macet	100%	15.870.000,00
Tahun 2018	33.952.000,00	Macet	100%	33.952.000,00
Tahun 2018	600.000,00	Macet	100%	600.000,00
Tahun 2019	14.424.000,00	Macet	100%	14.424.000,00
Tahun 2020	1.825.800,00	Lancar	0,5%	9.129,00
Jumlah	66.671.800,00			64.855.129,00
Total	242.685.161,00			100.954.575,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.1.a.8 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.524.570.411,00	4.063.752.034,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah piutang deviden yang akan diterima dari penempatan modal pada Bank Nagari, PT. Balairung Citrajaya dan PT. BPR Pulau Punjung.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.524.570.411,00 terdiri dari piutang deviden Bank Nagari Tahun 2020 sebesar Rp3.515.054.721,00, masuk ke kas daerah tanggal 27 April 2021 dan piutang deviden PT BPR Pulau Punjung sebesar Rp9.515.690,00 yang masuk ke kas daerah tanggal 29 Maret 2021.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.622.852,06	21.313.705,91

Nilai Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.622.852,06.

No	Uraian	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1.	Tahun 2020				
	Deviden BPR Pulau Punjung	9.515.690,00	Lancar	0,5%	47.578,45
	Deviden Bank Nagari	3.515.054.721,00	Lancar	0,5%	17.575.273,61
	Jumlah	3.524.570.411,00			17.622.852,06

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.1.a.9 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.821.956.799,88	12.310.601.825,87

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp5.821.956.799,88 dan sebesar Rp12.310.601.825,87 yang terdiri dari:

Tabel 5.2.11
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Piutang BLUD	388.006.830,00	7.110.288.392,00
	- BLUD Puskesmas	353.569.200,00	499.089.400,00
	- BLUD RSUD Sungai Dareh	34.437.630,00	6.611.198.992,00
2	Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00	554.897.679,00
3	Piutang Air Minum UPT SPAM	386.391.650,00	297.616.250,00
4	Piutang Bunga Deposito	10.080.637,00	100.205.473,00
5	Piutang TGR	4.477.450.012,88	4.246.994.031,87
6	Piutang Pengembalian Belanja	5.129.991,00	0,00
7	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah	0,00	600.000,00
	Jumlah	5.821.956.799,88	12.310.601.825,87



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Piutang BLUD

Piutang BLUD pada per 31 Desember 2020 sebesar Rp388.006.830,00 terdiri dari piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp353.569.200,00 dan Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp34.437.630,00.

Piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp353.569.200,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.2.12

Piutang BLUD Puskesmas Tahun 2020

No	SKPD/Unit Kerja	Piutang 2018	Piutang 2019	Piutang 2020	Jumlah Piutang (Rp)	Total Penerimaan sebelum LKPD terbit	Sisa Piutang 2020 yang belum diterima	Tanggal Pembayaran oleh BPJS
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6-7	9
1	Sungai Rumbai			26.952.300,00	26.952.300,00	23.482.300,00	3.470.000,00	- 23.374.000 tgl 18/01/2021 - 108.300 tgl 15/01/2021
2	Sungai Limau			21.988.000,00	21.988.000,00	21.916.000,00	72.000,00	- 21.916.000 tgl 18/01/2021
3	Sitiung II			22.338.400,00	22.338.400,00	22.338.400,00	0,00	- 8.105.000 tgl 11/01/2021 - 9.050.000 tgl 19/01/2021 - 113.400 tgl 15/01/2021 - 5.070.000 tgl 08/03/2021
4	Padang Laweh			13.058.000,00	13.058.000,00	12.980.000,00	78.000,00	- 6.010.000 tgl 5/01/2021
5	Sungai Dareh			5.315.800,00	5.315.800,00	5.315.800,00	0,00	- 1.350.000 tgl 18/01/2021 - 5.620.000 tgl 26/01/2021
6	Silago			86.355.400,00	86.355.400,00	86.352.500,00	2.900,00	- 75.505.000 tgl 05/01/2021 - 20.400 tgl 15/01/2021 - 10.827.100 tgl 2/03/2021
7	Gunung Medan			3.887.000,00	3.887.000,00	3.887.000,00	0,00	- 2.978.000 tgl 11/01/2021 - 57.000 tgl 15/01/2021 - 852.000 tgl 01/02/2021
8	Sitiung I			36.195.600,00	36.195.600,00	36.195.600,00	0,00	- 210.600 tgl 15/01/2021 - 26.025.000 tgl 18/01/2021 - 9.960.000 tgl 16/03/2021
9	Koto Baru			86.506.000,00	86.506.000,00	86.506.000,00	0,00	- 81.000 tgl 15/01/2021 - 86.425.000 tgl 18/01/2021
10	Timpeh			24.494.500,00	24.494.500,00	24.494.500,00	0,00	- 7.370.000 tgl 5/01/2021 - 3.600.000 tgl 11/01/2021 - 94.500 tgl 15/01/2021 - 6.010.000 tgl 18/01/2021 - 7.420.000 tgl 16/02/2021
11	Sialang	2.125.000,00	1.500.000,00	16.200,00	3.641.200,00	16.200,00	3.625.000,00	- 16.200 tgl 15/01/2021
12	Tiumang			2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	- 2.500.000 tgl 5/01/2021 - 50.000 tgl 15/01/2021
13	Koto Besar			19.517.000,00	19.517.000,00	19.490.000,00	27.000,00	- 12.238.000 tgl 5/01/2021 - 7.252.000 tgl 11/01/2021
14	Beringin Sakti			770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	- 700.000 tgl 5/01/2021 - 70.000 tgl 15/01/2021
		2.125.000,00	1.500.000,00	349.944.200,00	353.569.200,00	346.294.300,00	7.274.900,00	

Piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp353.569.200,00 telah diterima sebagian piutangnya pada saat penyusunan LKPD 2020 sebesar Rp346.294.300,00 dan masih tersisa piutang yang belum diterima sebesar Rp7.274.900,00.

Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp34.437.630,00 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.2.13
Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2020

NO	Tanggal Lunas	STS	Uraian	Jumlah	Dibayar	Keterangan
1			Klaim Suku anak Dalam bulan Desember 2019	5.784.900,00		Belum Lunas
2	11-Jan-21	6	Klaim Pasien In Health bulan November 2020 - Pembayaran Klaim Pasien In Health bulan November 2020	520.130,00	520.130,00	Lunas
3	11-Jan-21	6	Klaim Pasien In Health bulan Desember 2020 - Pembayaran Klaim Pasien In Health bulan Desember 2020	327.400,00	327.400,00	Lunas
4	10,25,30 Maret 21	49,55, 60	Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan Januari 2020 - Pembayaran Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan Januari 2020	4.195.300,00	4.195.300,00	Lunas
5			Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan Februari 2020 - Pembayaran Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan Februari 2020	5.981.700,00		Belum Lunas
6	17-Feb-21	30	Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan Juli 2020 - Pembayaran Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan Juli 2020	4.243.500,00	4.243.500,00	Lunas
7	08-Jan-21	7	Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan November 2020 - Pembayaran Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan Nov 2020	9.372.800,00	9.372.800,00	Lunas
8	08-Jan-21	5, 7	Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan Desember 2020 - Pembayaran Klaim BPJS Ketenagakerjaan bulan Des 2020	4.011.900,00	4.011.900,00	Lunas
JUMLAH				34.437.630,00	22.671.030,00	

Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp34.437.630,00 telah diterima pada saat penyusunan LKPD 2020 sebesar Rp22.671.030,00, masih tersisa piutang yang belum diterima sebesar Rp11.766.600,00.

b. Piutang Dana Bergulir

Piutang Dana Bergulir merupakan piutang tagihan dana bergulir yang ada pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Dana bergulir tersebut berasal dari hibah Pemerintah Kabupaten Sijunjung saat pemekaran Kabupaten Dharmasraya. Piutang Dana Bergulir Tahun 2020 sebesar Rp554.897.679,00 tidak ada perubahan nilai piutang dari Tahun 2019. Tidak dilakukannya penagihan atas Piutang Dana Bergulir disebabkan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan serta tidak adanya piutang yang dapat ditagih dari debitur. Hal lain tidak bisanya dilakukan penagihan disebabkan alamat yang tidak ditemukan, pindah alamat, meninggal dunia, dan tidak mampu.

Adapun rincian Piutang Dana Bergulir Tahun 2020 dan 2019 terdapat di **Lampiran 16** pada Laporan Keuangan ini.

c. Piutang Air Minum UPT SPAM

Piutang Air Minum UPT SPAM per 31 Desember 2020 sebesar Rp386.391.650,00 berasal dari piutang Tahun 2019 sebesar Rp297.616.250,00 dikurangi dengan penerimaan piutang Tahun 2020 Rp94.644.300,00 dan penambahan piutang Tahun 2020 sebesar Rp183.419.700,00. Piutang dapat dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.2.14
Piutang Air Minum UPT SPAM Tahun 2020

No	Tahun Tunggakan	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)	Penerimaan Tahun 2020 (Rp)	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)
1	Tahun 2012	13.130.300,00	-	13.130.300,00
2	Tahun 2013	2.667.800,00	-	2.667.800,00
3	Tahun 2014	22.578.050,00	-	22.578.050,00
4	Tahun 2015	10.933.900,00	-	10.933.900,00
5	Tahun 2016	3.523.500,00	-	3.523.500,00
6	Tahun 2017	33.092.200,00	604.600,00	32.487.600,00
7	Tahun 2018	40.591.000,00	4.651.400,00	35.939.600,00
8	Tahun 2019	171.099.500,00	89.388.300,00	81.711.200,00
9	Jan- Nov 2020			135.634.400,00
10	Desember 2020			47.785.300,00
	Jumlah	297.616.250,00	94.644.300,00	386.391.650,00

d. Piutang Bunga Deposito

Piutang Bunga Deposito sebesar Rp10.080.637,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.15
Piutang Bunga Deposito Tahun 2019

No	Uraian		Bunga Deposito Oktober 2020	Bunga Acrual seharusnya diterima per 13 Nov 2020	Pembayaran Bunga Deposito Nov 2020	Sisa Bunga Deposito yang belum diterima
1	2		3	4	5	6=4-5
1	No. Rekening	1403.0301.301070-3				
	No. Seri Bilyet	143812				
	Nominal	5.000.000.000				
	Tanggal Bilyet	14-Sep-20				
	Tanggal Cair	13-Nov-20				
	Tingkat Suku Bunga	7,00%				
	Hari Akrua	30 hari				
	Bunga Akrua pe 31 Desember 2020	7,00%	29.166.667	28.225.807	18.145.170	10.080.637

Piutang Bunga Deposito Tahun 2020 bernilai sebesar Rp10.080.637,00 adalah kekurangan pembayaran bunga deposito Bank Nagari pada saat pencairan deposito pada tanggal 13 November 2020. Penerimaan bunga deposito hanya dibayarkan sebesar Rp18.145.170,00 terdapat kekurangan nilai bunga deposito sebesar Rp10.080.637,00. Pada saat laporan keuangan disusun, konfirmasi kekurangan bunga deposito dari Bank Nagari belum diterima.

e. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) pada Neraca per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp4.246.994.031,87, Penambahan nilai piutang selama Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp725.911.745,00, Pengurangan piutang sebesar Rp495.455.764,18 terdiri dari penyeteroran temuan sebelum penetapan SKP2KS sebesar Rp249.025.991,76 dan penyeteroran setelah penerbitan SKP2KS sebesar Rp246.429.772,42 sehingga nilai Piutang TGR Per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp4.477.450.012,88. Dapat dijelaskan pada perhitungan sebagai berikut.

➤ Piutang Tahun 2019	Rp 4.246.994.031,87
➤ Penambahan Piutang 2020	Rp 721.246.545,06
➤ Koreksi Piutang belum tercatat	Rp 4.665.200,13
➤ Penyeteroran sebelum penetapan SKP2KS	Rp (249.025.991,76)
➤ Penyeteroran setelah penetapan SKP2KS	<u>Rp (246.429.772,42)</u>
➤ Nilai Piutang Per 31 Desember 2020	Rp 4.477.450.012,88

Adapun rincian mengenai Piutang TGR Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 17** pada laporan keuangan ini.

f. Piutang Pengembalian Belanja

Piutang Pengembalian Belanja Tahun 2020 adalah piutang belanja bantuan kepada partai politik Tahun 2019 yang belum tercatat sebesar Rp5.129.991,00.

Piutang tersebut timbul sehubungan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Dharmasraya serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 09.I/LHP/XVIII.PDG/03/2020 atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, terdapat kelebihan pembayaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik periode Agustus 2019 pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.129.991,00.

g. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah

Piutang hasil penjualan aset daerah pada Tahun 2020 bernilai sebesar Rp0,00. Nilai piutang tahun 2019 sebesar Rp600.000,00 adalah merupakan penjualan Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan atas penjualan bongkaran atap gedung sekolah pada Tahun 2019 yang disetor ke kas daerah tahun 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(923.326.882,67)	(546.175.917,56)

Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp(923.326.882,67) per 31 Desember 2020 terdiri dari:

Tabel 5.2.16
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	2020	2019
a.	Penyisihan Piutang BLUD	(9.172.900,50)	(37.821.941,96)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	2020	2019
b.	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(462.518.051,08)	(462.518.051,08)
c.	Penyisihan Piutang Air Minum UPT SPAM	(34.099.561,50)	(24.096.927,00)
d.	Penyisihan Piutang Bunga Deposito	(50.403,18)	(501.027,38)
e.	Penyisihan Piutang TGR	(417.460.316,46)	(21.234.970,16)
f.	Piutang Pengembalian Belanja	(25.649,95)	0,00
g	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan	0,00	(3.000,00)
Jumlah		(923.326.882,67)	(546.175.917,58)

a) Penyisihan Piutang BLUD

Penyisihan Piutang BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.172.900,50 dengan terdapat pada piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp6.141.371,00 dan piutang BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp3.031.529,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.17
Penyisihan Piutang BLUD Tahun 2020

No.	Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Jasa Layanan BLUD Puskesmas				
	Tahun 2018	2.125.000,00	Macet	100%	2.125.000,00
	Tahun 2019	1.500.000,00	Macet	100%	1.500.000,00
	Januari s.d. November 2020	8.070.000,00	Kurang lancar	10%	807.000,00
	Desember 2020	341.874.200,00	Lancar	0,50%	1.709.371,00
	Jumlah	353.569.200,00			6.141.371,00
2	Jasa Layanan BLUD RSUD Sungai Dareh				
	Tahun 2019	5.784.900,00	Kurang lancar	10,00%	578.490,00
	Januari s.d. November 2020	24.313.430,00	Kurang lancar	10,00%	2.431.343,00
	Desember 2020	4.339.300,00	Lancar	0,50%	21.696,50
	Jumlah	34.437.630,00			3.031.529,50
	Total 1 + 2	388.006.830,00			9.172.900,50

b) Penyisihan Piutang Dana Bergulir sebesar Rp462.518.051,08

Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2020 sebesar Rp462.518.051,08 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.18
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2020

No	Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	(%) Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang
1	2	3	4	5	6
1	Kec. Pulau Punjung				
	a. s.d tanggal Jatuh Tempo	Lancar	-	0,5	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	(%) Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang
1	2	3	4	5	6
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	20.644.139,00	10	2.064.413,90
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	25.969.285,00	50	12.984.642,50
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	75.735.857,00	100	75.735.857,00
2	Kec. Sitiung				
	a. s.d tanggal Jatuh Tempo	Lancar	-	0,5	-
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	-	10	-
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	-	50	-
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	42.186.005,00	100	42.186.005,00
3	Kec. Koto Baru				
	a. s.d tanggal Jatuh Tempo	Lancar	1.104.335,00	0,5	5.521,68
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	38.498.010,00	10	3.849.801,00
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	38.211.068,00	50	19.105.534,00
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	261.491.484,00	100	261.491.484,00
4	Kec. Sungai Rumbai				
	a. s.d tanggal Jatuh Tempo	Lancar	-	0,5	-
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	-	10	5.962.704,00
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	11.925.408,00	50	39.132.088,00
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	39.132.088,00	100	-
	Jumlah		554.897.679,00		462.518.051,08

c) Penyisihan Piutang Air Minum UPT SPAM

Penyisihan Piutang Air Minum UPT SPAM per 31 Desember 2020 sebesar Rp34.099.561,50 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.2.19
Penyisihan Piutang Air PDAM Tahun 2020

No.	Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Tahun 2012	13.130.300,00	Kurang Lancar	10,00%	1.313.030,00
2	Tahun 2013	2.667.800,00	Kurang Lancar	10,00%	266.780,00
3	Tahun 2014	22.578.050,00	Kurang Lancar	10,00%	2.257.805,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
4	Tahun 2015	10.933.900,00	Kurang Lancar	10,00%	1.093.390,00
5	Tahun 2016	3.523.500,00	Kurang Lancar	10,00%	352.350,00
6	Tahun 2017	32.487.600,00	Kurang Lancar	10,00%	3.248.760,00
7	Tahun 2018	35.939.600,00	Kurang Lancar	10,00%	3.593.960,00
8	Tahun 2019	81.711.200,00	Kurang Lancar	10,00%	8.171.120,00
9	Jan- Nov 2020	135.634.400,00	Kurang Lancar	10,00%	13.563.440,00
10	Desember 2020	47.785.300,00	Lancar	0,50%	238.926,50
	Jumlah	386.391.650,00			34.099.561,50

d) Penyisihan Piutang Bunga Deposito adalah sebesar Rp50.403,18 dari perhitungan $(0,5\% \times \text{Rp}10.080.637,00)$.

e) Penyisihan Piutang TGR sebesar Rp417.460.316,46 diperoleh dari perhitungan :

No	Uraian	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Piutang TGR				
	Piutang 2019	4.158.663.856,89	kurang lancar	10%	415.866.385,68
	Piutang 2020	318.786.155,99	Lancar	0,5%	1.593.930,78
		4.477.450.012,88			417.460.316,46

f) Penyisihan Piutang Pengembalian Belanja sebesar Rp25.649,95 dari perhitungan $(0,5\% \times \text{Rp}5.129.991,00)$.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.1.a.10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	6.505.389.322,00	3.072.369.696,00

Pada Tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya mencatat Piutang Transfer Pemerintah Pusat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020. Nilai kurang bayar DBH berdasarkan PMK tersebut adalah sebesar Rp6.524.308.440,00. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan ini, terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Tahun 2021, yang telah mencabut PMK 113/PMK.07/2020, disebabkan karena terdapatnya perubahan data realisasi PBB sektor minyak bumi dan gas bumi TA 2019.

Penyesuaian nilai piutang transfer tahun 2020 karena adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021 menjadi sebesar Rp6.505.389.322,00, terdapat kurang bayar sebesar Rp 18.919.118 ,00 telah diseliminasi dengan peraturan terbitnya PMK tersebut.

Adapun rincian mengenai Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 18** pada laporan keuangan ini



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada Tahun 2019, Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.072.369.696,00. Berdasarkan dari data Simtrada Kementerian Keuangan, piutang diterima pada Tahun 2020 sebesar Rp1.736.944.395,00 dan sisa piutang yang tidak diterima di kas daerah dilakukan eliminasi penerimaannya sebesar Rp1.335.425.301,00. Eliminasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020 yang telah mencabut PMK Nomor 20/PMK.07/2020 dan PMK Nomor 36/PMK.07/2020.

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.1.a.11	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	8.967.719.269,00	3.931.933.883,00

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah berupa Dana Bagi Hasil Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2020 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/04/Pjk-B.Keuda/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/ Kota Se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Keputusan tersebut, Kabupaten Dharmasraya memiliki alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp46.678.966.816,00 dengan penerimaan pajak tahun 2020 yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp37.711.247.547,00. Kekurangan salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2020 sebesar Rp 8.967.719.269,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.20
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	DBH Tahun 2020				Piutang	
		Alokasi Defenitif 2020	Penerimaan LRA			Tahun 2020	Tahun 2019
			Penerimaan 2020	Penerimaan Piutang 2019	Penerimaan di Kasda		
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-4	8
1	PKB	10.269.207.062,00	5.564.530.583,00	1.194.533.528,00	6.759.064.111,00	4.704.676.479,00	1.194.533.528,00
2	BBNKB	4.279.022.431,00	3.504.766.684,00	526.432.603,00	4.031.199.287,00	774.255.747,00	526.432.603,00
3	PBBKB	18.366.930.993,00	14.898.264.169,00	1.658.007.244,00	16.556.271.413,00	3.468.666.824,00	1.658.007.244,00
4	PAP	108.535.323,00	88.415.104,00	10.809.961,00	99.225.065,00	20.120.219,00	10.809.961,00
5	PAJAK ROKOK	13.655.271.007,00	13.655.271.007,00	0,00	13.655.271.007,00	0,00	0,00
Jumlah		46.678.966.816,00	37.711.247.547,00	3.389.783.336,00	41.101.030.883,00	8.967.719.269,00	3.389.783.336,00

Penerimaan Dana Bagi hasil Provinsi yang telah diterima di Kas Daerah selama Tahun 2020 adalah sebesar sebesar Rp41.101.030.883,00 berasal dari penerimaan tahun 2020 sebesar Rp37.711.247.547,00, dan penerimaan piutang kurang salur Tahun 2019 sebesar Rp3.389.783.336,00. Piutang kurang salur Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2020 adalah sebesar Rp8.967.719.269,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.1.a.12 Piutang Lainnya	13.050.752,00	13.050.752,00

Berdasarkan Berita Acara Pembatalan Pelaksanaan Pekerjaan No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017 tanggal 31 Oktober 2017 atas Pekerjaan Turap/Penahan Tebing Ampang Kuranji dengan Nomor Kontrak 610.2/21-PU-PR/PPk-AIR/PJI-PTAK/APBD/VIII-2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp398.773.000,00 telah disetor ke rekening kontraktor sebanyak uang muka 30% yaitu sebesar Rp119.631.900,00 (termasuk PPN dan PPh), pihak kontraktor atas nama CV.Artha Mandiri bersedia mengembalikan uang muka pelaksanaan pekerjaan dengan SPP No.931.DPU-PR/2017 tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp106.581.148,00 diluar PPN dan PPh sebesar Rp13.050.752,00.

CV. Artha Mandiri telah mengembalikan uang muka sebesar Rp106.581.148,00 ke Kas Daerah dengan dua kali penyetoran yaitu tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp90.000.000,00 dan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp16.581.148,00. Masih terdapat sisa piutang sebesar Rp13.050.752,00 yang merupakan kompensasi pajak untuk penggantian pembayaran pajak yang telah terlanjur disetor ke Kas Negara untuk dikompensasi dengan penyetoran ke Kas Daerah oleh CV Artha Mandiri.

Pada Bulan Desember 2018, sesuai pernyataan dari Direktur CV. Lubuk Karya yang menyatakan bahwa menyetujui untuk mengalihkan kompensasi pembayaran pajak negara sebesar Rp13.050.752,00 dari CV. Artha mandiri ke CV. Disebabkan karena adanya kegiatan kontrak pembangunan gedung kantor dengan nomor kontrak 640/020/036-PL/PGK-APBD/CK-DPUPR/2018 dilaksanakan oleh CV. Lubuk Karya dan penyetoran PPN yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara dilakukan kompensasi untuk disetorkan ke kas daerah. Setelah uang pembayaran kegiatan 100% masuk ke rekening CV. Lubuk Karya pada tanggal 29 Desember 2018, Direktur Lubuk Karya belum menyetorkan kompensasi pajak ke ke daerah sebesar Rp13.050.752,00 sampai saat ini. Terhadap piutang ini telah dilakukan beberapa kali penagihan, terakhir pada tanggal 30 November 2020.

Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp1.305.075,20 (13.050.752,00 x 10%).

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.1.a.13 Belanja Dibayar Dimuka	231.012.527,83	169.315.624,28

Belanja Dibayar Dimuka pada Tahun 2020 dan 2019 terdiri dari.

	2020	2019
a) Belanja Jasa Dibayar Dimuka	218.683.760,71	149.643.493,13
b) Belanja Sewa Dibayar Dimuka	12.328.767,12	19.672.131,15
Jumlah	231.012.527,83	169.315.624,28

a) Belanja Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp218.683.760,71

Beban Jasa Dibayar Dimuka pada Tahun 2020 merupakan pembayaran premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah sebesar Rp135.983.455,23 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp82.700.305,48.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.2.21
Belanja Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2020

No	SKPD	Asuransi Dibayar Dimuka 2020			Beban Asuransi
		total kontrak	TMT Kontrak	Asuransi dibayar dimuka	
1	Sekretariat Daerah	7.605.150,00	31 Januari 2020 s.d 31 Januari 2021	644.152,05	6.960.997,95
		8.816.400,00	15 Februari 2020 s.d 15 Februari 2021	1.108.072,13	7.708.327,87
		7.318.000,00	28 Februari 2020 s.d 28 Februari 2021	1.179.677,60	6.138.322,40
		31.290.450,00	02 April 2019 s.d 02 April 2020	7.886.907,95	23.403.542,05
		6.089.000,00	26 Oktober 2020 s.d 26 Oktober 2021	4.987.975,34	1.101.024,66
		121.263.240,00	30 November 2020 s.d 30 November 2021	110.964.170,30	10.299.069,70
		14.369.925,00	22 Agustus 2020 s.d 22 Agustus 2021	9.212.499,86	5.157.425,14
	Jumlah	196.752.165,00		135.983.455,23	60.768.709,77
2	Sekretariat Dewan	80.966.500,00	01 April 2020 s.d 01 April 2021	20.186.168,49	60.780.331,51
		74.812.000,00	01 November 2020 s.d 01 November 2021	62.514.136,99	12.297.863,01
	Jumlah	155.778.500,00		82.700.305,48	73.078.194,52
	Total	352.530.665,00		218.683.760,71	133.846.904,29

b) Belanja Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp12.328.767,12

Belanja Sewa Dibayar Dimuka Tahun 2020 berupa sewa atas gedung kantor yang dibayar pada Tahun 2020 dan sampai akhir Tahun 2020 masih terdapat saldo yang masih dapat dinikmati oleh SKPD beberapa bulan ke depan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.22
Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Tahun 2020

NO	SKPD	belanja dibayar dimuka Tahun 2020			Beban Sewa 2019
		total kontrak	TMT kontrak	Sewa dibayar dimuka	
1	KUMPERDAG	50.000.000,00	01 April 2020 s.d 31 Maret 2021	12.328.767,12	37.671.232,88
	Jumlah	50.000.000,00		12.328.767,12	37.671.232,88

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.1.a.13 Persediaan	27.219.306.442,17	37.729.072.702,63

Akun persediaan digunakan untuk mencatat barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan/digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persediaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut.

Tabel 5.2.23
Persediaan Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Persediaan Bahan habis pakai		207.820.517,00	294.244.797,00
1	Alat Tulis Kantor	50.617.167,00	109.177.734,00
2	Alat Listrik	1.176.000,00	1.993.833,00
3	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	801.000,00	1.788.000,00
4	Alat Rumah Tangga	5.479.000,00	4.641.000,00
5	Alat Kebersihan	12.174.100,00	13.204.500,00
6	Barang Cetakan	137.573.250,00	146.639.730,00
7	Baju adat Daerah	0,00	16.800.000,00
Persediaan Bahan/material		13.732.221.192,47	11.998.505.096,05
1	Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00
2	Bibit ternak	62.210.000,00	46.755.000,00
3	Obat- obatan	5.186.480.114,58	5.517.690.860,00
4	Bahan Kedokteran	2.841.307.576,08	469.285.248,00
5	Gas Medis	14.492.500,00	11.814.000,00
6	Bahan labor	263.906.295,53	296.368.174,00
7	Bahan material Peternakan/Pertanian/Pekerjaan Umum	5.281.487.306,28	5.443.645.008,50
8	Bibit Perikanan	0,00	0
9	Bahan Kimia	55.681.900,00	200.967.147,00
10	Bahan Bakar Minyak	0,00	11.979.658,55
11	sarana prasaran kesiap siagaan bencana	11.031.500,00	
12	Bibit perikanan	15.624.000,00	
Persediaan Barang Lainnya		13.279.264.732,70	25.436.322.809,58
1	Persediaan baragn yang berasal dari BM yang akan diberikan ke masyarakat/pihak ketiga	1.762.731.600,00	682.189.314,00
	Persediaan baragn yang berasal dari BM	308.888.550,00	
2	Persediaan yang akan diserahkan ke Masyarakat	7.367.115.240,00	17.608.161.126,00
3	Persediaan yang akan diserahkan ke Pihak ketiga	353.838.000,00	7.145.972.369,58
4	Persediaan Sumbangan dari Pihak ketiga	3.117.400.319,00	
5	Persediaan Dana BTT	97.825.273,70	
6	Persediaan Dana KLB	271.465.750,00	
Jumlah		27.219.306.442,17	37.729.072.702,63

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dengan rincian persediaan per SKPD Tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.2.24
Persediaan per SKPD Tahun 2020

No	SKPD	Persediaan Habis Pakai	Persediaan Bahan Material	Persediaan lainnya	Total Persediaan
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	1.506.000,00	-	-	1.506.000,00
2	Dinas Kesehatan	10.825.500,00	3.416.926.649,00	2.355.419.750,00	5.783.171.899,00
3	BLUD Puskesmas	3.499.700,00	2.671.334.259,39	142.432.500,00	2.817.266.459,39
4	RSUD Sungai Dareh	-	-	601.273.023,70	601.273.023,70
5	BLUD RSUD Sungai Dareh	32.904.900,00	2.181.574.944,80	-	2.214.479.844,80
6	Dinas PUPR	1.694.300,00	5.283.075.956,28	9.680.680.140,00	14.965.450.396,28
7	Dinas Perkimtan	1.353.500,00	-	111.893.250,00	113.246.750,00
8	Dinas Satpol Pp & Damkar	488.000,00	-	-	488.000,00
9	DINSOSP3APKKB	1.371.250,00	10.324.350,00	105.304.299,00	116.999.899,00
10	Dinas Pangan dan Perikanan	-	15.744.000,00	-	15.744.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	125.000,00	18.661.883,00	-	18.786.883,00
12	Disdukcapil	110.360.500,00	-	-	110.360.500,00
13	Dinas PMD	432.000,00	-	-	432.000,00
14	Dinas Perhubungan	7.710.000,00	-	-	7.710.000,00
15	Dinas Kominfo	-	-	-	-
16	Diskumperdag	120.000,00	-	-	120.000,00
17	Dinas PMPTSP	2.217.800,00	-	-	2.217.800,00
18	Dinas Budparpora	1.285.000,00	-	-	1.285.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	256.000,00	-	-	256.000,00
20	Dinas Pertanian	2.218.000,00	123.663.900,00	-	125.881.900,00
21	Dinas Transnaker	566.500,00	-	-	566.500,00
22	Inspektorat	1.020.500,00	-	-	1.020.500,00
23	Bappeda	1.222.000,00	-	-	1.222.000,00
24	BKD	19.740.067,00	-	124.031.270,00	143.771.337,00
25	BKPSDM	153.000,00	-	-	153.000,00
26	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-
27	Sekretariat Daerah	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
28	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-
29	Sekretariat DPRD	510.000,00	-	-	510.000,00
30	Kecamatan Pulau Punjung	365.000,00	-	-	365.000,00
31	Kecamatan Sitiung	135.000,00	-	-	135.000,00
32	Kecamatan Koto Baru	304.000,00	-	-	304.000,00
33	Kecamatan Sungai Rumbai	460.000,00	-	-	460.000,00
34	Kecamatan IX Koto	384.000,00	-	-	384.000,00
35	Kecamatan Timpeh	209.000,00	-	-	209.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Persediaan Habis Pakai	Persediaan Bahan Material	Persediaan lainnya	Total Persediaan
36	Kecamatan Koto Salak	329.000,00	-	-	329.000,00
37	Kecamatan Asam Jujuhan	182.000,00	62.500,00	-	244.500,00
38	Kecamatan Koto Besar	438.000,00	-	-	438.000,00
39	Kecamatan Padang Laweh	-	-	-	-
40	Kecamatan Tiumang	52.000,00	-	-	52.000,00
41	Kesbangpol	750.000,00	-	-	750.000,00
42	BPBD	1.133.000,00	11.031.500,00	158.230.500,00	170.395.000,00
	JUMLAH	207.820.517,00	13.732.221.192,47	13.279.264.732,70	27.219.306.442,17

Nilai Persediaan Tahun 2020 sebesar Rp27.219.306.442,17 mengalami penurunan sebesar Rp 10.509.766.260,00 atau 27,86% dibandingkan Persediaan Tahun 2019 sebesar Rp37.729.072.702,63. Penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2020 terjadi pada persediaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena berkurangnya nilai persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga dibandingkan tahun lalu. Persediaan Tahun 2020 senilai Rp14.965.450.396,28 menurun sebesar Rp14.719.169.580,35 atau -50,41% dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp29.684.619.976,63. Sedangkan kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, persediaan Tahun 2019 sebesar Rp493.000,00, di Tahun 2020 sebesar Rp170.395.000,00 naik sebesar Rp169.902.000,00 atau 345,63% akibat adanya penambahan persediaan dalam penanganan Covid-19.

Sementara itu, berdasarkan dari hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan obat-obatan dan bahan makanan terdapat beberapa item yang sudah kadaluarsa sebesar Rp326.966.231,10 dengan uraian sebagai berikut.

No	SKPD	Uraian			
		Obat	Bahan Labor	Habis Pakai	Bahan Makanan
1	Dinas Kesehatan	229.328.310,56	-	-	-
2	BLUD Puskesmas	88.373.812,10	-	-	-
3	BLUD RSUD dareh	9.264.108,44	17.491.097,80	1.184.395,98	
4	DINSOSP3APPKB	-	-	-	1.206.000,00
	Jumlah	326.966.231,10	17.491.097,80	1.184.395,98	1.206.000,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.1.b.1. Investasi Jangka Panjang	27.452.000.000,00	27.452.000.000,00

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp27.452.000.000,00 merupakan Investasi Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Sumatera Barat (Bank Nagari), PT Balairung Citrajaya Sumbang, dan BPR Pulau Punjung. Adapun perkembangan penyertaan modal pada ketiga *investee* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1) Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Nagari

Saldo Per 31 Desember 2019	Rp	25.852.000.000,00
Penambahan selama Tahun 2020	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2020	Rp	25.852.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Nagari tersebut terdiri dari.

- Tahun 2007 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000013 dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,00;
- Tahun 2009 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000033 dengan nilai nominal Rp322.000.000,00;
- Tahun 2010 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000052 dengan nilai nominal Rp9.678.000.000,00;
- Tahun 2012 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000088 dengan nilai nominal Rp3.200.000.000,00 dan Surat Kolektif Saham Nomor A.000102 dengan nilai nominal Rp36.000.000,00;
- Tahun 2013 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000118 dengan nilai nominal Rp5.369.000.000,00 dan Surat Kolektif Saham Nomor A.000131 dengan nilai nominal Rp31.000.000,00.
- Tahun 2017 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.1427724-1431444 dengan nilai nominal Rp3.716.000.000,00.
- Tahun 2019 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000232 dengan nilai nominal Rp2.500.000.000,00

Sampai dengan 31 Desember 2020 Investasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Bank Nagari sebesar Rp25.852.000.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 1,51%, dengan penerimaan deviden pada tahun 2020 adalah sebesar Rp3.515.054.721,00 sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

2) Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Balairung Citrajaya Sumbar

Saldo Per 31 Desember 2019	Rp	1.500.000.000,00
Penambahan selama Tahun 2020	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2020	Rp	1.500.000.000,00

Investasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada PT Balairung Citra Jaya Sumatera Barat di Jakarta senilai Rp1.500.000.000,00 dengan jumlah modal disetor keseluruhan sebesar Rp164.025.990.000,00 sehingga kepemilikan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,91% . Pada tahun 2008 bersama-sama Pemerintah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menanamkan investasi pada pembangunan Balairung Sumatera Barat. Investasi ini didasarkan pada Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat nomor 030-424.1-2007.

PT Balairung Citrajaya Sumbar merupakan BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bergerak pada bidang usaha hotel, Restoran, dan fasilitas pendukung lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyertaan modal pada PT Balairung Citrajaya Sumbar sesuai dengan Surat Saham Gabungan Nomor 012 dengan nilai nominal Rp1.500.000.000,00.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya belum memperoleh bagi hasil dari penyertaan modal pada Balairung, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggunakan metode biaya karena kepemilikan hanya sebesar 0,91% dari ekuitas Balairung sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

3) Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung

Saldo Per 31 Desember 2019	Rp	100.000.000,00
Penambahan selama Tahun 2020	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2020	Rp	100.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah pada BPR Pulau Punjung pada Tahun 2012 sesuai dengan Surat Saham Biasa Nomor Seri B 0542 dengan nilai nominal Rp100.000.000,00.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperoleh bagi hasil dari penyertaan modal pada BPR Pulau Punjung sebesar Rp 9.515.690,00, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggunakan metode biaya karena kepemilikan hanya sebesar 1,92% dari ekuitas PT BPR Pulau Punjung sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.C.1.c. ASET TETAP

Aset Tetap Adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Dalam rangka penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang kodifikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah dan lebih detail diatur dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud, kebijakan ini dimulaisejakpelaporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019, pelaporan tahun ini merupakan tahun kedua Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerapkannya.

Nilai Aset tetap yang tidak berubah sebagai akibat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Aset Tetap Tanah
- Aset Tetap Jalan, irigasi dan jaringan
- Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset tetap yang berubah sebagai akibat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- KIB peralatan mesin dari 9 (sembilan) sub KIB menjadi 19 (sembilan belas) sub KIB
- KIB Bangunan gedung dari 2 (dua) sub KIB menjadi 4 (empat) sub KIB
- KIB Aset Tetap Lainnya dari 4 (empat) sub KIB menjadi 6 (enam) sub KIB
- Aset tetap rambu-rambu yang semula dicatat pada KIB Bangunan Gedung (sub KIB monumen) pindah ke KIB peralatan mesin sub KIB rambu-rambu
- Aset tetap peralatan olahraga yang semula di catat pada KIB Aset Tetap Lainnya pindah ke KIB Peralatan Mesin sub KIB peralatan olahraga
- Saldo aset lain-lain berubah mengikut pada perpindahan aset rambu-rambu dan alat olahraga

Rekapitulasi Saldo Aset Tetap 31 Desember Tahun 2020 dan 31 Desember 2019 (audited Tahun 2019) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019 (Audited)	Tren
	Rp.	Rp.	%
ASET TETAP	3.112.087.081.289,71	2.907.550.271.397,80	107,03%
a. Tanah	649.170.781.447,00	650.764.357.447,00	99,76%
b. Peralatan dan Mesin	310.784.964.569,44	260.565.316.331,44	119,27%
c. Gedung dan Bangunan	665.269.927.412,85	620.623.140.974,09	107,19%
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.268.023.945.040,42	1.215.452.774.013,34	104,33%
e. Aset Tetap Lainnya	105.717.574.583,00	72.876.409.916,00	145,06%
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	113.119.888.237,00	87.268.272.715,93	129,62%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(901.217.948.545,60)	(776.317.976.515,57)	116,09%
Nilai Buku Aset Tetap	2.210.869.132.744,11	2.131.232.294.882,23	103,74%

Dari tabel diatas jika dibandingkan nilai Aset Tetap audited 2019 dengan 31 Desember 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp204.536.809.891,91



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.25
Penambahan dan pengurangan aset tetap berdasarkan jenis aset tetap

KIB/Sub KIB	Saldo Aset Tetap 2019 (Audited)	Jumlah Penambahan Aset 2020	Jumlah Pengurangan Aset 2020	Saldo Aset 2020
ASET TETAP	2.907.550.271.397,80	235.256.232.328,84	30.719.422.436,93	3.112.087.081.289,71
Tanah	650.764.357.447,00	335.524.000,00	1.929.100.000,00	649.170.781.447,00
Tanah	650.764.357.447,00	335.524.000,00	1.929.100.000,00	649.170.781.447,00
Peralatan dan Mesin	260.565.316.331,44	53.596.566.294,00	3.376.918.056,00	310.784.964.569,44
Alat Besar	26.798.803.681,00	1.134.653.544,00	10.300.000,00	27.923.157.225,00
Alat Angkutan	66.612.741.124,00	6.331.341.000,00	1.658.915.500,00	71.285.166.624,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.552.031.755,00	787.458.000,00	6.260.000,00	8.333.229.755,00
Alat Pertanian	1.453.012.454,00	474.619.192,00	-	1.927.631.646,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	46.996.585.563,50	8.167.375.084,00	54.117.000,00	55.109.843.647,50
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	17.875.795.776,00	1.094.995.385,00	85.287.324,00	18.885.503.837,00
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	40.768.206.629,74	16.925.776.606,00	-	57.693.983.235,74
Alat Laboratorium	19.856.346.506,20	7.866.312.928,00	892.066.232,00	26.830.593.202,20
Alat Persenjataan	57.880.340,00	690.720.000,00	612.620.000,00	135.980.340,00
Komputer	29.893.754.642,00	9.953.719.491,00	55.072.000,00	39.792.402.133,00
Alat Eksplorasi	-	-	-	-
Alat Pengeboran	-	-	-	-
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-	-	-	-
Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
Alat Keselamatan Kerja	546.912.030,00	89.162.432,00	-	636.074.462,00
Alat Peraga	-	-	-	-
Peralatan Proses/Produksi	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00
Rambu – Rambu	1.722.751.150,00	-	-	1.722.751.150,00
Peralatan Olah Raga	430.494.680,00	68.432.632,00	2.280.000,00	496.647.312,00
Gedung dan Bangunan	620.623.140.974,09	46.061.806.484,76	1.415.020.046,00	665.269.927.412,85
Bangunan Gedung	589.704.003.624,00	45.275.391.827,83	1.415.020.046,00	633.564.375.405,83
Monumen	6.442.214.368,00	-	-	6.442.214.368,00
Bangunan Menara	3.102.481.906,00	-	-	3.102.481.906,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	21.374.441.076,09	786.414.656,93	-	22.160.855.733,02
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.215.452.774.013,34	52.607.141.027,08	35.970.000,00	1.268.023.945.040,42
Jalan Dan Jembatan	988.288.447.874,00	42.499.639.635,83	30.360.000,00	1.030.757.727.509,83
Bangunan Air	171.325.757.603,34	3.752.158.780,32	5.610.000,00	175.072.306.383,66
Instalasi	28.757.549.143,00	2.043.678.482,00	-	30.801.227.625,00
Jaringan	27.081.019.393,00	4.311.664.128,93	-	31.392.683.521,93
Aset Tetap Lainnya	72.876.409.916,00	32.888.646.267,00	47.481.600,00	105.717.574.583,00
Bahan Perpustakaan	30.284.341.542,00	4.088.943.767,00	-	34.373.285.309,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.719.874.878,00	-	-	2.719.874.878,00
Hewan	159.657.600,00	59.900.000,00	31.521.600,00	188.036.000,00
Biota Perairan	-	-	-	-
Tanaman	65.552.000,00	-	-	65.552.000,00
Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-
Aset Tetap Dalam Renovasi	39.646.983.896,00	28.739.802.500,00	15.960.000,00	68.370.826.396,00
KDP	87.268.272.715,93	49.766.548.256,00	23.914.932.734,93	113.119.888.237,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	87.268.272.715,93	49.766.548.256,00	23.914.932.734,93	113.119.888.237,00
Penyusutan Aset Tetap	(776.317.976.515,57)	(126.918.921.547,03)	(2.018.949.517,00)	(901.217.948.545,60)
Nilai Buku	2.131.232.294.882,23	108.337.310.781,81	28.700.472.919,93	2.210.869.132.744,11

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap pada tahun 2020 disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 5.2.26
penambahan dan pengurangan aset berdasarkan perolehan

No	Uraian	Jumlah
	Saldo Aset Tetap 31 Desember 2019 (Audited)	2.907.550.271.397,8
	Penambahan 2020	235.256.232.328,8
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	164.875.524.505,9
2	Penambahan Belanja Modal Bos Reguler Menjadi Aset	5.755.909.467,0
3	Penambahan Belanja Modal BOS Afirmasi Menjadi Aset	2.082.845.980,0
4	Penambahan Belanja Modal BOS Kinerja Menjadi Aset	999.270.561,0
5	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	2.091.411.273,0
6	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	159.126.428,0
7	Penambahan Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset	53.000.000,0
8	Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	114.228.572,0
9	Penambahan Hutang Tahun 2020 Menjadi Aset	23.644.922.103,0
10	Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset	2.033.987.470,0
11	Penambahan Hibah Provinsi Menjadi Aset	5.456.968.135,0



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
12	Penambahan Hibah Masyarakat Menjadi Aset	2.750.000,0
13	Penambahan Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	452.464.870,0
17	Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset	841.810.520,0
18	Penambahan Mutasi Antar OPD	726.300.000,0
19	Penambahan Mutasi Honor Pokja	114.228.572,0
20	Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	480.911.400,0
21	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	24.266.556.293,9
22	Penambahan BTT Covid-19 menjadi Aset	1.025.916.178,0
23	Penambahan Dana KLB Menjadi Aset	78.100.000,0
Pengurangan 2020		30.719.422.436,9
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	23.653.936.293,9
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD	726.300.000,0
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	114.228.572,0
4	Pengurangan Koreksi Pencatatan	1.894.226.000,0
5	Lelang dan Penjualan	290.721.600,0
6	Penghapusan	477.523.891,0
7	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	3.104.920.004,0
8	Pengurangan Hibah ke Organisasi / Kelompok Masyarakat	357.566.076,0
9	Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal	100.000.000,0
Saldo Aset Tetap 31 Desember 2020		3.112.087.081.289,7

Dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyediakan anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) sebesar Rp30.790.391.073,91 yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah (BPBD, Dinkes, Transnaker, RSUD, Diknas dan Satpol PP. dari anggaran yang disediakan tersebut terdapat pengadaan yang menjadi Aset tetap sebesar Rp1.025.916.178,00 rincian aset tetap dari dana BTT terdapat pada Lampiran 18

Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.27

Penambahan dan pengurangan penyusutan aset tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2019 (Audited)		776.317.976.515,6
Penambahan Penyusutan 2020		126.918.921.547,0
1	Penambahan Penyusutan Mutasi Antar OPD	587.230.333,0
2	Penambahan Penyusutan Reklas	160.500.000,0
3	Penambahan Penyusutan Koreksi	2.758.878.189,0
4	Penyusutan Semester I	55.932.134.508,5
5	Penyusutan Semester II	67.480.178.516,5
Pengurangan Penyusutan 2020		2.018.949.517,0
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar OPD	587.230.333,0
2	Pengurangan Penyusutan Reklas	988.627.012,0
3	Pengurangan Penyusutan Lelang dan Penjualan	259.200.000,0
4	Pengurangan Penyusutan Hibah ke Instansi Vertikal	35.569.679,0
5	Pengurangan Penyusutan Koreksi	148.322.493,0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020		901.217.948.545,6
Nilai Buku Aset Tetap 31 Desember 2020		2.210.869.132.744,1

Rincian Aset Tetap menurut Jenis dan Perangkat Daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

V.C.1.c.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan adapun saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (audited) sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019 (Audited)	Tren
	Rp.	Rp.	%
Tanah	649.170.781.447,00	650.764.357.447,00	99,76%
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	
Nilai Buku	649.170.781.447,00	650.764.357.447,00	99,76%

Apabila diperhatikan tabel diatas saldo aset tetap tanah berkurang sebesar Rp1.593.576.00,00 penyebab yang paling mempengaruhi adalah adanya koreksi pencatatan aset tetap tanah double catat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.829.100.000,00

Adapun Penambahan dan pengurangan nilai tanah tahun 2020 per OPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2.28
 Penambahan dan pengurangan aset tetap tanah per OPD

No.	Nama SKPD Baru	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
1	Sekretariat DPRD	3.714.125.740,00	-	-	3.714.125.740,00
2	Sekretariat Daerah	412.856.407.725,00	-	1.929.100.000,00	410.927.307.725,00
3	Kec. Pulau Punjung	987.500.000,00	-	-	987.500.000,00
4	Kec. Sitiung	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00
5	Kec. Koto Baru	1.488.000.000,00	-	-	1.488.000.000,00
6	Kec. Sungai Rumbai	1.120.000.000,00	-	-	1.120.000.000,00
7	Kec. IX Koto	17.875.000,00	-	-	17.875.000,00
8	Kec. Timpeh	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00
9	Kec. Padang Laweh	20.020.000,00	-	-	20.020.000,00
10	Kec. Tiumang	-	75.000.000,00	-	75.000.000,00
11	Kec Koto Besar	461.087.771,00	-	-	461.087.771,00
12	Kec Koto Salak	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00
13	Kec. Asam Jujuhan	71.500.000,00	-	-	71.500.000,00
14	Dinas PUPR	161.984.936.389,00	49.780.000,00	-	162.034.716.389,00
15	Dinas PERKIMTAN	1.299.185.160,00	-	-	1.299.185.160,00
16	Dinas Perhubungan	5.961.400.000,00	-	-	5.961.400.000,00
17	Dinas Kesehatan	2.839.972.100,00	-	-	2.839.972.100,00
18	RSUD	10.683.462.500,00	-	-	10.683.462.500,00
19	Dinas Pendidikan	24.346.560.334,00	210.744.000,00	-	24.557.304.334,00
20	Dinas BUDPARPORA	1.115.335.010,00	-	-	1.115.335.010,00
21	Dinas TRANSNAKER	2.121.000.000,00	-	-	2.121.000.000,00
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
24	Dinas PMD	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	11.564.778.836,00	-	-	11.564.778.836,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	1.281.870.882,00	-	-	1.281.870.882,00
27	Dinas KUMPERDAG	1.176.340.000,00	-	-	1.176.340.000,00
28	BKD	-	-	-	-
29	DPMPSTP	-	-	-	-
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	-	-	-	-
32	DLH	4.028.000.000,00	-	-	4.028.000.000,00
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-
36	BKPSDM	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-
Jumlah		650.764.357.447,00	335.524.000,00	1.929.100.000,00	649.170.781.447,00

Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap tanah tahun 2020 berdasarkan asal perolehan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.29
 Penambahan dan pengurangan aset tetap tanah berdasarkan asal perolehan

Saldo Aset Tetap Tanah 31 Desember 2019 (Audited)		650.764.357.447
Penambahan Aset Tetap Tanah 2020		335.524.000,00
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	49.780.000,00
2	Penambahan Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	210.744.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3	Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset	75.000.000,00
	Pengurangan Aset Tetap Tanah 2020	1.929.100.000
1	Pengurangan Koreksi Pencatatan	1.829.100.000,00
2	Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal	100.000.000,00
	Saldo Aset Tetap Tanah 31 Desember 2020	649.170.781.447

Rincian penambahan aset tetap tanah sebesar Rp335.524.000,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.30

Rincian penambahan aset tetap tanah per OPD

Penambahan Aset Tetap Tanah 2020		335.524.000,00
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	49.780.000,00
	- Dinas PUPR	49.780.000,00
2	Penambahan Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	210.744.000,00
	- Dinas Pendidikan	210.744.000,00
3	Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset	75.000.000,00
	- Kec Tiumang	75.000.000,00

Penambahan aset tetap tanah yang berasal dari penilaian kurang catat sebesar Rp210.744.000,00 adalah berupa 2 (dua) bidang tanah pada Sekolah Dasar Negeri 13 Sitiung dengan luas 3.754 m² dengan hasil penilaian sebesar Rp135.144.000,00 dan seluas 2.100 m² dengan hasil penilaian sebesar Rp75.600.000,00

Penambahan aset tetap tanah yang berasal dari kurang catat senilai Rp75.000.000,00 terdapat di Kecamatan Tiumang merupakan tanah lokasi Kantor Camat Tiumang yang berasal dari penyerahan panitia pemekaran Kecamatan Tiumang kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Rincian pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp1.929.100.000,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.31

Pengurangan Aset Tetap Tanah

Pengurangan Aset Tetap Tanah 2020		1.929.100.000,00
1	Pengurangan Koreksi Pencatatan	1.829.100.000,00
	- Sekretariat Daerah	1.829.100.000,00
2	Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal	100.000.000,00
	- Sekretariat Daerah	100.000.000,00

Koreksi double catat pada Sekretariat Daerah merupakan aset tetap tanah yang terletak di Nagari taratak Tinggi Kecamatan Timpeh setelah dilakukan inventarisasi ke lapangan tanah tersebut merupakan barang yang sama tercatat dengan tahun perolehan 2005 dan 2015 pada Kartu Inventaris Barang Tanah, untuk itu dilakukan koreksi salah satunya yaitu yang tercatat pada tahun 2015 dengan nilai perolehan Rp1.829.100.000,00

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Dharmasraya maka di tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memberikan hibah aset tetap tanah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjajian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya Nomor 030/660/BKD/VIII-2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang digunakan sebagai lokasi pendirian Madrasah Tsanawiyah Negeri di Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh seluas 10.000 m² dengan nilai perolehan Rp100.000.000,00 aset tetap tanah tersebut tercatat di Sekretariat Daerah dan telah dilakukan penghapusan pencatatan berdasarkan Keputusan Pengelola Barang Nomor 953/294/KPTS-SEKDA/2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa tanah pada Sekretariat Daerah Dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada Sekolah Dasar Negeri 8 Sungai Rumbai terdapat tanah seluas 972 m² yang belum dicatat sebagai aset tetap namun telah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai lokasi pembangunan Ruang Kelas Baru, tanah tersebut berasal dari bantuan komite sekolah yang dibeli dari warga sekitar dengan harga Rp185.400.000,00 namun proses pembayaran ganti rugi belum lunas sehingga sampai saat ini belum diserahkan oleh komite sekolah kepada pihak sekolah.

V.A.1.c.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization threshold*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu Rp1.000.000,00

Terkait penerapan Permendagri Nomor 108 tahun 2016 maka saldo aset tetap peralatan mesin mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh :

1. Bertambahnya sub KIB peralatan mesin dari 9 (sembilan) menjadi 19 (Sembilan belas)
2. Reklas aset rambu-rambu dari KIB Bangunan gedung ke KIB Peralatan Mesin
3. Reklas aset peralatan olahraga dari KIB Aset tetap Lainnya ke KIB Peralatan Mesin
4. Koreksi nilai penyusutan sebagai akibat reklas aset rambu-rambu dan peralatan olahraga

Perubahan sub KIB pada Peralatan Mesin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.32
Perubahan Sub KIB Peralatan Mesin terkait
Penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016

No	Nama Sub KIB Peralatan Mesin Versi Permendagri 17 Tahun 2007	Nama Sub KIB Peralatan Mesin Versi Permendagri 108 Tahun 2016
1	Alat Besar	Alat Besar
2	Alat Angkut	Alat Angkut
3	Alat Bengkel	Alat Bengkel
4	Alat Pertanian	Alat Pertanian
5	Alat Kantor/RT	Alat Kantor/RT
6	Alat Studio	Alat Studio
7	Alat Kedokteran	Alat Kedokteran
8	Alat Laboratorium	Alat Laboratorium
9	Alat Persenjataan Keamanan	Alat Persenjataan
10		Komputer
11		Alat Eksplorasi
12		Alat Pengeboran
13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
14		Alat bantu eksplorasi
15		Alat keselamatan kerja
16		Alat peraga
17		Peralatan proses/Produksi
18		Rambu-rambu
19		Peralatan Olahraga



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (Audited) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019 (Audited)	Tren
	Rp	Rp	%
Peralatan dan Mesin	310.784.964.569,44	260.565.316.331,44	119,27%
Akumulasi Penyusutan	(188.807.900.427,60)	(156.940.942.950,57)	120,31%
Nilai Buku	121.977.064.141,84	103.624.373.380,87	117,71%

Jumlah peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2020 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2019 (Audited) mengalami kenaikan sebesar Rp50.219.648.238,00

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (Audited) adalah sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin :	31 Desember 2020	31 Desember 2019 (Audited)	Tren
	Rp	Rp	%
Alat Besar	27.923.157.225,00	26.798.803.681,00	104,20%
Alat Angkutan	71.285.166.624,00	66.612.741.124,00	107,01%
Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.333.229.755,00	7.552.031.755,00	110,34%
Alat Pertanian	1.927.631.646,00	1.453.012.454,00	132,66%
Alat Kantor dan Rumah Tangga	55.109.843.647,50	46.996.585.563,50	117,26%
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	18.885.503.837,00	17.875.795.776,00	105,65%
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	57.693.983.235,74	40.768.206.629,74	141,52%
Alat Laboratorium	26.830.593.202,20	19.856.346.506,20	135,12%
Alat Persenjataan	135.980.340,00	57.880.340,00	234,93%
Komputer	39.792.402.133,00	29.893.754.642,00	133,11%
Alat Eksplorasi	-	-	
Alat Pengeboran	-	-	
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-	-	
Alat Bantu Eksplorasi	-	-	
Alat Keselamatan Kerja	636.074.462,00	546.912.030,00	116,30%
Alat Peraga	-	-	
Peralatan Proses/Produksi	12.000.000,00	-	
Rambu - Rambu	1.722.751.150,00	1.722.751.150,00	100,00%
Peralatan Olah Raga	496.647.312,00	430.494.680,00	115,37%
Akumulasi Penyusutan	(188.807.900.427,60)	(156.940.942.950,57)	120,31%
Nilai Buku	121.977.064.141,84	103.624.373.380,87	117,71%



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian penambahan dan pengurangan dan Nilai buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (Audited) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.33
Penambahan, Pengurangan dan nilai buku Peralatan dan Mesin

No	Nama OPD	SALDO 31 desember 2019 (Audited)	Penambahan Aset Tetap	Pengurangan Aset Tetap	Saldo 31 Aset Tetap Desember 2020	Akumulasi Penyusutan 31 desember 2019 (Audited)	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 desember 2020	Nilai buku 2020
1	Sekretariat DPRD	11.978.476.679,00	463.089.450,00	27.197.000,00	128.414.369.129,00	7.750.537.296,48	1.363.914.780,52	20.943.428,00	9.093.508.649,00	3.320.860.480,00
2	Sekretariat Daerah	28.164.708.583,00	917.137.472,00	451.038.572,00	28.630.807.483,00	18.123.124.449,12	3.247.409.863,88	424.200.000,00	20.946.334.313,00	7.684.473.170,00
3	Kec. Pulau Punjung	632.607.825,00	-	-	632.607.825,00	495.587.252,00	52.126.939,00	-	547.714.191,00	84.893.634,00
4	Kec. Sitiung	514.499.765,00	6.000.000,00	-	520.499.765,00	212.372.028,00	59.489.611,00	-	271.861.639,00	248.638.126,00
5	Kec. Koto Baru	560.597.744,00	10.000.000,00	-	570.597.744,00	216.792.906,00	64.329.725,00	-	281.122.631,00	289.475.113,00
6	Kec. Sungai Rumbai	551.272.375,00	14.000.000,00	-	565.272.375,00	280.841.194,08	48.934.120,92	-	329.775.315,00	235.497.060,00
7	Kec. IX Koto	586.695.803,00	-	-	586.695.803,00	501.598.246,00	27.292.777,00	-	528.891.023,00	57.804.780,00
8	Kec. Timpeh	383.896.475,00	-	-	383.896.475,00	358.314.154,08	14.071.981,92	-	372.386.136,00	11.510.339,00
9	Kec. Padang Laweh	400.836.210,00	-	-	400.836.210,00	344.155.852,95	21.049.667,05	-	365.205.520,00	35.630.690,00
10	Kec. Tiumang	441.232.425,00	-	-	441.232.425,00	366.230.424,00	25.190.667,00	-	391.421.091,00	49.811.334,00
11	Kec Koto Besar	468.756.531,00	15.650.000,00	2.450.000,00	481.956.531,00	196.807.081,00	54.692.485,00	2.450.000,00	249.049.566,00	232.906.965,00
12	Kec Koto Salak	533.237.125,00	-	-	533.237.125,00	457.924.913,17	24.405.165,83	-	482.330.079,00	50.907.046,00
13	Kec. Asam Jujuhan	572.903.625,00	-	-	572.903.625,00	544.894.345,00	12.162.702,00	-	557.057.047,00	15.846.578,00
14	Dinas PUPR	31.819.518.244,00	1.128.063.544,00	-	32.947.581.788,00	25.182.823.779,33	1.865.519.707,67	-	27.048.343.487,00	5.899.238.301,00
15	Dinas PERKIMTAN	1.200.543.700,00	14.000.000,00	-	1.214.543.700,00	744.624.121,67	127.072.313,33	-	871.696.435,00	342.847.265,00
16	Dinas Perhubungan	4.287.484.376,00	926.820.000,00	160.500.000,00	5.053.804.376,00	2.961.329.180,93	722.068.579,07	160.500.000,00	3.522.897.760,00	1.530.906.616,00
17	Dinas Kesehatan	42.294.583.745,14	19.915.109.660,00	-	62.209.693.405,14	23.207.512.829,88	7.268.337.730,12	-	30.475.850.560,00	31.733.842.845,14
18	RSUD	36.750.640.419,60	8.512.387.617,00	-	45.263.028.036,60	18.305.875.417,95	5.727.827.492,65	-	24.033.702.910,60	21.229.325.126,00
19	Dinas Pendidikan	32.874.886.327,00	17.373.509.801,00	1.522.592.484,00	48.725.803.644,00	16.916.112.210,26	5.932.359.543,24	-	22.848.471.753,50	25.877.331.890,50
20	Dinas BUDPARPORA	1.117.205.501,00	181.341.500,00	-	1.298.547.001,00	654.540.326,14	286.950.568,86	-	941.490.895,00	357.056.106,00
21	Dinas TRANSSAKER	786.004.642,00	51.600.000,00	14.391.000,00	823.213.642,00	676.932.430,00	67.988.126,00	14.391.000,00	730.529.556,00	92.684.086,00
22	DSP3KB	2.737.710.080,00	868.650.750,00	-	3.606.360.830,00	2.070.153.632,00	299.349.615,00	-	2.369.503.247,00	1.236.857.583,00
23	DISDUKCAPIL	3.003.277.442,00	74.584.500,00	-	3.077.861.942,00	1.377.782.703,67	379.431.712,33	-	1.757.214.416,00	1.320.647.526,00
24	Dinas PMD	1.089.369.800,00	17.500.000,00	-	1.106.869.800,00	959.544.467,00	53.808.333,00	-	1.013.352.800,00	93.517.000,00
25	Dinas Pertanian	6.521.603.191,00	1.114.090.500,00	-	7.635.693.691,00	5.282.203.156,33	785.370.272,67	-	6.067.573.429,00	1.568.120.262,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	4.970.135.447,50	-	-	4.970.135.447,50	4.385.658.782,93	380.718.883,57	-	4.766.377.666,50	203.757.781,00
27	Dinas KUMPERDAG	15.023.642.589,20	172.500.000,00	-	15.196.142.589,20	2.200.829.267,83	1.887.024.685,17	-	4.087.853.953,00	11.108.288.636,20
28	BKD	4.548.856.010,00	571.090.000,00	7.900.000,00	5.112.046.010,00	3.183.072.787,42	491.729.691,58	7.900.000,00	3.666.902.479,00	1.445.143.531,00
29	DPMPSTP	1.138.465.091,00	165.000.000,00	106.200.000,00	1.197.265.091,00	966.471.310,00	235.208.045,00	106.200.000,00	1.095.479.355,00	101.785.736,00
30	Inspektorat Kabupaten	1.384.790.781,00	-	41.000.000,00	1.343.790.781,00	1.218.190.350,00	120.238.002,00	41.000.000,00	1.297.428.352,00	46.362.429,00
31	BAPPEDA	1.717.874.942,00	-	-	1.717.874.942,00	1.186.426.212,33	213.317.032,67	-	1.399.743.245,00	318.131.697,00
32	DLH	6.154.881.087,00	566.654.500,00	259.200.000,00	6.462.335.587,00	4.735.810.804,43	401.554.315,57	259.200.000,00	4.878.165.120,00	1.584.170.467,00
33	Kantor KESBANGPOL	259.182.000,00	-	-	259.182.000,00	245.519.500,00	3.225.000,00	-	248.744.500,00	10.437.500,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	6.496.350.096,00	-	-	6.496.350.096,00	4.451.340.686,00	662.126.022,00	-	5.113.466.708,00	1.382.883.388,00
35	BPBD	2.956.794.350,00	32.600.000,00	643.252.000,00	2.346.142.350,00	2.686.513.163,33	77.378.645,67	636.336.584,00	2.127.555.225,00	218.587.125,00
36	BKPSDM	1.110.829.131,00	3.950.000,00	25.745.000,00	1.089.034.131,00	1.002.149.845,00	61.217.362,00	25.745.000,00	1.037.622.207,00	51.411.924,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.969.350.505,00	80.294.700,00	2.952.000,00	2.046.693.205,00	1.280.666.463,67	193.882.288,33	2.952.000,00	1.471.596.752,00	575.096.453,00
38	Dinas KOMINFO	2.561.615.669,00	400.942.300,00	112.500.000,00	2.850.057.969,00	1.209.679.380,58	422.501.035,42	112.500.000,00	1.519.680.416,00	1.330.377.553,00
Jumlah		260.565.316.331,44	53.596.566.294,00	3.376.918.056,00	310.784.964.569,44	156.940.942.950,57	33.681.275.489,03	1.814.318.012,00	188.807.900.427,60	121.977.064.141,84



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tabel dibawah ini dapat dijelaskan penambahan dan pengurangan nilai aset tetap peralatan mesin tahun 2020 berdasarkan perolehan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.34

Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019 (Audited)	260.565.316.331,44
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2020	53.596.566.294,00
1 Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	41.953.149.792,00
2 Penambahan Belanja Modal Bos Reguler Menjadi Aset	2.378.180.570,00
3 Penambahan Belanja Modal BOS Afirmasi Menjadi Aset	1.896.692.780,00
4 Penambahan Belanja Modal BOS Kinerja Menjadi Aset	810.481.960,00
5 Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	2.031.194.298,00
6 Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	11.250.000,00
7 Penambahan Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset	41.250.000,00
8 Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	26.838.572,00
9 Penambahan Hutang Tahun 2020 Menjadi Aset	122.700.000,00
10 Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset	1.097.150.844,00
11 Penambahan Hibah Masyarakat Menjadi Aset	2.750.000,00
12 Penambahan Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	6.350.000,00
13 Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset	336.628.000,00
14 Penambahan Mutasi Antar OPD	552.100.000,00
15 Penambahan Mutasi Honor Pokja	26.838.572,00
16 Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	321.000.000,00
17 Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	1.091.384.728,00
18 Penambahan BTT Covid-19 menjadi Aset	812.526.178,00
19 Penambahan Dana KLB Menjadi Aset	78.100.000,00
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2020	3.376.918.056,00
1 Pengurangan Mutasi Antar OPD	552.100.000,00
2 Pengurangan Mutasi Honor Pokja	26.838.572,00
3 Pengurangan Koreksi Pencatatan	14.391.000,00
4 Lelang dan Penjualan	259.200.000,00
5 Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	2.524.388.484,00
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020	310.784.964.569,44

Rincian penambahan aset tetap peralatan mesin berdasarkan perolehan per OPD sebesar Rp53.596.566.294,00 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.35

Uraian Penambahan Peralatan dan Mesin per OPD

No	Uraian	Jumlah
	Penambahan Peralatan dan Mesin 2020	53.596.566.294,00
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	41.953.149.792,00
	Alat Besar	31.650.000,00
1	Sekretariat DPRD	29.250.000,00
2	Dinas Pendidikan	2.400.000,00
	Alat Angkutan	5.439.231.000,00
1	Sekretariat Daerah	461.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	3.293.651.000,00
3	DSP3KB	708.125.000,00
4	Dinas Pertanian	242.200.000,00
5	BKD	277.455.000,00
6	DLH	456.800.000,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	559.560.000,00
1	Dinas Perhubungan	549.560.000,00
2	Dinas Pertanian	10.000.000,00
	Alat Pertanian	3.161.392,00
1	Dinas Pendidikan	3.161.392,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.576.760.332,00
1	Sekretariat DPRD	431.939.450,00
2	Sekretariat Daerah	171.153.900,00
3	Kec. Sungai Rumbai	5.000.000,00
4	Dinas PUPR	10.000.000,00
5	Dinas PERKIMTAN	14.000.000,00
6	Dinas Perhubungan	24.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
7	Dinas Kesehatan	239.260.000,00
8	RSUD	1.130.575.370,00
9	Dinas Pendidikan	2.873.534.662,00
10	Dinas BUDPARPORA	32.991.500,00
11	DSP3KB	23.600.750,00
12	DISDUKCAPIL	8.100.000,00
13	Dinas PMD	9.000.000,00
14	Dinas Pertanian	324.370.000,00
15	BKD	83.000.000,00
16	DLH	1.485.000,00
17	BPBD	14.300.000,00
18	BKPSDM	3.950.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80.294.700,00
20	Dinas KOMINFO	96.205.000,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	558.981.800,00
1	Kec. Sitiung	6.000.000,00
2	Dinas Perhubungan	1.500.000,00
3	Dinas Kesehatan	319.613.000,00
4	RSUD	27.900.000,00
5	Dinas Pendidikan	1.200.000,00
6	Dinas TRANSAKER	31.000.000,00
7	DSP3KB	23.870.000,00
8	DISDUKCAPIL	16.262.000,00
9	Dinas Pertanian	43.100.000,00
10	BKD	27.885.000,00
11	Dinas KOMINFO	60.651.800,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	15.893.997.918,00
1	Dinas Kesehatan	11.561.256.536,00
2	RSUD	4.332.741.382,00
	Alat Laboratorium	7.404.825.387,00
1	Dinas Kesehatan	3.278.817.591,00
2	RSUD	482.136.000,00
3	Dinas Pendidikan	3.547.581.796,00
4	DISDUKCAPIL	2.750.000,00
5	DLH	93.540.000,00
	Alat Persenjataan	579.050.000,00
1	Dinas Pendidikan	579.050.000,00
	Komputer	5.810.179.331,00
1	Sekretariat Daerah	143.445.000,00
2	Kec. Koto Baru	10.000.000,00
3	Kec. Sungai Rumbai	9.000.000,00
4	Kec Koto Besar	15.650.000,00
5	Dinas PUPR	31.000.000,00
6	Dinas Perhubungan	28.000.000,00
7	Dinas Kesehatan	211.370.000,00
8	RSUD	59.000.000,00
9	Dinas Pendidikan	4.471.589.331,00
10	Dinas BUDPARPORA	35.850.000,00
11	DSP3KB	110.295.000,00
12	DISDUKCAPIL	47.472.500,00
13	Dinas PMD	8.500.000,00
14	Dinas Pertanian	167.592.500,00
15	Dinas KUMPERDAG	12.000.000,00
16	BKD	182.750.000,00
17	DLH	14.829.500,00
18	BPBD	7.750.000,00
19	Dinas KOMINFO	244.085.500,00
	Alat Keselamatan Kerja	40.080.000,00
1	Dinas Pendidikan	40.080.000,00
	Peralatan Olah Raga	55.672.632,00
1	Dinas Pendidikan	55.672.632,00
2	Penambahan Belanja Modal Bos Reguler Menjadi Aset	2.378.180.570,00
	Alat Besar	5.240.000,00
1	Dinas Pendidikan	5.240.000,00
	Alat Angkutan	2.500.000,00
1	Dinas Pendidikan	2.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	222.378.000,00
1	Dinas Pendidikan	222.378.000,00
	Alat Pertanian	76.812.800,00
1	Dinas Pendidikan	76.812.800,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	967.389.870,00
1	Dinas Pendidikan	967.389.870,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	76.806.200,00
1	Dinas Pendidikan	76.806.200,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	16.520.000,00
1	Dinas Pendidikan	16.520.000,00
	Alat Laboratorium	51.756.300,00
1	Dinas Pendidikan	51.756.300,00
	Alat Persenjataan	14.900.000,00
1	Dinas Pendidikan	14.900.000,00
	Komputer	892.695.450,00
1	Dinas Pendidikan	892.695.450,00
	Alat Keselamatan Kerja	30.981.950,00
1	Dinas Pendidikan	30.981.950,00
	Peralatan Proses/Produksi	12.000.000,00
1	Dinas Pendidikan	12.000.000,00
	Peralatan Olah Raga	8.200.000,00
1	Dinas Pendidikan	8.200.000,00
3	Penambahan Belanja Modal BOS Afirmasi Menjadi Aset	1.896.692.780,00
	Alat Besar	2.450.000,00
1	Dinas Pendidikan	2.450.000,00
	Alat Pertanian	36.017.100,00
1	Dinas Pendidikan	36.017.100,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	241.170.680,00
1	Dinas Pendidikan	241.170.680,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	11.809.500,00
1	Dinas Pendidikan	11.809.500,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	27.600.000,00
1	Dinas Pendidikan	27.600.000,00
	Alat Laboratorium	7.537.500,00
1	Dinas Pendidikan	7.537.500,00
	Alat Persenjataan	18.670.000,00
1	Dinas Pendidikan	18.670.000,00
	Komputer	1.551.438.000,00
1	Dinas Pendidikan	1.551.438.000,00
4	Penambahan Belanja Modal BOS Kinerja Menjadi Aset	810.481.960,00
	Alat Pertanian	31.799.900,00
1	Dinas Pendidikan	31.799.900,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	192.423.560,00
1	Dinas Pendidikan	192.423.560,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	39.147.000,00
1	Dinas Pendidikan	39.147.000,00
	Alat Laboratorium	70.028.500,00
1	Dinas Pendidikan	70.028.500,00
	Komputer	473.079.000,00
1	Dinas Pendidikan	473.079.000,00
	Alat Keselamatan Kerja	4.004.000,00
1	Dinas Pendidikan	4.004.000,00
5	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	2.031.194.298,00
	Alat Besar	8.250.000,00
1	Dinas Kesehatan	8.250.000,00
	Alat Angkutan	1.430.000,00
1	Dinas Kesehatan	1.430.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	462.630.900,00
1	Dinas Kesehatan	322.460.900,00
2	RSUD	140.170.000,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	126.465.500,00
1	Dinas Kesehatan	33.423.500,00
2	RSUD	93.042.000,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	527.868.688,00
1	Dinas Kesehatan	26.501.951,00
2	RSUD	501.366.737,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
	Alat Laboratorium	51.661.500,00
1	Dinas Kesehatan	43.301.500,00
2	RSUD	8.360.000,00
	Komputer	852.887.710,00
1	Dinas Kesehatan	111.325.110,00
2	RSUD	741.562.600,00
6	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	11.250.000,00
	Alat Angkutan	5.100.000,00
1	Sekretariat Daerah	600.000,00
2	Dinas Kesehatan	4.500.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.900.000,00
1	Sekretariat DPRD	1.900.000,00
	Komputer	4.250.000,00
1	BPBD	4.250.000,00
7	Penambahan Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset	41.250.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.250.000,00
1	RSUD	5.250.000,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	27.900.000,00
1	RSUD	27.900.000,00
	Alat Laboratorium	3.900.000,00
1	RSUD	3.900.000,00
	Komputer	4.200.000,00
1	RSUD	4.200.000,00
8	Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	26.838.572,00
	Alat Angkutan	8.940.000,00
1	Sekretariat Daerah	8.940.000,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.760.000,00
1	Sekretariat Daerah	2.760.000,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.428.572,00
1	Sekretariat Daerah	1.428.572,00
	Alat Laboratorium	11.430.000,00
1	Sekretariat Daerah	11.430.000,00
	Peralatan Olah Raga	2.280.000,00
1	Sekretariat Daerah	2.280.000,00
9	Penambahan Hutang Tahun 2020 Menjadi Aset	122.700.000,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	122.700.000,00
1	RSUD	122.700.000,00
10	Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset	1.097.150.844,00
	Alat Besar	1.087.063.544,00
1	Dinas PUPR	1.087.063.544,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.087.300,00
1	RSUD	10.087.300,00
11	Penambahan Hibah Masyarakat Menjadi Aset	2.750.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.750.000,00
1	Dinas Pendidikan	2.750.000,00
12	Penambahan Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	333.178.000,00
	Alat Pertanian	326.828.000,00
	Dinas Pertanian	326.828.000,00
	Komputer	6.350.000,00
	Dinas Pendidikan	6.350.000,00
13	Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset	9.800.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.000.000,00
1	BPBD	5.000.000,00
	Komputer	4.800.000,00
1	Dinas Pendidikan	3.500.000,00
2	BPBD	1.300.000,00
14	Penambahan Mutasi Antar OPD	552.100.000,00
	Komputer	544.200.000,00
1	Dinas Pendidikan	106.200.000,00
2	Dinas BUDPARPORA	112.500.000,00
3	Dinas KUMPERDAG	160.500.000,00
4	DPMPTSP	165.000.000,00
	Komputer	7.900.000,00
1	Sekretariat Daerah	7.900.000,00
15	Penambahan Mutasi Honor Pokja	26.838.572,00
	Alat Angkutan	8.940.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	6.180.000,00
2	DSP3KB	2.760.000,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.760.000,00
1	Dinas Perhubungan	2.760.000,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.428.572,00
1	Dinas Kesehatan	1.428.572,00
	Alat Laboratorium	11.430.000,00
1	Dinas Pendidikan	11.430.000,00
	Peralatan Olah Raga	2.280.000,00
1	Dinas Pendidikan	2.280.000,00
16	Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	321.000.000,00
	Alat Angkutan	321.000.000,00
	Dinas Perhubungan	321.000.000,00
17	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	1.091.384.728,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	481.764.728,00
	RSUD	478.764.728,00
	Dinas Pendidikan	3.000.000,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	263.680.000,00
	Dinas Pendidikan	263.680.000,00
	Komputer	345.940.000,00
	Dinas Pendidikan	345.940.000,00
18	Penambahan BTT Covid-19 menjadi Aset	812.526.178,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	220.247.714,00
1	Dinas Kesehatan	77.086.000,00
2	RSUD	95.300.000,00
3	Dinas Pendidikan	36.261.714,00
4	Dinas TRANSAKER	11.600.000,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	15.248.241,00
1	Dinas Pendidikan	15.248.241,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	309.190.000,00
1	Dinas Kesehatan	95.484.000,00
2	RSUD	213.706.000,00
	Alat Laboratorium	253.743.741,00
1	Dinas Kesehatan	201.670.000,00
2	RSUD	33.725.500,00
3	Dinas Pendidikan	9.348.241,00
4	Dinas TRANSAKER	9.000.000,00
	Alat Keselamatan Kerja	14.096.482,00
1	Dinas Pendidikan	14.096.482,00
19	Penambahan Dana KLB Menjadi Aset	78.100.000,00
	Alat Persenjataan	78.100.000,00
1	Dinas Kesehatan	78.100.000,00

Penambahan peralatan mesin yang berasal dari hutang sebesar Rp122.700.000,00 terdapat di RSUD Sungai Dareh dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.36
 Penambahan Peralatan Mesin dari Hutang pada RSUD Sungai Dareh

No	Uraian	Jumlah
1	Pengadaan alat kesehatan penanganan Covid 19 dari PT Amanah Jaya Bersama	51,700,000.00
2	Pengadaan alat kesehatan penanganan Covid 19 dari PT Emindo Jaya Bersama	71,000,000.00
Jumlah		122,700,000.00

Penambahan peralatan mesin yang berasal dari Hibah pusat menjadi aset sebesar Rp1.097.150.844,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperoleh 1 (satu) unit alat berat Excavator senilai Rp1.087.063.544,00 hal ini tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor 408.1/BA/DC/2019 dan tercatat di Dinas PUPR.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Hibah dari Perpustakaan Nasional RI kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui RSUD Sungai Dareh senilai Rp10.087.300 berupa lemari rak buku hal ini tertuang dalam Berita Acara serah terima Bantuan Rak Buku untuk Dihilangkan ke Perpustakaan Rumah Sakit Nomor 1630/4.1/PLK.03.01/VI.2020 berupa 2 unit rak buku

Penambahan dari Hibah masyarakat jadi aset sebesar Rp2.750.000,00 terdapat di Dinas Pendidikan adalah berupa kursi tamu kenang-kenangan siswa SDN 4 Timpeh

Penambahan peralatan mesin yang berasal dari penilaian kurang catat sebesar Rp333.178.000,00 adalah sebagai berikut :

- Pada Dinas Pertanian berupa penilaian 23 unit Container N2 Cair senilai Rp326.828.000,00
- Pada Dinas Pendidikan (Sekolah dasar negeri 1 Timpeh) berupa 1 unit PC Unit senilai Rp6.350.000,00

Penambahan peralatan mesin yang berasal dari kurang catat sebesar Rp9.800.000,00 adalah sebagai berikut :

- BPBD sebesar Rp6.300.000,00 adalah berupa Air Conditioner (AC) senilai Rp5.000.000,00 merupakan pengadaan Tahun 2018 dari kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor serta printer senilai Rp1.300.000,00
- Dinas Pendidikan sebesar Rp3.500.000,00 berupa printer dari BOS Reguler 2019 SDN 8 Timpeh.

Rincian pengurangan aset tetap peralatan mesin berdasarkan perolehan per OPD sebesar Rp3.376.918.056,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.37
 Uraian Pengurangan Peralatan dan Mesin per OPD

No	Uraian	Jumlah
	Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2020	3.376.918.056,00
1	Pengurangan Mutasi Antar OPD	552.100.000,00
	Alat Angkutan	544.200.000,00
1	Sekretariat Daerah	165.000.000,00
2	Dinas Perhubungan	160.500.000,00
3	DPMPTSP	106.200.000,00
4	Dinas KOMINFO	112.500.000,00
	Komputer	7.900.000,00
1	BKD	7.900.000,00
2	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	26.838.572,00
	Alat Angkutan	8.940.000,00
1	Sekretariat Daerah	8.940.000,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.760.000,00
1	Sekretariat Daerah	2.760.000,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.428.572,00
1	Sekretariat Daerah	1.428.572,00
	Alat Laboratorium	11.430.000,00
1	Sekretariat Daerah	11.430.000,00
	Peralatan Olah Raga	2.280.000,00
1	Sekretariat Daerah	2.280.000,00
3	Pengurangan Koreksi Pencatatan	14.391.000,00
	Alat Angkutan	14.391.000,00
1	Dinas TRANSAKER	14.391.000,00
4	Lelang dan Penjualan	259.200.000,00
	Alat Angkutan	259.200.000,00
1	Sekretariat Daerah	259.200.000,00
5	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	2.524.388.484,00
	Alat Besar	10.300.000,00
1	Sekretariat DPRD	10.300.000,00
	Alat Angkutan	832.184.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
1	DLH	259.200.000,00
2	BPBD	572.984.500,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.500.000,00
1	BPBD	3.500.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	54.117.000,00
1	Inspektorat Kabupaten	35.000.000,00
1	BPBD	12.245.000,00
2	BKPSDM	3.920.000,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.952.000,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	83.858.752,00
1	Dinas Pendidikan	29.336.252,00
2	BPBD	54.522.500,00
	Alat Laboratorium	880.636.232,00
1	Dinas Pendidikan	880.636.232,00
	Alat Persenjataan	612.620.000,00
1	Dinas Pendidikan	612.620.000,00
	Komputer	47.172.000,00
1	Sekretariat DPRD	16.897.000,00
2	Kec Koto Besar	2.450.000,00
3	Inspektorat Kabupaten	6.000.000,00
4	BKPSDM	21.825.000,00

Pengurangan saldo Peralatan mesin sebesar Rp259.200.000,00 berasal dari penjualan/lelang di Sekretariat Daerah merupakan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Mantan Bupati Dharmasraya periode 2005-2010 berupa Kendaraan Dinas Ford Everest Tahun 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 030/01/SPSB-ASET/2013 tentang Sewa Beli Kendaraan Perorangan Dinas Milik Daerah Kabupaten Dharmasraya kepada Mantan Bupati Dharmasraya Periode Tahun 2005-2010 dengan nilai penjualan Rp66.800.000,00 (pembayaran tahun 2014 sebesar Rp6.750.000,00 dan pembayaran tahun 2020 sebesar Rp60.050.000,00) dan telah dilakukan penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah melalui Keputusan Pengelola Barang Nomor 953/323/KPTS-SEKDA/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas pada Sekretariat Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020, nilai buku kendaraan tersebut pada saat dijual adalah sebesar Rp0,00

Adapun Penambahan dan Pengurangan Penyusutan aset tetap peralatan mesin tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.38

Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019 (Audited)		156.940.942.950,57
Penambahan Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2020		33.681.275.489,03
1	Penambahan Penyusutan Mutasi Antar OPD	552.100.000,00
2	Penambahan Penyusutan Reklas	160.500.000,00
3	Penambahan Penyusutan Koreksi	104.166,00
4	Penyusutan Semester I	15.364.318.663,29
5	Penyusutan Semester II	17.604.252.659,74
Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2020		1.814.318.012
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar OPD	552.100.000,00
2	Pengurangan Penyusutan Reklas	988.627.012,00
3	Pengurangan Penyusutan Lelang dan Penjualan	259.200.000,00
4	Pengurangan Penyusutan Koreksi	14.391.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020		188.807.900.427,60
Nilai Buku Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020		121.977.064.141,84



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Penambahan Penyusutan aset tetap peralatan mesin sebesar Rp33.681.275.489,03 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.39
 Uraian Penambahan Penyusutan Peralatan dan Mesin 2020

No	Uraian	Jumlah
	Penambahan Penyusutan Peralatan dan Mesin 2020	33.681.275.489,03
1	Penambahan Penyusutan Mutasi Antar OPD	552.100.000,00
	Alat Angkutan	544.200.000,00
1	Sekretariat Daerah	106.200.000,00
2	Dinas BUDPARPORA	112.500.000,00
3	Dinas KUMPERDAG	160.500.000,00
4	DPMPTSP	165.000.000,00
	Komputer	7.900.000,00
1	Sekretariat Daerah	7.900.000,00
2	Penambahan Penyusutan Reklas	160.500.000,00
	Alat Angkutan	160.500.000,00
1	Dinas Perhubungan	160.500.000,00
3	Penambahan Penyusutan Koreksi	104.166,00
	Komputer	104.166,00
1	BKD	104.166,00
4	Penyusutan Semester I	15.364.318.663,29
	Alat Besar	1.081.976.701,93
1	Sekretariat DPRD	19.476.413,81
2	Sekretariat Daerah	1.426.999,38
3	Kec. Padang Laweh	135.714,05
4	Kec. Asam Jujuhan	357.143,00
5	Dinas PUPR	789.455.117,00
6	Dinas Kesehatan	641.758,00
7	RSUD	4.062.297,65
8	Dinas Pendidikan	3.115.013,90
9	Dinas BUDPARPORA	107.143,00
10	Dinas Pangan dan Perikanan	136.144.641,57
11	Dinas KUMPERDAG	82.125.703,00
12	Inspektorat Kabupaten	957.858,00
13	DLH	40.851.666,57
14	BPBD	3.119.233,00
	Alat Angkutan	2.540.844.279,00
1	Sekretariat DPRD	139.689.151,00
2	Sekretariat Daerah	570.020.289,00
3	Kec. Pulau Punjung	14.508.325,00
4	Kec. Sitiung	19.817.597,00
5	Kec. Koto Baru	20.133.445,00
6	Kec. Sungai Rumbai	18.792.473,00
7	Kec. IX Koto	4.956.832,00
8	Kec. Timpeh	2.207.723,00
9	Kec. Padang Laweh	2.427.819,00
10	Kec Koto Besar	18.641.704,00
11	Kec Koto Salak	1.647.657,00
12	Dinas PUPR	185.165.376,00
13	Dinas PERKIMTAN	10.574.909,00
14	Dinas Perhubungan	57.522.843,00
15	Dinas Kesehatan	349.639.955,00
16	RSUD	156.019.288,00
17	Dinas Pendidikan	62.592.427,00
18	Dinas BUDPARPORA	23.345.300,00
19	DSP3KB	83.989.465,00
20	DISDUKCAPIL	88.195.653,00
21	Dinas Pertanian	81.797.984,00
22	Dinas Pangan dan Perikanan	34.312.138,00
23	Dinas KUMPERDAG	61.396.877,00
24	BKD	22.170.207,00
25	DPMPTSP	1.167.751,00
26	Inspektorat Kabupaten	20.907.857,00
27	BAPPPEDA	23.325.047,00
28	DLH	73.137.938,00
29	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	291.470.844,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
30	BPBD	23.036.489,00
31	BKPSDM	21.457.856,00
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47.848.633,00
33	Dinas KOMINFO	8.926.427,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	396.218.348,00
1	Sekretariat Daerah	1.346.000,00
2	Dinas PUPR	15.033.612,00
3	Dinas Perhubungan	1.335.000,00
4	Dinas Kesehatan	264.000,00
5	RSUD	348.750,00
6	Dinas Pendidikan	15.214.207,00
7	Dinas BUDPARPORA	882.500,00
8	DISDUKCAPIL	874.500,00
9	Dinas Pertanian	15.517.940,00
10	Dinas KUMPERDAG	334.658.239,00
11	BKD	4.088.500,00
12	DPMPTSP	1.446.500,00
13	BAPPPEDA	1.010.000,00
14	DLH	2.192.600,00
15	BPBD	1.312.500,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000,00
17	Dinas KOMINFO	643.500,00
	Alat Pertanian	66.752.633,00
1	Dinas PUPR	12.187.500,00
2	Dinas PERKIMTAN	4.276.250,00
3	Dinas Pendidikan	37.793.883,00
4	DLH	12.495.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.310.979.058,34
1	Sekretariat DPRD	407.666.436,00
2	Sekretariat Daerah	762.994.892,00
3	Kec. Pulau Punjung	9.080.394,00
4	Kec. Sitiung	4.913.750,00
5	Kec. Koto Baru	7.077.163,00
6	Kec. Sungai Rumbai	3.546.667,00
7	Kec. IX Koto	5.598.581,00
8	Kec. Timpeh	960.000,00
9	Kec. Padang Laweh	3.704.600,00
10	Kec Tiumbang	5.858.667,00
11	Kec Koto Besar	3.117.200,00
12	Kec Koto Salak	6.600.000,00
13	Kec. Asam Jujuhan	3.116.666,00
14	Dinas PUPR	42.972.690,00
15	Dinas PERKIMTAN	18.356.147,33
16	Dinas Perhubungan	8.886.050,00
17	Dinas Kesehatan	609.018.944,00
18	RSUD	477.841.270,00
19	Dinas Pendidikan	366.059.112,18
20	Dinas BUDPARPORA	33.477.800,00
21	Dinas TRANSNAKER	4.636.334,00
22	DSP3KB	4.163.307,00
23	DISDUKCAPIL	13.661.431,33
24	Dinas PMD	10.893.083,00
25	Dinas Pertanian	98.170.871,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	20.380.948,00
27	Dinas KUMPERDAG	17.172.275,00
28	BKD	101.719.887,08
29	DPMPTSP	9.902.500,00
30	Inspektorat Kabupaten	28.381.382,00
31	BAPPPEDA	30.365.310,67
32	DLH	46.147.570,00
33	Kantor KESBANGPOL	1.300.000,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	37.822.722,00
35	BPBD	8.703.367,00
36	BKPSDM	8.899.680,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41.129.242,33
38	Dinas KOMINFO	46.682.118,42



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.048.278.586,77
1	Sekretariat DPRD	102.997.076,71
2	Sekretariat Daerah	115.056.453,50
3	Kec. Pulau Punjung	600.000,00
4	Kec. Sitiung	1.549.500,00
5	Kec. Koto Baru	840.000,00
6	Kec. Sungai Rumbai	1.238.962,92
7	Kec. IX Koto	880.267,00
8	Kec. Timpeh	661.842,92
9	Kec. Padang Laweh	1.375.000,00
10	Kec Tiumbang	2.095.000,00
11	Kec Koto Besar	360.000,00
12	Kec Koto Salak	868.674,83
13	Kec. Asam Jujuhan	920.000,00
14	Dinas PUPR	25.304.531,67
15	Dinas PERKIMTAN	2.778.850,00
16	Dinas Perhubungan	4.360.000,00
17	Dinas Kesehatan	48.271.378,82
18	RSUD	130.182.150,33
19	Dinas Pendidikan	366.465.311,21
20	Dinas BUDPARPORA	6.669.972,86
21	Dinas TRANSAKER	816.667,00
22	DSP3KB	9.922.000,00
23	DISDUKCAPIL	17.017.567,00
24	Dinas PMD	1.580.000,00
25	Dinas Pertanian	18.877.702,67
26	Dinas Pangan dan Perikanan	-
27	Dinas KUMPERDAG	84.232.746,17
28	BKD	28.390.191,50
29	DPMPTSP	3.730.500,00
30	Inspektorat Kabupaten	4.042.973,00
31	BAPPPEDA	5.640.591,00
32	DLH	2.852.750,00
33	Kantor KESBANGPOL	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	1.197.000,00
35	BPBD	2.056.099,67
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	998.959,00
37	Dinas KOMINFO	53.447.867,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	3.031.256.117,00
1	Sekretariat Daerah	5.998.500,00
2	Dinas Kesehatan	1.431.441.888,00
3	RSUD	1.584.964.475,00
4	Dinas Pendidikan	2.484.360,00
5	Dinas Pertanian	6.101.975,00
6	Dinas KUMPERDAG	264.919,00
	Alat Laboratorium	1.013.449.880,40
1	Kec. IX Koto	124.044,00
2	Kec Koto Salak	60.000,00
3	Dinas PUPR	20.476.123,00
4	Dinas Kesehatan	145.784.641,00
5	RSUD	242.575.798,40
6	Dinas Pendidikan	311.322.392,00
7	DSP3KB	100.000,00
8	DISDUKCAPIL	130.833,00
9	Dinas Pertanian	814.368,00
10	Dinas Pangan dan Perikanan	3.075.714,00
11	Dinas KUMPERDAG	270.772.767,00
12	BKD	250.000,00
13	DPMPTSP	80.000,00
14	DLH	17.883.200,00
	Alat Persenjataan	13.813.889,00
1	Dinas Kesehatan	10.847.222,00
2	Dinas Pendidikan	1.116.667,00
3	Dinas Pertanian	350.000,00
4	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	1.500.000,00
	Komputer	2.755.304.758,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat DPRD	22.934.750,00
2	Sekretariat Daerah	122.071.224,00
3	Kec. Pulau Punjung	2.875.000,00
4	Kec. Sitiung	4.187.500,00
5	Kec. Koto Baru	4.232.671,00
6	Kec. Sungai Rumbai	1.871.875,00
7	Kec. IX Koto	3.248.831,00
8	Kec. Timpeh	3.954.730,00
9	Kec. Padang Laweh	3.291.667,00
10	Kec. Tiumang	5.175.000,00
11	Kec Koto Besar	5.182.292,00
12	Kec Koto Salak	3.581.250,00
13	Kec. Asam Jujuhan	1.870.875,00
14	Dinas PUPR	66.988.283,00
15	Dinas PERKIMTAN	27.295.002,00
16	Dinas Perhubungan	24.459.258,00
17	Dinas Kesehatan	279.400.720,00
18	RSUD	80.045.297,00
19	Dinas Pendidikan	1.559.474.834,00
20	Dinas BUDPARPORA	21.987.484,00
21	Dinas TRANSAKER	27.958.091,00
22	DSP3KB	39.003.823,00
23	DISDUKCAPIL	72.691.166,00
24	Dinas PMD	16.774.250,00
25	Dinas Pertanian	26.357.409,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	7.949.500,00
27	Dinas KUMPERDAG	13.448.050,00
28	BKD	98.094.425,00
29	DPMPTSP	20.283.750,00
30	Inspektorat Kabupaten	12.921.252,00
31	BAPPPEDA	52.370.796,00
32	DLH	6.461.416,00
33	Kantor KESBANGPOL	312.500,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	10.701.177,00
35	BPBD	750.000,00
36	BKPSDM	4.098.537,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.314.167,00
38	Dinas KOMINFO	93.685.906,00
Alat Keselamatan Kerja		5.015.000,00
1	Dinas Pendidikan	5.015.000,00
Rambu - Rambu		95.299.549,07
1	Dinas Perhubungan	95.299.549,07
Peralatan Olah Raga		5.129.862,78
1	Dinas Pendidikan	5.129.862,78
5	Penyusutan Semester II	17.604.252.659,74
Alat Besar		623.938.322,18
1	Sekretariat DPRD	15.965.464,00
2	Sekretariat Daerah	1.427.000,00
3	Kec. Padang Laweh	135.714,00
4	Kec. Asam Jujuhan	357.143,00
5	Dinas PUPR	345.570.837,00
6	Dinas Kesehatan	1.047.710,17
7	RSUD	4.062.298,00
8	Dinas Pendidikan	3.340.673,00
9	Dinas BUDPARPORA	107.143,00
10	Dinas Pangan dan Perikanan	124.977.025,00
11	Dinas KUMPERDAG	82.125.703,00
12	Inspektorat Kabupaten	957.857,00
13	DLH	40.851.667,00
14	BPBD	3.012.088,00
Alat Angkutan		2.866.551.749,00
1	Sekretariat DPRD	139.689.150,00
2	Sekretariat Daerah	568.700.217,00
3	Kec. Pulau Punjung	14.508.325,00
4	Kec. Sitiung	19.817.598,00
5	Kec. Koto Baru	20.133.446,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
6	Kec. Sungai Rumbai	18.792.473,00
7	Kec. IX Koto	4.956.833,00
8	Kec. Timpeh	2.007.574,00
9	Kec. Padang Laweh	2.427.819,00
10	Kec Koto Besar	18.641.705,00
11	Kec Koto Salak	1.647.658,00
12	Dinas PUPR	185.165.380,00
13	Dinas PERKIMTAN	10.574.906,00
14	Dinas Perhubungan	215.422.843,00
15	Dinas Kesehatan	497.203.918,00
16	RSUD	156.019.285,00
17	Dinas Pendidikan	62.696.595,00
18	Dinas BUDPARPORA	23.345.301,00
19	DSP3KB	105.986.435,00
20	DISDUKCAPIL	88.195.654,00
21	Dinas Pertanian	92.463.127,00
22	Dinas Pangan dan Perikanan	31.114.051,00
23	Dinas KUMPERDAG	61.396.876,00
24	BKD	28.532.768,00
25	DPMPTSP	1.167.752,00
26	Inspektorat Kabupaten	17.423.215,00
27	BAPPPEDA	23.325.048,00
28	DLH	79.309.370,00
29	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	279.781.369,00
30	BPBD	22.704.402,00
31	BKPSDM	17.697.024,00
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47.848.632,00
33	Dinas KOMINFO	7.855.000,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	418.112.932,00
1	Sekretariat Daerah	1.246.083,00
2	Dinas PUPR	15.033.612,00
3	Dinas Perhubungan	19.745.668,00
4	Dinas Kesehatan	264.000,00
5	RSUD	348.750,00
6	Dinas Pendidikan	18.885.249,00
7	Dinas BUDPARPORA	735.417,00
8	DISDUKCAPIL	874.500,00
9	Dinas Pertanian	15.577.814,00
10	Dinas KUMPERDAG	334.658.239,00
11	BKD	4.088.500,00
12	DPMPTSP	1.446.500,00
13	BAPPPEDA	1.010.000,00
14	DLH	2.192.600,00
15	BPBD	1.312.500,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000,00
17	Dinas KOMINFO	643.500,00
	Alat Pertanian	356.169.491,00
1	Dinas PUPR	10.156.250,00
2	Dinas PERKIMTAN	4.276.250,00
3	Dinas Pendidikan	37.807.242,00
4	Dinas Pertanian	291.434.749,00
5	DLH	12.495.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.429.875.735,81
1	Sekretariat DPRD	406.368.465,00
2	Sekretariat Daerah	757.114.483,00
3	Kec. Pulau Punjung	7.279.895,00
4	Kec. Sitiung	3.266.666,00
5	Kec. Koto Baru	6.631.997,00
6	Kec. Sungai Rumbai	2.288.333,00
7	Kec. IX Koto	3.440.913,00
8	Kec. Timpeh	300.000,00
9	Kec. Padang Laweh	3.218.001,00
10	Kec Tiumbang	4.792.000,00
11	Kec Koto Besar	2.481.667,00
12	Kec Koto Salak	6.333.334,00
13	Kec. Asam Jujuhan	2.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
14	Dinas PUPR	42.199.343,00
15	Dinas PERKIMTAN	18.866.150,00
16	Dinas Perhubungan	10.156.883,00
17	Dinas Kesehatan	622.778.232,13
18	RSUD	581.683.562,67
19	Dinas Pendidikan	439.940.336,00
20	Dinas BUDPARPORA	34.988.551,00
21	Dinas TRANSAKER	3.617.917,00
22	DSP3KB	3.663.510,00
23	DISDUKCAPIL	13.287.430,00
24	Dinas PMD	10.966.000,00
25	Dinas Pertanian	97.301.168,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	14.361.063,00
27	Dinas KUMPERDAG	15.956.925,00
28	BKD	78.548.814,00
29	DPMPTSP	9.627.500,00
30	Inspektorat Kabupaten	26.789.718,00
31	BAPPPEDA	26.773.645,00
32	DLH	35.152.138,00
33	Kantor KESBANGPOL	1.300.000,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	27.191.660,00
35	BPBD	7.599.200,00
36	BKPSDM	9.064.265,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40.627.446,00
38	Dinas KOMINFO	51.168.525,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		1.023.080.756,99
1	Sekretariat DPRD	86.193.122,00
2	Sekretariat Daerah	114.818.620,00
3	Kec. Pulau Punjung	400.000,00
4	Kec. Sitiung	1.749.500,00
5	Kec. Koto Baru	840.000,00
6	Kec. Sungai Rumbai	968.962,00
7	Kec. IX Koto	713.600,00
8	Kec. Timpeh	661.842,00
9	Kec. Padang Laweh	1.333.333,00
10	Kec. Tiumang	2.095.000,00
11	Kec. Koto Besar	120.000,00
12	Kec. Koto Salak	806.592,00
13	Kec. Asam Jujuhan	920.000,00
14	Dinas PUPR	24.872.864,00
15	Dinas PERKIMTAN	2.778.850,00
16	Dinas Perhubungan	4.410.000,00
17	Dinas Kesehatan	63.143.729,00
18	RSUD	132.808.050,00
19	Dinas Pendidikan	338.674.846,00
20	Dinas BUDPARPORA	6.298.765,00
21	Dinas TRANSAKER	3.400.000,00
22	DSP3KB	11.115.500,00
23	DISDUKCAPIL	17.701.700,00
24	Dinas PMD	1.580.000,00
25	Dinas Pertanian	18.740.781,00
26	Dinas KUMPERDAG	83.699.413,00
27	BKD	27.999.694,00
28	DPMPTSP	3.730.500,00
29	Inspektorat Kabupaten	3.059.640,00
30	BAPPPEDA	4.620.591,00
31	DLH	2.852.750,00
32	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	1.197.000,00
33	BPBD	2.056.100,00
34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	998.959,00
35	Dinas KOMINFO	55.720.454,00
Alat Kedokteran Dan Kesehatan		4.372.858.374,60
1	Sekretariat Daerah	5.998.500,00
2	Dinas Kesehatan	2.543.552.038,00
3	RSUD	1.818.210.566,60
4	Dinas Pendidikan	3.165.027,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
5	Dinas Pertanian	1.667.325,00
6	Dinas KUMPERDAG	264.918,00
	Alat Laboratorium	1.296.872.866,50
1	Kec. IX Koto	124.044,00
2	Kec Koto Salak	60.000,00
3	Dinas PUPR	18.465.531,00
4	Dinas Kesehatan	390.388.742,00
5	RSUD	261.241.636,00
6	Dinas Pendidikan	331.296.260,50
7	Dinas TRANSAKER	93.750,00
8	DSP3KB	83.333,00
9	DISDUKCAPIL	222.500,00
10	Dinas Pertanian	814.366,00
11	Dinas Pangan dan Perikanan	2.563.095,00
12	Dinas KUMPERDAG	270.772.772,00
13	BKD	250.000,00
14	DPMPTSP	80.000,00
15	DLH	20.416.837,00
	Alat Persenjataan	15.983.332,00
1	Dinas Kesehatan	13.016.666,00
2	Dinas Pendidikan	1.116.666,00
3	Dinas Pertanian	350.000,00
4	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	1.500.000,00
	Komputer	3.096.339.686,00
1	Sekretariat DPRD	22.934.752,00
2	Sekretariat Daerah	105.090.603,00
3	Kec. Pulau Punjung	2.875.000,00
4	Kec. Sitiung	4.187.500,00
5	Kec. Koto Baru	4.441.003,00
6	Kec. Sungai Rumbai	1.434.375,00
7	Kec. IX Koto	3.248.832,00
8	Kec. Timpeh	3.318.270,00
9	Kec. Padang Laweh	3.000.000,00
10	Kec Tiumang	5.175.000,00
11	Kec Koto Besar	6.147.917,00
12	Kec Koto Salak	2.800.000,00
13	Kec. Asam Jujuhan	1.870.875,00
14	Dinas PUPR	66.472.658,00
15	Dinas PERKIMTAN	27.294.999,00
16	Dinas Perhubungan	26.709.254,00
17	Dinas Kesehatan	261.632.188,00
18	RSUD	97.414.018,00
19	Dinas Pendidikan	1.948.445.396,00
20	Dinas BUDPARPORA	22.505.192,00
21	Dinas TRANSAKER	27.465.367,00
22	DSP3KB	41.322.242,00
23	DISDUKCAPIL	66.578.778,00
24	Dinas PMD	12.015.000,00
25	Dinas Pertanian	19.032.693,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	5.840.708,00
27	Dinas KUMPERDAG	13.578.263,00
28	BKD	97.492.539,00
29	DPMPTSP	17.544.792,00
30	Inspektorat Kabupaten	4.796.250,00
31	BAPPPEDA	44.876.004,00
32	DLH	6.261.813,00
33	Kantor KESBANGPOL	312.500,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	9.764.250,00
35	BPBD	1.716.667,00
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.016.250,00
37	Dinas KOMINFO	103.727.738,00
	Alat Keselamatan Kerja	4.669.500,67
1	Dinas Pendidikan	4.669.500,67
	Peralatan Proses/Produksi	125.000,00
1	Dinas Pendidikan	125.000,00
	Rambu - Rambu	93.261.231,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Perhubungan	93.261.231,00
	Peralatan Olah Raga	6.413.682,00
1	Dinas Pendidikan	6.413.682,00

Rincian Pengurangan Penyusutan aset tetap peralatan mesin sebesar Rp1.814.318.012,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.40
 Uraian Pengurangan Penyusutan Peralatan dan Mesin Per OPD

No	Uraian	Jumlah
	Pengurangan Penyusutan Peralatan dan Mesin 2020	1.814.318.012,00
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar OPD	552.100.000,00
	Alat Angkutan	544.200.000,00
1	Sekretariat Daerah	165.000.000,00
2	Dinas Perhubungan	160.500.000,00
3	DPMPTSP	106.200.000,00
4	Dinas KOMINFO	112.500.000,00
	Komputer	7.900.000,00
1	BKD	7.900.000,00
2	Pengurangan Penyusutan Reklas	988.627.012,00
	Alat Besar	4.046.428,00
1	Sekretariat DPRD	4.046.428,00
	Alat Angkutan	832.184.500,00
1	DLH	259.200.000,00
2	BPBD	572.984.500,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.829.167,00
1	BPBD	2.829.167,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	53.994.500,00
1	Inspektorat Kabupaten	35.000.000,00
2	BPBD	12.122.500,00
3	BKPSDM	3.920.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.952.000,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	48.400.417,00
1	BPBD	48.400.417,00
	Komputer	47.172.000,00
1	Sekretariat DPRD	16.897.000,00
2	Kec Koto Besar	2.450.000,00
3	Inspektorat Kabupaten	6.000.000,00
4	BKPSDM	21.825.000,00
3	Pengurangan Penyusutan Lelang dan Penjualan	259.200.000,00
	Alat Angkutan	259.200.000,00
1	Sekretariat Daerah	259.200.000,00
4	Pengurangan Penyusutan Koreksi	14.391.000,00
	Alat Angkutan	14.391.000,00
1	Dinas TRANSNAKER	14.391.000,00

V.A.1.c.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monument/bangunan bersejarah, gudang dan gedung museum. Gedung dan Bangunan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

digunakan, merupakan objek pemeliharaan dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.20.000.000,00. Adapun saldo per tanggal 31 Desember 2020 dan Saldo 31 Desember 2019 (Audited) adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019 (Audited)	Tren
	Rp.	Rp.	%
Gedung dan Bangunan	665.269.927.412,85	620.623.140.974,09	107,19%
Akumulasi Penyusutan	(88.623.036.573,00)	(71.728.064.053,00)	123,55%
Nilai Buku	576.646.890.839,85	548.895.076.921,09	105,06%

Nilai Gedung dan Bangunan apabila dibandingkan dengan Audited 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp44.646.786.438,76.

Adapun Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan sub KIB adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019 (Audited)	Tren
	Rp.	Rp.	%
Bangunan Gedung	633.564.375.405,83	589.704.003.624,00	107,44%
Monumen	6.442.214.368,00	6.442.214.368,00	100,00%
Bangunan Menara	3.102.481.906,00	3.102.481.906,00	0,00%
Tugu Titik Kontrol/Pasti	22.160.855.733,02	21.374.441.076,09	0,00%
Akumulasi Penyusutan	(88.623.036.573,00)	(71.728.064.053,00)	123,55%
Nilai Buku	576.646.890.839,85	548.895.076.921,09	105,06%



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Adapun penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.41
Penambahan, pengurangan dan koreksi penambahan/pengurangan Gedung dan Bangunan

N o.	Nama OPD	SALDO 31 Desember 2019 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020	Akumulasi Penyusutan 2019 (Audited)	Penambahan Penyusutan 2020	Pengurangan Penyusutan 2020	Akumulasi Penyusutan Aset 2020	Nilai Buku Aset 2020
1	Sekretariat DPRD	41.147.184.530,00	100.307.000,00	-	41.247.491.530,00	4.746.203.494,00	826.845.758,00	-	5.573.049.252,00	35.674.442.278,00
2	Sekretariat Daerah	39.708.375.987,00	635.303.960,00	30.120.000,00	40.313.559.947,00	3.788.635.893,00	1.063.181.650,00	-	4.851.817.543,00	35.461.742.404,00
3	Kec. Pulau Punjung	1.146.199.720,00	-	174.200.000,00	971.999.720,00	240.170.282,00	74.697.815,00	35.130.333,00	279.737.764,00	692.261.956,00
4	Kec. Sitiung	506.918.100,00	-	-	506.918.100,00	106.568.699,00	29.585.323,00	-	136.154.022,00	370.764.078,00
5	Kec. Koto Baru	1.247.767.942,00	-	-	1.247.767.942,00	186.087.780,00	48.666.026,00	-	234.753.806,00	1.013.014.136,00
6	Kec. Sungai Rumbai	1.391.380.178,00	-	-	1.391.380.178,00	228.683.201,00	171.598.696,00	-	400.281.897,00	991.098.281,00
7	Kec. IX Koto	89.790.000,00	-	-	89.790.000,00	1.945.450,00	1.795.800,00	-	3.741.250,00	86.048.750,00
8	Kec. Timpeh	2.046.610.796,00	-	-	2.046.610.796,00	270.666.348,00	40.932.216,00	-	311.598.564,00	1.735.012.232,00
9	Kec. Padang Laweh	1.421.972.473,00	-	-	1.421.972.473,00	194.473.597,00	28.439.449,00	-	222.913.046,00	1.199.059.427,00
10	Kec. Tiung	2.417.904.859,00	-	-	2.417.904.859,00	181.611.603,00	48.695.233,00	-	230.306.836,00	2.187.598.023,00
11	Kec. Koto Besar	2.187.494.750,00	-	-	2.187.494.750,00	333.479.687,00	57.204.010,00	-	390.683.697,00	1.796.811.053,00
12	Kec. Koto Salak	1.972.819.099,00	-	-	1.972.819.099,00	214.398.828,00	39.556.633,00	-	253.955.461,00	1.718.863.638,00
13	Kec. Asam Jujuhan	2.840.508.500,00	-	-	2.840.508.500,00	374.807.758,00	57.152.351,00	-	431.960.109,00	2.408.548.391,00
14	Dinas PUPR	20.511.453.052,00	429.300.000,00	357.566.076,00	20.583.186.976,00	1.284.349.469,00	455.953.535,00	35.569.679,00	1.704.733.325,00	18.878.453.651,00
15	Dinas PERKIMTAN	349.919.250,00	-	-	349.919.250,00	12.744.503,00	6.998.385,00	-	19.742.888,00	330.176.362,00
16	Dinas Perhubungan	3.505.815.491,00	-	-	3.505.815.491,00	424.763.071,00	71.378.148,00	-	496.141.219,00	3.009.674.272,00
17	Dinas Kesehatan	61.141.431.213,10	7.351.019.187,65	611.366.520,00	67.881.083.880,75	6.245.477.441,00	2.395.802.913,00	128.454.046,00	8.512.826.308,00	59.368.257.572,75
18	RSUD	12.349.153.892,00	312.560.000,00	-	12.661.713.892,00	2.644.980.197,00	1.955.203.547,00	-	4.600.183.744,00	8.061.530.148,00
19	Dinas Pendidikan	240.246.366.922,28	22.645.271.767,00	241.767.450,00	262.649.871.239,28	31.260.175.983,00	4.946.091.414,00	-	36.206.267.397,00	226.443.603.842,28
20	Dinas BUDPARPORA	101.075.937.218,85	2.074.417.523,00	-	103.150.354.741,85	9.669.343.338,00	2.171.266.468,00	-	11.840.609.806,00	91.309.744.935,85
21	Dinas TRANSAKER	3.359.217.439,00	-	-	3.359.217.439,00	796.550.079,00	248.104.435,00	-	1.044.654.514,00	2.314.562.925,00
22	DSP3KB	2.173.571.518,00	195.298.250,00	-	2.368.869.768,00	229.037.356,00	82.571.288,00	-	311.608.644,00	2.057.261.124,00
23	DISDUKCAPIL	841.001.680,00	69.850.000,00	-	910.851.680,00	278.951.173,00	186.831.420,00	-	465.782.593,00	445.069.087,00
24	Dinas PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	16.904.363.231,30	575.062.950,00	-	17.479.426.181,30	2.169.302.099,00	630.054.364,00	977.447,00	2.798.379.016,00	14.681.047.165,30
26	Dinas Pangan dan Perikanan	8.511.062.878,00	264.996.769,00	-	8.776.059.647,00	2.011.972.942,00	193.325.109,00	-	2.205.298.051,00	6.570.761.596,00
27	Dinas KUMPERDAG	39.208.265.957,56	11.408.419.078,11	-	50.616.685.035,67	2.538.519.693,00	944.669.432,00	-	3.483.189.125,00	47.133.495.910,67
28	BKD	5.594.474.000,00	-	-	5.594.474.000,00	442.083.982,00	112.248.904,00	-	554.332.886,00	5.040.141.114,00
29	DPMPTSP	810.939.000,00	-	-	810.939.000,00	126.287.845,00	16.576.229,00	-	142.864.074,00	668.074.926,00
30	Inspektorat Kabupaten	1.535.427.000,00	-	-	1.535.427.000,00	125.393.205,00	30.708.540,00	-	156.101.745,00	1.379.325.255,00
31	BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	DLH	2.135.752.292,00	-	-	2.135.752.292,00	339.680.647,00	74.257.664,00	-	413.938.311,00	1.721.813.981,00
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	BKPSDM	937.677.005,00	-	-	937.677.005,00	155.048.635,00	58.583.570,00	-	213.632.205,00	724.044.800,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.306.385.000,00	-	-	1.306.385.000,00	105.669.775,00	26.127.700,00	-	131.797.475,00	1.174.587.525,00
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		620.623.140.974,09	46.061.806.484,76	1.415.020.046,00	665.269.927.412,85	71.728.064.053,00	17.095.104.025,00	200.131.505,00	88.623.036.573,00	576.646.890.839,85



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan perolehan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.42

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 (Audited)		620.623.140.974,09
Penambahan Gedung dan Bangunan 2020		46.061.806.484,76
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	37.111.346.965,83
2	Penambahan Belanja Modal Bos Reguler Menjadi Aset	82.444.400,00
3	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	49.868.615,00
4	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	80.576.428,00
5	Penambahan Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset	1.750.000,00
6	Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	30.120.000,00
7	Penambahan Hutang Tahun 2020 Menjadi Aset	37.840.000,00
8	Penambahan Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	642.245.870,00
9	Penambahan Mutasi Antar OPD	174.200.000,00
10	Penambahan Mutasi Honor Pokja	30.120.000,00
11	Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	159.911.400,00
12	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	7.447.992.805,93
13	Penambahan BTT Covid-19 menjadi Aset	213.390.000,00
Pengurangan Gedung dan Bangunan 2020		1.415.020.046,00
1	Pengurangan Mutasi Antar OPD	174.200.000,00
2	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	30.120.000,00
3	Pengurangan Koreksi Pencatatan	50.735.000,00
4	Penghapusan	241.767.450,00
5	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	560.631.520,00
6	Pengurangan Hibah ke Organisasi / Kelompok Masyarakat	357.566.076,00
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2020		665.269.927.412,85

Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan versi Permendagri 17 Tahun 2007 berdasarkan perolehan dan OPD sebesar Rp46.061.806.484,76 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.43

Uraian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah
Penambahan Gedung dan Bangunan 2020		46.061.806.484,76
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	37.111.346.965,83
	Bangunan Gedung	36.683.648.534,83
1	Sekretariat DPRD	99.557.000,00
2	Sekretariat Daerah	361.211.109,00
3	Dinas PUPR	209.673.000,00
4	Dinas Kesehatan	6.844.807.144,65
5	RSUD	310.810.000,00
6	Dinas Pendidikan	22.155.952.367,00
7	Dinas BUDPARPORA	2.068.297.523,00
8	DSP3KB	21.098.250,00
9	DISDUKCAPIL	69.850.000,00
10	Dinas Pertanian	337.003.500,00
11	Dinas Pangan dan Perikanan	252.582.369,00
12	Dinas KUMPERDAG	3.952.806.272,18
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	427.698.431,00
1	Sekretariat Daerah	7.851.981,00
2	Dinas PUPR	181.787.000,00
3	Dinas Pertanian	238.059.450,00
2	Penambahan Belanja Modal Bos Reguler Menjadi Aset	82.444.400,00
	Bangunan Gedung	78.844.400,00
1	Dinas Pendidikan	78.844.400,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.600.000,00
1	Dinas Pendidikan	3.600.000,00
3	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	49.868.615,00
	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	49.868.615,00
1	Dinas Kesehatan	49.868.615,00
4	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	80.576.428,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
	Bangunan Gedung	80.576.428,00
1	Sekretariat DPRD	750.000,00
2	Sekretariat Daerah	750.000,00
3	Dinas Kesehatan	79.076.428,00
5	Penambahan Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset	1.750.000,00
	Bangunan Gedung	1.750.000,00
1	Sekretariat Daerah	1.750.000,00
6	Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	30.120.000,00
	Bangunan Gedung	30.120.000,00
1	Sekretariat Daerah	30.120.000,00
7	Penambahan Hutang Tahun 2020 Menjadi Aset	37.840.000,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	37.840.000,00
1	Dinas PUPR	37.840.000,00
8	Penambahan Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	642.245.870,00
	Bangunan Gedung	399.666.120,00
	Sekretariat Daerah	160.791.120,00
	Dinas Pendidikan	238.875.000,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	242.579.750,00
	Sekretariat Daerah	74.579.750,00
	Dinas Pendidikan	168.000.000,00
9	Penambahan Mutasi Antar OPD	174.200.000,00
	Bangunan Gedung	174.200.000,00
1	DSP3KB	174.200.000,00
10	Penambahan Mutasi Honor Pokja	30.120.000,00
	Bangunan Gedung	30.120.000,00
1	Dinas Kesehatan	16.380.000,00
2	Dinas BUDPARPORA	6.120.000,00
3	Dinas KUMPERDAG	7.620.000,00
11	Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	159.911.400,00
	Bangunan Gedung	159.911.400,00
1	Dinas Pangan dan Perikanan	159.911.400,00
12	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	7.447.992.805,93
	Bangunan Gedung	7.373.296.330,00
1	Dinas KUMPERDAG	7.373.296.330,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	74.696.475,93
1	Dinas KUMPERDAG	74.696.475,93
13	Penambahan BTT Covid-19 menjadi Aset	213.390.000,00
	Bangunan Gedung	213.390.000,00
1	Dinas Kesehatan	213.390.000,00

Rincian penambahan aset tetap Bangunan Gedung yang berasal dari Hutang senilai Rp37.840.000,00 terdapat pada Dinas PUPR adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.44

Uraian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hutang

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja perencanaan CV Dimas Mitra Consultant	19,910,000
2	Belanja perencanaan Tirta Planing Engineering Consultant	17,930,000
J U M L A H		37,840,000.00

Rincian penambahan aset tetap Bangunan Gedung yang berasal dari Penilaian Kurang Catat sebesar Rp642.245.870,00 adalah sebagai berikut :

1. Bangunan rumah dinas Sekretaris Daerah berupa bangunan rumah dengan hasil penilaian Rp160.791.120,00
2. Bangunan pagar rumah dinas Sekretaris Daerah Rp74.579.750,00
3. Bangunan Rumah Dinas sebanyak 2 (dua) unit pada Sekolah Dasar Negeri 5 Sungai Rumbai senilai Rp238.875.000,00 dan pagar senilai Rp168.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Adapun Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan perolehan dan OPD sebesar Rp1.415.020.046,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.45
 Uraian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Pengurangan Gedung dan Bangunan 2020		1.415.020.046,00
1	Pengurangan Mutasi Antar OPD	174.200.000,00
	Bangunan Gedung	174.200.000,00
1	Kec. Pulau Punjung	174.200.000,00
2	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	30.120.000,00
	Bangunan Gedung	30.120.000,00
1	Sekretariat Daerah	30.120.000,00
3	Pengurangan Koreksi Pencatatan	50.735.000,00
	Bangunan Gedung	50.735.000,00
1	Dinas Kesehatan	50.735.000,00
4	Penghapusan	241.767.450,00
	Bangunan Gedung	241.767.450,00
1	Dinas Pendidikan	241.767.450,00
5	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	560.631.520,00
	Bangunan Gedung	560.631.520,00
1	Dinas Kesehatan	560.631.520,00
6	Pengurangan Hibah ke Organisasi / Kelompok Masyarakat	357.566.076,00
	Bangunan Gedung	357.566.076,00
1	Dinas PUPR	357.566.076,00

Pengurangan nilai Bangunan Gedung sebesar Rp241.767.450,00 pada Dinas Pendidikan (Sekolah Dasar Negeri 8 Sungai Rumbai) adalah karena pembongkaran 2 (dua) unit rumah dinas yang tidak layak dan telah dilakukan pembongkaran, penghapusan ini berdasarkan Keputusan pengelola Barang tentang Penghapusan Nomor 953/79/KPTS-SEKDA/2021

Pengurangan saldo Bangunan Gedung karena Koreksi Pencatatan sebesar Rp50.735.000,00 pada Dinas Kesehatan merupakan Hutang Tahun 2018 yang tidak dibayarkan sesuai dengan surat pernyataan dari Direktur Nafandha Ridhamulia Cipta, pt dan Direktur CV. Risky Karya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.46
 Uraian hutang 2018 yang tidak dibayarkan

No	Uraian	Jumlah
Nafandha Ridhamulia Cipta, pt		29.820.000,00
1	Perencanaan rehab RSUD Sungai Rumbai	9.860.000,00
2	Pengawasan rehab Puskesmas Sitiung I	1.975.000,00
3	Pengawasan rehab Puskesmas Tiumang	3.940.000,00
4	Perencanaan rehab rumah dinas Puskesmas Sungai dareh	6.010.000,00
5	Perencanaan pembangunan pustu Koto Ranah	8.035.000,00
CV. Risky Karya		20.915.000,00
1	Pengawasan rehab RSUD Sungai Rumbai	7.980.000,00
2	Perencanaan rehab Puskesmas Tiumang	6.000.000,00
3	Perencanaan rehab Puskesmas Sitiung I	2.950.000,00
4	Pengawasan rehab rumah dinas Puskesmas Sungai Dareh	3.985.000,00
J U M L A H		50,735,000.00

Pengurangan saldo Bangunan Gedung pada Dinas PUPR sebesar Rp357.566.076,00 adalah karena hibah ke kelompok masyarakat/organisasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Bangunan rumah Tahfiz senilai Rp217.926.673,00 yang diserahkan ke Yayasan Samudera Al-Fatihah melalui Berita Acara Serahterima Hibah Bangunan Gedung Rumah Tahfiz Yayasan Samudera Al-Fatihah Nomor 640/ /BAST-PGK/DPUPR/VII/2020 dan telah dilakukan penghapusan melalui Keputusan Pengelola Nomor 953/299/KPTS-SEKDA/2020



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tentang Penghapusan berupa Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

2. Bangunan RKB Islamic Center Al-Azhar senilai 139.639.403,00 yang diserahkan ke Yayasan Al Azhar melalui Berita Acara Serah terima Hibah Bangunan Gedung Lokal Islamic Center Al Azhar Nomor 640/201/BAST-PGK/DPUPR/IV/2020 dan telah dilakukan penghapusan melalui Keputusan Pengelola Nomor 953/297/KPTS-SEKDA/2020 tentang Penghapusan berupa Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Penambahan dan pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.47

Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 (Audited)		71.728.064.053,00
Penambahan Penyusutan Gedung dan Bangunan 2020		17.095.104.025,00
1	Penambahan Penyusutan Mutasi Antar OPD	35.130.333,00
2	Penambahan Penyusutan Koreksi	2.758.774.023,00
3	Penyusutan Semester I	7.746.110.559,19
4	Penyusutan Semester II	6.555.089.109,81
Pengurangan Penyusutan Gedung dan Bangunan 2020		200.131.505,00
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar OPD	35.130.333,00
2	Pengurangan Penyusutan Hibah ke Instansi Vertikal	35.569.679,00
3	Pengurangan Penyusutan Koreksi	129.431.493,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2020		88.623.036.573,00
Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2020		576.646.890.839,85

Rincian Penambahan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.095.104.025,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.48

Uraian Penambahan Penyusutan Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah
Penambahan Penyusutan Gedung dan Bangunan 2020		17.095.104.025,00
1	Penambahan Penyusutan Mutasi Antar OPD	35.130.333,00
	Bangunan Gedung	35.130.333,00
1	DSP3KB	35.130.333,00
2	Penambahan Penyusutan Koreksi	2.758.774.023,00
	Bangunan Gedung	2.758.774.023,00
1	Sekretariat Daerah	186.620.584,00
2	Kec. Pulau Punjung	54.921.529,00
3	Kec. Sitiung	19.412.586,00
4	Kec. Koto Baru	23.710.667,00
5	Kec. Sungai Rumbai	140.247.551,00
6	Kec Koto Besar	12.799.810,00
7	Dinas PUPR	29.891.514,00
8	Dinas Kesehatan	3.678.725,00
9	RSUD	1.657.985.106,00
10	Dinas TRANSNAKER	180.920.084,00
11	DISDUKCAPIL	151.383.481,00
12	Dinas Pertanian	226.269.535,00
13	DLH	31.102.822,00
14	BKPSDM	39.830.029,00
3	Penyusutan Semester I	7.746.110.559,19
	Bangunan Gedung	7.386.462.114,00
1	Sekretariat DPRD	408.718.814,00
2	Sekretariat Daerah	403.715.586,00
3	Kec. Pulau Punjung	9.888.143,00
4	Kec. Sitiung	5.086.368,00
5	Kec. Koto Baru	11.948.093,00
6	Kec. Sungai Rumbai	15.455.883,00
7	Kec. Timpeh	19.968.108,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
8	Kec. Padang Laweh	12.053.205,00
9	Kec Tiumbang	23.903.104,00
10	Kec Koto Besar	22.202.100,00
11	Kec Koto Salak	19.778.317,00
12	Kec. Asam Jujuhan	28.576.176,00
13	Dinas PUPR	158.983.777,00
14	Dinas PERKIMTAN	1.892.244,00
15	Dinas Perhubungan	35.689.074,00
16	Dinas Kesehatan	1.721.061.027,00
17	RSUD	144.061.394,00
18	Dinas Pendidikan	2.304.333.528,00
19	Dinas BUDPARPORA	1.147.377.234,00
20	Dinas TRANSNAKER	33.592.175,00
21	DSP3KB	20.588.826,00
22	DISDUKCAPIL	17.182.497,00
23	Dinas Pertanian	179.493.131,00
24	Dinas Pangan dan Perikanan	85.830.621,00
25	Dinas KUMPERDAG	438.543.050,00
26	BKD	56.124.452,00
27	DPMPSTP	8.288.114,00
28	Inspektorat Kabupaten	15.354.270,00
29	DLH	17.318.404,00
30	BKPSDM	6.390.549,00
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.063.850,00
Monumen		64.422.141,00
1	Sekretariat Daerah	398.670,00
2	Dinas PUPR	1.581.160,00
3	Dinas Kesehatan	627.210,00
4	Dinas Pendidikan	61.815.101,00
Bangunan Menara		38.781.029,00
1	Dinas PUPR	38.781.029,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti		256.445.275,19
1	Sekretariat DPRD	4.360.547,00
2	Sekretariat Daerah	32.691.496,00
3	Kec. Koto Baru	529.587,00
4	Kec. Sungai Rumbai	219.690,00
5	Kec. IX Koto	897.900,00
6	Kec. Timpeh	498.000,00
7	Kec. Padang Laweh	2.166.519,00
8	Kec Tiumbang	444.512,00
9	Dinas PUPR	14.440.638,00
10	Dinas PERKIMTAN	1.606.948,00
11	Dinas Kesehatan	13.178.192,00
12	RSUD	3.530.000,00
13	Dinas Pendidikan	111.677.758,19
14	Dinas BUDPARPORA	8.867.893,00
15	DSP3KB	3.109.582,00
16	Dinas Pertanian	21.346.841,00
17	Dinas Pangan dan Perikanan	1.753.490,00
18	Dinas KUMPERDAG	27.880.444,00
19	DLH	4.259.016,00
19	BKPSDM	2.986.222,00
4	Penyusutan Semester II	6.555.089.109,81
Bangunan Gedung		6.234.460.443,00
1	Sekretariat DPRD	409.405.849,00
2	Sekretariat Daerah	406.115.603,00
3	Kec. Pulau Punjung	9.888.143,00
4	Kec. Sitiung	5.086.369,00
5	Kec. Koto Baru	11.948.092,00
6	Kec. Sungai Rumbai	15.455.882,00
7	Kec. Timpeh	19.968.108,00
8	Kec. Padang Laweh	12.053.207,00
9	Kec Tiumbang	23.903.106,00
10	Kec Koto Besar	22.202.100,00
11	Kec Koto Salak	19.778.316,00
12	Kec. Asam Jujuhan	28.576.175,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
13	Dinas PUPR	157.106.552,00
14	Dinas PERKIMTAN	1.892.246,00
15	Dinas Perhubungan	35.689.074,00
16	Dinas Kesehatan	641.654.348,00
17	RSUD	146.097.047,00
18	Dinas Pendidikan	2.337.889.305,00
19	Dinas BUDPARPORA	1.006.153.449,00
20	Dinas TRANSNAKER	33.592.176,00
21	DSP3KB	20.632.965,00
22	DISDUKCAPIL	18.265.442,00
23	Dinas Pertanian	180.836.718,00
24	Dinas Pangan dan Perikanan	103.987.508,00
25	Dinas KUMPERDAG	449.743.023,00
26	BKD	56.124.452,00
27	DPMPSTP	8.288.115,00
28	Inspektorat Kabupaten	15.354.270,00
29	DLH	17.318.404,00
30	BKPSDM	6.390.549,00
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.063.850,00
Monumen		64.422.145,00
1	Sekretariat Daerah	398.670,00
2	Dinas PUPR	1.581.160,00
3	Dinas Kesehatan	627.210,00
4	Dinas Pendidikan	61.815.105,00
Bangunan Menara		38.781.023,00
1	Dinas PUPR	38.781.023,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti		217.425.498,81
1	Sekretariat DPRD	4.360.548,00
2	Sekretariat Daerah	33.241.041,00
3	Kec. Koto Baru	529.587,00
4	Kec. Sungai Rumbai	219.690,00
5	Kec. IX Koto	897.900,00
6	Kec. Timpeh	498.000,00
7	Kec. Padang Laweh	2.166.518,00
8	Kec. Tiumang	444.511,00
9	Dinas PUPR	14.806.682,00
10	Dinas PERKIMTAN	1.606.947,00
11	Dinas Kesehatan	14.976.201,00
12	RSUD	3.530.000,00
13	Dinas Pendidikan	68.560.616,81
14	Dinas BUDPARPORA	8.867.892,00
15	DSP3KB	3.109.582,00
16	Dinas Pertanian	22.108.139,00
17	Dinas Pangan dan Perikanan	1.753.490,00
18	Dinas KUMPERDAG	28.502.915,00
19	DLH	4.259.018,00
20	BKPSDM	2.986.221,00

Rincian Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp200.131.505,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.49

Uraian Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2020		200.131.505,00
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar OPD	35.130.333,00
	Bangunan Gedung	35.130.333,00
1	Kec. Pulau Punjung	35.130.333,00
2	Pengurangan Penyusutan Hibah ke Instansi Vertikal	35.569.679,00
	Bangunan Gedung	35.569.679,00
1	Dinas PUPR	35.569.679,00
3	Pengurangan Penyusutan Koreksi	129.431.493,00
	Bangunan Gedung	128.454.046,00
1	Dinas Kesehatan	128.454.046,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	977.447,00
1	Dinas Pertanian	977.447,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.A.1.c.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan, maka jalan, irigasi dan jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan dan merupakan objek pemeliharaan. Jalan, Irigasi dan jaringan tidak ada diatur mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi. berapapun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi dan disajikan berdasarkan nilai perolehan dan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap tersebut. Metode penyusutannya garis lurus tidak ada nilai residu dan dihitung dengan pendekatan bulanan disajikan semesteran.

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (Audited) adalah sebagai berikut :

	Saldo Aset Tetap 2020	Saldo Aset Tetap 2019 (Audited)	Tren
	Rp.	Rp.	%
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.268.023.945.040,42	1.215.452.774.013,34	104,33%
Akumulasi Penyusutan	(623.685.661.545,00)	(547.547.619.512,00)	113,91%
Nilai Buku	644.338.283.495,42	667.905.154.501,34	96,47%

Adapun penambahan dan pengurangan saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.50
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan Per OPD

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2019 (audited)	Jumlah Penambahan Aset 2020	Jumlah Pengurangan Aset 2020	Saldo Aset Tetap 2020
1	Sekretariat DPRD	5.852.155.166,00	-	-	5.852.155.166,00
2	Sekretariat Daerah	4.636.454.940,00	35.970.000,00	35.970.000,00	4.636.454.940,00
3	Kec. Pulau Punjung	7.700.000,00	-	-	7.700.000,00
4	Kec. Sitiung	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	13.483.500,00	-	-	13.483.500,00
7	Kec. IX Koto	16.778.576,00	-	-	16.778.576,00
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-
10	Kec Tiumbang	700.000,00	-	-	700.000,00
11	Kec Koto Besar	18.400.000,00	-	-	18.400.000,00
12	Kec Koto Salak	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	1.177.409.033.865,34	35.412.990.789,15	-	1.212.822.024.654,49
15	Dinas PERKIMTAN	1.900.104.335,00	2.682.659.285,00	-	4.582.763.620,00
16	Dinas Perhubungan	246.486.519,00	-	-	246.486.519,00
17	Dinas Kesehatan	2.673.965.927,00	6.113.360,00	-	2.680.079.287,00
18	RSUD	932.508.000,00	-	-	932.508.000,00
19	Dinas Pendidikan	1.728.746.458,00	7.710.030,00	-	1.736.456.488,00
20	Dinas BUDPARPORA	157.269.000,00	-	-	157.269.000,00
21	Dinas TRANSNAKER	461.741.500,00	-	-	461.741.500,00
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	34.853.500,00	-	-	34.853.500,00
24	Dinas PMD	26.390.000,00	-	-	26.390.000,00
25	Dinas Pertanian	1.345.100.007,00	-	-	1.345.100.007,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	3.346.976.344,00	222.032.631,00	-	3.569.008.975,00
27	Dinas KUMPERDAG	34.500.000,00	14.193.409.931,93	-	14.227.909.931,93
28	BKD	-	-	-	-
29	DPMPPTSP	14.330.500,00	-	-	14.330.500,00
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-
31	BAPPEDA	48.453.000,00	-	-	48.453.000,00
32	DLH	122.253.800,00	-	-	122.253.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2019 (audited)	Jumlah Penambahan Aset 2020	Jumlah Pengurangan Aset 2020	Saldo Aset Tetap 2020
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	11.717.000,00	-	-	11.717.000,00
35	BPBD	14.264.419.276,00	-	-	14.264.419.276,00
36	BKPSDM	6.995.000,00	-	-	6.995.000,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.690.000,00	-	-	19.690.000,00
38	Dinas KOMINFO	110.967.800,00	46.255.000,00	-	157.222.800,00
Jumlah		1.215.452.774.013,34	52.607.141.027,08	35.970.000,00	1.268.023.945.040,42



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.51

Penambahan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan per OPD

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2020	Akumulasi Penyusutan 2019(Audited)	Penambahan Penyusutan 2020	Pengurangan Penyusutan 2020	Akumulasi Penyusutan Aset 2020	Nilai Buku Aset Tetap 2020
1	Sekretariat DPRD	5.852.155.166,00	1.127.042.309,00	193.677.552,00	-	1.320.719.861,00	4.531.435.305,00
2	Sekretariat Daerah	4.636.454.940,00	626.818.593,00	118.118.311,00	-	744.936.904,00	3.891.518.036,00
3	Kec. Pulau Punjung	7.700.000,00	1.363.542,00	192.500,00	-	1.556.042,00	6.143.958,00
4	Kec. Sitiung	9.100.000,00	1.781.042,00	227.500,00	-	2.008.542,00	7.091.458,00
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	13.483.500,00	3.782.967,00	427.915,00	-	4.210.882,00	9.272.618,00
7	Kec. IX Koto	16.778.576,00	3.045.125,00	419.465,00	-	3.464.590,00	13.313.986,00
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-	-	-
10	Kec. Tiumang	700.000,00	158.958,00	17.500,00	-	176.458,00	523.542,00
11	Kec Koto Besar	18.400.000,00	4.638.333,00	460.000,00	-	5.098.333,00	13.301.667,00
12	Kec Koto Salak	1.500.000,00	171.875,00	37.500,00	-	209.375,00	1.290.625,00
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	1.212.822.024.654,49	542.259.168.033,00	73.451.113.900,00	-	615.710.281.933,00	597.111.742.721,49
15	Dinas PERKIMTAN	4.582.763.620,00	110.482.246,00	202.790.225,00	-	313.272.471,00	4.269.491.149,00
16	Dinas Perhubungan	246.486.519,00	88.702.059,00	18.935.541,00	-	107.637.600,00	138.848.919,00
17	Dinas Kesehatan	2.680.079.287,00	419.261.861,00	118.270.282,00	-	537.532.143,00	2.142.547.144,00
18	RSUD	932.508.000,00	110.162.800,00	38.038.186,00	4.500.000,00	143.700.986,00	788.807.014,00
19	Dinas Pendidikan	1.736.456.488,00	256.175.034,00	93.182.160,00	-	349.357.194,00	1.387.099.294,00
20	Dinas BUDPARPORA	157.269.000,00	521.303,00	5.135.634,00	-	5.656.937,00	151.612.063,00
21	Dinas TRANSAKER	461.741.500,00	127.745.143,00	21.248.830,00	-	148.993.973,00	312.747.527,00
22	DSP3KB	-	-	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	34.853.500,00	8.214.138,00	871.336,00	-	9.085.474,00	25.768.026,00
24	Dinas PMD	26.390.000,00	6.047.708,00	659.750,00	-	6.707.458,00	19.682.542,00
25	Dinas Pertanian	1.345.100.007,00	297.673.484,00	54.375.225,00	-	352.048.709,00	993.051.298,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	3.569.008.975,00	778.125.319,00	98.597.751,00	-	876.723.070,00	2.692.285.905,00
27	Dinas KUMPERDAG	14.227.909.931,93	1.245.833,00	540.607.437,00	-	541.853.270,00	13.686.056.661,93
28	BKD	-	-	-	-	-	-
29	DPMPTSP	14.330.500,00	4.286.342,00	617.900,00	-	4.904.242,00	9.426.258,00
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	48.453.000,00	6.157.569,00	1.211.325,00	-	7.368.894,00	41.084.106,00
32	DLH	122.253.800,00	15.230.281,00	3.056.345,00	-	18.286.626,00	103.967.174,00
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan	11.717.000,00	2.753.831,00	361.931,00	-	3.115.762,00	8.601.238,00

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2020	Akumulasi Penyusutan 2019(Audited)	Penambahan Penyusutan 2020	Pengurangan Penyusutan 2020	Akumulasi Penyusutan Aset 2020	Nilai Buku Aset Tetap 2020
	DAMKAR						
35	BPBD	14.264.419.276,00	1.269.522.268,00	1.171.866.708,00	-	2.441.388.976,00	11.823.030.300,00
36	BKPSDM	6.995.000,00	1.052.100,00	152.400,00	-	1.204.500,00	5.790.500,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.690.000,00	3.855.958,00	984.500,00	-	4.840.458,00	14.849.542,00
38	Dinas KOMINFO	157.222.800,00	12.433.458,00	6.886.424,00	-	19.319.882,00	137.902.918,00
Jumlah		1.268.023.945.040,42	547.547.619.512,00	76.142.542.033,00	4.500.000,00	623.685.661.545,00	644.338.283.495,42



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.52

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan berdasarkan perolehan

Saldo Aset Tetap 2019 (audited)	1.215.452.774.013,34
Penambahan Aset Tetap 2020	52.607.141.027,08
1 Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	30.008.174.146,08
2 Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	6.113.360,00
3 Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	35.970.000,00
4 Penambahan Hutang Tahun 2020 Menjadi Aset	443.490.000,00
5 Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset	893.276.626,00
6 Penambahan Hibah Provinsi Menjadi Aset	5.456.968.135,00
7 Penambahan Mutasi Honor Pokja	35.970.000,00
8 Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	15.727.178.760,00
Pengurangan Aset Tetap 2020	35.970.000,00
1 Pengurangan Mutasi Honor Pokja	35.970.000,00
Saldo Aset Tetap 2020	1.268.023.945.040,42

Uraian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp52.607.141.027,08 terdiri dari :

Tabel 5.2.53

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan per OPD

No	Uraian	Jumlah
	Penambahan Aset Tetap 2020	52.607.141.027,08
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	30.008.174.146,08
	Jalan dan Jembatan	27.935.123.183,83
1	Dinas PUPR	27.935.123.183,83
	Bangunan Air/ Irigasi	1.290.044.653,32
1	Dinas PUPR	1.062.312.022,32
2	Dinas Pendidikan	5.700.000,00
3	Dinas Pangan dan Perikanan	222.032.631,00
	Instalasi	37.331.800,00
1	Dinas PUPR	37.331.800,00
	Jaringan	745.674.508,93
1	Dinas Pendidikan	2.010.030,00
2	Dinas KUMPERDAG	697.409.478,93
3	Dinas KOMINFO	46.255.000,00
2	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	6.113.360,00
	Instalasi	6.113.360,00
1	Dinas Kesehatan	6.113.360,00
3	Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	35.970.000,00
	Jalan dan Jembatan	30.360.000,00
1	Sekretariat Daerah	30.360.000,00
	Bangunan Air/ Irigasi	5.610.000,00
1	Sekretariat Daerah	5.610.000,00
4	Penambahan Hutang Tahun 2020 Menjadi Aset	443.490.000,00
	Jalan dan Jembatan	443.490.000,00
1	Dinas PUPR	443.490.000,00
5	Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset	893.276.626,00
	Bangunan Air/ Irigasi	893.276.626,00
1	Dinas PUPR	893.276.626,00
6	Penambahan Hibah Provinsi Menjadi Aset	5.456.968.135,00
	Jalan dan Jembatan	5.056.809.285,00
1	Dinas PUPR	2.374.150.000,00
2	Dinas PERKIMTAN	2.682.659.285,00
	Bangunan Air/ Irigasi	400.158.850,00
1	Dinas PUPR	400.158.850,00
7	Penambahan Mutasi Honor Pokja	35.970.000,00
	Jalan dan Jembatan	30.360.000,00
1	Dinas PUPR	30.360.000,00
	Bangunan Air/ Irigasi	5.610.000,00
1	Dinas PUPR	5.610.000,00
8	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	15.727.178.760,00
	Jalan dan Jembatan	9.003.497.167,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas PUPR	2.231.178.307,00
2	Dinas KUMPERDAG	6.772.318.860,00
	Bangunan Air/ Irigasi	1.157.458.651,00
1	Dinas KUMPERDAG	1.157.458.651,00
	Instalasi	2.000.233.322,00
1	Dinas KUMPERDAG	2.000.233.322,00
	Jaringan	3.565.989.620,00
1	Dinas KUMPERDAG	3.565.989.620,00

Uraian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hutang pada Dinas PUPR sebesar Rp443.490.000,00 terdiri dari :

1. Pekerjaan Dinding Penahan Jalan Tanjung Simalidu (CV. Samilo Sandiko Karya) senilai Rp199.100.000,00
2. Pengawasan Pembangunan Jembatan Paket I (CV. Azahra Consultant) senilai Rp29.860.000,00
3. Pengawasan pembangunan Jalan Paket I (PT. Natural Sumatera Consultant) senilai Rp29.870.000,00
4. Pekerjaan Rehab Jalan Bukit Gading (CV. Bunga Fajar) senilai Rp184.660.000,00

Penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah pusat menjadi aset pada Dinas PUPR terjadi karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Naskah Hibah Barang Milik Negara pada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Nomor 2495/95/SBG/2020 memperoleh hibah berupa Sumur Bor Dalam senilai Rp893.276.626,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumur bor dalam senilai Rp492.923.090,00 yang terletak di Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak
2. Sumur bor dalam senilai Rp400.353.536,00 yang terletak di Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung

Penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah provinsi menjadi aset pada Dinas PUPR dan Dinas Perkintan terjadi karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Berita Acara Serah Terima Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor 030/414/BKD/V-2020 memperoleh hibah berupa Jalan, Jembatan dan Irigasi senilai Rp5.456.968.135,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas PUPR senilai Rp2.774.308.850,00 adalah berupa :
 - a. Jembatan Batang Balun (Ruas Jalan Abai Siat-Batas Solok Selatan) senilai Rp247.050.000,00
 - b. Jembatan Batang Baye (Ruas Jalan Abai Siat-Batas Solok Selatan) senilai Rp885.700.000,00
 - c. Jembatan Batang Paparan (Ruas Jalan Abai Siat-Batas Solok Selatan) senilai Rp133.100.000,00
 - d. Jembatan Batang Adnan (Ruas Jalan Abai Siat-Batas Solok Selatan) Rp53.250.000,00
 - e. Jembatan Batang Gambir (Ruas Jalan Abai Siat-Batas Solok Selatan) Rp133.100.000,00
 - f. Jembatan Sungai Batung (Ruas Jalan Abai Siat-Batas Solok Selatan) Rp783.850.000,00
 - g. Jembatan Sungai Geringging (Ruas Jalan Abai Siat-Batas Solok Selatan) Rp138.100.000,00
 - h. Irigasi Batang Rambah senilai Rp97.354.850,00
 - i. Perbaikan Daerah Irigasi (DI) Tanjung harapan II Koto senilai Rp80.267.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- j. Rehabilitasi DI Batang Mimpi senilai Rp172.797.000,00
- k. Daerah Irigasi Akasia senilai Rp49.740.000,00

- 2. Dinas Perkimtan senilai Rp2.682.659.285 adalah berupa pembangunan PLP2KBK kawasan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya

Uraian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp556.663.666,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.54
 Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan

Pengurangan Aset Tetap 2020		35.970.000,00
1	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	35.970.000,00
	Jalan dan Jembatan	30.360.000,00
1	Sekretariat Daerah	30.360.000,00
	Bangunan Air/ Irigasi	5.610.000,00
1	Sekretariat Daerah	5.610.000,00

Adapun penambahan dan pengurangan penyusutan jalan, irigasi dan jaringan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2.55
 Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan

Saldo Aset Tetap 2020		1.268.023.945.040,42
Akumulasi Penyusutan 2019 (Audited)		547.547.619.512,00
Penambahan Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan 2020		76.142.542.033,00
1	Penyusutan Semester I	32.821.705.286,00
2	Penyusutan Semester II	43.320.836.747,00
Pengurangan Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan 2020		4.500.000,00
1	Pengurangan Penyusutan Koreksi	4.500.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset 2020		623.685.661.545,00
Nilai Buku Aset Tetap 2020		644.338.283.495,42

Uraian Penambahan Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp76.142.542.033,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.56
 Uraian Penambahan Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan

No	Uraian	Jumlah
Penambahan Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan 2020		76.142.542.033,00
1	Penyusutan Semester I	32.821.705.286,00
	Jalan dan Jembatan	29.725.456.773,00
1	Dinas PUPR	28.967.798.274,00
2	Dinas PERKIMTAN	76.241.677,00
3	RSUD	9.375.300,00
4	Dinas Pendidikan	13.372.140,00
5	Dinas TRANSNAKER	10.326.915,00
6	Dinas Pertanian	14.751.500,00
7	Dinas Pangan dan Perikanan	12.106.870,00
8	Dinas KUMPERDAG	52.981.574,00
9	BPBD	568.502.523,00
	Bangunan Air/ Irigasi	2.195.791.110,00
1	Sekretariat Daerah	437.000,00
2	Dinas PUPR	2.076.807.166,00
3	Dinas PERKIMTAN	12.826.591,00
4	Dinas Perhubungan	9.113.937,00
5	Dinas Kesehatan	197.750,00
6	RSUD	8.179.793,00
7	Dinas Pendidikan	20.234.200,00
8	Dinas BUDPARPORA	2.567.817,00
9	Dinas TRANSNAKER	100.000,00
10	Dinas Pertanian	7.424.480,00
11	Dinas Pangan dan Perikanan	30.643.092,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
12	Dinas KUMPERDAG	9.645.489,00
13	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	138.014,00
14	BPBD	17.430.831,00
15	BKPSDM	44.950,00
	Instalasi	487.526.163,00
1	Sekretariat DPRD	67.390.746,00
2	Sekretariat Daerah	3.410.626,00
3	Kec. Pulau Punjung	96.250,00
4	Kec. Sungai Rumbai	201.363,00
5	Kec. IX Koto	209.733,00
6	Kec Koto Besar	230.000,00
7	Kec Koto Salak	18.750,00
8	Dinas PUPR	343.555.625,00
9	Dinas Perhubungan	353.833,00
10	Dinas Kesehatan	58.662.718,00
11	RSUD	1.464.000,00
12	Dinas Pendidikan	1.670.374,00
13	Dinas TRANSNAKER	197.500,00
14	Dinas PMD	329.875,00
15	Dinas Pertanian	1.843.707,00
16	Dinas Pangan dan Perikanan	1.263.943,00
17	Dinas KUMPERDAG	6.131.204,00
18	DPMPTSP	74.250,00
19	Dinas KOMINFO	421.666,00
	Jaringan	412.931.240,00
1	Sekretariat DPRD	29.448.034,00
2	Sekretariat Daerah	55.211.529,00
3	Kec. Sitiung	113.750,00
4	Kec. Sungai Rumbai	12.591,00
5	Kec Tiumang	8.750,00
6	Dinas PUPR	295.178.732,00
7	Dinas PERKIMTAN	1.149.098,00
8	Dinas Kesehatan	267.597,00
9	Dinas Pendidikan	11.287.822,00
10	DISDUKCAPIL	435.667,00
11	Dinas Pertanian	3.167.920,00
12	Dinas Pangan dan Perikanan	2.439.603,00
13	Dinas KUMPERDAG	8.882.081,00
14	DPMPTSP	234.700,00
15	BAPPEDA	605.662,00
16	DLH	1.528.173,00
17	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	42.950,00
18	BKPSDM	31.250,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	492.250,00
20	Dinas KOMINFO	2.393.081,00
2	Penyusutan Semester II	43.320.836.747,00
	Jalan dan Jembatan	39.980.252.744,00
1	Dinas PUPR	38.937.022.442,00
2	Dinas PERKIMTAN	98.597.171,00
3	RSUD	9.375.300,00
4	Dinas Pendidikan	13.372.140,00
5	Dinas TRANSNAKER	10.326.915,00
6	Dinas Pertanian	14.751.500,00
7	Dinas Pangan dan Perikanan	10.415.308,00
8	Dinas KUMPERDAG	317.889.445,00
9	BPBD	568.502.523,00
	Bangunan Air/ Irigasi	2.366.139.990,00
1	Sekretariat Daerah	437.000,00
2	Dinas PUPR	2.191.498.803,00
3	Dinas PERKIMTAN	12.826.591,00
4	Dinas Perhubungan	9.113.938,00
5	Dinas Kesehatan	197.750,00
6	RSUD	8.179.793,00
7	Dinas Pendidikan	20.281.700,00
8	Dinas BUDPARPORA	2.567.817,00
9	Dinas TRANSNAKER	100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
10	Dinas Pertanian	7.424.480,00
11	Dinas Pangan dan Perikanan	38.025.387,00
12	Dinas KUMPERDAG	57.872.933,00
13	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	138.017,00
14	BPBD	17.430.831,00
15	BKPSDM	44.950,00
	Instalasi	515.839.822,00
1	Sekretariat DPRD	67.390.740,00
2	Sekretariat Daerah	3.410.626,00
3	Kec. Pulau Punjung	96.250,00
4	Kec. Sungai Rumbai	201.367,00
5	Kec. IX Koto	209.732,00
6	Kec Koto Besar	230.000,00
7	Kec Koto Salak	18.750,00
8	Dinas PUPR	344.074.122,00
9	Dinas Perhubungan	353.833,00
10	Dinas Kesehatan	58.676.867,00
11	RSUD	1.464.000,00
12	Dinas Pendidikan	1.670.374,00
13	Dinas TRANSNAKER	197.500,00
14	Dinas PMD	329.875,00
15	Dinas Pertanian	1.843.706,00
16	Dinas Pangan dan Perikanan	1.263.941,00
17	Dinas KUMPERDAG	33.912.222,00
18	DPMPTSP	74.250,00
19	Dinas KOMINFO	421.667,00
	Jaringan	458.604.191,00
1	Sekretariat DPRD	29.448.032,00
2	Sekretariat Daerah	55.211.530,00
3	Kec. Sitiung	113.750,00
4	Kec. Sungai Rumbai	12.594,00
5	Kec Tiung	8.750,00
6	Dinas PUPR	295.178.736,00
7	Dinas PERKIMTAN	1.149.097,00
8	Dinas Kesehatan	267.600,00
9	Dinas Pendidikan	11.293.410,00
10	DISDUKCAPIL	435.669,00
11	Dinas Pertanian	3.167.932,00
12	Dinas Pangan dan Perikanan	2.439.607,00
13	Dinas KUMPERDAG	53.292.489,00
14	DPMPTSP	234.700,00
15	BAPPEDA	605.663,00
16	DLH	1.528.172,00
17	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	42.950,00
18	BKPSDM	31.250,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	492.250,00
20	Dinas KOMINFO	3.650.010,00

Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 4.500.000,00 terdapat pada RSUD Sungai Dareh merupakan koreksi penghitungan penyusutan Bangunan Air yang belum terkoreksi pada penerapan pertama (2019) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah sehingga dilakukan perbaikan pada Laporan barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020, bangunan air ini mengalami perubahan masa manfaat dari 10 tahun menjadi 40 tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.C.1.c.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya, adapun saldo Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

Adapun saldo Aset Tetap Lainnya kondisi 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (Audited) adalah sebagai berikut :

	Saldo Aset Tetap 2020	Saldo Aset Tetap 2019 (audited)	Tren
	Rp.	Rp.	%
Aset Tetap Lainnya	105.717.574.583,00	72.876.409.916,00	145,06%
Akumulasi Penyusutan	(101.350.000,00)	(101.350.000,00)	100,00%
Nilai Buku	105.616.224.583,00	72.775.059.916,00	145,13%

Apabila dibandingkan saldo audited 2019 dengan 31 Desember 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp32.841.164.667,00

Adapun penambahan dan pengurangan saldo Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.57
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya per OPD

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2019 (audited)	Penambahan Aset Tetap 2020	Pengurangan Aset Tetap 2020	Saldo Aset Tetap 2020
1	Sekretariat DPRD	43.091.000,00	-	-	43.091.000,00
2	Sekretariat Daerah	-	75.760.000,00	15.960.000,00	59.800.000,00
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	1.425.000,00	-	-	1.425.000,00
7	Kec. IX Koto	104.050.000,00	-	-	104.050.000,00
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-
10	Kec Tiumbang	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	134.408.000,00	-	-	134.408.000,00
15	Dinas PERKIMTAN	10.660.000,00	-	-	10.660.000,00
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
17	Dinas Kesehatan	-	5.735.000,00	-	5.735.000,00
18	RSUD	38.996.211.896,00	28.701.867.500,00	-	67.698.079.396,00
19	Dinas Pendidikan	31.552.201.607,00	4.045.383.767,00	-	35.597.585.374,00
20	Dinas BUDPARPORA	68.250.000,00	-	-	68.250.000,00
21	Dinas TRANSAKER	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	1.774.000,00	-	-	1.774.000,00
24	Dinas PMD	288.520.000,00	-	-	288.520.000,00
25	Dinas Pertanian	463.564.600,00	59.900.000,00	31.521.600,00	491.943.000,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	12.114.000,00	-	-	12.114.000,00
27	Dinas KUMPERDAG	-	-	-	-
28	BKD	-	-	-	-
29	DPMPPTSP	6.019.850,00	-	-	6.019.850,00
30	Inspektorat Kabupaten	6.131.710,00	-	-	6.131.710,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2019 (audited)	Penambahan Aset Tetap 2020	Pengurangan Aset Tetap 2020	Saldo Aset Tetap 2020
31	BAPPPEDA	1.827.500,00	-	-	1.827.500,00
32	DLH	56.123.400,00	-	-	56.123.400,00
33	Kantor KESBANGPOL	36.500,00	-	-	36.500,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-
36	BKPSDM	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	873.735.228,00	-	-	873.735.228,00
38	Dinas KOMINFO	256.265.625,00	-	-	256.265.625,00
Jumlah		72.876.409.916,00	32.888.646.267,00	47.481.600,00	105.717.574.583,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian penambahan dan pengurangan penyusutan Aset Tetap Lainnya per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.58

Akumulasi Penyusutan dan Nilai buku Aset Tetap Lainnya per OPD

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2020	Akumulasi Penyusutan 2019 (Audited)	Penambahan Penyusutan 2020	Pengurangan Penyusutan 2020	Akumulasi Penyusutan Aset 2020	Nilai Buku Aset Tetap 2020
1	Sekretariat DPRD	43.091.000,00	-	-	-	-	43.091.000,00
2	Sekretariat Daerah	59.800.000,00	-	-	-	-	59.800.000,00
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	1.425.000,00	-	-	-	-	1.425.000,00
7	Kec. IX Koto	104.050.000,00	-	-	-	-	104.050.000,00
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-	-	-
10	Kec Tiumbang	-	-	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	134.408.000,00	-	-	-	-	134.408.000,00
15	Dinas PERKIMTAN	10.660.000,00	-	-	-	-	10.660.000,00
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Kesehatan	5.735.000,00	-	-	-	-	5.735.000,00
18	RSUD	67.698.079.396,00	-	-	-	-	67.698.079.396,00
19	Dinas Pendidikan	35.597.585.374,00	-	-	-	-	35.597.585.374,00
20	Dinas BUDPARPORA	68.250.000,00	-	-	-	-	68.250.000,00
21	Dinas TRANSNAKER	-	-	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	1.774.000,00	-	-	-	-	1.774.000,00
24	Dinas PMD	288.520.000,00	-	-	-	-	288.520.000,00
25	Dinas Pertanian	432.043.000,00	101.350.000,00	-	-	101.350.000,00	390.593.000,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	12.114.000,00	-	-	-	-	12.114.000,00
27	Dinas KUMPERDAG	-	-	-	-	-	-
28	BKD	-	-	-	-	-	-
29	DPMPTSP	6.019.850,00	-	-	-	-	6.019.850,00
30	Inspektorat Kabupaten	6.131.710,00	-	-	-	-	6.131.710,00
31	BAPPEDA	1.827.500,00	-	-	-	-	1.827.500,00
32	DLH	56.123.400,00	-	-	-	-	56.123.400,00
33	Kantor KESBANGPOL	36.500,00	-	-	-	-	36.500,00

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2020	Akumulasi Penyusutan 2019 (Audited)	Penambahan Penyusutan 2020	Pengurangan Penyusutan 2020	Akumulasi Penyusutan Aset 2020	Nilai Buku Aset Tetap 2020
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-	-	-
36	BKPSDM	-	-	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	873.735.228,00	-	-	-	-	873.735.228,00
38	Dinas KOMINFO	256.265.625,00	-	-	-	-	256.265.625,00
Jumlah		105.717.574.583,00	101.350.000,00	-	-	101.350.000,00	105.616.224.583,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian penambahan dan pengurangan saldo Aset Tetap lainnya adalah sebagai berikut
 :

Tabel 5.2.59

Penambahan Pengurangan Aset Tetap Lainnya berdasarkan perolehan

Saldo Aset Tetap 2019 (audited)	72.876.409.916,00
Jumlah Penambahan Aset Tetap 2020	32.888.646.267,00
1 Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	29.045.597.449,00
2 Penambahan Belanja Modal Bos Reguler Menjadi Aset	3.295.284.497,00
3 Penambahan Belanja Modal BOS Afiriasi Menjadi Aset	186.153.200,00
4 Penambahan Belanja Modal BOS Kinerja Menjadi Aset	188.788.601,00
5 Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	4.235.000,00
6 Penambahan Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset	10.000.000,00
7 Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	15.960.000,00
8 Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset	43.560.000,00
9 Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset	83.107.520,00
10 Penambahan Mutasi Honor Pokja	15.960.000,00
Jumlah Pengurangan Aset Tetap 2020	47.481.600,00
1 Pengurangan Mutasi Honor Pokja	15.960.000,00
2 Lelang dan Penjualan	31.521.600,00
Saldo Aset Tetap 2020	105.717.574.583,00

Penambahan saldo Aset Tetap lainnya berdasarkan perolehan per OPD sebesar
 Rp32.888.646.267,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.60

Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya per OPD

Jumlah Penambahan Aset Tetap 2020	32.888.646.267,00
1 Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	29.045.597.449,00
Buku Perpustakaan	351.849.949,00
1 Dinas Pendidikan	351.849.949,00
HEWAN	59.900.000,00
1 Dinas Pertanian	59.900.000,00
Aset Tetap Renovasi/ Pemugaran	28.633.847.500,00
1 Dinas Kesehatan	1.500.000,00
2 RSUD	28.632.347.500,00
2 Penambahan Belanja Modal Bos Reguler Menjadi Aset	3.295.284.497,00
Buku Perpustakaan	3.295.284.497,00
1 Dinas Pendidikan	3.295.284.497,00
3 Penambahan Belanja Modal BOS Afiriasi Menjadi Aset	186.153.200,00
Buku Perpustakaan	186.153.200,00
1 Dinas Pendidikan	186.153.200,00
4 Penambahan Belanja Modal BOS Kinerja Menjadi Aset	188.788.601,00
Buku Perpustakaan	188.788.601,00
1 Dinas Pendidikan	188.788.601,00
5 Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	4.235.000,00
Aset Tetap Renovasi/ Pemugaran	4.235.000,00
1 Dinas Kesehatan	4.235.000,00
6 Penambahan Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset	10.000.000,00
Aset Tetap Renovasi/ Pemugaran	10.000.000,00
1 RSUD	10.000.000,00
7 Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	15.960.000,00
Aset Tetap Renovasi/ Pemugaran	15.960.000,00
1 Sekretariat Daerah	15.960.000,00
8 Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset	43.560.000,00
Buku Perpustakaan	43.560.000,00
1 RSUD	43.560.000,00
9 Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset	83.107.520,00
Buku Perpustakaan	23.307.520,00
1 Dinas Pendidikan	23.307.520,00
Aset Tetap Renovasi/ Pemugaran	59.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	1	Sekretariat Daerah	59.800.000,00
10		Penambahan Mutasi Honor Pokja	15.960.000,00
		Aset Tetap Renovasi/ Pemugaran	15.960.000,00
	1	RSUD	15.960.000,00

Melalui Berita Acara Serah Terima Bantuan Buku Siap Layan Untuk Dihilangkan ke Perpustakaan Rumah Sakit Nomor 4.1/PLK 03.07/VIII.2020 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (RSUD Sungai dareh) memperoleh hibahkoleksi buku sebanyak 1.000 eksemplar dari Perpustakaan Nasional RI senilai Rp43.560.000,00

Penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari kurang catat senilai Rp83.107.520,00 merupakan aset kurang catat berupa buku dari kegiatan BOS reguler Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Pembangunan garase mobil pada rumah pribadi yang digunakan sebagai rumah dinas mantan Wakil Bupati Dharmasraya periode 2016-2021 merupakan kegiatan belanja modal Tahun Anggaran 2017 senilai Rp59.800.000,00 pada Sekretariat Daerah

Pengurangan saldo Aset Tetap lainnya berdasarkan perolehan sebesar Rp47.481.600,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.61

Pengurangan Aset Tetap Lainnya berdasarkan perolehan

	Jumlah Pengurangan Aset Tetap 2020	47.481.600,00
1	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	15.960.000,00
2	Lelang dan Penjualan	31.521.600,00

Rincian pengurangan saldo Aset Tetap lainnya berdasarkan masing-masing OPD sebesar Rp47.481.600,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.62

Pengurangan Aset Tetap Lainnya per OPD

	Jumlah Pengurangan Aset Tetap 2020	47.481.600,00
1	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	15.960.000,00
	Aset Tetap Renovasi/ Pemugaran	15.960.000,00
	1 Sekretariat Daerah	15.960.000,00
2	Lelang dan Penjualan	31.521.600,00
	HEWAN	31.521.600,00
	1 Dinas Pertanian	31.521.600,00

Pengurangan saldo Aset Tetap lainnya pada Dinas Pertanian senilai Rp31.521.600,00 adalah karena adanya penjualan terhadap 9 ekor hewan ternak berupa kambing yang telah afkir/tidak produksi lagi nilai penjualan adalah sebesar Rp4.900.000,00 terhadap hewan ternak ini telah dilakukan penghapusan dari daftar barang Milik Daerah melalui Keputusan Pengelola Barang Nomor 953/292/KPTS-SEKDA/2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kambing pada Dinas Pertanian dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Tabel 5.2.63

Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Lainnya

	Saldo Aset Tetap 2020	105.717.574.583,00
	Akumulasi Penyusutan 2019 (Audited)	101.350.000,00
	Penambahan Penyusutan Aset Tetap Lainnya 2020	-
1	Penyusutan Semester I	-
2	Penyusutan Semester II	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Lainnya 2020	-
Akumulasi Penyusutan Aset 2020	101.350.000,00
Nilai Buku Aset Tetap 2020	105.616.224.583,00

V.A.1.c.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan / atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai, nilai Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak berpengaruh terhadap implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016, adapun nilai KDP 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (Audited) adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019 (audited)	Tren
	Rp.	Rp.	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	113.119.888.237,00	87.268.272.715,93	129,89%
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	
Nilai Buku	113.119.888.237,00	87.268.272.715,93	129,89%

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 bertambah sebesar Rp25.851.615.521,07 penambahan yang signifikan adalah karena pembangunan Masjid Agung Dharmasraya

Penambahan dan pengurangan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.64
 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap KDP

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2019 (audited)	Penambahan Aset Tetap 2020	Pengurangan Aset Tetap 2020	Saldo Aset Tetap 2020
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
2	Sekretariat Daerah	-	5.340.000,00	5.340.000,00	-
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	-	-	-	-
7	Kec. IX Koto	-	-	-	-
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-
10	Kec Tiumang	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	63.065.171.388,00	44.753.881.026,00	2.270.784.307,00	105.548.268.107,00
15	Dinas PERKIMTAN	366.648.550,00	-	-	366.648.550,00
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
17	Dinas Kesehatan	115.255.441,00	5.007.327.230,00	115.255.441,00	5.007.327.230,00
18	RSUD	559.659.728,00	-	559.659.728,00	-
19	Dinas Pendidikan	978.512.000,00	-	-	978.512.000,00
20	Dinas BUDPARPORA	-	-	-	-
21	Dinas TRANSAKER	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2019 (audited)	Penambahan Aset Tetap 2020	Pengurangan Aset Tetap 2020	Saldo Aset Tetap 2020
23	DISDUKCAPIL	-	-	-	-
24	Dinas PMD	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	-	-	-	-
26	Dinas Pangan dan Perikanan	-	-	-	-
27	Dinas KUMPERDAG	21.326.358.258,93	-	20.943.993.258,93	382.365.000,00
28	BKD	-	-	-	-
29	DPMPTSP	-	-	-	-
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	-	-	-	-
32	DLH	-	-	-	-
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-
36	BKPSDM	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	856.667.350,00	-	19.900.000,00	836.767.350,00
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-
	Jumlah	87.268.272.715,93	49.766.548.256,00	23.914.932.734,93	113.119.888.237,00

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap KDP berdasarkan perolehan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.65

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap KDP berdasarkan perolehan

Saldo Aset Tetap 2019 (audited)		87.268.272.715,93
Jumlah Penambahan Aset Tetap 2020		49.766.548.256,00
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	26.707.476.153,00
2	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	7.500.000,00
3	Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	5.340.000,00
4	Penambahan Hutang Tahun 2020 Menjadi Aset	23.040.892.103,00
5	Penambahan Mutasi Honor Pokja	5.340.000,00
Jumlah Pengurangan Aset Tetap 2020		23.914.932.734,93
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	23.653.936.293,93
2	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	5.340.000,00
3	Penghapusan	235.756.441,00
4	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	19.900.000,00
Saldo Aset Tetap 2020		113.119.888.237,00

Penambahan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp49.766.548.256,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.66

Penambahan Aset Tetap KDP per OPD

Jumlah Penambahan Aset Tetap 2020		49.766.548.256,00
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	26.707.476.153,00
1	Dinas PUPR	21.951.660.527,00
2	Dinas Kesehatan	4.755.815.626,00
2	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	7.500.000,00
1	Dinas Kesehatan	7.500.000,00
3	Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	5.340.000,00
1	Sekretariat Daerah	5.340.000,00
4	Penambahan Hutang Tahun 2020 Menjadi Aset	23.040.892.103,00
1	Dinas PUPR	22.802.220.499,00
2	Dinas Kesehatan	238.671.604,00
5	Penambahan Mutasi Honor Pokja	5.340.000,00
1	Dinas Kesehatan	5.340.000,00

Penambahan KDP yang berasal dari hutang senilai Rp23.040.892.103,00 merupakan kegiatan sebagai berikut :

1. Dinas PUPR senilai Rp22.802.220.499,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Kegiatan perencanaan Pembangunan jalan paket V(Diazka Konsultan) dengan nilai Rp99.875.00,00
 - b. Kegiatan perencanaan Pembangunan jalan paket IV (Diazka Konsultan) dengan nilai Rp99.850.00,00
 - c. Kegiatan perencanaan Landscape Masjid Agung (CV. Gatra Konsultan) dengan nilai Rp99.750.000,00
 - d. Kegiatan lanjutan pengerjaan Masjid Agung (PT. Nindya Karya) dengan nilai Rp22.522.720.499,00
2. RSUD Sungai Dareh senilai Rp238.671.604,00 merupakan kegiatan pembangunan RSUD Sungai Rumbai (CV.Tewang Jaya Kontruksi)

Pengurangan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp23.914.932.734,93 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.67

Pengurangan Aset Tetap KDP per OPD

Jumlah Pengurangan Aset Tetap 2019		23.914.932.734,93
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	23.653.936.293,93
1	1 Dinas PUPR	2.231.178.307,00
2	2 RSUD	478.764.728,00
3	3 Dinas KUMPERDAG	20.943.993.258,93
2	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	5.340.000,00
1	1 Sekretariat Daerah	5.340.000,00
3	Penghapusan	235.756.441,00
1	1 Dinas PUPR	39.606.000,00
2	2 Dinas Kesehatan	115.255.441,00
3	3 RSUD	80.895.000,00
4	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	19.900.000,00
1	1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.900.000,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan terbesar terjadi di Dinas Kumperdag merupakan kegiatan pembangunan IKM Logam yang telah selesai pengerjaannya di Tahun 2020

Pengurangan saldo KDP senilai Rp235.756.441,00 merupakan penghapusan (Keputusan Pengelola Barang Nomor 953/79/KPTS-SEKDA/2021) terhadap 3 (tiga) perencanaan pada OPD yang tidak akan dilanjutkan dengan pembangunan fisik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas PUPR senilai Rp39.606.000,00 adalah perencanaan tugu simpang silago yang mana saat ini dilokasi tersebut telah didirikan Ruang terbuka Hijau sehingga pembangunan tugu tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan fisiknya.
2. Dinas kesehatan senilai Rp115.255.441,00 adalah perencanaan pembangunan gedung Baru Puskesmas Gunung Medan yang tidak dilanjutkan karena pembangunan dilakukan ditempat yang lain dan dengan perencanaan yang baru.
3. RSUD Sungai dareh senilai Rp80.895.000,00 adalah perencanaan rehab gedung Instalasi Gawat darurat yang tidak dilanjutkan lagi karena pelayanan Instalasi gawat darurat akan dipindahkan ke Gedung Baru RSUD Sungai Dareh.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.C.1.e ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya nilai Aset Lainnya mengalami pengaruh atau perubahan terkait implementasi dari Permendagri Nomor 108 tahun 2016 khususnya pada Aset Lainnya, adapun rinciannya sebagai berikut :

	Saldo Aset Lainnya 2020	Saldo Aset Lainnya 2019 (Audited)	Tren
	Rp.	Rp.	%
Tuntutan Ganti Rugi	293.258.963,00	302.120.251,44	97,07%
Aset Tidak Berwujud	3.834.413.677,00	3.778.739.886,00	101,47%
Akumulasi Penyusutan (Amortisasi)	(1.569.821.608,17)	(1.231.263.297,99)	127,50%
Aset Lain-Lain	213.829.466.684,84	221.011.350.127,84	96,75%
Penyusutan Aset Lain-lain	(142.013.028.477,75)	(3.745.411.425,00)	3791,65 %
Kas yang Dibatasi Penggunaannya Jumlah	74.374.289.238,92	220.115.535.542,29	33,79%

V.C.1.e.1. Tuntutan Ganti Rugi

Pada Tahun 2020 saldo Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah sebesar Rp293.258.963,00. Adapun rincian Aset Lainnya berupa TGR per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019 (Audited)	Tren
	Rp	Rp	%
Tuntutan Ganti Rugi	293.258.963,00	302.120.251,44	97,07%

Selama Tahun 2020 terdapat pengurangan TGR sebesar Rp8.861.288,44 yang merupakan penyeteroran temuan yang telah diterbitkan SKTJM atas Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.68
Rincian penambahan aset tuntutan ganti rugi

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	31-Des-20	31-Des-19
1	961/17/SKTJM-2016 Tgl 08 Desember 2015	LAP-27/R/Inspektorat-2012	SYAMSUL BAHRI 19620303 198503 1 024 Dinas Pendidikan	Kekurangan fisik SMA Negeri 1 Koto Baru	0,00	8.261.288,44
2	961/002/SKTJM-2016 Tgl 18 Januari 2016	LAP-24/R/Inspektorat-2011	Ir. AMIYUSAR 19640517 199303 1 007 Dinas Peternakan	Kurang fisik pembangunan rumah kompos	5.351.234,00	5.951.234,00
3	Surat Keputusan Majelis Tuntutan Perbehendaraan BPK Nomor 14.TP.04-2016/XII/2016.SKPC tentang pencatatan kerugian negaratan ggal 23 Jan 2017	LHP BPK RI No.212/S/XVIII.P DG/11/2009	Neneng Elis Herlina, S.Si 19691026 200604 2 001 Bendahara Badan Lingkungan Hidup	Ketektoran Kaspadakas di bendaharapengeluaran SKPD Badan Lingkungan Hidup Tahun 2008 yang sampai pada LKPD Tahun 2014 beradapada akuns di Bendahara Pengelu	287.907.729,00	287.907.729,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	31-Des-20	31-Des-19
				aran.		
JUMLAH					293.258.963,00	302.120.251,44

Rincian pengurangan TGR sebesar Rp8.861.288,44 terdiri atas penyetoran pelunasan temuan atas nama Syamsul Bahri SKTJM No.961/17/SKTJM-2016 sebesar Rp8.261.288,44 tanggal 20 Maret 2020 dan angsuran setoran atas nama Ir. Armiyusar sebesar Rp600.000,00 tanggal 27 Januari 2020

V.C.1.e.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagiandiperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merupakan Aset Tidak Berwujud Lainnya berupa *software* komputer. *Software* komputer adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu dan dapat digunakan di komputer lain, adapun nilai aset tidak berwujud, terkait penerapan Permendagri Nomor 108 tahun 2016 saldo aset takberwujud tidak mengalami perubahan, adapun saldo aset takberwujud adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019 (Audited)
	Rp.	Rp.
Aset Tidak Berwujud	3.834.413.677,00	3.778.739.886,00
Akumulasi Penyusutan (Amortisasi)	(1.569.821.608,17)	(1.231.263.297,99)
Jumlah	2.264.592.068,83	2.547.476.588,01

Adapun rincian Nilai Aset Tak berwujud per OPD adalah sebagai berikut

Tabel 5.2.69
 Penambahan Pengurangan Aset Tidak berwujud Per OPD

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tidak Berwujud 2019 (audited)	Penambahan Aset Tidak Berwujud 2020	Pengurangan Aset Tidak Berwujud 2020	Saldo Aset Tidak Berwujud 2020
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
2	Sekretariat Daerah	145.750.000,00	-	-	145.750.000,00
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	-	-	-	-
7	Kec. IX Koto	-	-	-	-
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-
10	Kec Tiumang	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	-	-	-	-
15	Dinas PERKIMTAN	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	196.350.000,00	750.000,00	-	197.100.000,00
17	Dinas Kesehatan	144.650.000,00	-	-	144.650.000,00
18	RSUD	199.485.000,00	23.849.000,00	-	223.334.000,00
19	Dinas Pendidikan	925.382.392,00	-	-	925.382.392,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tidak Berwujud 2019 (audited)	Penambahan Aset Tidak Berwujud 2020	Pengurangan Aset Tidak Berwujud 2020	Saldo Aset Tidak Berwujud 2020
20	Dinas BUDPARPORA	-	37.892.941,00	-	37.892.941,00
21	Dinas TRANSNAKER	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	146.347.719,00	-	5.168.150,00	141.179.569,00
24	Dinas PMD	52.675.000,00	-	-	52.675.000,00
25	Dinas Pertanian	-	-	-	-
26	Dinas Pangan dan Perikanan	-	-	-	-
27	Dinas KUMPERDAG	-	-	-	-
28	BKD	1.338.630.400,00	-	-	1.338.630.400,00
29	DPMPTSP	-	-	-	-
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	-	-	-	-
32	DLH	1.650.000,00	-	1.650.000,00	-
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-
36	BKPSDM	142.000.000,00	-	-	142.000.000,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
38	Dinas KOMINFO	485.819.375,00	-	-	485.819.375,00
Jumlah		3.778.739.886,00	62.491.941,00	6.818.150,00	3.834.413.677,00

Pada tahun 2020 terdapat penambahan Aset Tidak berwujud sebesar Rp62.491.941,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.70

Penambahan Aset Tidak berwujud

Jumlah Penambahan Aset Tidak Berwujud 2020		62.491.941,00
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	38.642.941,00
2	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	23.849.000,00

Adapun rincian penambahan Aset Tidak berwujud berdasarkan perolehan dan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.71

Rincian Penambahan Aset Tidak Berwujud per OPD

Jumlah Penambahan Aset Tidak Berwujud 2020		62.491.941,00
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	38.642.941,00
1	Dinas Perhubungan	750.000,00
2	Dinas BUDPARPORA	37.892.941,00
2	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	23.849.000,00
1	RSUD	23.849.000,00

Pengurangan saldo aset tidak berwujud senilai Rp6.818.150,00 adalah karena penghapusan (Keputusan Pengelola Nomor 953/103/KPTS-SEKDA/2021) aset tidak berwujud berupa anti virus yang tidak dapat digunakan dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp1.650.000,00
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp5.168.150,00

Saldo Penyusutan Aset Tidak Berwujud (amortisasi) adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.2.72
REKAP AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
 Sampai 31 Desember 2020

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tidak Berwujud 2020	Akumulasi Penyusutan 2019 (Audited)	Penambahan Penyusutan 2020	Pengurangan Penyusutan 2020	Akumulasi Penyusutan (Amortisasi) 2020	Nilai Buku Aset Tidak Berwujud 2020
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat Daerah	145.750.000,00	15.789.582,67	14.575.000,66	-	30.364.583,33	115.385.416,67
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	-	-	-	-	-	-
7	Kec. IX Koto	-	-	-	-	-	-
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-	-	-
10	Kec. Tiumang	-	-	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	-	-	-	-	-	-
15	Dinas PERKIMTAN	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	197.100.000,00	47.031.250,00	19.641.250,00	-	66.672.500,00	130.427.500,00
17	Dinas Kesehatan	144.650.000,00	100.049.583,33	14.465.000,00	-	114.514.583,33	30.135.416,67
18	RSUD	223.334.000,00	63.170.250,00	22.134.658,00	-	85.304.908,00	138.029.092,00
19	Dinas Pendidikan	925.382.392,00	311.439.934,13	92.043.239,20	-	403.483.173,33	521.899.218,67
20	Dinas BUDPARPORA	37.892.941,00	-	-	-	-	37.892.941,00
21	Dinas TRANSNAKER	-	-	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	146.347.719,00	11.062.395,28	14.117.956,90	1.851.920,00	23.328.432,18	117.851.136,82
24	Dinas PMD	52.675.000,00	14.485.625,00	5.267.500,00	-	19.753.125,00	32.921.875,00
25	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pangan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-
27	Dinas KUMPERDAG	-	-	-	-	-	-
28	BKD	1.338.630.400,00	585.461.105,00	126.734.136,00	-	712.195.241,00	626.435.159,00
29	DPMPSTP	-	-	-	-	-	-
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	-	-	-	-	-	-
32	DLH	1.650.000,00	742.500,00	-	742.500,00	-	-
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-	-	-
35	BKPD	-	-	-	-	-	-
36	BKPSDM	142.000.000,00	32.225.000,00	14.200.000,00	-	46.425.000,00	95.575.000,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-
38	Dinas KOMINFO	485.819.375,00	49.806.072,58	17.973.989,42	-	67.780.062,00	418.039.313,00
Jumlah		3.841.231.827,00	1.231.263.297,99	341.152.730,18	2.594.420,00	1.569.821.608,17	2.264.592.068,83

V.C.1.e.3.Aset Lain-lain

Asetlain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/ atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif.Saldo aset lain-lain 31 desember 2020 dan 31 Desember 2019 (Audited) adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019 (Audited)
	Rp.	Rp.
Aset Lain-Lain	213.829.466.684,84	221.011.350.127,84
Penyusutan Aset Lain-lain	(142.013.028.477,75)	(3.745.411.425,00)
Nilai Buku	71.816.438.207,09	217.265.938.702,84



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penambahan dan pengurangan Aset lain-lain 31 Desember 2020 masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.73

Penambahan Pengurangan Aset Lain-lain Per OPD

No.	Nama OPD	Saldo Aset Lain-lain 2019 (audited)	Penambahan Aset Lain-lain 2020	Pengurangan Aset Lain-lain 2020	Saldo Aset Lain-lain 2020
1	Sekretariat DPRD	258.620.600,00	27.197.000,00	-	285.817.600,00
2	Sekretariat Daerah	7.815.662.289,00	-	202.940.760,00	7.612.721.529,00
3	Kec. Pulau Punjung	421.429.000,00	-	-	421.429.000,00
4	Kec. Sitiung	239.900.000,00	-	-	239.900.000,00
5	Kec. Koto Baru	402.111.800,00	-	-	402.111.800,00
6	Kec. Sngai Rumbai	485.398.000,00	-	-	485.398.000,00
7	Kec. IX Koto	309.220.000,00	-	-	309.220.000,00
8	Kec. Timpeh	367.441.950,00	-	-	367.441.950,00
9	Kec. Padang Laweh	270.493.000,00	-	-	270.493.000,00
10	Kec Tiumang	332.166.000,00	-	1.000.000,00	331.166.000,00
11	Kec Koto Besar	517.713.334,00	2.450.000,00	-	520.163.334,00
12	Kec Koto Salak	790.437.000,00	-	-	790.437.000,00
13	Kec. Asam Jujuhan	311.345.000,00	-	-	311.345.000,00
14	Dinas PUPR	124.819.762.022,00	-	-	124.819.762.022,00
15	Dinas PERKIMTAN	12.361.332.550,00	-	6.825.047.189,00	5.536.285.361,00
16	Dinas Perhubungan	1.688.606.530,00	-	321.000.000,00	1.367.606.530,00
17	Dinas Kesehatan	9.571.231.489,00	560.631.520,00	147.497.000,00	9.984.366.009,00
18	RSUD	9.230.974.996,00	-	-	9.230.974.996,00
19	Dinas Pendidikan	17.847.094.514,84	29.336.252,00	330.000,00	17.876.100.766,84
20	Dinas BUDPARPORA	55.844.311,00	-	-	55.844.311,00
21	Dinas TRANSSNAKER	272.319.858,00	-	10.000.000,00	262.319.858,00
22	DSP3KB	1.587.630.663,00	-	-	1.587.630.663,00
23	DISDUKCAPIL	330.748.300,00	-	-	330.748.300,00
24	Dinas PMD	512.614.593,00	126.000.000,00	-	638.614.593,00
25	Dinas Pertanian	24.465.658.530,00	74.000.000,00	1.435.493.266,00	23.104.165.264,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	969.366.800,00	-	2.464.000,00	966.902.800,00
27	Dinas KUMPERDAG	92.703.833,00	-	-	92.703.833,00
28	BKD	1.311.384.972,00	-	18.675.000,00	1.292.709.972,00
29	DPMPSTP	128.073.400,00	-	-	128.073.400,00
30	Inspektorat Kabupaten	34.570.490,00	41.000.000,00	-	75.570.490,00
31	BAPPPEDA	435.769.795,00	-	-	435.769.795,00
32	DLH	1.303.696.780,00	259.200.000,00	-	1.562.896.780,00
33	Kantor KESBANGPOL	160.291.700,00	-	9.200.000,00	151.091.700,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	284.242.598,00	-	-	284.242.598,00
35	BPBD	684.060.000,00	643.252.000,00	-	1.327.312.000,00
36	BKPSDM	152.584.400,00	25.745.000,00	-	178.329.400,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	112.489.080,00	2.952.000,00	-	115.441.080,00
38	Dinas KOMINFO	76.359.950,00	-	-	76.359.950,00
Jumlah		221.011.350.127,84	1.791.763.772,00	8.973.647.215,00	213.829.466.684,84

Rincian penambahan dan pengurangan Aset lain-lain berdasarkan perolehan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.74

Penambahan Pengurangan Aset Lain-lain Berdasarkan Perolehan

Jumlah Penambahan Aset Lain-lain 2020		1.791.763.772,00
1	Penambahan Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	200.000.000,00
2	Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	1.591.763.772,00
Jumlah Pengurangan Aset Lain-lain 2020		8.973.647.215,00
1	Pengurangan Koreksi Pencatatan	10.000.000,00
2	Penghapusan	238.599.760,00
3	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	468.827.000,00
4	Pengurangan Hibah ke Organisasi / Kelompok Masyarakat	8.256.220.455,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Penambahan Aset lain-lain sebesar Rp1.791.763.772,00 berdasarkan perolehan per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.75

Rincian Penambahan Aset lain-lain per OPD

Jumlah Penambahan Aset Lain-lain 2020		1.791.763.772,00
1	Penambahan Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	200.000.000,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	200.000.000,00
1	Dinas PMD	126.000.000,00
2	Dinas Pertanian	74.000.000,00
	Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	1.591.763.772,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.591.763.772,00
1	Sekretariat DPRD	27.197.000,00
2	Kec Koto Besar	2.450.000,00
3	Dinas Kesehatan	560.631.520,00
4	Dinas Pendidikan	29.336.252,00
5	Inspektorat Kabupaten	41.000.000,00
6	DLH	259.200.000,00
7	BPBD	643.252.000,00
8	BKPSDM	25.745.000,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.952.000,00

Penambahan Aset Lain-Lain sebagai akibat pelaksanaan penilaian sebesar Rp200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.76

Rincian Penambahan Aset lain-lain dari Penilaian Kurang Catat

No	Uraian	Hasil Penilaian
	Dinas PMD	126.000.000,00
1	Mitsubishi Kuda (2008)	126.000.000,00
	Dinas Pertanian	74.000.000,00
1	Sepeda Motor Win (1997)	8.000.000,00
2	Sepeda Motor Win (1997)	8.000.000,00
3	Sepeda Motor Win (1997)	8.000.000,00
4	Sepeda Motor Win (1997)	8.000.000,00
5	Sepeda Motor Win (1997)	8.000.000,00
6	Sepeda Motor Win (1999)	8.500.000,00
7	Sepeda Motor Honda McB (1996)	7.500.000,00
8	Sepeda Motor Astrea Grand (1999)	8.000.000,00
9	Sepeda Motor Astrea Grand (2004)	10.000.000,00
	Total Hasil Penilaian	200.000.000,00

Rincian Pengurangan Aset lain-lain sebesar Rp8.973.647.215,00 berdasarkan perolehan per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.77

Rincian Pengurangan Aset lain-lain per OPD

Jumlah Pengurangan Aset Lain-lain 2020		8.973.647.215,00
1	Pengurangan Koreksi Pencatatan	10.000.000,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	10.000.000,00
1	Dinas TRANSNAKER	10.000.000,00
2	Penghapusan	238.599.760,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	238.599.760,00
1	Sekretariat Daerah	202.940.760,00
2	Kec Tiung	1.000.000,00
3	Dinas Pertanian	4.320.000,00
4	Dinas Pangan dan Perikanan	2.464.000,00
5	BKD	18.675.000,00
6	Kantor KESBANGPOL	9.200.000,00
3	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	468.827.000,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	468.827.000,00
1	Dinas Perhubungan	321.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	147.497.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	3	Dinas Pendidikan	330.000,00
4		Pengurangan Hibah ke Organisasi / Kelompok Masyarakat	8.256.220.455,00
		Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.431.173.266,00
	1	Dinas Pertanian	1.431.173.266,00
		Aset yang dipinjamkaikan	6.825.047.189,00
	1	Dinas PERKIMTAN	6.825.047.189,00

Rincian Pengurangan Aset lain-lain sebesar Rp238.599.760,00 merupakan penghapusan barang habis pakai yang tercatat di aset lain-lain dengan Keputusan Pengelola Barang tentang penghapusan Nomor 953/97/KPTS-SEKDA/2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kantor Kesbangpol senilai Rp9.200.00,00
2. Badan Keuangan Daerah senilai Rp18.675.000,00
3. Dinas Pertanian senilai Rp4.320.000,00
4. Sekretariat Daerah senilai Rp202.940.760,00
5. Kecamatan Tiumang senilai Rp1.000.000,00
6. Dinas Pangan dan Perikanan senilai Rp2.464.000,00

Rincian Pengurangan Aset lain-lain sebesar Rp8.256.220.455,00 merupakan pelaksanaan hibah kepada Organisasi/Kelompok masyarakat berupa jalan usaha tani dan jalan desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.78

Daftar Hibah Aset Lain-Lain ke organisasi/kelompok masyarakat

No	Nama OPD	Nilai Aset	Penerima Hibah	No. SK Penghapusan	Ket
1	Dinas Perkimtan	6,825,047,189.00	Pemerintah Nagari	953/254/KPTS-SEKDA/2020	
2	Dinas Pertanian	1,431,173,266.00	Kelompok Masyarakat Tani	953/301/KPTS-SEKDA/2020	
Jumlah		8,256,220,455.00			

Adapun nilai penyusutan Aset Lain-lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.79

Nilai Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain 2020		213.829.466.684,84
Akumulasi Penyusutan 2019 (Audited)		3.745.411.425,00
Penambahan Penyusutan Aset Lain-lain 2020		140.883.054.061,75
1	Penamban Penyusutan Reklas	1.297.023.450,00
2	Penambahan Penyusutan Koreksi	125.442.443.532,03
3	Penyusutan Semester I	6.295.395.365,93
4	Penyusutan Semester II	7.848.191.713,79
Pengurangan Penyusutan Aset Lain-lain 2020		2.615.437.009,00
1	Pengurangan Penyusutan Koreksi	2.615.437.009,00
Akumulasi Penyusutan Aset 2020		142.013.028.477,75
Nilai Buku Aset Lain-lain 2020		71.816.438.207,09



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.C.2 KEWAJIBAN

Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp35.955.981.923,07 atau naik sebesar Rp7.326.798.337,80 atau 25,59% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp28.629.183.585,27. Jumlah tersebut terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.2.a Kewajiban Jangka Pendek	35.955.981.923,07	28.629.183.585,27

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga) utang bunga maupun utang perhitungan pihak ketiga (PFK).

Utang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.2.a.1 Utang kepada Pihak Ketiga (PFK)	4.900.000,00	601.085,00

Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2020 sebesar Rp4.900.000,00 merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yaitu :

1. PPN sebesar Rp3.809.100,00 pada RSUD Sungai Rumbai berupa belanja modal pengadaan alat kesehatan sebesar Rp102.400,00 telah disetor ke kas negara tanggal 7 Maret 2021 dan SDN 09 Koto Besar berupa pembelian perlengkapan sekolah sebesar Rp3.706.700 disetor ke kas negara tanggal 14 April 2021.
2. PPh Pasal 21 sebesar Rp612.500,00 pada Puskesmas Sungai Limau berupa honor pengelola keuangan sebesar Rp42.500,00 disetor ke kas negara tanggal 22 Maret 2021, SDN 09 Koto Besar sebesar Rp570.000,00 berupa honor insentif BOS disetor ke kas negara tanggal 14 April 2021.
3. PPh Pasal 22 sebesar Rp470.400,00 pada SDN 09 Koto Besar disetor ke kas negara tanggal 14 April 2021
4. PPh Pasal 23 sebesar Rp8.000,00 pada SDN 09 Koto Besar disetor ke kas negara tanggal 14 April 2021

Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019 sebesar Rp601.085,00 merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Puskesmas Timpeh berupa Utang PPh 21 atas Jasa Pelayanan yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 28 Februari 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.2.a.2 Pendapatan Diterima Dimuka	2.661.665.181,07	59.368.059,68

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020 sebesar Rp357.193.924,07 tersebut terdiri atas pendapatan diterima dimuka atas kerja sama pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp47.130.514,07 berupa pemakaian sewa gedung ATM pada beberapa SKPD, sewa untuk bangunan menara telekomunikasi dan lebih salur klaim BPJS BLUD Dinas Kesehatan serta Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat yang ditetapkan berdasarkan PMK 25/PMK.07/2021 sebesar Rp2.614.534.667,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. tahun 2020
1	Dinas Kesehatan				
	ATM Bank Nagari Cabang Koto Baru	PKS/006/KB06-2016	20/06/2016 s.d. 31/12/2020		11.409.268,97
		20 Juni 2016 sd 20 Juni 2021	01/01/2021 s.d. 12/10/2021	1.178.131,03	
		5 Tahun			
		Rp12.587.400,00			
		1827 hari			
I	Jumlah			1.178.131,03	11.409.268,97
2	BLUD Puskesmas				
	Pendapatan diterima dimuka dana Kapitasi			822.300,00	
	Lebih salur Klaim BPJS 2018-2019			8.995.000,00	
II	Jumlah			9.817.300,00	0,00
3	RSUD Sungai Dareh				
a.	Payment Point dan ATM Bank Nagari	445/789/RSUD-2016	01/02/2017 s.d. 31/12/2020		27.661.243,75
		1 Feb 2017 s.d 1 Feb 2022	01/01/2021 s.d. 31/12/2021	7.060.387,39	
		5 Tahun	01/01/2022 s.d. 01/02/2022	618.992,86	
		Rp35.340.624,00			
		1827 hari			
b.	ATM BRI	05 Mei 2020 s.d. 04 Mei 2021	05/05/2020 s.d. 31/12/2020		2.443.013,70
		1 Tahun	01/01/2021 s.d. 04/05/2021	1.256.986,30	
		Rp3.700.000,00			
		365 hari			
III	Jumlah			8.936.366,55	30.104.257,45
4	Badan Keuangan Daerah				
a.	Menara Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi	Nomor:415.4/14/BUP-2018 Nomor: 0001/DMT/RC-3/M-R010/VIII/2018	17/06/2018 s.d. 31/12/2020		16.026.013,13
		17 Juni 2018 s.d 16 Juni 2023	01/01/2021 s.d. 31/12/2021	6.296.549,84	
		5 Tahun	01/01/2022 s.d. 01/02/2022	6.296.549,84	
		Rp31.500.000,00	01/01/2023 s.d. 16/06/2023	2.880.887,19	
b.	ATM Bank Nagari	030/654/BKD-XII/2017	01/12/2017 s.d. 31/12/2020		18.886.199,34
		20 Juni 2016 s.d 30 Nov 2022	01/01/2021 s.d. 31/12/2021	6.116.648,41	
		5 tahun	01/01/2022 s.d. 01/02/2022	5.597.152,25	
		Rp30.600.000,00			
		1826 hari			



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. tahun 2020
IV	Jumlah			27.187.787,53	34.912.212,47
	Sekretariat Daerah				
	ATM Bank BRI	Nomor: B.191- KCIII/LOG/01/2020	02/01/2020 s.d. 01/01/2021	10.928,96	3.989.071,04
		2 Januari 2020 s.d 1 Januari 2021			
		1 Tahun			
		Rp4.000.000,00			
		365 Hari			
	Total (I + II + III + IV)			47.130.514,07	80.414.809,93

Realisasi Pendapatan Kapitasi Puskesmas pada Tahun 2020 terdapat pembayaran kapitasi lebih salur oleh BPJS pada Bulan Desember 2020 sebesar Rp9.817.300,00. Pembayaran lebih salur kapitasi Tahun 2020 akan dilakukan pemotongan pada penerimaan kapitasi pada tahun 2021. Rincian lebih salur pendapatan kapitasi puskesmas dapat uraikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.2

Pendapatan Diterima Dimuka BLUD Puskesmas Tahun 2020

No	Puskesmas	Klaim BPJS 2018 dan 2019	Lebih Salur Kapitasi 2020	Pendapatan Diterima Dimuka 2020
1	Sungai Rumbai		45.600,00	45.600,00
2	Sungai Limau		6.000,00	6.000,00
3	Sitiung II		118.800,00	118.800,00
4	Padang Laweh		6.000,00	6.000,00
5	Sungai Dareh		129.600,00	129.600,00
6	Silago		56.100,00	56.100,00
7	Gunung Medan		74.100,00	74.100,00
8	Sitiung I		64.800,00	64.800,00
9	Koto Baru		135.000,00	135.000,00
10	Timpeh	8.995.000,00	40.500,00	9.035.500,00
11	Sialang		75.600,00	75.600,00
12	Koto Besar		70.200,00	70.200,00
JUMLAH		8.995.000,00	822.300,00	9.817.300,00

Nilai klaim BPJS tahun 2018 dan 2019 pada Puskesmas Timpeh sebesar Rp8.995.000,00 adalah Hasil temuan audit Tim BPJS tanggal 9 November 2020, adanya kesalahan prosedur pengajuan klaim pada 21 kasus pada tahun 2018 dan 2019, dimana bidan yang menolong persalinan bukan bidan wilayah kerja puskesmas timpeh, tetapi bidan berada di wilayah kerja puskesmas beringin sakti (pemekaran dari puskesmas timpeh) sehingga penerimaan klaim sebesar Rp13.075.000,00 yang telah disetor ke Puskesmas Timpeh oleh BPJS, dibatalkan dan dilakukan pemotongan selama tahun 2020 sebesar Rp4.080.000,00 sehingga nilai pendapatan diterima dimuka atas klaim per 31 Desember 2020 menjadi Rp8.995.000,00.

Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.07/2020. Bahwa dalam perkembangannya terdapat perubahan data realisasi DBH PBB sektor minyak



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bumi dan gas bumi tahun anggaran 2019, ditetapkan PMK 25/PMK.07/2021 tentang penetapan kurang bayar, lebih bayar dan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021 yang mencabut 113/PMK.07/2020, sehingga alokasi lebih bayar DBH Pusat tahun 2020 yang disesuaikan dengan aturan terbaru menjadi sebesar Rp2.614.534.667,00. Adapun rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.3

Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2020

No	Uraian	DBH Lebih Bayar		Alokasi di PMK 25/2021
		PMK 113/2020	PMK 25/2021	
1.	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan			
	PPh Pasal 21 Tahun 2018	4.435.069	4.435.069	
2.	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan			
	PBB Pertambangan Non Minyak Bumi dan Gas Bumi TA. 2019	2.565.137	2.565.137	
	PBB Biaya Pemungutan Pertambangan Non Minyak Bumi dan Gas Bumi TA. 2019	71.098	71.098	
	PBB Bagian Daerah Sektor Perkebunan Tahun 2018	2.459.330.237	2.304.471.257	2.304.471.257
	PBB Bagian Daerah Sektor Pertambangan Non Minyak Bumi dan Gas Bumi TA. 2018	135.644.872	-	
	PBB Biaya Pemungutan Perkebunan TA. 2018	102.472.094	102.472.094	
	PBB Biaya Pemungutan Pertambangan Non Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2018	3.767.913	3.767.913	
3.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara			
	Mineral dan Batubara Royalti Tahun 2019	98.184.464	98.184.464	
	Mineral dan Batubara Landrent Tahun 2018	7.285.855	7.285.855	
	Panas Bumi Iuran Tetap Tahun 2018	722.577	722.577	
	PSDH Kehutanan Tahun 2019	90.559.203	90.559.203	
	Jumlah	2.905.038.519	2.614.534.667	

Tahun 2020 (Rp)

Tahun 2019 (Rp)

V.C.2.a.3 Utang Belanja

33.289.416.742,00

25.959.697.767,73

Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar 33.289.416.742,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.3.4

Utang Belanja Tahun 2020

No	Utang Belanja	Uraian	Saldo Utang
a.	Belanja Pegawai		
1	BKD	Utang Insentif Pemungutan Pajak daerah	99.907.066,00
I	Jumlah		99.907.066,00
b.	Belanja Barang Jasa		-
1	Dinas Kesehatan	Pengadaan kebutuhan Logistik Covid	492.810.612,00
2	BLUD Puskesmas	Utang Jasa Layanan 2020	414.022.410,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Utang Belanja	Uraian	Saldo Utang
3	BLUD RSUD Sungai Dareh	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.103.407.950,00
		Belanja Bahan Pakai Habis/ Kedokteran	2.283.273.441,00
		Belanja Bahan Obat	2.262.889.475,00
		Belanja Bahan Laboratorium	822.481.283,00
		Belanja Gas Medis	42.933.000,00
4	Dinas PUPR	Utang Belanja Barang dan jasa	645.554.949,00
5	Dinas Perhubungan	Utang Penambahan Daya Listrik kantor	149.500.000,00
6	Dinas Pertanian	Utang Belanja Barang dan Jasa	128.206.000,00
7	Sekretariat Daerah	Utang Kerja sama dengan Media Online	200.000.000,00
II	Jumlah		8.545.079.120,00
c.	Belanja Modal		
1	Dinas Pendidikan	Utang Belanja Modal	119.341.200,00
2	RSUD Sungai Dareh	Utang Belanja Modal	122.700.000,00
3	Dinas PUPR	Utang Belanja Modal	23.485.174.499,00
4	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Modal	238.671.604,00
III	Jumlah		23.965.887.303,00
d.	Belanja Bantuan Keuangan		
	PPKD	Utang DBH PDRD Nagari Triwulan IV	678.543.253,00
IV	Jumlah		678.543.253,00
JUMLAH (I + II + III + IV)			33.289.416.742,00

	Tahun 2020	Tahun 2019
a. Utang Belanja Pegawai	99.907.066,00,00	14.578.191.518,15

Utang Belanja Pegawai 2020

Utang Belanja Pegawai 2020 sebesar Rp99.907.066,00,00 merupakan utang Insentif Pemungutan PBB pada Badan Keuangan Daerah Sesuai Dengan SK Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 862.1/26/KPTS-BKD/2021 tentang Penetapan Kekurangan Insentif Kepada Pemungut / Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Tahun 2020.

Uraian Utang Belanja Pegawai pada BKD dapat dijelaskan pada **Lampiran 35**

Utang Belanja Pegawai 2019

Utang Belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan Tahun 2019 berupa Sertifikasi Guru Triwulan IV yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp14.263.247.400,00. Utang ini telah dibayar pada tanggal 3 Januari 2020 dengan SP2D Nomor 00058/SP2D/LS/1.01.01/2020 sebesar Rp14.263.247.400,00.

Utang Belanja Pegawai pada BKD sebesar Rp314.944.198,15 sebagai berikut.

1. Utang Insentif Pajak Daerah TW IV sebesar Rp113.538.618 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 862.1/122/KPTS-BKD/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Kekurangan Insentif Triwulan IV kepada Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemungut/Pengelola Pajak Daerah di Kabupaten Dharmasraya TA 2019. Utang ini telah dibayarkan pada tanggal 10 November 2020 dengan SP2D Nomor 03662/SP2D-4.04.01/2020 sebesar Rp.95.338.618,00 Sehingga terdapat koreksi utang Insentif pajak Daerah TW IV tahun 2019 sebesar Rp.18.200.000,00 yang disebabkan oleh insentif PBB Sektor perkotaan seharusnya diberikan untuk insentif nagari bukan untuk perangkat daerah pemungut/ pengelola pajak daerah.

2. Utang Insentif Retribusi Daerah TW IV sebesar Rp114.153.305,00 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 862.1/123/KPTS-BKD/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Kekurangan Insentif Triwulan IV kepada Perangkat Daerah Pemungut/Pengelola Retribusi Daerah di Kabupaten Dharmasraya TA 2019. Utang ini telah dibayarkan pada tanggal 10 November 2020 dengan SP2D Nomor 03662/SP2D-4.04.01/2020 sebesar Rp.112.559.709, terdapat koreksi pengurangan Piutang Insentif pajak Daerah TW IV tahun 2019 sebesar Rp1.593.596,00 yang disebabkan karena kesalahan perhitungan.
3. Utang Insentif PBB Tahun 2019 sebesar Rp87.252.275,15 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 862.1/297/KPTS-BKD/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Kekurangan Insentif Kepada Pemungut/ Pengelola Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Tahun Anggaran 2019 Di Kabupaten Dharmasraya, utang ini telah dibayarkan pada tanggal 17 November 2020 dengan SP2D Nomor 03805/SP2D-4.04.01/2020.

	Tahun 2020	Tahun 2019
b. Utang Belanja Barang dan Jasa	8.545.079.120,00	8.373.196.877,58

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 terdiri dari.

1. Utang belanja pada BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp414.022.410,00 merupakan Utang BLUD UPT Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai atas utang klaim BPJS dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.5
Utang Belanja UPT Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai Tahun 2020

No	Puskesmas	Klaim BPJS
1	Sungai Rumbai	43.015.260,00
2	Sungai Limau	13.192.800,00
3	Padang Laweh	10.138.800,00
4	Sungai Dareh	3.247.800,00
5	Silago	68.644.440,00
6	Gunung Medan	2.332.200,00
7	Sitiung I	27.825.360,00
8	Koto Baru	63.714.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Puskesmas	Klaim BPJS
9	Timpeh	31.799.160,00
10	Koto Besar	40.371.340,00
11	Beringin Sakti	462.000,00
12	RSUD Sungai Rumbai	109.279.250,00
JUMLAH		414.022.410,00

- Utang Belanja pada BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp6.514.985.149,00. Lampiran Utang Belanja BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2020 dapat dilihat di **Lampiran 36** pada Laporan Keuangan ini.
- Utang belanja pada SKPD sebesar Rp 1.616.071.561,00 dapat dilihat di **Lampiran 37** pada Laporan Keuangan ini.

Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2019

- Utang Belanja Tahun 2019 pada BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp5.854.941.234,00 terdiri atas utang jasa layanan sebesar Rp1.065.664.272,00 dan utang bahan habis pakai sebesar Rp4.789.276.962,00 yang terdiri dari utang bahan habis pakai/kedokteran sebesar Rp1.586.143.441, utang bahan obat Rp2.316.720.711, utang bahan laboratorium sebesar Rp843.820.810,00, dan utang gas medis sebesar Rp42.592.000,00 telah dibayarkan ditahun 2020
- Utang belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp454.090.210,00 telah dibayar ditahun 2020 Sebesar Rp452.733.010,00 dan dikoreksi karena dobel transfer oleh BPJS sebesar Rp1.357.200,00 yaitu pada Puskesmas Sungai Rumbai sebesar Rp.103.200,00 dan Puskesmas Timpeh sebesar Rp1.254.000,00.
- Utang belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas pihak ketiga sebesar Rp2.064.165.433,58 merupakan utang belanja barang yang akan diserahkan pada masyarakat sebesar Rp1.432.664.000,00 dan utang barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp631.501.433,58 telah dibayarkan ditahun 2020

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
c. Utang Belanja Modal	23.965.887.303,00	2.941.766.718,00

Utang Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp23.965.887.303,00 terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp119.341.200,00, RSUD Sungai Dareh sebesar Rp122.700.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp238.671.604,00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp23.485.174.499,00 merupakan utang KDP Masjid Agung sebesar Rp22.522.720.499,00 dan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

utang belanja modal lainnya sebesar Rp962.454.000,00 yang uraiannya dapat dilihat pada **Lampiran 38** di Laporan Keuangan ini.

Utang Belanja Modal 2019 yang telah dibayarkan ditahun 2020 sebesar Rp2.941.766.718,00 merupakan utang belanja modal yang terdiri dari :

- 1) Utang Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp597.928.000,00 telah dibayarkan selama tahun 2020.
- 2) Utang belanja modal pada BLUD Puskesmas Tahun 2019 sebesar Rp50.735.000,00 merupakan sisa utang Tahun 2018. atas rehabilitasi/pembangunan puskesmas yang dikoreksi di tahun 2020 berdasarkan Surat Pernyataan dari PT. Nafandha Ridhamulia Cipta dan CV. Rizky Karya tanggal 15 Desember 2020 menyatakan tidak akan menuntut Pembayaran atas pekerjaan tahun 2018.
- 3) Utang belanja modal pada Dinas Pendidikan sebesar Rp189.569.000,00 merupakan utang belanja modal BOS Afirmasi yang belum dibayarkan karena keterlambatan pembayaran barang yang datang saat akhir tahun, pelunasan utang telah dilaksanakan pada Tahun 2020.
- 4) Utang belanja modal pada RSUD sebesar Rp1.972.034.718,00 merupakan utang belanja modal pengadaan pada RSUD Sungai Dareh s.d. 31 Desember 2019 telah dibayarkan pada tahun 2020.
- 5) Utang belanja modal pada Dinas Perhubungan sebesar Rp131.500.000,00 merupakan utang belanja modal yang berasal dari pengadaan SIM PKB, aset tak berwujud telah dibayarkan ditahun 2020 dengan nomor SP2D 01963/SP2D-2.09.01/2020 tanggal 29 Juli 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
d. Utang Belanja Bantuan Keuangan	678.543.253,00	66.542.574,00

Utang Belanja bantuan Keuangan 2020 sebesar Rp.678.543.253,00 merupakan Utang Dana Bagi Hasil Pendapatan Daerah Retribusi Daerah (DBHPDRD) Triwulan IV untuk 52 Nagari di Kabupaten Dharmasraya.

Utang belanja bantuan Keuangan Tahun 2019 adalah utang belanja Partai Politik yang kurang bayar sebanyak satu bulan yaitu Desember 2019 sebesar Rp66.542.574,00 telah dibayar ditahun 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.2.a.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	2.609.516.672,86

Utang jangka pendek lainnya Tahun 2020 adalah Rp0,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Utang jangka pendek lainnya tahun 2019 berupa utang retensi yang muncul karena adanya pekerjaan yang belum diselesaikan pada Tahun 2019 sebesar Rp2.609.516.672,86, telah dibayarkan dan pekerjaannya telah selesai tahun 2020

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.2.b Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.C.3 EKUITAS	2.346.493.866.411,02	2.424.445.022.003,03

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Total ekuitas akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.346.493.866.411,02 diperoleh dari ekuitas awal sebesar Rp2.424.445.022.003,03 ditambah surplus laporan operasional sebesar Rp71.631.485.901,77 dikurangi dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar Rp(149.582.641.493,78).

Ekuitas Awal	2.424.445.022.003,03
Surplus/Defisit LO	71.631.485.901,77
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	(149.582.641.493,78)
Ekuitas Akhir	2.346.493.866.411,02



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.D. Laporan Operasional

V.D.1. Pendapatan – LO

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
5.	PENDAPATAN	962.701.597.597,06	1.030.635.685.858,56	(67.934.088.261,50)

Pendapatan Operasional Tahun 2020 dan Tahun 2019 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan LO Tahun 2020 sebesar Rp962.701.597.597,06 bila dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp1.030.635.685.858,56, terdapat penurunan sebesar Rp67.934.088.261,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.1
Pendapatan Operasional Tahun 2020 dan 2019

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
8.	PENDAPATAN	962.701.597.597,06	1.030.635.685.858,56	(67.934.088.261,50)
8.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	78.237.222.767,86	86.582.014.545,56	(8.344.791.777,70)
8.2.	Pendapatan Transfer	829.499.881.968,00	909.305.392.520,00	(79.805.510.552,00)
8.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	54.964.492.861,20	34.748.278.793,00	20.216.214.068,20

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.	Pendapatan Asli Daerah	78.237.222.767,86	86.582.014.545,56	(8.344.791.777,70)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp8.344.791.777,70.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan 2019

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
8.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	78.237.222.767,86	86.582.014.545,56	(8.344.791.777,70)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	20.059.644.354,45	21.331.271.199,67	(1.271.626.845,22)
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.985.918.356,61	2.911.433.570,20	(925.515.213,59)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.524.570.411,00	7.646.750.200,00	(4.122.179.789,00)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
8.1.4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	52.667.089.645,80	54.692.559.575,69	(2.025.469.929,89)

a.1. Pendapatan Pajak Daerah

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	20.059.644.354,45	21.331.271.199,67	(1.271.626.845,22)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp1.271.626.845,22.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.4.3
Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah antara LRA dan LO Tahun 2020

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	17.751.808.580,45	20.059.644.354,45	2.307.835.774,00
Pajak Hotel - LRA	75.169.750,00	77.969.750,00	2.800.000,00
Pajak Restoran - LRA	1.364.845.743,45	1.365.748.943,45	903.200,00
Pajak Hiburan - LRA	-	-	-
Pajak Reklame - LRA	198.347.740,00	198.347.740,00	-
Pajak Penerangan Jalan - LRA	11.338.084.342,00	11.282.426.715,00	(55.657.627,00)
Pajak Parkir - LRA	-	-	-
Pajak Air Tanah - LRA	6.898.303,00	6.898.303,00	-
Pajak Sarang Burung Walet - LRA	2.500.000,00	2.500.000,00	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	235.472.577,00	235.472.577,00	-
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	2.162.234.785,00	4.522.024.986,00	2.359.790.201,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	2.368.255.340,00	2.368.255.340,00	-

Penjelasan perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO jumlah sebesar Rp2.307.835.774,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.4.4
Selisih Pendapatan Pajak Daerah antara LRA dan LO Tahun 2020

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
-piutang Pajak Hotel		2.800.000,00	2.800.000,00
-kas di BOS Pajak restoran		903.200,00	903.200,00
-piutang Pajak Penerangan Jalan	1.076.625.717,00	1.020.968.090,00	(55.657.627,00)
-piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	147.000.225,00	2.506.790.426,00	2.359.790.201,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
JUMLAH	1.223.625.942,00	3.531.461.716,00	2.307.835.774,00

Penjelasan Selisih

- Adanya piutang pajak Hotel Tahun 2020 yang belum diterima sebesar Rp2.800.000,00
- Adanya koreksi pencatatan pajak restoran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2020 pada SDN 09 Koto Besar sebesar Rp903.200,00
- Adanya piutang pajak PPJ Tahun 2019 yang diterima Tahun 2020 sebesar Rp1.076.625.717,00
- Adanya piutang pajak PPJ Tahun 2020 yang belum diterima sebesar Rp1.020.968.090,00
- Adanya piutang pajak PBB Tahun 2019 yang diterima Tahun 2020 sebesar Rp147.000.225,00
- Adanya piutang pajak PBB Tahun 2020 yang belum diterima sebesar Rp2.506.790.426,00

a.2. Pendapatan Retribusi Daerah

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.985.918.356,61	2.911.433.570,20	(925.515.213,59)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp925.515.213,59.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.4.5
Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah antara LRA dan LO Tahun 2020

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	1.861.712.711,00	1.985.918.356,61	124.205.645,61
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	139.345.000,00	136.235.000,00	(3.110.000,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	107.550.000,00	107.550.000,00	-
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	79.242.000,00	109.404.000,00	30.162.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	324.109.000,00	324.818.000,00	709.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	33.000.000,00	33.000.000,00	-
Retribusi Pelayan Tera / Tera Ulang	31.955.000,00	31.955.000,00	-
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	231.325.000,00	322.275.000,00	90.950.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	590.860.516,00	596.355.161,61	5.494.645,61
Retribusi Khusus Parkir	33.829.195,00	33.829.195,00	-
Retribusi Rumah Potong Hewan	4.160.000,00	4.160.000,00	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	104.712.000,00	104.712.000,00	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	181.625.000,00	181.625.000,00	-

Penjelasan perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO jumlah sebesar Rp 124.205.645,61 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.4.6

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah antara LRA dan LO Tahun 2020

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Kesehatan - kas bendahara Penerimaan atas pungutan retribusi pelayanan kesehatan RSUD Sungai Rumbai	3.110.000,00		(3.110.000,00)
Dinas Koperindag - piutang retribusi pelayanan pasar	19.505.000,00	49.667.000,00	30.162.000,00
Dinas Perhubungan - kas di bendahara penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor	282.000,00	991.000,00	709.000,00
Dinas Kominfo - piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi		90.950.000,00	90.950.000,00
piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada :	19.653.915,26	25.148.560,87	5.494.645,61
- Dinas Pendidikan	16.203.000,00		
- Dinas Kesehatan		2.521.613,79	
- RSUD Sungai Dareh	1.256.986,30	8.343.392,12	
- Dinas Perkintan	2.183.000,00	1.825.800,00	
- Badan Keuangan Daerah		12.447.207,01	
- Sekretariat Daerah	10.928,96	10.547,95	
JUMLAH	62.204.830,52	191.905.121,74	124.205.645,61

Penjelasan selisih antara LRA dan LO pada Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 sebesar Rp124.205.645,61 pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Adanya penyesuaian pengurangan atas penyeteroran Kas di Bendahara Penerimaan atas pungutan retribusi pelayanan kesehatan RSUD Sungai Rumbai tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.110.000,00 yang disetor ke kas daerah tanggal 2 Januari 2020



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terdapat selisih sebesar Rp30.162.000,00 yang terdiri dari:
- Adanya penyesuaian penambahan atas piutang retribusi pelayanan pasar Tahun 2020 yang belum diterima sebesar Rp49.667.000.
 - Adanya penyesuaian pengurangan atas penerimaan piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2019 yang diterima tahun 2020 sebesar Rp19.505.000,00.
- 3) Dinas Perhubungan terdapat selisih sebesar Rp709.000,00 yang terdiri dari:
- Adanya penyesuaian penambahan atas Kas di Bendahara Penerimaan berupa retribusi pengujian kendaraan bermotor yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp991.000,00 per 31 Desember 2020.
 - Adanya penyesuaian pengurangan atas Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2019 yang disetor Tahun 2020 sebesar Rp282.000,00.
- 4) Adanya penambahan atas piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi Tahun 2020 yang belum diterima sebesar Rp90.950.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informasi.
- 5) Adanya penyesuaian pengurangan dan penambahan atas piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp5.494.645,61, yaitu :
- penyesuaian pengurangan pada Dinas Pendidikan atas piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun 2019 yang diterima pada Tahun 2020 sebesar Rp16.203.000,00.
 - penyesuaian penambahan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.521.613,79, berupa pendapatan diterima dimuka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penerimaan sewa ATM Bank Nagari Cabang Koto Baru sesuai dengan kontrak tanggal 20 Juni 2016 s.d. 20 Juni 2021 sebesar Rp2.521.613,79.
 - penyesuaian pengurangan pada RSUD Sungai Dareh atas retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa kerjasama sewa ATM Bank BRI sesuai dengan kontrak tanggal 5 Mei 2020 s.d 4 Mei 2021 sebesar Rp1.256.986,30.
 - penyesuaian penambahan pada RSUD Sungai Dareh atas retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp8.343.392,12, yang terdiri dari :
 - Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penerimaan Payment Point dan sewa ATM Bank Nagari sesuai dengan kontrak tanggal 1 Februari 2017 s.d 1 Februari 2022 sebesar Rp7.079.730,92
 - Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penerimaan sewa ATM Bank Nagari sesuai dengan kontrak tanggal 5 Mei 2018 s.d. 4 Mei 2019 sebesar Rp1.263.661,20.
 - penyesuaian pengurangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan atas retribusi pemakaian kekayaan daerah (Rusunawa) Tahun 2019 yang diterima Tahun 2020 sebesar Rp2.183.000,00
 - penyesuaian penambahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan atas retribusi pemakaian kekayaan daerah (Rusunawa) Tahun 2020 yang belum diterima sebesar Rp1.825.800,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- penyesuaian penambahan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp12.447.207,01 yang terdiri dari:
 - Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pendapatan sewa tanah menara telekomunikasi PT Dayamitra sebesar Rp6.313.800,66.
 - Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pendapatan sewa tanah ATM Bank Nagari yang terletak di samping Kantor Bupati sebesar Rp6.133.406,35.
- Penyesuaian penambahan atas Koreksi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO atas sewa ATM BRI di Sekretariat Daerah yang berakhir pada tgl 1 Januari 2021 sebesar Rp10.928,96
- Penyesuaian pengurangan atas penerimaan pendapatan retribusi kekayaan daerah berupa sewa ATM BRI berdasarkan kontrak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2020 sebesar Rp10.547,95 pada Sekretariat Daerah.

a.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.1.1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.524.570.411,00	7.646.750.200,00	(4.122.179.789,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp4.122.179.789,00.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Daerah-LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.4.7
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
antara LRA dan LO Tahun 2020

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.063.752.034,00	3.524.570.411,00	(539.181.623,00)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	4.063.752.034,00	3.524.570.411,00	(539.181.623,00)

Penjelasan perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -LO jumlah sebesar Rp539.181.623,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel. 5.4.8
Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara LRA dan LO Tahun 2020

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
pengurangan atas penerimaan piutang deviden PT Balairung Citra Jaya Tahun 2019	4.063.752.034,00		(4.063.752.034,00)
Penambahan pencatatan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden Bank Nagari		3.515.054.721,00	3.515.054.721,00
Penambahan pencatatan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden PT.BPR Pulau Punjung		9.515.690,00	9.515.690,00
JUMLAH	4.063.752.034,00	3.524.570.411,00	(539.181.623,00)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2020 sebesar Rp539.181.623,00 pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Adanya Penyesuaian pengurangan atas penerimaan piutang deviden PT Balairung Citra Jaya Tahun 2019 sebesar Rp4.063.752.034,00.
- Adanya Penyesuaian Penambahan pencatatan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden Bank Nagari Rp3.515.054.721,00 dan PT.BPR Pulau Punjung Rp9.515.690,00

a.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.1.1	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	52.667.089.645,80	54.692.559.575,69	(2.025.469.929,89)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp2.025.469.929,89. Penamaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya adalah akun pada Laporan Operasional, sedangkan akun pada LRA yakni Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang sah-LRA dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya -LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.4.9
Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya antara LRA dan LO Tahun 2020

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	59.200.568.327,67	52.667.089.645,80	(6.533.478.681,87)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	73.050.000,00	7.500.000,00	(65.550.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Penerimaan Jasa Giro - LRA	1.064.703.252,00	1.064.703.252,00	-
Pendapatan Bunga - LRA	1.423.926.635,00	1.333.801.799,00	(90.124.836,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	255.291.060,86	502.685.685,99	247.394.625,13
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	122.754.673,81	122.754.673,81	-
Pendapatan dari Pengembalian	144.660.032,00	149.790.023,00	5.129.991,00
Pendapatan BLUD - LRA	55.474.643.874,00	48.755.540.012,00	(6.719.103.862,00)
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	641.538.800,00	730.314.200,00	88.775.400,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	-	-	-

Penjelasan perbedaan Lain-lainPendapatan Asli Daerah yang sah-LRA dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO jumlah sebesar Rp6.533.478.681,87 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.4.10
Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya
antara LRA dan LO Tahun 2020

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Reklas pendapatan Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan atas lelang aset ke Surplus penjualan aset nonlancar	67.550.000,00		(67.550.000,00)
Koreksi atas kurang catat Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah atas penerimaan Bunga Deposito pada Bank Nagari dan Bank BRI	100.205.473,00		(100.205.473,00)
pengurangan aset lainnya atas penerimaan piutang TGR tahun 2015 atas nama Syamsul Bahri telah dilunasi tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 Rp8.261.288,44, dan Amiyusar sebesar Rp600.000,-	8.861.288,44		(8.861.288,44)
Penambahan piutang TGR Tahun 2020		256.255.913,57	256.255.913,57
Piutang lain-lain PAD yang sah - pendapatan pengembalian belanja-kelebihan pembayaran dana bantuan partai politik kepada DPC PPP untuk bulan Agustus tahun 2019		5.129.991,00	5.129.991,00
piutang bunga deposito pada Bank Nagari Pulau Punjung		10.080.637,00	10.080.637,00
Piutang BLUD RSUD	6.605.414.092,00	28.652.730,00	(6.576.761.362,00)
Piutang SPAM	94.644.300,00	183.419.700,00	88.775.400,00
Piutang BLUD Puskesmas	495.264.400,00	349.994.200,00	(145.270.200,00)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
lebih salur kapitasi tahun 2020	822.300,00		(822.300,00)
lebih salur klaim BPJS pada Puskesmas Timpeh		3.800.000,00	3.800.000,00
Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan-LO	600.000,00		(600.000,00)
Reklasifikasi Penerimaan atas Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan-LO Penerimaan pengelolaan kebun karet milik pemda yang tercatat di surplus penjualan aset non lancar		7.500.000,00	7.500.000,00
Koreksi pengurangan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sitiung II sebesar Rp50.000,00, (tercatat Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sitiung II Desember 2020 Rp5.120.000,00 sedangkan disetujui BPJS Rp5.070.000,00)	50.000,00		(50.000,00)
Koreksi Penjualan Aset Tetap Lainnya atas Kambing yang telah afkir sebanyak 9 ekor pada Dinas Pertanian	4.900.000,00		(4.900.000,00)
JUMLAH	7.378.311.853,44	844.833.171,57	(6.533.478.681,87)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO pada Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp6.533.478.681,87 yang terdapat pada BLUD Puskesmas, BLUD RSUD Sungai Dareh, Dinas PUPR dan PPKD, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.4.11
Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya antara LO dan LRA
pada SKPD Tahun 2020

NO	NAMA OPD	LO	LRA	SELISIH
1	2	4	3	5
1	BLUD Puskesmas	9.870.856.560,00	10.013.199.060,00	(142.342.500,00)
2	BLUD RSUD Sungai Dareh	38.884.683.452,00	45.461.444.814,00	(6.576.761.362,00)
3	Dinas PUPR	853.068.873,81	764.293.473,81	88.775.400,00
4	Dinas Pertanian	0,00	4.900.000,00	(4.900.000,00)
5	PPKD	3.058.480.759,99	2.956.730.979,86	101.749.780,13
	Jumlah	52.667.089.645,80	59.200.568.327,67	(6.533.478.681,87)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO pada Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp6.533.478.681,87 pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pada BLUD Puskesmas terdapat selisih sebesar Rp142.292.500,00 yang terdiri penambahan piutang BLUD Tahun 2020 sebesar Rp349.994.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dan lebih salur klaim BPJS pada Puskesmas Timpeh sebesar Rp3.800.000,00. Pengurangan piutang BLUD Tahun 2019 sebesar Rp495.264.400,00 dan lebih salur kapitasi Tahun 2020 sebesar Rp822.3000.

- 2) Pada BLUD RSUD Sungai Dareh terdapat selisih sebesar Rp6.576.761.362,00 yang terdiri dari penambahan piutang BLUD Tahun 2020 sebesar Rp28.652.730,00 dan pengurangan piutang BLUD 2019 sebesar Rp6.605.414.092,00.
- 3) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat selisih sebesar Rp88.775.400,00 yang terdiri dari penambahan piutang SPAM Tahun 2020 sebesar Rp183.419.700,00 dan pengurangan piutang SPAM sebesar Rp94.644.300,00 (penerimaan piutang Tahun 2017 sebesar Rp604.600,00; penerimaan piutang Tahun 2018 sebesar Rp4.651.400,00; dan penerimaan piutang Tahun 2019 sebesar Rp89.388.300,00.
- 4) Pada PPKD terdapat selisih sebesar Rp94.249.780,13 yang terdiri dari:
Penyesuaian penambahan sebesar Rp 271.466.541,57 yang terdiri dari:
 - Piutang TGR sebesar Rp256.255.913,57.
 - Piutang Bunga Deposito sebesar Rp10.080.637,00.
 - Piutang pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran dana bantuan partai politik kepada DPC PPP untuk bulan Agustus tahun 2019 sebesar Rp5.129.991,-.
 - Reklasifikasi Penerimaan atas Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan-LO Penerimaan pengelolaan kebun karet milik pemda yang tercatat di surplus penjualan aset non lancar sebesar Rp. 7.500.000,00.
Penyesuaian pengurangan sebesar Rp177.216.761 yang terdiri dari:
 - Piutang TGR sebesar Rp8.261.288,44.
 - Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan-LO berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 030/1816/BKD/XI-2019 tanggal 26 November 2019 Perihal Tindak lanjut sisa bongkaran bangunan gedung (atap bangunan) pada SMPN 2 Pulau Punjung yang baru disetor ke kas daerah pada tanggal 28 April 2020 sebesar Rp600.000,00
 - Reklasifikasi pendapatan Hasil Penjualan Aset daerah- LO ke Surplus defisit penjualan aset Non lancar sebesar Rp67.550.000,00.
 - Koreksi atas kurang catat atas penerimaan Bunga Deposito pada Bank Nagari dan Bank BRI sebesar Rp100.205.473,00.
 - Koreksi pengurangan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sitiung II sebesar Rp50.000,00, (tercatat Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sitiung II Desember 2020 Rp5.120.000,00 sedangkan disetujui BPJS Rp5.070.000,00)
- 5) Reklasifikasi Penerimaan atas Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan-LO Penerimaan pengelolaan kebun karet milik pemda yang tercatat di surplus penjualan aset non lancar sebesar Rp7.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 6) Koreksi pengurangan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sitiung II sebesar Rp50.000,00, (tercatat Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sitiung II Desember 2020 Rp5.120.000,00 sedangkan disetujui BPJS Rp5.070.000,00)
- 7) Koreksi Penjualan Aset Tetap Lainnya atas Kambing yang telah afkir sebanyak 9 ekor pada Dinas Pertanian yang merupakan Defisit Non Operasional sebesar Rp.4.900.000,00.

b. Pendapatan Transfer

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.	Pendapatan Transfer	829.499.881.968,00	909.305.392.520,00	(79.805.510.552,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Transfer Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp79.805.510.552,00.

Pendapatan Transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 5.4.12
Perbedaan Pendapatan Transfer antara LRA dan LO Tahun 2020

KODE REK	Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
		Rp	Rp	Rp
8.2.	Pendapatan Transfer	872.426.151.108,00	829.499.881.968,00	(42.926.269.140,00)
8.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	731.498.444.225,00	736.266.889.152,00	4.768.444.927,00
	Dana Bagi Hasil Pajak	12.973.433.646,00	17.525.407.792,00	4.551.974.146,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	2.174.079.602,00	2.390.550.383,00	216.470.781,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	478.355.774.000,00	478.355.774.000,00	-
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	237.995.156.977,00	237.995.156.977,00	-
8.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	99.826.676.000,00	46.554.026.000,00	(53.272.650.000,00)
	Dana Penyesuaian	99.826.676.000,00	46.554.026.000,00	(53.272.650.000,00)
8.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	41.101.030.883,00	46.678.966.816,00	5.577.935.933,00
	Pendapatan bagi Hasil Pajak	41.101.030.883,00	46.678.966.816,00	5.577.935.933,00
	Pendapatan bagi Hasil Lainnya	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	-

Penjelasan perbedaan Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO jumlah sebesar Rp42.926.269.140,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel. 5.4.13
Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer antara LRA dan LO Tahun 2020

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Penambahan piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2020 yang belum diterima		8.967.719.269,00	8.967.719.269,00
Penerimaan Piutang Transfer Pemerintah Pusat atas PMK Nomor 20 Tahun 2020 dan PMK 36 Tahun 2020 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar DBH Tahun 2019 dalam rangka penanganan Covid 19	1.736.944.395,00		(1.736.944.395,00)
Koreksi atas pencatatan transfer dana desa yang disalurkan dari KPPN ke Rekening Kas Desa, tidak melalui RKUD	53.272.650.000,00		(53.272.650.000,00)
Penerimaan piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2019	3.389.783.336,00		(3.389.783.336,00)
Koreksi Pencatatan kurang bayar Piutang Transfer Pemerintah Pusat (Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak)		6.265.576.339,00	6.265.576.339,00
Koreksi Pencatatan kurang bayar Piutang Transfer Pemerintah Pusat (Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam)		239.812.983,00	239.812.983,00
JUMLAH	58.399.377.731,00	15.473.108.591,00	(42.926.269.140,00)

Penjelasan penyesuaian :

- Penyesuaian penambahan sebesar Rp 15.473.108.591,00 yang terdiri dari:
 - Penambahan piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2020 yang belum diterima sebesar Rp8.967.719.269,00
 - Koreksi Pencatatan kurang bayar Piutang Transfer Pemerintah Pusat (Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak) sebesar Rp6.265.576.339,00 atas PMK 113 Tahun 2020 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar DBH Tahun 2020 yang telah dicabut dengan PMK 25 Tahun 2021
 - Koreksi Pencatatan kurang bayar Piutang Transfer Pemerintah Pusat (Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam) sebesar Rp 239.812.983,00 atas PMK 113 Tahun 2020 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar DBH Tahun 2020 yang telah dicabut dengan PMK 25 Tahun 2021
- Penyesuaian pengurangan sebesar Rp58.399.377.731,00 yang terdiri dari:
 - Penerimaan Piutang Transfer Pemerintah Pusat atas PMK Nomor 20 Tahun 2020 dan PMK 36 Tahun 2020 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar DBH Tahun 2019 dalam rangka penanganan Covid 19 sebesar Rp1.736.944.395,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Koreksi atas pencatatan transfer dana desa yang disalurkan dari KPPN ke Rekening Kas Desa, tidak melalui RKUD sebesar Rp53.272.650.000,00.
- Penerimaan piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2019 sebesar Rp3.389.783.336,00.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.	Pendapatan Hibah	54.964.492.861,20	34.748.278.793,00	20.216.214.068,20

Jumlah tersebut merupakan saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat kenaikan sebesar Rp20.216.214.068,20.

Lain-lain Pendapatan yang Sah ini merupakan pendapatan hibah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri, Pendapatan Hibah BOS, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 5.4.14
Perbedaan Lain-lain Pendapatan yang sah antara LRA dan LO Tahun 2020

KODE REK	Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
		Rp	Rp	Rp
8.3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	34.887.153.721,00	54.964.492.861,20	20.077.339.140,20
	Pendapatan Hibah	34.887.153.721,00	54.964.492.861,20	20.077.339.140,20
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	2.050.000.000,00	11.838.779.323,00	9.788.779.323,00
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	416.323.721,00	10.704.883.538,20	10.288.559.817,20
	Pendapatan Hibah BOS - LRA	32.420.830.000,00	32.420.830.000,00	-

Penjelasan perbedaan Lain-lain Pendapatan yang Sah -LRA dengan Lain-lain Pendapatan yang sah -LO jumlah sebesar Rp20.077.339.140,20 terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp9.788.779.323,00 adalah merupakan hibah dari pemerintah berupa aset tetap dan sebesar Rp10.288.559.817,20 merupakan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri sumbangan bantuan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang langsung diserahkan pihak ketiga kepada perangkat daerah terkait berupa peralatan kesehatan dan perlengkapan medis lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pada Dinas Pendidikan adanya penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari hibah masyarakat sebesar Rp2.750.000,00 berupa kursi tamu kenang-kenangan siswa SDN 4 Timpeh.
2. Pada Dinas Kesehatan adanya penambahan persediaan dari hibah pihak ketiga sebesar Rp9.397.790.998,00 yang terdiri dari persediaan alat



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kesehatan habis pakai sebesar Rp7.216.592.250,00 dan penambahan persediaan obat-obatan dari Provinsi sebesar Rp2.222.439.748,00.

3. Pada BLUD Puskesmas adanya penambahan persediaan dari hibah/sumbangan pihak ketiga berupa alat kesehatan habis pakai sebesar Rp581.312.000,00, dengan rincian:

No	Puskesmas	Pendapatan Hibah
1	Sungai Rumbai	18.365.000,00
2	Sungai Limau	17.170.000,00
3	Sitiung II	13.175.000,00
4	Padang Laweh	76.648.000,00
5	Sungai Dareh	16.230.000,00
6	Silago	16.323.000,00
7	Gunung Medan	31.503.000,00
8	Sitiung I	55.368.000,00
9	Koto Baru	40.373.500,00
10	Timpeh	18.913.000,00
11	Sialang	14.748.500,00
12	Tiumang	35.249.000,00
13	Koto Besar	68.226.000,00
14	Beringin Sakti	12.615.000,00
15	RSUD Sungai Rumbai	146.405.000,00
JUMLAH		581.312.000,00

4. Pada RSUD Sungai Dareh adanya penambahan hibah sebesar Rp556.441.300,00 yang terdiri dari aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp10.087.300,00, aset tetap lainnya sebesar Rp43.560.000,00 dan bantuan alat kesehatan habis pakai dari pihak ketiga dalam rangka penanganan covid 19 sebesar Rp502.794.000,00.
5. Pada Dinas PUPR adanya penambahan aset dari hibah sebesar Rp4.754.649.020,00 yang terdiri dari aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.087.063.544,00, dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp3.667.585.476,00.
6. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adanya penambahan aset dari hibah sebesar Rp2.682.659.285,00 berupa aset tetap jalan, jaringan dan irigasi.
7. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga adanya penambahan persediaan dari hibah/sumbangan pihak ketiga sebesar Rp1.579.825.267,20.
8. Pada Dinas Pangan dan Perikanan adanya penambahan hibah berupa makanan sebesar Rp5.000.000,00.
9. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adanya penambahan dari hibah/sumbangan pihak ketiga sebesar Rp27.000.000,00 berupa alat kesehatan habis pakai.
10. Pada Badan Keuangan Daerah adanya penambahan persediaan hibah dari KPU Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp124.031.270,00 berupa 47 buah Thermogun, 202 baju hazmat, dan 164 Handsprayer.
11. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adanya penambahan hibah/sumbangan pihak ketiga berupa alat kesehatan habis pakai sebesar Rp365.880.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.D.2. Beban

Beban pada Laporan Operasional sesuai dengan format Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.	BEBAN	890.555.469.704,29	1.004.914.438.011,22	(114.358.968.306,94)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Operasional Tahun 2020 dan Tahun 2019, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyesuaian piutang, dan beban transfer. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp114.358.968.306,94 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.15
Beban Operasional Tahun 2020 dan 2019

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.	BEBAN	890.555.469.704,28	1.004.914.438.011,22	9.587.677.666,77
9.1.1.	Beban Pegawai	425.276.572.735,00	452.306.900.751,32	(27.030.328.016,32)
9.1.2.	Beban Persediaan	69.109.719.631,86	68.946.555.652,95	163.163.978,91
9.1.2.	Beban Jasa	61.054.627.884,27	49.437.197.781,24	11.617.430.103,03
9.1.2.	Beban Sewa	2.217.298.064,03	4.867.540.019,38	(2.650.241.955,35)
9.1.2.	Beban Pemeliharaan	8.647.223.670,00	11.934.277.601,00	(3.287.053.931,00)
9.1.2.	Beban Perjalanan Dinas	36.283.810.392,00	54.878.825.962,00	(18.595.015.570,00)
9.1.5.	Beban Hibah	72.886.229.581,03	62.152.815.287,80	10.733.414.293,23
9.1.6.	Beban Bantuan Sosial	17.918.600.000,00	3.132.000.000,00	14.786.600.000,00
9.1.7.	Beban Penyusutan Aset tetap	125.070.937.211,03	175.835.716.891,03	(50.935.744.860,99)
9.1.7.	Beban Penyusutan Aset lain-lain	14.150.005.898,05	62.168.036,00	138.205.449.016,75
9.1.7.	Beban Amortisasi	339.300.810,18	263.680.248,22	75.620.561,96
9.1.8.	Beban Penyesuaian Piutang	2.991.191.038,83	1.123.543.214,28	1.867.647.824,55
9.1.9.	Beban Transfer	54.609.952.788,00	119.973.216.566,00	(65.363.263.778,00)

a. Beban Pegawai

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.1.	Beban Pegawai	425.276.572.735,00	452.306.900.751,32	(27.030.328.016,32)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp27.030.328.016,32 yang dipengaruhi antara lain berkurangnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan beban kerja dan honor pengelola keuangan dibayarkan 11 (sebelas) bulan.

Beban Pegawai ini terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang Lembur, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Beban Pegawai BLUD, Beban Pegawai Dana BOS, dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.16
Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.1	BEBAN	425.276.572.735,00	452.306.900.751,32	(27.030.328.016,32)
9.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan pegawai	231.767.137.816,00	232.687.254.234,00	(920.116.418,00)
9.1.1.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	120.480.140.860,00	144.301.162.771,00	(23.821.021.911,00)
9.1.1.03.	Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.406.185.000,00	7.266.060.000,00	(859.875.000,00)
9.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	811.982.066,00	959.000.535,15	(147.018.469,15)
9.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	69.942.100,00	174.346.192,00	(104.404.092,00)
9.1.1.07.	Uang Lembur PNS	1.070.951.000,00	811.529.000,00	259.422.000,00
9.1.1.08.	Honorarium PNS LO	6.846.055.000,00	9.429.598.261,17	(2.583.543.261,17)
	Honorarium Non PNS LO	35.746.190.000,00	35.719.817.550,00	26.372.450,00
	Beban Pegawai BLUD	22.077.988.893,00	20.958.132.208,00	1.119.856.685,00

Saldo Beban Pegawai tersebut adalah jumlah *netto* setelah dikurangnya pengembalian beban pegawai selama Tahun 2020.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.4.17
Perbedaan Belanja Pegawai antara LRA dan LO Tahun 2020

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA (Rp)	Belanja-LO (Rp)	Selisih +/- (Rp)
Beban Pegawai	418.043.145.643,00	425.276.572.735,00	(7.233.427.092,00)
Gaji dan Tunjangan pegawai	231.767.137.816,00	231.767.137.816,00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	134.743.388.260,00	120.480.140.860,00	14.263.247.400,00
Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.406.185.000,00	6.406.185.000,00	-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	894.665.893,00	811.982.066,00	82.683.827,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	182.501.809,00	69.942.100,00	112.559.709,00
Uang Lembur PNS	1.070.951.000,00	1.070.951.000,00	-
Honorarium PNS LO	6.981.205.000,00	6.846.055.000,00	135.150.000,00
Honorarium Non PNS LO	35.735.690.000,00	35.746.190.000,00	(10.500.000,00)
Beban Pegawai BLUD	261.420.865,00	22.077.988.893,00	(21.816.568.028,00)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penjelasan perbedaan belanja persediaan-LRA dengan beban persediaan-LO jumlah sebesar Rp(7.233.427.092,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.4.18
Selisih Belanja Pegawai antara LRA dan LO Tahun 2020

URAIAN	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Beban Jasa BLUD direklas ke Beban Pegawai BLUD	21.826.518.685,00	0,00	(21.826.518.685,00)
Utang belanja pegawai	1.216.120.681,00	15.624.062.274,00	14.407.941.593,00
Beban Pegawai menambah nilai aset	0	224.150.000,00	224.150.000,00
Penambahan beban dari BTT	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)
JUMLAH	23.081.639.366,00	15.848.212.274,00	(7.233.427.092,00)

Penjelasan Selisih

- Penyesuaian Beban Jasa BLUD direklas ke Beban Pegawai BLUD sebesar Rp21.826.518.685,00.
- Penyesuaian utang belanja pegawai sebesar Rp14.407.941.593,00, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.3.19
Selisih Belanja Pegawai antara LRA dan LO Tahun 2020

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan - Sertifikasi Guru	-	14.263.247.400,00	14.263.247.400,00
BKD - Utang Insentif Pajak Daerah 2019		182.590.893,00	182.590.893,00
BKD - Utang Insentif Retribusi Daerah 2019	-	112.559.709,00	112.559.709,00
BKD - Utang Insentif Pajak Daerah 2020	99.907.066,00		(99.907.066,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD RSUD Sungai Dareh	1.103.407.950,00	1.065.664.272,00	(37.743.678,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD RSUD Sungai Rumbai	12.805.665,00		(12.805.665,00)
Jumlah	1.216.120.681,00	15.624.062.274,00	14.407.941.593,00

Penjelasan selisih :

- Pengurangan beban atas utang belanja pegawai Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan berupa Sertifikasi Guru Triwulan IV yang belum dibayarkan sampai akhir Tahun 2019 sebesar Rp14.263.247.400,00. Utang ini telah lunas dibayarkan dengan SP2D Nomor 00058/SP2D-1.01.01/2020 tanggal 3 Januari 2020.
- Pembayaran utang belanja pegawai sebesar Rp95.338.618,00, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 862.1/122/KPTS-BKD/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Kekurangan Insentif Triwulan IV kepada Perangkat Daerah Pemungut/Pengelola Pajak Daerah di Kabupaten Dharmasraya TA 2019 sebesar Rp113.538.618,00, terdapat



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

koreksi utang Insentif pajak Daerah TW IV tahun 2019 sebesar Rp.18.200.000,00 yang disebabkan oleh insentif PBB Sektor perkotaan seharusnya diberikan untuk insentif nagari bukan untuk perangkat daerah pemungut/ pengelola pajak daerah.

- Pembayaran utang Insentif PBB Tahun 2019 sebesar Rp87.252.275,00 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 862.1/297/KPTS-BKD/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Kekurangan Insentif kepada Pemungut/Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Tahun 2019 di Kabupaten Dharmasraya TA 2019 sebesar Rp87.252.275,15, terdapat koreksi sebesar Rp0,15 dikarenakan pembulatan angka dibelakang koma.
 - Pembayaran utang belanja pegawai sebesar Rp112.559.709,00 pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan utang insentif Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 862.1/123/KPTS-BKD/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Kekurangan Insentif Triwulan IV kepada Perangkat Daerah Pemungut/Pengelola Retribusi Daerah di Kabupaten Dharmasraya TA 2019 sebesar Rp114.153.305,00 sehingga terjadi koreksi sebesar Rp1.593.596,00 karena adanya koreksi ulang dalam perhitungan insentif.
 - Adanya penambahan utang belanja pegawai pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan utang Insentif Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2020 sebesar Rp99.907.066,00 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 862.1/35/KPTS-BKD/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Penetapan Kekurangan Insentif kepada Pemungut/Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Tahun 2020 di Kabupaten Dharmasraya.
- c) Penyesuaian untuk mengakui beban pegawai menambah nilai aset sebesar Rp224.150.000,00. Dengan rincian :

Tabel. 5.3.20
Beban pegawai menambah nilai aset Tahun 2020

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Dinas PUPR – Belanja Pegawai menjadi persediaan	-	14.150.000,00	14.150.000,00
Belanja Honor PNS menjadi aset tetap Dinas Kesehatan	-	27.000.000,00	27.000.000,00
BLUD Puskesmas - Belanja Pegawai menambah nilai aset tetap	-	7.500.000,00	7.500.000,00
BLUD RSUD Sungai Dareh - Belanja Pegawai menambah nilai aset tetap	-	53.000.000,00	53.000.000,00
Sekretariat Daerah - Belanja Pegawai menambah nilai aset tetap	-	119.850.000,00	119.850.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Sekretariat DPRD - Belanja Pegawai menambah nilai aset tetap	-	2.650.000,00	2.650.000,00
Jumlah		224.150.000,00	224.150.000,00

- d) Adanya Penambahan belanja pegawai dari Belanja Tidak Terduga untuk penanganan covid-19 sebesar Rp39.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.3.21

PenambahanBeban Pegawai dari BTT Tahun 2020

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Dinas Transnaker - BTT menambah Beban Honor PNS	28.500.000,00		(28.500.000,00)
Dinas Transnaker - BTT menambah Beban Honor Non PNS	10.500.000,00		(10.500.000,00)
Jumlah	39.000.000,00		(39.000.000,00)

a. Beban Persediaan

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.2.b	Beban Persediaan	69.109.719.631,86	68,946,555,652.95	163.163.978,91

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Persediaan dalam Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp163.163.978,91.

Beban Persediaan ini terdiri dari beban pakai habis, beban bahan material, beban cetak dan penggandaan serta beban persediaan BLUD dan beban persediaan BOS, yaitu :

Tabel 5.3.22

Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan an Rp
		Rp	Rp	
9.1.1	Beban Persediaan	69.109.719.631,86	68.946.555.652,95	163.163.978,91
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis	11.818.364.585,98	12.214.537.197,45	(396.172.611,47)
9.1.2.02.	Beban Bahan/Material	4.174.436.386,45	8.736.747.604,50	(4.562.311.218,05)
9.1.2.06.	Beban Cetak dan Penggandaan	3.685.865.871,00	5.079.390.202,00	(1.393.524.331,00)
9.1.2.11.	Beban Makanan dan Minuman	7.737.018.640,00	11.974.567.484,00	(4.237.548.844,00)
9.1.2.12.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	466.195.000,00	901.106.000,00	(434.911.000,00)
9.1.2.13.	Beban Pakaian Kerja	65.823.500,00	393.766.575,00	(327.943.075,00)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
9.1.2.14.	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	182.835.500,00	1.023.171.637,00	(840.336.137,00)
9.1.2.20.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - LO	-	-	-
9.1.2.29.	Beban Persediaan Dana BLUD - LO	30.056.592.633,43	18.184.724.885,00	11.871.867.748,43
9.1.2.34.	Beban Persediaan Dana BOS - LO	10.922.587.515,00	10.438.544.068,00	484.043.447,00

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Persediaan)-LRA dengan Beban Persediaan-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.23
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Persediaan) LRA dan Beban Persediaan LO Tahun 2020

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Persediaan	29.505.293.812,00	69.109.719.631,86	(39.604.425.819,86)
Beban Persediaan alat tulis kantor - LO	2.600.648.068,00	2.670.385.518,00	(69.737.450,00)
Beban Dokumen/Administrasi Tender	440.000,00	440.000,00	-
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) - LO	419.933.404,00	521.062.604,22	(101.129.200,22)
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya - LO	265.177.000,00	265.168.000,00	9.000,00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih - LO	626.740.042,00	629.347.542,00	(2.607.500,00)
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas - LO	3.032.497.901,00	3.052.845.068,55	(20.347.167,55)
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-
Beban Persediaan pengisian isi tabung gas - LO	41.109.000,00	41.109.000,00	-
Beban Alat Kesehatan Habis Pakai*)	1.575.271.062,00	4.320.227.620,21	(2.744.956.558,21)
Beban Peralatan Rumah Tangga*)	166.070.500,00	175.891.233,00	(9.820.733,00)
Beban Peralatan Persampahan*)	6.988.000,00	6.988.000,00	-
Beban Sarana dan Prasarana Perhubungan	134.900.000,00	134.900.000,00	-
Beban Persediaan bahan baku bangunan - LO	92.494.000,00	380.645.026,00	(288.151.026,00)
Beban Persediaan bahan/bibit tanaman - LO	827.459.750,00	827.459.750,00	-
Beban Persediaan bibit ternak - LO	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)
Beban Persediaan bahan obat-obatan - LO	6.232.245.895,00	1.152.686.037,45	5.079.559.857,55
Beban Persediaan bahan kimia - LO	214.855.500,00	396.543.364,00	(181.687.864,00)
Beban Persediaan Makanan Pokok	216.890.000,00	206.565.650,00	10.324.350,00
Beban Hadiah - LO	42.255.000,00	42.255.000,00	-
Beban Bahan Praktek Lapangan*)	15.000.000,00	15.000.000,00	-
Beban Bahan Peralatan Pelatihan*)	-	-	-
Beban Bahan Kebutuhan Keperluan Bencana*)	425.107.114,00	416.947.114,00	8.160.000,00
Beban persediaan bahan kosmetik	2.927.045,00	2.927.045,00	-
Beban Persediaan Perlengkapan olah raga - LO	29.000.000,00	29.000.000,00	-
Belanja Bahan Makanan/Sembako*)	83.000.000,00	83.000.000,00	-
Belanja Cinder Mata*)	122.000.000,00	122.000.000,00	-
Belanja Bahan Dekorasi dan Publikasi*)	71.281.000,00	73.281.000,00	(2.000.000,00)
Beban Persediaan Bahan Material Peternakan/Perikanan - LO	329.839.000,00	381.126.400,00	(51.287.400,00)
Beban Persediaan bahan / alat perlengkapan	-	-	-
Beban perlengkapan sekolah*)	40.000.000,00	40.000.000,00	-
Beban Cetak - LO	2.826.866.050,00	2.839.115.030,00	(12.248.980,00)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Penggandaan - LO	803.908.841,00	803.908.841,00	-
Beban Penjilidan	42.842.000,00	42.842.000,00	-
Beban makanan dan minuman harian pegawai - LO	1.170.856.420,00	1.170.856.420,00	-
Beban makanan dan minuman rapat - LO	2.364.038.400,00	2.366.348.400,00	(2.310.000,00)
Beban makanan dan minuman tamu - LO	1.635.352.650,00	1.635.352.650,00	-
Beban makanan dan minuman pelatihan - LO	12.940.000,00	205.010.000,00	(192.070.000,00)
Beban Makan Minum Kegiatan*)	2.102.365.170,00	2.120.035.170,00	(17.670.000,00)
Beban Makan Minum Pasien*)	131.831.000,00	131.831.000,00	-
Beban Makan minum tambahan anak sekolah*)	107.585.000,00	107.585.000,00	-
Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH - LO	271.000.000,00	271.000.000,00	-
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) - LO	95.370.000,00	95.370.000,00	-
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL) - LO	-	-	-
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) - LO	44.715.000,00	44.715.000,00	-
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) - LO	-	-	-
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR) - LO	55.110.000,00	55.110.000,00	-
Beban pakaian kerja lapangan - LO	30.350.000,00	35.825.000,00	(5.475.000,00)
Beban Pakaian Dinas Lapangan*)	29.998.500,00	29.998.500,00	-
Beban Pakaian Pelatihan/Kegiatan*)	-	-	-
Beban pakaian adat daerah - LO	47.682.500,00	64.482.500,00	(16.800.000,00)
Beban pakaian batik tradisional - LO	8.828.000,00	8.828.000,00	-
Beban pakaian olahraga	44.790.000,00	44.790.000,00	-
Beban Pakaian Kontingen*)	64.735.000,00	64.735.000,00	-
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada	-	-	-
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak	-	-	-
Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada	-	-	-
Beban Uang yang diberikan kepada pihak	-	-	-
Beban Persediaan Dana BLUD - LO	-	30.056.592.633,43	(30.056.592.633,43)
Beban Persediaan Dana BOS - LO	-	10.922.587.515,00	(10.922.587.515,00)

Penjelasan perbedaan belanja persediaan-LRA dengan beban persediaan-LO jumlah sebesar Rp10.302.590.876,86, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penyesuaian persediaan yang terpakai pada Tahun 2019 dan yang masih menjadi persediaan (*stock*) pada Tahun 2020 berdasarkan *stock opname* persediaan per 31 Desember 2020.
- Penyesuaian belanja persediaan yang menambah nilai aset, yaitu.

SKPD	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
BPBD	-	5.550.000,00	5.550.000,00
JUMLAH	-	5.550.000,00	5.550.000,00

- Penyesuaian utang belanja persediaan Tahun 2020 sebesar Rp5.913.097.350,59 di debit dan Tahun 2019 yang mengurangi beban persediaan sebesar Rp4.789.276.962,00 dikredit, dapat diuraikan pada tabel.

Tabel. 5.3.24
Penyesuaian utang belanja persediaan Tahun 2020

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
DINAS KESEHATAN			



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
- Utang belanja bahan obat-obatan	370.667.750,00	-	(370.667.750,00)
BLUD RSUD SUNGAI DAREH	-	-	-
- Utang belanja bahan pakai habis/ kedokteran	2.241.507.965,00	1.586.143.441,00	(655.364.524,00)
- Utang belanja bahan obat-obatan	2.304.654.951,00	2.316.720.711,00	12.065.760,00
- Utang belanja bahan laboratorium	822.481.283,00	843.820.810,00	21.339.527,00
- Utang belanja Gas Medis	42.933.000,00	42.592.000,00	(341.000,00)
BLUD RSUD SUNGAI RUMBAI	-	-	-
- Utang belanja bahan pakai habis/ kedokteran	-	-	-
- Utang belanja bahan obat-obatan	2.646.401,59	-	(2.646.401,59)
DINAS PERTANIAN	-	-	-
- Utang Belanja Bahan kimia	62.056.000,00	-	(62.056.000,00)
- Utang Belanja Bahan/alat Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan*)	66.150.000,00	-	(66.150.000,00)
JUMLAH	5.913.097.350,59	4.789.276.962,00	(1.123.820.388,59)

- d) Penambahan persediaan dari Belanja Tidak Terduga untuk penanganan covid-19 sebesar Rp2.012.986.466,23, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.3.25
Penambahan persediaan dari Belanja Tidak Terduga Tahun 2020

SKPD	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
DINAS PENDIDIKAN	-		
- Beban Persediaan alat listrik dan elektronik	2.185.741,00		(2.185.741,00)
- Beban Peralatan Rumah Tangga	10.819.733,00		(10.819.733,00)
DINAS KESEHATAN	-		-
- Beban Alat Kesehatan Habis Pakai	435.547.745,93		(435.547.745,93)
BLUD PUSKESMAS	-		-
- Beban Alat Kesehatan Habis Pakai	127.246.246,00		(127.246.246,00)
RSUD			-
- Beban Alat Kesehatan Habis Pakai	460.736.850,00		(460.736.850,00)
- Beban Persediaan bahan obat-obatan	51.721.266,30		(51.721.266,30)
SATPOL PP			-
- Beban Persediaan alat tulis kantor - LO	2.000.000,00		(2.000.000,00)
- Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih - LO	1.450.000,00		(1.450.000,00)
- Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas - LO	8.367.509,00		(8.367.509,00)
- Beban Alat Kesehatan Habis Pakai	4.600.000,00		(4.600.000,00)
- Beban Bahan Kebutuhan Keperluan Bencana	1.500.000,00		(1.500.000,00)
- Belanja Bahan Dekorasi dan Publikasi	2.000.000,00		(2.000.000,00)
- Beban makanan dan minuman rapat - LO	2.700.000,00		(2.700.000,00)
- Beban makanan dan minuman tamu - LO	17.670.000,00		(17.670.000,00)
- Beban pakaian kerja lapangan - LO	5.475.000,00		(5.475.000,00)
DINAS TRANSNAKER			-
- Beban Persediaan alat tulis kantor - LO	4.420.000,00		(4.420.000,00)
- Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih - LO	1.500.000,00		(1.500.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
- Beban Alat Kesehatan Habis Pakai	680.976.375,00		(680.976.375,00)
- Beban makanan dan minuman pelatihan - LO	192.070.000,00		(192.070.000,00)
JUMLAH	2.012.986.466,23		(2.012.986.466,23)

- e) Penambahan belanja persediaan dari bantuan/sumbangan pihak ketiga untuk penanganan covid-19, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 5.3.26
Penambahan persediaan dari bantuan/sumbangan pihak ketiga Tahun 2020

SKPD	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Beban Alat Kesehatan Habis Pakai pada :			
Dinas Kesehatan	130.138.112,28		(130.138.112,28)
RSUD Sungai Dareh	270.812.000,00		(270.812.000,00)
BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	18.365.000,00		(18.365.000,00)
BLUD Puskesmas Sungai Limau	17.170.000,00		(17.170.000,00)
BLUD Puskesmas Sitiung II	3.490.000,00		(3.490.000,00)
BLUD Puskesmas Padang Laweh	76.648.000,00		(76.648.000,00)
BLUD Puskesmas Sungai Dareh	15.330.000,00		(15.330.000,00)
BLUD Puskesmas Silago	16.323.000,00		(16.323.000,00)
BLUD Puskesmas Gunung Medan	31.503.000,00		(31.503.000,00)
BLUD Puskesmas Sitiung I	35.733.000,00		(35.733.000,00)
BLUD Puskesmas Koto Baru	40.373.500,00		(40.373.500,00)
BLUD Puskesmas Timpeh	15.581.000,00		(15.581.000,00)
BLUD Puskesmas Sialang	7.088.500,00		(7.088.500,00)
BLUD Puskesmas Tiurang	35.249.000,00		(35.249.000,00)
BLUD Puskesmas Koto Besar	66.863.500,00		(66.863.500,00)
BLUD Puskesmas Beringin Sakti	12.615.000,00		(12.615.000,00)
BLUD Puskesmas RSUD Sungai Rumbai	34.435.000,00		(34.435.000,00)
BPBD	87.635.000,00		(87.635.000,00)
- Beban Bahan Makanan/Sembako			-
BLUD Puskesmas Sitiung I	8.780.000,00		(8.780.000,00)
BLUD Puskesmas Timpeh	3.332.000,00		(3.332.000,00)
JUMLAH	927.464.612,28		(927.464.612,28)

- f) Penyesuaian Beban Jasa BLUD direklas ke Beban Persediaan BLUD Puskesmas sebesar Rp13.277.553,63 dan BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp17.052.833.980,00
- g) Penyesuaian Beban dana BOS direklas ke Beban Persediaan BOS sebesar Rp10.921.245.600,00

c. Beban Jasa

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan Rp
		Rp	Rp	
9.1.2.b	Beban Jasa	61.054.627.884,27	49.437.197.781,24	11.617.430.103,03



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat kenaikan sebesar Rp11.617.430.103,03.

Beban Jasa ini terdiri dari beban jasa kantor, beban premi asuransi, beban jasa konsultasi dan beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis serta beban jasa BLUD dan beban jasa BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Persediaan)-LRA dengan Beban Jasa-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.27

Perbedaan Belanja Jasa LRA dan LO Tahun 2020

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Jasa	36.903.586.644,00	61.054.627.884,27	(24.151.041.240,27)
Beban Jasa telepon - LO	655.872.198,00	655.872.198,00	-
Beban Jasa air - LO	35.760.800,00	35.760.800,00	-
Beban Jasa listrik - LO	9.893.656.968,00	10.043.156.968,00	(149.500.000,00)
Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang - LO	-	-	-
Beban Jasa surat kabar/majalah - LO	224.415.000,00	224.415.000,00	-
Beban Jasa kawat/faksimili/internet - LO	1.217.616.511,00	1.217.616.511,00	-
Beban Jasa paket/pengiriman - LO	6.680.040,00	20.680.040,00	(14.000.000,00)
Beban Jasa Sertifikasi - LO	13.172.240,00	13.172.240,00	-
Beban Jasa Transaksi Keuangan	18.900.000,00	18.900.000,00	-
Beban Transportasi dan Akomodasi*)	2.168.945.400,00	2.453.345.400,00	(284.400.000,00)
Beban Jasa Dekorasi/Makeup/Kesenian*)	294.900.000,00	294.900.000,00	-
Beban Jasa Pihak Ketiga*)	-	-	-
Beban Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	269.822.500,00	269.822.500,00	-
Beban jasa pelayanan kesehatan*)	528.025.000,00	528.025.000,00	-
Beban jasa penyebaran informasi*)	865.400.000,00	1.065.400.000,00	(200.000.000,00)
Beban BebanJasa Upah Kerja*)	543.710.000,00	543.710.000,00	-
Beban jasa penyelenggaraan mayat dan	17.700.000,00	109.700.000,00	(92.000.000,00)
Beban jasa informasi, teks, audio dan visual*)	193.478.000,00	193.478.000,00	-
Beban Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur*)	2.627.240.661,00	2.627.240.661,00	-
Beban Jasa Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor *)	-	-	-
Beban jasa pembuatan dan pemeliharaan Website/Aplikasi atau Peta	163.855.000,00	163.855.000,00	-
Beban Jasa Hiburan Kesenian*)	767.085.000,00	767.085.000,00	-
Beban kontribusi*)	70.061.000,00	70.061.000,00	-
Beban Visum Et Repertum	-	-	-
Beban Jasa Pemeriksaan Laboratorium	27.648.000,00	27.648.000,00	-
Beban Paket Meeting	-	-	-
Belanja Bantuan Operasional SATGAS	1.344.344.250,00	1.428.194.250,00	(83.850.000,00)
Belanja Uang Saku	4.500.000,00	4.500.000,00	-
Belanja Insentif - LO	4.289.454.049,00	6.603.320.911,00	(2.313.866.862,00)
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan -	8.274.672.200,00	8.274.672.200,00	-
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah - LO	352.530.665,00	283.490.397,42	69.040.267,58



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Jasa Konsultansi Penelitian - LO	-	-	-
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan - LO	548.665.000,00	548.665.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan - LO	41.940.000,00	41.940.000,00	-
Beban beasiswa tugas belajar S2 - LO	-	-	-
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan -	66.716.710,00	66.716.710,00	-
Beban sosialisasi - LO	24.800.000,00	24.800.000,00	-
Beban bimbingan teknis - LO	563.619.452,00	563.619.452,00	-
Beban Kontribusi*)	6.400.000,00	6.400.000,00	-
Beban Barang dan Jasa BOS Daerah	782.000.000,00	782.000.000,00	-
Beban Jasa dana BLUD - LO		9.489.077.018,85	(9.489.077.018,85)
Beban Jasa dana BOS - LO		11.593.387.627,00	(11.593.387.627,00)

Penjelasan perbedaan belanja jasa-LRA dengan jasa-LO sebesar Rp24.151.041.240,27 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.28
Selisih Belanja Jasa LRA dan LO Tahun 2020

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
utang belanja jasa	776.386.022,00	452.733.010,00	(323.653.012,00)
Premi asuransi barang milik daerah	149.643.493,13	218.683.760,71	69.040.267,58
belanja tidak terduga untuk penanganan covid-19	2.665.974.000,00	-	(2.665.974.000,00)
Beban Jasa dana BLUD	9.637.066.868,85	-	(9.637.066.868,85)
Beban Jasa dana BOS	11.593.387.627,00	-	(11.593.387.627,00)
JUMLAH	24.822.458.010,98	671.416.770,71	(24.151.041.240,27)

Penjelasan selisih :

a.) Selisih penyesuaian utang belanja jasa sebesar Rp323.653.012,00, yaitu.

Tabel. 5.3.29
Penyesuaian utang belanja jasa Tahun 2020

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Kesehatan			
Utang 2020 Pada Dinas Kesehatan - Insentif Covid-19 Untuk :			
- Dinas Kesehatan	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)
- Puskesmas Sungai Dareh	62.142.862,00		(62.142.862,00)
- Puskesmas Sitiung II	40.000.000,00		(40.000.000,00)
Dinas Perhubungan			
Utang Penambahan Daya Listrik kantor	149.500.000,00	-	(149.500.000,00)
Sekretariat Daerah			
Utang Kerja sama dengan Media Online	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)
Blud Puskesmas			
Utang 2019 Jasa Pelayanan dan Jasa Klaim BPJS	-	452.733.010,00	452.733.010,00
Utang 2020 Jasa Pelayanan dan Jasa Klaim BPJS	304.743.160,00	-	(304.743.160,00)
JUMLAH	776.386.022,00	452.733.010,00	(323.653.012,00)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b.) Penyesuaian beban jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

Tabel. 5.3.30
Penyesuaian beban jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2020

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah	130.321.980,83	135.983.455,23	5.661.474,40
Premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD	19.321.512,30	20.186.168,49	864.656,19
Premi asuransi gedung pada Sekretariat DPRD	-	62.514.136,99	62.514.136,99
JUMLAH	149.643.493,13	218.683.760,71	69.040.267,58

Penjelasan selisih

- penyesuaian premi asuransi dibayar dimuka atas kendaraan dinas Tahun 2019 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp130.321.980,83 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp19.321.512,30.
 - penyesuaian premi asuransi dibayar dimuka atas kendaraan dinas Tahun 2020 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp135.983.455,23 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp20.186.168,49
 - penyesuaian premi asuransi dibayar dimuka atas gedung kantor Tahun 2020 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp62.514.136,99
- c.) Penyesuaian beban jasa atas penambahan dari belanja tidak terduga untuk penanganan covid-19 pada SKPD sebesar Rp2.665.974.000,00, yaitu.

Tabel. 5.3.31
Penyesuaian beban jasa dari belanja tidak terduga Tahun 2020

SKPD	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
RSUD SUNGAI DAREH			
- Beban Insentif Tenaga Kesehatan -LO	2.191.724.000,00		(2.191.724.000,00)
SATPOL PP			
- Beban Bantuan Operasional SATGAS -LO	83.850.000,00		(83.850.000,00)
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
- Beban Transportasi dan Akomodasi -LO	284.400.000,00		(284.400.000,00)
- Beban Jasa paket/pengiriman-LO	14.000.000,00		(14.000.000,00)
SATPOL PP			
- Beban jasa penyelenggaraan mayat dan orang terlantar-LO	92.000.000,00		(92.000.000,00)
JUMLAH	2.665.974.000,00		(2.665.974.000,00)

d. Beban Sewa

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
9.1.2.c	Beban Sewa	2.217.298.064,03	4.867.540.019,38	(2.650.241.955,35)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Sewa Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp2.650.241.955,35.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban sewa ini terdiri dari beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir, beban sewa sarana mobilitas, beban sewa alat berat dan beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor serta beban sewa BLUD dan beban jasa BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Sewa-LRA dengan Beban Sewa-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.32
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Sewa) LRA dan Beban Sewa LO Tahun 2020

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Sewa	2.053.288.000,00	2.217.298.064,03	(164.010.064,03)
Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas - LO	-	-	-
Beban sewa gedung/ kantor/tempat - LO	316.225.000,00	323.568.364,03	(7.343.364,03)
Beban sewa ruang rapat/pertemuan - LO	210.186.000,00	210.186.000,00	-
Beban Sewa Tempat Pembuangan Sampah*)	-	-	-
Beban sewa penginapan*)	26.460.000,00	26.460.000,00	-
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat - LO	127.350.000,00	127.350.000,00	-
Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	-	-	-
Beban Sewa Eskavator	4.950.000,00	4.950.000,00	-
Beban sewa meja kursi - LO	85.950.000,00	85.950.000,00	-
Beban Sewa Komputer dan Printer	-	-	-
Beban Sewa Proyektor	120.000.000,00	120.000.000,00	-
Beban sewa generator	-	-	-
Beban sewa tenda - LO	981.067.000,00	981.067.000,00	-
Beban sewa pakaian adat/tradisional - LO	-	-	-
Beban Sewa alat rumah tangga dan dekorasi*)	-	-	-
Beban sewa peralatan dan perlengkapan olah raga*)	-	-	-
Beban Sewa Sound system dan perlengkapannya	181.100.000,00	181.100.000,00	-
Beban Sewa dana BLUD - LO		50.365.700,00	(50.365.700,00)
Beban Sewa dana BOS - LO		106.301.000,00	(106.301.000,00)

Penjelasan perbedaan belanja sewa-LRA dengan beban sewa-LO sebesar Rp164.010.064,03 disebabkan karena penyesuaian sewa dibayar dimuka sewa kantor Tahun 2019 sebesar Rp19.672.131,15 dan penyesuaian sewa dibayar dimuka Tahun 2020 sebesar Rp12.328.767,12, Reklas atas Beban Jasa dana BLUD ke Beban Sewa dana BLUD sebesar Rp50.365.700,00 dan Reklas atas Beban Jasa dana BOS ke Beban Sewa dana BOS sebesar Rp106.301.000,00, dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel. 5.3.33
Selisih Beban Sewa LRA-LO Tahun 2020

SKPD/ Uraian	Penyesuaian		Selisih LRA-LO
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	(Rp)
Sewa dibayar dimuka :			-
Dinas Kumperdag	12.431.693,99	12.328.767,12	(102.926,87)
Kantor Kesbangpol	7.240.437,16	-	(7.240.437,16)
Beban Jasa dana BLUD direklas ke Beban Sewa dana BLUD	50.365.700,00	-	(50.365.700,00)
Beban Jasa dana BOS direklas ke Beban Sewa dana BOS	106.301.000,00	-	(106.301.000,00)
JUMLAH	176.338.831,15	12.328.767,12	(164.010.064,03)

e. Beban Pemeliharaan

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
9.1.2.d	Beban Pemeliharaan	8.647.223.670,00	11.934.277.601,00	(3.287.053.931,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp3.287.053.931,00.

Beban pemeliharaan ini terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor dan Beban Pemeliharaan serta beban pemeliharaan BLUD dan beban pemeliharaan BOS.

Tidak terdapat perbedaan jumlah Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.34
Perbedaan Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2020

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan	5.988.308.011,00	8.647.223.670,00	(2.658.915.659,00)
Beban Jasa Service	1.216.571.014,00	1.216.571.014,00	-
Beban Penggantian Suku Cadang - LO	2.215.278.309,00	2.215.278.309,00	-
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - LO	674.955.485,00	674.955.485,00	-
Beban Jasa KIR - LO	74.438.450,00	74.438.450,00	-
Beban Pajak Kendaraan Bermotor - LO	105.031.350,00	105.031.350,00	-
Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	406.000,00	406.000,00	-
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	64.680.200,00	64.680.200,00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO	864.660.953,00	884.955.139,00	(20.294.186,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO	623.611.250,00	565.606.250,00	58.005.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.570.000,00	10.570.000,00	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	138.105.000,00	138.105.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan dana BLUD -LO		1.841.957.573,00	(1.841.957.573,00)
Beban Pemeliharaan dana BOS -LO		854.668.900,00	(854.668.900,00)

Penjelasan perbedaan belanja Pemeliharaan-LRA dengan beban sewa-LO sebesar Rp2.658.915.659,00, yaitu :

Tabel 5.3.35
Selisih Beban Pemeliharaan LRA-LO Tahun 2020

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
- RSUD Sungai Dareh - BTT menambah nilai Beban Pemeliharaan Perlatan dan Mesin	20.294.186,00	-	(20.294.186,00)
- Dinas Kesehatan - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan menambah nilai aset		58.005.000,00	58.005.000,00
- Beban Jasa dana BLUD direklas ke Beban Pemeliharaan dana BLUD	1.841.957.573,00		(1.841.957.573,00)
- Beban Jasa dana BOS direklas ke Beban Pemeliharaan dana BOS	854.668.900,00		(854.668.900,00)
JUMLAH	2.716.920.659,00		(2.658.915.659,00)

Penjelasan selisih :

- Adanya penambahan Beban Pemeliharaan dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20.294.186,00 pada RSUD Sungai Dareh.
- adanya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan menambah nilai aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp58.005.000,00 terdiri dari Dinas Kesehatan sebesar Rp44.405.000,00 dan BLUD RSUD Sungai Rumbai sebesar Rp13.600.000,00.
- Adanya Reklas atas Beban Jasa dana BLUD ke Beban Pemeliharaan dana BLUD sebesar Rp1.841.957.573,00.
- Adanya Reklas atas Beban Jasa dana BOS ke Beban Pemeliharaan dana BOS sebesar Rp854.668.900,00.

f. Beban Perjalanan Dinas

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	36.283.810.392,00	54.878.825.962,00	(18.595.015.570,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp18.595.015.570,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban perjalanan dinas ini terdiri dari beban perjalanan dinas dalam daerah, beban perjalanan dinas luar daerah, beban perjalanan dinas BLUD, dan beban perjalanan dinas dalam daerah BOS.

Tidak terdapat perbedaan pada jumlah Belanja Perjalanan dinas-LRA dengan Beban Perjalanan Dinas-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.36
Belanja Barang dan Jasa (Perjalanan Dinas)-LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO
Tahun 2020

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA Rp	Beban-LO Rp	Selisih +/- Rp
Beban Perjalanan Dinas	34.639.538.502,00	36.283.810.392,00	(1.644.271.890,00)
Beban perjalanan dinas dalam daerah - LO	8.898.735.450,00	8.898.735.450,00	-
Beban perjalanan dinas luar daerah - LO	25.740.803.052,00	25.740.803.052,00	-
Beban Perjalanan Dinas dana BLUD -LO		819.460.890,00	(819.460.890,00)
Beban Perjalanan Dinas dana BOS -LO		824.811.000,00	(824.811.000,00)

Penjelasan perbedaan belanja persediaan-LRA dengan beban persediaan-LO jumlah sebesar Rp1.644.271.890,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Adanya Reklas atas Beban Jasa dana BLUD ke Beban Perjalanan dinas dana BLUD sebesar Rp819.460.890,00.
- Adanya Reklas atas Beban Jasa dana BOS ke Beban Perjalanan dinas dana BOS sebesar Rp824.811.000,00.

g. Beban Hibah

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
9.1.5	Beban Hibah	72.886.229.581,03	62.152.815.287,80	10.733.414.293,23

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat peningkatan sebesar Rp10.733.414.293,23.

Beban hibah ini terdiri dari beban hibah kepada Pemerintah Pusat, beban hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi, beban hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat serta reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal ke Belanja Hibah.

Perbedaan saldo Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO sebagai berikut.

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Hibah	54.874.970.568,83	72.886.229.581,03	(18.011.259.012,20)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penjelasan perbedaan belanja hibah-LRA dengan beban hibah-LO sebesar Rp18.011.259.012,20, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.4.37
Perbedaan Belanja Hibah -LRA dan Beban Hibah-LO Tahun 2020

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Persediaan	23.624.011.209,58	6.930.160.291,00	16.693.850.918,58
Hibah Kepada Pihak ketiga	357.566.076,00		357.566.076,00
Hibah barang yang diserahkan ke Masyarakat/Pihak ke tiga Anggaran 2020		2.064.165.433,58	(2.064.165.433,58)
BM JIJ jadi persediaan		145.628.000,00	(145.628.000,00)
Sumbangan Pihak ketiga Bantuan Covid dll	1.638.462.185,20		1.638.462.185,20
Aset diserahkan kepada masyarakat	1.531.173.266,00		1.531.173.266,00
	27.151.212.736,78	9.139.953.724,58	18.011.259.012,20

a.) Penyesuaian atas penambahan beban hibah.

- Persediaan berdasarkan stock opname persediaan per 31 Desember 2019 pada SKPD sebesar Rp23.624.011.210,00, terdapat pada Dinas PUPR sebesar Rp22.380.111.609,58, Dinas Perkimtan sebesar Rp397.181.600,00, dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp846.718.000
- Adanya aset yang diserahkan kemasyarakat atau pihak ketiga (yayasan MI Al Azhar) dari Dinas PUPR berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp357.566.076,00
- Adanya aset yang diserahkan kemasyarakat yang menjadi beban hibah sebesar Rp1.531.173.266,00 yaitu pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.431.173.266,00 berupa aset lain - lain jalan, jaringan dan hibah tanah bangunan Kantor Pemerintahan Nagari Taratak Tinggi kecamatan Timpeh pada Sekretariat Daerah sebesar Rp100.000.000,00 ke Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya.
- Adanya sumbangan pihak ketiga yang menjadi beban hibah sebesar Rp2.485.180.185,20 berupa penanganan covid dll yang tersebar pada beberapa SKPD antara lain pada SKPD Dinsos Sebesar Rp1.487.247.685,20, Dinas Pangan Perikanan Rp5.000.000,00, Dinas DPMTSP sebesar Rp26.200.000,00 dan BPBD sebesar Rp120.014.500,00

b.) Penyesuaian atas pengurangan beban hibah.

- Adanya beban hibah barang yang diserahkan kepada Masyarakat atau pihak ketiga yang masih menjadi persediaan (stock) pada Tahun 2020 sebesar Rp6.930.160.291,00, terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penata ruang sebesar Rp6.818.267.041,00 dan Dinas Perkimtan sebesar Rp111.893.250,00.

- Adanya Beban Hibah (Barang yang diserahkan kepada Masyarakat atau pihak ketiga) Anggaran Tahun 2020 pada Dinas PUPR sebesar Rp2.064.165.433,58
- Adanya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi persediaan bahan material bahan baku bangunan pada Dinas PUPR sebesar Rp145.628.000,00.

h. Beban Bantuan Sosial

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
9.1.6.	Beban Bantuan Sosial	17.918.600.000	3.132.000.000,00	14.786.600.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat peningkatan sebesar Rp14.786.600.000,00.

Jumlah tersebut merupakan saldo beban bantuan sosial Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat peningkatan sebesar Rp14.786.600.000,00, yang disebabkan adanya penambahan untuk bantuan sosial untuk Masyarakat akibat pandemi covid 19 di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020.

Perbedaan saldo Belanja Bantuan Sosial-LRA dengan Beban Bantuan Sosial-LO sebagai berikut.

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Bantuan Sosial	164.000.000	17.918.600.000	(17.754.600.000)

Selisih sebesar Rp17.754.600.000,00 adalah reklas dari beban tak terduga berupa bantuan sosial ke masyarakat untuk penanganan dampak sosial masyarakat akibat Covid-19 dengan tiga tahap pencairan dengan rincian sebagai berikut :

- THP I sebanyak 15.141 KK @ 600.000 = 9.084.600.000 terdapat pengembalian karena data ganda sebesar Rp43.200.000,00 sehingga terealisasi sebesar Rp 9.041.400.000,00 dibayar sesuai SK Bupati No : 188.45/177/KPTS BUP/2020 Tgl 20 Mei dan Rekom Dinas Sosial No : 460/348/SOSP3APPKB/2020 TGL 19 Mei 2020.
- THP II sebanyak 14.658 KK sebesar Rp.8.794.800.000,00 terdapat pengembalian karena data ganda sebesar Rp 81.600.000,00 sehingga terealisasi sebesar Rp8.713.200.000,00 dibayar sesuai SK Bupati No : 188.45/243/KPTS BUP/2020 dan Rekom Dinas Sosial No : 460/594/SOSP3APPKB/2020 tgl 28 Agustus 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

i. Beban Penyusutan dan Amortisasi

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
9.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	139.560.243.919,26	176.161.565.175,25	(36.601.321.255,99)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, maka terdapat penurunan sebesar Rp36.601.321.255,99.

Tabel. 5.4.38
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019

PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan
	Rp	Rp	Rp
Beban Penyusutan dan Amortisasi	139.560.243.919,26	176.161.565.175,25	(36.601.321.255,99)
Beban Penyusutan Aset Tetap	125.070.937.211,03	175.835.716.891,03	(50.764.779.680,00)
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	14.150.005.898,05	62.168.036,00	14.087.837.862,05
Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tak Berwujud	339.300.810,18	263.680.248,22	75.620.561,96

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok aset dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015.

j. Beban Penyisihan Piutang

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	2.991.191.038,83	1.123.543.214,28	1.867.647.824,55

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat kenaikan sebesar Rp1.867.647.824,55.

Beban Penyisihan Piutang ini terdiri dari beban penyisihan piutang pajak, beban penyisihan piutang retribusi, beban penyisihan piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan beban penyisihan piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Tabel. 5.4.39
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 dan 2019

PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan
	Rp	Rp	Rp
Beban Penyisihan Piutang	2.991.191.038,83	1.123.543.214,28	1.867.648.074,56
Beban Penyisihan Piutang Pajak	2.552.185.796,32	1.045.597.354,85	1.506.588.441,47



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan
	Rp	Rp	Rp
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	2.684.214,00	24.319.727,00	(21.635.513,00)
Beban Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.622.852,06	21.313.705,91	(3.690.853,85)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	418.698.176,46	32.312.426,52	386.385.999,94

Beban Penyisihan untuk Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Piutang Lain-Lain PAD dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

k. Beban Transfer

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
9.2.	Beban Transfer	54.609.952.788,00	119.973.216.566,00	(65.363.263.778,00)

Jumlah tersebut merupakan Beban Transfer dalam Tahun 2020 dan Tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp65.363.263.778,00. Beban Transfer terdiri dari.

Tabel. 5.4.40
Beban Transfer Tahun 2020 dan 2019

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
9.2.	Beban Transfer	54.609.952.788,00	119.973.216.566,00	(65.363.263.778,00)
9.2.1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.611.562.308,00	3.170.650.000,00	(1.559.087.692,00)
9.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
9.2.4.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa & Parpol	52.199.999.600,00	116.017.917.000,00	(63.817.917.400,00)
9.2.5.	Beban Bantuan Keuangan	798.390.880,00	784.649.566,00	13.741.314,00

Untuk perbedaan jumlah Belanja Transfer-LRA dengan Beban Transfer-LO adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.4.41
Perbedaan Belanja Transfer antara LRA dan LO Tahun 2020

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Transfer	107.270.602.109,00	54.609.952.788,00	52.660.649.321,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	933.019.055,00	1.611.562.308,00	(678.543.253,00)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	105.472.649.600,00	52.199.999.600,00	53.272.650.000,00
Beban Bantuan Keuangan	864.933.454,00	798.390.880,00	66.542.574,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penjelasan selisih sebesar Rp52.660.649.321,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Selisih sebesar Rp678.543.253,00 pada Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan :
 - Penambahan Utang Belanja DBH PDRD Triwulan IV kpd Nag TA 2020 An. Irvan Budianto Dt.Rangkayo Mulia Wali Nag Koto Gadang, dkk atas 32 Nagari dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Dharmasraya No:188.45/345/KPTS-BUP/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp406.618.428,00
 - Penambahan Utang Belanja DBH PDRD Triwulan IV kpd Nag TA 2020 An. Suwanto Wali Nag Panyubarangan, dkk atas 20 Nagari dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Dharmasraya No:188.45/345/KPTS-BUP/2020 tanggal 17 Desember 2020, sebesar Rp271.924.828,00
- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa adalah penerimaan transfer dana desa yang disalurkan dari KPPN ke Rekening Kas Desa, tidak melalui RKUD sebesar Rp53.272.650.000,00
- Beban bantuan keuangan sebesar Rp66.542.574,00 adalah utang belanja Partai Politik bulan Desember 2019 dibayarkan ditahun 2020.

V.D.3. Surplus/Defisit dari Operasi

PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Surplus/Defisit dari Operasi	72.146.127.892,78	25.721.247.847,34	46.424.880.045,44

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp72.146.127.892,78 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp46.424.880.045,44 atau 180,49%. Merupakan surplus dari Pendapatan sebesar Rp962.701.597.597,06 dikurangi Beban Operasi sebesar Rp890.555.469.704,29.

V.D.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(202.328.041,00)	198.608.000,00	(400.936.041,00)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 adalah defisit sebesar Rp(202.328.041,00), dibandingkan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar Rp(400.936.041,00). Nilai defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 terdiri dari:

- Surplus Penjualan Aset Nonlancar sebesar Rp60.050.000,00 merupakan penerimaan atas Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat pada Mantan Bupati Dharmasraya Periode tahun 2005-2010,
- Defisit penjualan Aset Tetap Lainnya atas Kambing yang telah afkir sebanyak 9 ekor pada Dinas Pertanian sebesar Rp(26.621.600,00) dari nilai buku aset tetap lainnya sebesar Rp31.521.600,00 dikurangi dengan nilai penjualan sebesar Rp4.900.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Koreksi sebesar Rp235.756.441,00 berupa penghapusan KDP yang tidak dilanjutkan berupa Perencanaan Tugu Simping Silago Tahun 2013 pada dinas PUPR Rp39.606.000,00, Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Gunung Medan Tahun 2016 pada Dinas Kesehatan Rp115.255.441,00 dan Penghapusan KDP yang tidak dilanjutkan Tahun 2016 pada RSUD Sungai Dareh senilai Rp.80.895.000,00

V.D.5. Pos Luar Biasa

PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Pos Luar Biasa	(312.313.950,00)	(24.176.925,00)	(288.137.025,00)

Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2020 sebesar Rp312.313.950,00 merupakan Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2020 yang terealisasi untuk pembiayaan penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor dan Penanganan Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (DBD) yang direklasifikasi ke beban luar biasa pada Laporan Operasional.

V.D.6. Surplus/Defisit LO

PERKIRAAN	TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Surplus/Defisit LO	71.631.485.901,77	25.895.678.922,34	45.735.806.979,43

Surplus Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp71.631.485.901,77 mengalami kenaikan sebesar Rp45.735.806.979,44 dibandingkan dengan Surplus Laporan Operasional Tahun 2019 sebesar Rp25.895.678.922,34. Surplus LO merupakan penjumlahan dari Surplus dari Kegiatan Operasi sebesar Rp72.146.127.892,77, dikurangi Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(202.328.041,00) dan Pos Luar Biasa atas reklas Beban Tak Terduga ke Beban Luar Biasa sebesar Rp(312.313.950,00).

Uraian Perhitungan Surplus/Defisit LO Tahun 2020 sebagai berikut:

Surplus dari Kegiatan Operasi	Rp	72.146.127.892,77
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(202.328.041,00)
Pos Luar Biasa	Rp	<u>(312.313.950,00)</u>
Surplus/Defisit LO	Rp	<u>71.631.485.901,77</u>



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.E LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang memberikan informasi arus kas masuk (*Cash In Flow*) dan arus kas keluar (*Cash Out Flow*) yang setara dalam Kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.

Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris selama satu periode akuntansi. Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 sebagai berikut.

V.E.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Posisi selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.E.1.a Arus Masuk Kas	990.125.596.482,12	1.019.159.463.248,49

Arus Masuk Kas merupakan pendapatan operasi yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah lainnya, Pendapatan Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan kas dari aktivitas operasi sebagai berikut.

Tabel 5.5.1

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	17.751.808.580,45	19.178.964.229,67
2	Penerimaan Retribusi Daerah	1.861.712.711,00	3.054.849.682,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.063.752.034,00	3.590.314.080,00
4	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	59.135.018.327,67	52.860.183.160,82
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	12.973.433.646,00	13.711.561.010,00
6	Penerimaan Dana Bagi Bukan Hasil Pajak	2.174.079.602,00	2.116.617.541,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	478.355.774.000,00	524.888.502.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	237.995.156.977,00	220.914.062.329,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	99.826.676.000,00	97.546.293.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41.101.030.883,00	47.598.137.491,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
13	Penerimaan Hibah	34.887.153.721,00	33.699.978.725,00
14	Penerimaan Dana Darurat	-	-
15	Penerimaan Lainnya	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	990.125.596.482,12	1.019.159.463.248,49



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.E.1.b Arus Keluar Kas **Tahun 2020 (Rp) 791.224.720.710,68** **Tahun 2019 (Rp) 809.955.320.794,50**

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi mencakup seluruh pengeluaran kas untuk keperluan operasional pemerintahan. Berdasarkan SAP, pengeluaran ini mencakup belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil. Pada Tahun 2020 pengeluaran kas untuk aktivitas operasi sebagai berikut.

Tabel 5.5.2
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	418.043.145.643,00	430.141.092.583,00
2	Pembayaran Barang	185.947.730.070,85	207.300.127.555,20
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
5	Pembayaran Hibah	54.874.970.568,83	49.451.249.739,30
6	Pembayaran Bantuan Sosial	164.000.000,00	3.132.000.000,00
7	Pembayaran Tak Terduga	864.933.454,00	718.106.992
8	Pembayaran Bantuan Keuangan	24.924.272.319,00	24.176.925
9	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	106.405.668.655,00	119.188.567.000,00
10	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	791.224.720.710,68	809.955.320.794,50

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi **Tahun 2020 (Rp) 198.900.875.771,44** **Tahun 2019 (Rp) 209.204.142.453,99**

Merupakan kenaikan/penurunan kas dari aktivitas operasi. Pada Tahun 2020 terjadi kenaikan kas (arus masuk kas - arus keluar kas) dari aktivitas operasi sebesar Rp198.900.875.771,44.

Arus Masuk Kas Rp 990.125.596.482,12
Arus Keluar Kas (Rp 791.224.720.710,68)
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi Rp 198.900.875.771,44

V.E.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.E.2.a Arus Masuk Kas	65.550.000,00	198.608.000,00

Pada Tahun 2020 terdapat penerimaan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp65.550.000,00 terdiri dari pelepasan aset tetap atas penjualan sisa bongkaran atap gedung dan bangunan sekolah dasar Tahun 2019 yang disetor ke kasda pada Tahun 2020 sebesar Rp600.000,00, penerimaan atas penjualan kendaraan dinas roda empat pada mantan Bupati Dharmasraya Periode tahun 2005-2010 sebesar Rp60.050.000,00 dan penjualan Aset Tetap Lainnya atas Kambing yang telah afkir sebanyak 9 ekor pada Dinas Pertanian sebesar Rp4.900.000,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.E.2.b Arus Keluar Kas	194.525.452.178,27	226.598.089.916,65

Pada Tahun 2020 terdapat pengeluaran kas dari aktivitas investasi sebesar Rp194.525.452.178,27. Pengeluaran kas dimaksud ditujukan untuk perolehan aset tetap sebagai berikut.

Tabel 5.5.3
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Perolehan Tanah	-	-
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	64.751.373.002,50	45.512.218.370,50
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	94.052.704.714,97	112.232.961.295,51
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.663.993.010,80	61.210.263.507,34
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.057.381.450,00	7.642.646.743,30
6	Perolehan Aset Lainnya	-	-
	Jumlah	194.525.452.178,27	226.598.089.916,65

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(194.459.902.178,27)	(226.399.481.916,65)

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Pada Tahun 2020 arus kas bersih (arus masuk kas - arus keluar kas) dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(194.459.902.178,27)

Arus Masuk Kas	Rp 65.550.000,00
Arus Keluar Kas	(Rp 194.525.452.178,27)
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	(Rp 194.459.902.178,27)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.E.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Posisi selama Tahun 2020 arus masuk kas dan arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan adalah.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.E.3.a Arus Masuk Kas	0,00	0,00

Pada Tahun 2020 tidak terdapat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan yang diterima kembali.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.E.3.b Arus Keluar Kas	0,00	2.500.000.000,00

Pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan yang akan diterima kembali dan atau dibayar kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang dan utang jangka panjang. Pada Tahun 2020 arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 atau tidak terdapat arus kas keluar selama Tahun Anggaran 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(2.500,000,000.00)

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas pendanaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00

V.E.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.E.4.a Arus Masuk Kas	47.830.727.682,00	40.443.642.504,00

Arus masuk kas selama Tahun 2020 sebesar Rp47.830.727.682,00 yang berasal dari.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Penerimaan PFK	47.828.833.482,00	40.440.250.504,00
Penerimaan kas	1.894.200,00	3.392.000,00
Jumlah	47.830.727.682,00	40.443.642.504,00

Rincian penerimaan PFK Tahun 2020 dan 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.5.4

Penerimaan PFK Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Penerimaan IWP	2.981.584.044,00	3.345.476.947,00
2	Penerimaan TASPEN	13.005.993.261,00	0,00
3	Penerimaan TAPERUM	234.558.000,00	316.244.000,00
4	Penerimaan PPN	14.578.344.626,00	17.429.882.014,00
5	Penerimaan PPh Psl 21	13.168.403.955,00	13.921.888.979,00
6	Penerimaan PPh Psl 22	953.344.563,00	1.185.747.995,00
7	Penerimaan PPh Psl 23	82.912.371,00	56.665.072,00
8	Penerimaan PPh Psl 26	3.773.818,00	0,00
9	Penerimaan PPh Psl 4	2.819.918.844,00	4.184.345.497,00
	Jumlah	47.828.833.482,00	40.440.250.504,00

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan penerimaan dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga.

Penerimaan PFK Tahun 2020 sebesar Rp47.828.833.482,00 dan terdapat utang PFK Per 31 Desember 2020 yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp4.900.000,00 terdiri dari :

1. PPN sebesar Rp3.809.100,00 pada RSUD Sungai Rumbai berupa belanja modal pengadaan alat kesehatan sebesar Rp102.400,00 telah disetor ke kas negara tanggal 7 Maret 2021 dan SDN 09 Koto Besar berupa pembelian perlengkapan sekolah sebesar Rp3.706.700 disetor ke kas negara tanggal 14 April 2021.
2. PPh Pasal 21 sebesar Rp612.500,00 pada Puskesmas Sungai Limau berupa honor pengelola keuangan sebesar Rp42.500,00 disetor ke kas negara tanggal 22 Maret 2021, SDN 09 Koto Besar sebesar Rp570.000,00 berupa honor insentif BOS disetor ke kas negara tanggal 14 April 2021.
3. PPh Pasal 22 sebesar Rp470.400,00 pada SDN 09 Koto Besar disetor ke kas negara tanggal 14 April 2021
4. PPh Pasal 23 sebesar Rp8.000,00 pada SDN 09 Koto Besar disetor ke kas negara tanggal 14 April 2021

Penerimaan Kas sebesar Rp1.894.200,00 adalah penerimaan dari kas bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah tahun 2020 pada Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perhubungan sebesar Rp991.000,00 dan SDN 09 Koto Besar sebesar Rp903.200,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.E.4.b Arus Keluar Kas	47.827.926.567,00	40.457.372.438,00

Arus keluar kas selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp47.827.926.567,00 yang berasal dari:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
- Penyetoran PFK	47.824.534.567,00	40.457.372.438,00
- Pengeluaran Kas	3.392.000,00	-
Jumlah	47.827.926.567,00	40.457.372.438,00

Tabel 5.5.5

Penyetoran PFK Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Penyetoran IWP	2.981.584.044,00	3.345.476.947,00
2	Penyetoran TASPEN	13.005.993.261,00	
3	Penyetoran TAPERUM	234.558.000,00	316.244.000,00
4	Penyetoran PPN	14.574.535.526,00	17.429.882.014,00
5	Penyetoran PPh Psl 21	13.168.392.540,00	13.921.888.979,00
6	Penyetoran PPh Psl 22	952.874.163,00	1.185.747.995,00
7	Penyetoran PPh Psl 23	82.904.371,00	56.665.072,00
8	Penyetoran PPh Psl 26	3.773.818,00	0,00
9	Penyetoran PPh Psl 4	2.819.918.844,00	4.184.345.497,00
	Jumlah	47.824.534.567,00	40.440.250.504,00

Penyetoran PFK Tahun 2020 sebesar Rp47.827.926.567,00 terdapat penyetoran utang PFK Tahun 2019 ke Kas Negara sebesar Rp601.085,00 atas PPh Psl 21.

Terkait penyetoran pajak-pajak Pusat ke RKUN, Kabupaten Dharmasraya sudah melakukan rekonsiliasi dengan KPP Pratama Solok dan KPPN Sijunjung berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak Pusat Semester I Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Dharmasraya Nomor 900/613/BKD-2020 tanggal 24 Juli 2020 dan Berita Acara Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak Pusat Semester II Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Dharmasraya Nomor 900/154/BKD-2021 tanggal 11 Februari 2021.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(2.801.115,00)	(13.729.934,00)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Merupakan total kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Transitoris. Pada Tahun 2020 arus kas bersih (arus masuk kas – arus keluar kas) dari aktivitas transitoris sebesar Rp (2.801.115,00).

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Kenaikan / Penurunan Kas	4.443.774.708,17	(19.709.069.396,66)

Merupakan total kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Pada Tahun 2020 terjadi kenaikan kas (arus masuk kas – arus keluar kas) sebesar Rp4.443.774.708,17

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	4.443.774.708,17	(19.709.069.396,66)
Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas	94.194.632,52	14.544.592.538,98
Saldo Awal Kas di Kas BLUD	1.094.990.941,80	8.565.179.881,00
Saldo Awal Kas di Dana BOS	2.695.211.372,00	483.693.923,00
Jumlah Saldo Awal Kas	3.884.396.946,32	23.593.466.342,98
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	6.154.888.601,54	88.799.569,52
Saldo Akhir Kas di BLUD	1.526.712.732,95	1.094.990.941,80
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	991.000,00	5.395.063,00
Saldo Akhir pada Dana BOS	645.579.320,00	2.695.211.372,00
Saldo Akhir Kas	8.328.171.654,49	3.884.396.946,32

Perbedaan komponen yang terdapat pada Saldo Akhir Kas di LAK dan SiLPA di LRA Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

SALDO LRA	SALDO ARUS KAS
8.334.425.206,49	8.328.171.654,49
SELISIH	6.253.552,00

Saldo akhir kas di LAK sebesar Rp8.328.171.654,49 sedangkan SiLPA menurut LRA sebesar Rp8.334.425.206,49 sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.253.552,00 Selisih tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

No	Uraian	Rp
1.	SiLPA LRA	8.334.425.206,49
2.	Saldo Arus Kas	8.328.171.654,49
	Selisih	6.253.552,00

Rincian Selisih

a.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	(991.000,00)
c.	Utang PFK BLUD di Neraca	(4.900.000,00)
d.	Piutang atas Pembatalan Kontrak Kerja Tahun 2017 No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017	13.050.752,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e.	SP2D No.5711/LS/2016 kekurangan debet oleh Bank (telah disetor ke CV. Mulla Karya tgl 26/04/2021)	(3.000,00)
f.	Kas di Setara Kas / Pajak restoran yang belum disetor oleh Bendahara SDN 09 Koto Besar ke Kas daerah	(903.200)
	Selisih	6.253.552,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

VF. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.F. Ekuitas	2.346.493.866.411,02	2.424.445.022.003,03
Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.346.493.866.411,02 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.424.445.022.003,03.		
Uraian dan rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut.		
Saldo awal ekuitas	Rp	2.424.445.022.003,03
Surplus/Defisit LO	Rp	71.631.485.901,77
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar		
a. Dampak Kumulatif perubahan Kebijakan	Rp	0,00
b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	Rp	(149.582.641.493,78)
Saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas	Rp	2.346.493.866.411,02



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

VI.A Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Visi

Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, mempunyai visi yaitu.

“Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya”

Misi

Berdasarkan VISI di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mempunyai enam misi, yaitu.

- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap, dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
- Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan, dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
- Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
- Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun.

Letak dan Luas Wilayah

Secara geografi Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat, dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m - 1.500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Dharmasraya mempunyai luas wilayah $\pm$ 2.961,13 Km atau 296.113 Ha. Secara



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

geografis Kabupaten Dharmasraya berada pada posisi, 00 47' 7" LS -- 141' 56", Lintang Selatan (LS) dan, 1019' 21", BT -- 1010 54' 27", Bujur Timur (BT).

Kabupaten Dharmasraya dilalui oleh jalur lalu lintas Sumatera dan berbatasan dengan.

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan

Penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut data Tahun 2015 berjumlah 223.112 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2014 meningkat 2,85% dengan kepadatan 105 jiwa/km² dan merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut suku bangsa diperoleh data Suku Minang 62,93%, Suku Jawa 32,96%, Suku Sunda 1,49%, Suku Batak 0,88%, Melayu 0,71% dan Suku lainnya 1,03%. Berdasarkan distribusi penduduk menurut tingkat usia, diperoleh data angkatan kerja (15-59 tahun) sebanyak 104.123 jiwa (61,30%) dengan tingkat ketergantungan 63,15%.

VI.B Susunan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 maka entitas akuntansi mengalami pergeseran dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya. Secara lebih rinci Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya dibagi dalam tiga tipe, yaitu.

1. Perangkat Daerah Tipe A, yaitu.
 - 1) Sekretariat Daerah
 - 2) Inspektorat
 - 3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 4) Badan Keuangan Daerah
 - 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 7) Dinas Pertanian
 - 8) Kecamatan Asam Jujuhan
 - 9) Kecamatan Koto Baru
 - 10) Kecamatan Koto Besar
 - 11) Kecamatan Koto Salak
 - 12) Kecamatan Pulau Punjung
 - 13) Kecamatan Sembilan Koto
 - 14) Kecamatan Sitiung
 - 15) Kecamatan Sungai Rumbai
 - 16) Kecamatan Timpeh
 - 17) Kecamatan Tiumang
2. Perangkat Daerah Tipe B, yaitu.
 - 1) Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga
 - 3) Dinas Kesehatan
 - 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
 - 6) Dinas Komunikasi dan Informatika,
 - 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 8) Dinas Lingkungan Hidup
 - 9) Kecamatan Padang Laweh
 - 10) Dinas Pangan dan Perikanan
3. Perangkat Daerah Tipe C, yaitu.
 - 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 2) Sekretariat DPRD
 - 3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
 - 5) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 - 6) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, dan
 - 7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - 8) Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berjumlah 35 Perangkat Daerah yang terdiri dari



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, 3 Badan dan 11 Kecamatan. Selain 35 Perangkat Daerah tersebut, ada 3 SKPD yang masih tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Tahun 2010 yakni RSUD Sungai Dareh, BPBD, dan Kantor Kesbangpol. Ketiga SKPD tersebut tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukannya ditetapkan. Peraturan Daerah dimaksud di atas terdiri dari.

- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Berikut rincian Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan/urusan penunjang, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
SKPD Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Urusan/Urusan Penunjang

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
1	Pendidikan	1.	Dinas Pendidikan
2	Kebudayaan	2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Kepemudaan dan Olahraga		
4	Pariwisata		
5	Kesehatan	3	Dinas Kesehatan
6	Sosial	4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
9	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
12	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Pol PP)		



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
13	Penanaman Modal	8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
15	Perindustrian		
16	Perdagangan		
17	Energi dan Sumber Daya Mineral		-
18	Transmigrasi	10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
19	Tenaga Kerja		
20	Komunikasi dan Informatika	11	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Statistik		
22	Persandian		
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
25	Pertanahan		
26	Perhubungan	14	Dinas Perhubungan
27	Lingkungan Hidup	15	Dinas Lingkungan Hidup
28	Kehutanan		-
29	Pangan	16	Dinas Pangan dan Perikanan
30	Pertanian	17	Dinas Pertanian
31	Kelautan dan Perikanan		
32	Perpustakaan	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
33	Kearsipan		
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	Perencanaan	20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
36	Penelitian dan Pengembangan		
37	Keuangan	21	Badan Keuangan Daerah
38	Sekretariat Daerah	22	Sekretariat Daerah
39	Sekretariat Dewan	23	Sekretariat DPRD
40	Inspektorat	24	Inspektorat
41	Kecamatan Asam Jujuhan	25	Kecamatan Asam Jujuhan
42	Kecamatan Koto Baru	26	Kecamatan Koto Baru
43	Kecamatan Koto Besar	27	Kecamatan Koto Besar
44	Kecamatan Koto Salak	28	Kecamatan Koto Salak
45	Kecamatan Padang Laweh	29	Kecamatan Padang Laweh
46	Kecamatan Pulau Punjung	30	Kecamatan Pulau Punjung
47	Kecamatan IX Koto	31	Kecamatan IX Koto
48	Kecamatan Sitiung	32	Kecamatan Sitiung



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
49	Kecamatan Sungai Rumbai	33	Kecamatan Sungai Rumbai
50	Kecamatan Timpeh	34	Kecamatan Timpeh
51	Kecamatan Tiumang	35	Kecamatan Tiumang

Kabupaten Dharmasraya telah melakukan Pemilu Legislatif pada tanggal 17 April 2019 dan pelantikan terhadap 30 orang anggota DPRD terpilih untuk periode 2019 s.d. 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019, sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya definitif dilantik pada tanggal 20 November 2019.

Tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya juga telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak) pada tanggal 9 Desember 2020. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya terpilih untuk periode 2021 s.d. 2024 dilaksanakan tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Sumatera Barat.

Secara umum Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yaitu.

- 1) Bupati : Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E.
- 2) Wakil Bupati : Drs. DP Datuak Labuan.
- 3) Ketua DPRD : Pariyanto, S.H.
- 4) Sekretaris Daerah : H. Adlisman, S.Sos, M.Si.

VI.C Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910-1867-SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Bupati Dharmasraya meneruskan dengan Instruksi Bupati Bupati Dharmasraya Nomor 188.55/1/INST-BUP/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai tanggal 28 Desember 2017. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Transaksi pembayaran melalui mekanisme non tunai dilakukan untuk pembayaran sebagai berikut.

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3. Belanja Makanan dan Minuman
4. Belanja Honorarium dan lembur PNS dan Non PNS
5. Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor, Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas
6. Belanja Alat Tulis Kantor, Alat Listrik, Alat Rumah Tangga, Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai habis, Seminar Kit, Belanja Cetak dan Penggandaan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan pembayaran secara non tunai sebelum ditetapkan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai secara nasional untuk pembayaran Belanja Tidak langsung.

VI.D Revaluasi Aset Tetap

Kabupaten Dharmasraya belum menerapkan Revaluasi Aset Tetap seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi merupakan penilaian kembali aset tetap karena kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan. Revaluasi dapat berdampak meningkatkan nilai tercatat Aset Tetap atau menurunkan nilai tercatat Aset Tetap. Belum adanya penyusunan kebijakan akuntansi tentang Revaluasi Aset Tetap di Kabupaten Dharmasraya disebabkan karena belum adanya pedoman pelaksanaan penilaian kembali barang milik daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

VI.E Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Aset Tetap, KDP, dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020

Dengan adanya wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di seluruh dunia termasuk Indonesia dan perkembangannya yang cepat meluas serta menyebabkan jatuhnya banyak korban dan kerugian material yang telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, maka *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai Pandemic pada tanggal 11 Maret 2020. Pemerintah segera mengantisipasi menyebarnya virus corona di Wilayah Negara Kesatuan RI dengan dengan cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai tanggungjawab Pemerintah untuk melindungi segenap Warga Negara Indonesia di dalam dan luar negeri.

Sinergisitas antara Kementerian/Lembaga Pemerintah dalam bentuk aturan sebagai berikut.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)* tanggal 13 Maret 2020.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 14 Maret 2020.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasi, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Disease 2019* (COVID-19) tanggal 16 Maret 2020.
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-247MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020 tanggal 27 Maret 2020.

Dengan adanya Surat Menteri Keuangan Nomor S-247MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran. 2020 berdampak pada pengadaan barang dan Jasa Tahun 2020 di Kabupaten Dharmasraya. Bupati Dharmasraya pun telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/300/BKD-2020 tanggal 1 April 2020 perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada APBD Tahun 2020. Namun, untuk Aset Tetap dan KDP terkait proyek infrastruktur serta kegiatan-kegiatan di Tahun 2019 tetap dilanjutkan pada Tahun 2020.

VI.F Rencana dan Program Penanganan Krisis

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/sj-Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Kepala Daerah dimintakan untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan target belanja daerah untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam APBD Tahun 2020, dengan melakukan pergeseran anggaran bulan April 2020, dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut.

- a. Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun berjalan agar menggunakan prinsip pengelolaan keuangan yang optimal, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
- b. Dampak adanya pengurangan pendapatan transfer dari pusat dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengakibatkan pengurangan terhadap belanja pada setiap perangkat daerah sehingga untuk penganggaran belanja operasional kantor termasuk perjalanan dinas bidang dan makan minum rapat ditempatkan pada satu kegiatan di Sekretariat, kecuali lingkup Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

VI.G Pergeseran APBD Tahun 2020

Pada Tahun 2020, dari Januari s.d. April 2020 sudah dilakukan pergeseran APBD Tahun 2020 sebanyak tiga kali yaitu.

1. Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2016 yang berbunyi pergeseran antar organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, serta perubahan pergeseran uraian rincian objek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

Adapun dalam Pergeseran ini dalam rangka mengakomodir adanya pekerjaan yang telah selesai Tahun 2019 dan dianggarkan pada APBD 2020 sebesar Rp.4.355.737.434,00 dengan Rincian sebagai berikut.

a. Dinas PUPR

Lanjutan Stadion Mini Sungai Rumbai	Rp	417.001.434,00
Rehab MCK Masjid Agung Babussalam PP	Rp	144.800.000,00
Rehab Rumah Gadang Dt. Kayo Bosou	Rp	67.700.000,00
Drainase Perumahan Villa Tama Perdana	Rp	99.567.000,00
Perencanaan Drainase Kawasan SR, KT Besar	Rp	25.500.000,00
Rigit Beton Jl. Trans I Sei. Kambut	Rp	139.650.000,00
Rigit Beton Jln Kamter Jr. Sei. Kambut	Rp	139.650.000,00
Pengerasan Jln TPU Taratak PP	Rp	89.800.000,00
Perbaikan Jalan Bukit Tambun	Rp	49.800.000,00
Pembukaan Jalan Baru Jr. Koto Nag. Gn. Medan	Rp	189.157.000,00
Pengerasan Jl lingkungan Jr.Taratak Siguntur	Rp	89.800.000,00
Pembukaan Jalan Baru Jr. Kp. Dondan G Medan	Rp	139.620.000,00
Pembangunan Jalan Jorong Ganting G Medan	Rp	44.900.000,00
Rigit Beton Jr. Harapan Mulya Tiumang	Rp	89.386.000,00
Rigit Beton SP3 Tiumang Nagari Tiumang	Rp	139.816.000,00
Rigit Beton Jr. Sukoharjo Nag. Tiumang	Rp	84.500.000,00
Rigit Beton Jr. Sei. Kalang II Nag. Tiumang	Rp	84.635.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rigit Beton Jr. Sei. Kalang I Nag. Tiumang	Rp	57.300.000,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Rp	26.500.000,00
Pengawasan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Rp	17.900.000,00
Pemeliharaan, Perawatan RTH	Rp	50.000.000,00
Penataan Kawasan (Land Scape RSUD)	Rp	264.146.000,00
Taman Embung Nagari Sitiung	Rp	182.300.000,00
Pengawasan Land Scape RSUD	Rp	14.531.000,00
Pengawasan RTH Simpang Tabek Sitiung	Rp	<u>11.884.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.662.093.434,00
b. RSUD Sungai Dareh		
Pengadaan sumur bor RSUD	Rp	85.118.000,00
Pengadaan sistem instalasi air gedung RSUD	Rp	174.729.000,00
Pengawasan pengadaan instalasi air	Rp	7.130.000,00
Pengadaan bangunan fisik dan instalasi IPAL	Rp	79.160.000,00
Pengawasan	Rp	3.200.000,00
Pembangunan lanjutan gedung RS baru (DAK)	Rp	489.800.000,00
Belanja DED Lanjutan RSUD	Rp	378.427.000,00
Pengadaan plank Merek Rumah Sakit	Rp	195.095.000,00
Pengawasan Plank Merek RSUD	Rp	7.975.000,00
Pengawasan Pembangunan Gedung RS Baru	Rp	<u>141.509.500,00</u>
Jumlah	Rp	1.562.144.000,00
c. Dinas Perhubungan		
SIM PKB	Rp	131.500.000,00
Jumlah	Rp	131.500.000,00
Jumlah Total	Rp	4.355.737.434,00
2. Pergeseran Kedua APBD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2020 dilakukan terhadap.		
a. Pekerjaan akibat pemberian kesempatan kerja kepada penyedia barang/jasa yang menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui TA 2020 sebesar Rp3.871.264.129,12 dengan Rincian sebagai berikut.		
a. Dinas PUPR		
Pekerjaan Jalan Kabupaten	Rp	565.326.541,83



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. RSUD Sungai Dareh

Pengadaan Meubeleur dan Interior RSUD	Rp	944.920.000,00
Pengawasan	Rp	29.182.450,00

c. Dinas Kumperdag

Pembangunan Gedung Produksi (DAK)	Rp	894.396,711,00
Pembangunan Infrastruktur Sentra	Rp	<u>1.437.438.429,29</u>
Jumlah	Rp	3.871.264.129,12

b. Kebijakan Pemerintah Pusat bersifat strategis

Penambahan Pendapatan pada objek Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada DPA PPKD dana BOS sebesar Rp30.951.100.000,00 dan penambahan Belanja Langsung pada Belanja Barang dan Jasa dana BOS sebesar Rp24.222.542.565,00 (dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dan Belanja Modal dana BOS sebesar Rp6.728.557.435,00 (Enam milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah). Penambahan pendapatan dan penambahan belanja tersebut adalah dari BOS SD dan SMP Tahun 2020 yang didasari dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 350.P/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang II Tahun 2020.

3. Pergeseran Ketiga APBD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 23 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020.

Didasari dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, pada Diktum Keenam menyebutkan bahwa Penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pergeseran Ketiga ini dilakukan sebagai berikut.

a. Penyesuaian Target Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2020

Pada awal APBD Tahun 2020, Pendapatan Daerah sebesar Rp1.031.026.254.667,00. Pada penyesuaian APBD menjadi Rp945.475.986.750,00 atau berkurang sebesar Rp86.550.167.917,00 atau 8,30% yang meliputi.

- Pendapatan Asli Daerah pada alokasi awal APBD 2020 sebesar Rp104.794.164.000,00 menjadi sebesar Rp78.242.243.450,00 atau berkurang sebesar Rp26.552.920.550 atau 25,34%
- Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat, berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional terdapat pengurangan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp87.049.347.367,00 atau 9,93% dari pagu awal sebesar Rp876.864.696.367,00 menjadi Rp789.815.349.000,00. Penyesuaian Dana Transfer Pusat pada APBD Tahun 2020 berdasarkan PMK Nomor 35 Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 6.2
Penyesuaian Pendapatan Transfer Pusat pada APBD 2020

No	Uraian	APBD Tahun 2020	Penyesuaian APBD 2020 Berdasarkan PMK 35 Tahun 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5=3-4
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
1	DBH (Dana Bagi Hasil)	18.349.221.367,00	18.273.210.000,00	(76.011.367,00)
2	DAU Formula	528.037.794.000,00	478.355.774.000,00	(49.682.020.000,00)
3	DAU Tambahan/ Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK	7.620.254.000,00	4.105.400.000,00	(3.514.854.000,00)
4	DAK	249.013.348.000,00	218.323.299.000,00	(30.690.049.000,00)
4.1	DAK Fisik / Reguler	141.361.632.000,00	124.985.625.000,00	(16.376.007.000,00)
4.2	DAK Fisik / Penugasan	20.991.642.000,00	7.435.831.000,00	(13.555.811.000,00)
4.3	DAK Non Fisik	86.660.074.000,00	85.901.843.000,00	(758.231.000,00)
	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya			
1	DID (Dana Insentif Daerah)	20.009.465.000,00	17.485.016.000,00	(2.524.449.000,00)
2	ADD (Alokasi Dana Desa)	53.834.614.000,00	53.272.650.000,00	(561.964.000,00)
	Jumlah	876.864.696.367,00	789.815.349.000,00	(87.049.347.367,00)

- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah bertambah sebesar Rp28.051.100.000,00 atau 56,82% awal dari pagu sebesar Rp49.367.294.300,00 menjadi Rp77.418.394.300,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Penyesuaian Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2020

• Rasionalisasi Belanja Pegawai

Belanja Daerah pada awal APBD Tahun 2020 sebesar Rp1.102.724.680.352,00 menjadi sebesar Rp952.564.664.280,00 atau berkurang sebesar Rp150.160.016.072,00 atau 13,62%.

• Rasionalisasi Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada awal APBD Tahun 2020 sebesar Rp208.147.033.695,00 menjadi Rp185.872.141.194,00 atau berkurang sebesar Rp22.274.892.501,00 atau 10,70%.

• Rasionalisasi Belanja Modal

Belanja Modal pada awal APBD Tahun 2020 sebesar Rp256.467.119.624,00 menjadi Rp180.830.275.982,00 atau berkurang sebesar Rp75.636.843.642,00 atau 29,49%.

c. Pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun 2020

• Penerimaan Pembiayaan Daerah pada awal APBD Tahun 2020 sebesar Rp73.198.525.685,00 berkurang sebesar Rp66.109.848.155,00 sehingga pada Penyesuaian APBD Tahun 2020 menjadi Rp7.088.677.530,00.

• Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada awal APBD Tahun 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp 1.500.000.000,00 sehingga pada Penyesuaian APBD sebesar Rp0,00.

d. Alokasi Penyesuaian APBD Tahun 2020 untuk Penanganan *Carona Virus* Disease 2019 (COVID-19) sebesar 57.662.744.532,00 yakni berupa kegiatan di SKPD sebesar Rp.27.444.265.458,00 dan pendanaan dari Belanja Tidak terduga sebesar Rp.30.218.479.074,00 yang dirinci dalam bentuk:

1) Penanganan Kesehatan dari Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan

Penatalaksanaan Penanggulangan Wabah	Rp. 4.489.960.000,00
BOK pada 14 Puskesmas	Rp. 3.117.579.380 ,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Rp. 1.025.491.647,00
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 310.000.000,00
Pembinaan Pelayanan Kesehatan	Rp. 627.329.128,00
Peningkatan Surveiand	<u>Rp. 5.089.967.803,00</u>
Jumlah	Rp. 14.660.327.958,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh

Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit	Rp. 1.000.000.000,00
Pelaksanaan Penanggulangan Wabah	Rp. 4.432.990.000,00

Dinas Transnaker

Pengembangan Operasional BLK dalam menjahit 30.900 masker dan 5.000 helai APBD untuk dibagikan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat dalam penanganan Covid-19	Rp. 368.530.000,00

Dinas Kumperdag

Pembinaan Peningkatan dan Pengembangan Kemitraan Usaha bagi UMKM menjahit 10.000 masker dalam penanganan Covid-19	Rp. 62.600.000,00

Jumlah Total Penanganan Kesehatan dari Program dan Kegiatan	Rp. 20.524.447.958,00

2) Penanganan Kesehatan dari Belanja Tidak Terduga

Dinas Kesehatan

Pembelian Logistik untuk penanganan Covid-19	Rp. 499.990.000,00
Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk penanganan Covid-19	Rp. 409.900.000,00
Pembangunan Ruang Isolasi dan pengadaan sarana prasarana kesehatan untuk penanganan Covid-19	Rp. 786.600.000,00
Pembelian Logistik KIT Isolasi RNA Automatic Merk Bifish Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi FK. Unand	<u>Rp. 409.600.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.106.090.000,00

Rumah Sakit Umum Daerah

Pembelian Logistik untuk penanganan Covid-19	Rp. 350.000.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana Pemanfaatan ruang poliklinik gedung RSUD baru untuk ruang isolasi dan pengadaan sarana kesehatan untuk penanganan Covid-19	Rp. 758.955.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pembayaran Insentif Covid-19 untuk petugas Medis RSUD tgl 21 Maret s/d 31 Mei 2020 Rp. 443.180.000,00

Pembayaran Insentif Covid-19 Petugas Medis RSUD Sei. Dareh bulan Juni s/d Desember 2020 dari Dana BTT Rp. 1.764.300.000,00

Jumlah Rp. 3.316.435.000,00

Dinas Transnaker

Pengembangan Operasional BLK dalam menjahit 100.000 masker untuk dibagikan kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat dalam penanganan Covid-19 Rp. 469.208.620,00

Pengembangan Operasional BLK dalam menjahit 150.000 masker untuk dibagikan kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat dalam penanganan Covid-19 Rp. 767.825.625,00

Jumlah Rp. 1.237.034.245,00

BPBD

Pembayaran biaya Pemulasaran Jenazah Covid-19 bulan Juli 2020 Rp. 47.000.000,00

Pembayaran biaya Pemulasaran Jenazah Covid-19 bulan November 2020 Rp. 25.500.000,00

Pembayaran Biaya Pemulasaran Jenazah Covid-19 bulan Desember 2020 dari Dana BTT Rp. 19.500.000,00

Dana BTT yang belum di SP2Dkan Rp. 942.813.579,00

Jumlah Total Penanganan Kesehatan dari Belanja Tidak Terduga Rp. 7.694.372.824,00

3) Penanganan Dampak Ekonomi dari Program dan Kegiatan Dinas Sosial P3APPKB

Biaya Penjemputan dan pendistribusian sebanyak 292,7 ton beras CBD dari Perum Bulog untuk dibagikan kepada masyarakat miskin Dharmasraya dan Honor Tim Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Rp. 552.650.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Pertanian	
Pengembangan KWT Organik dengan penanaman bibit sayuran dalam penanggulangan Covid-19	Rp. 345.825.000,00
Pengadaan Benih Padi Unggul	Rp. 342.000.000,00
Pengadaan Jalan Produksi	Rp. 400.000.000,00
Pasar Murah Produk Pertanian	<u>Rp. 250.000.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.337.825.000,00
Dinas PUPR	
Pembangunan Jembatan Ponton Siguntur	Rp. 345.000.000,00
Rehab Jalan Bukit Gadang	Rp. 200.000.000,00
Penanganan Jln Lubuk Karak Pasca Bencana	Rp. 100.000.000,00
Dinding Penahan Jalan Simalidu	Rp. 200.000.000,00
Pembangunan Jembatan Muaro Batang Mongge Banai	Rp. 199.840.000,00
Rigit Beton Jln Jorong Taratak	Rp. 200.000.000,00
Rigit Beton Jalan Muaromou	<u>Rp. 200.000.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.444.840.000,00
Dinas Pangan dan Perikanan	
Pengadaan Benih ikan dan Pakan	Rp. 60.000.000,00
Pengadaaan Bibit Sayuran untuk KWT	Rp. 35.000.000,00
Pengadaan Stok Beras Bulog	<u>Rp. 83.000.000,00</u>
Jumlah	Rp. 178.000.000,00
Jumlah Total Penanganan Dampak Ekonomi dari Program dan Kegiatan	Rp. 3.513.315.000,00
4) Penyediaan jaringan pengamanan sosial/social safety net dari Program dan Kegiatan BPBD	
Operasional Posko Siaga di Perbatasan Sumbar-Jambi dan Operasional Gugus Tugas untuk Polres, TNI dan Kejaksaaan Negeri dalam penanganan Covid-19	Rp. 1.920.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Dukcapil

Pelayanan Duk Capil dalam jaringan (daring /on line) terhadap dokumen administrasi kependudukan dalam penanganan Covid-19 Rp. 62.600.000,00

Dinas Kominfo

Pengadaan sarana dan prasarana video conference dalam penanggulangan Covid-19 Rp. 691.152.500,00

Dinas Satpol PP

Operasional pengamanan dan patroli rutin dalam penanganan Covid-19 Rp. 125.300.000,00

Dinas Lingkungan Hidup

Pengadaan APD lengkap untuk petugas kebersihan dan pengangkut sampah dalam Penanganan Covid-19 Rp. 82.520.000,00

Sekretariat Daerah

Perbaikan plafon, kamar mandi dan pengadaan AC Rumah Dinas Setda untuk ruang isolasi petugas Covid-19 Rp. 140.000.000,00

Dinas PUPR

Pagar keliling ruang isolasi Covid-19 di SPNF SKB dan SD 24 Pulau Punjung Rp. 221.000.000,00

Dinas Pendidikan

Pengadaan sarana dan prasarana ruang isolasi Covid-19 di SPNF SKB, SD 24 Pulau Punjung dan SD 8 Sungai Rumbai Rp. 163.830.000,00

Jumlah Total Penyediaan jaringan pengamanan sosial/social safety net dari Program dan Kegiatan Rp. 3.406.502.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5) Penyediaan jaringan pengamanan sosial/social safety net dari Belanja Tidak Terduga

Dinas Sosial P3APKB

Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap I untuk masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 Rp 9.084.600.000,00

Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap II dan III untuk masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 Rp 8.794.800.000,00

Jumlah Rp 17.879.400.000,00

Dinas Pendidikan

Pengadaan sarana prasarana penanganan Covid-19 lokasi Karantina SKB Pulau Punjung dari dana BTT Rp 98.881.250,00

Dinas Satpol PP

Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dasar Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan COVID-19 dari Dana BTT Rp 148.425.000,00

Jumlah Total Penyediaan jaringan pengamanan sosial/social safety net dari Belanja Tidak Terduga Rp 22.524.106.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 yang dapat kami sampaikan.

Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean goverment*).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua, terutama dalam mengemban tugas amanah pengabdian kita kepada daerah, bangsa, dan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKa TUANKU KERAJAAN, S.E.